

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Jawa Timur

Februari 2023





Publikasi ini dapat diakses secara online pada:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Februari-2023.aspx>

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (KEKDA) Provinsi
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur



VISION **Bank Indonesia**

"Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju."



MISSION **Bank Indonesia**

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.



Nilai - Nilai **Strategis**

Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork yang berdasarkan keluhuran nilai-nilai agama (religi)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan perekonomian triwulanan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* eksternal maupun internal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi daerah, stabilitas keuangan dan pengembangan akses UMKM, penyelenggaraan sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi Jawa Timur ke depan.

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan IV 2022 melanjutkan pertumbuhan positif kendati mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tumbuh 4,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,59% (yoy). Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh perlambatan permintaan domestik dan eksternal yang disebabkan eskalasi ketidakpastian global, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan telah selesainya sejumlah insentif pemerintah. Dengan pencapaian triwulan IV 2022, kinerja ekonomi Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2022 tumbuh 5,34% (yoy), terakselerasi dibandingkan realisasi tahun 2021 (3,56%, yoy). Akselerasi tersebut secara umum ditopang oleh perbaikan permintaan domestik, khususnya pada semester I 2022, dan masih positifnya permintaan eksternal. Hal tersebut terutama ditopang oleh semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif sejalan dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19 secara nasional, program pemulihan ekonomi, serta berlanjutnya berbagai proyek strategis pemerintah dan swasta.

Inflasi gabungan Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Timur pada triwulan IV 2022 dan keseluruhan tahun 2022 tercatat sebesar 6,52% (yoy). Pencapaian ini melandai dibandingkan triwulan III 2022 (6,80%, yoy) namun meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 (2,45%, yoy). Melandainya tingkat inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan III 2022 terutama disebabkan oleh penyesuaian harga BBM yang telah berlangsung pada triwulan III 2022 serta peningkatan pasokan komoditas hortikultura sejalan dengan berlangsungnya panen raya. Sementara itu, peningkatan inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada tahun

2022 dibandingkan tahun 2021 dipengaruhi oleh tingginya inflasi hortikultura pada triwulan II-III 2022 akibat gangguan hama dan faktor cuaca serta penyesuaian harga BBM pada 3 September 2022.

Ketahanan sektor korporasi dan rumah tangga Jawa Timur pada triwulan IV 2022 dan keseluruhan tahun 2022 masih terjaga. Hal ini tercermin dari risiko kredit dan risiko likuiditas yang masih dalam batas aman.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2022 disebabkan oleh faktor global dan konsolidasi fiskal domestik. Sementara tingkat inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan kembali di kisaran sasaran inflasi $3,0 \pm 1\%$ (yoy)

Dalam penyusunan laporan ini, Bank Indonesia banyak memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti BPS, perbankan dan instansi di lingkungan pemerintah daerah, BUMN maupun swasta, serta pihak-pihak lainnya. Atas seluruh bantuan dan kerja sama tersebut, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin baik selama ini dapat dijaga dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas-tugas kita masing-masing untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi Provinsi Jawa Timur, serta bangsa dan negara.

Surabaya, Februari 2023
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jawa Timur

ttd.

Budi Hanoto
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISI

ii	Visi, Misi dan Nilai Strategis Bank Indonesia
iii	Kata Pengantar
iv	Daftar Isi
vi	Daftar Grafik
xi	Daftar Tabel
xii	Ringkasan Eksekutif
xvii	Tabel Indikator

BAB I

Perkembangan Ekonomi Makroregional

1.1.	Kondisi Umum Perekonomian Jawa Timur	2
1.2.	PDRB Sisi Permintaan	4
1.2.1.	Konsumsi	4
1.2.2.	Investasi	5
1.2.3.	Ekspor – Impor	8
1.3.	PDRB Sisi Penawaran	10
1.3.1.	Industri Pengolahan	11
1.3.2.	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12
1.3.3.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13
1.3.4.	Konstruksi	15
1.3.5.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16

BAB II

Keuangan Pemerintah

2.1.	Gambaran Umum	30
2.2.	APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	30
2.2.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur	30
2.2.2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur	32
2.2.3.	Tracking Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2023	34
2.3.	APBD 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022	34
2.3.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota	35
2.3.2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota	36
2.3.3.	Tracking Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota Triwulan I 2023	38
2.4.	APBN di Jawa Timur Tahun 2022	39
2.4.1.	Anggaran Belanja APBN di Jawa Timur Tahun 2022	39
2.4.2.	Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2022	40
2.4.3.	Tracking Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur Triwulan I 2023	41



BAB
III

Perkembangan Inflasi

3.1.	Kondisi Umum	44
3.2.	Kinerja Inflasi Jawa Timur	44
3.2.1.	Perkembangan Inflasi Triwulan IV 2022	44
3.2.2.	Analisis Inflasi Menurut Kelompok Barang Dan Jasa	45
3.3.	Analisis Inflasi Spasial Jawa Timur	48
3.4.	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	49
3.5.	Tracking Inflasi Triwulan I 2023	50

BAB
VI

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1.	Gambaran Umum	82
6.2.	Ketenagakerjaan	82
6.2.1.	Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur	82
6.3.	Profil Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur	87
6.4.	Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	90
6.4.1.	Kesejahteraan Petani	90
6.4.2.	Kesejahteraan Nelayan	91

BAB
IV

Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.1.	Kondisi Umum	58
4.2.	Pembiayaan Daerah di Jawa Timur	58
4.2.1.	Asesmen Pembiayaan Korporasi	58
4.2.2.	Asesmen Pembiayaan Rumah Tangga (RT)	61
4.3.	Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	63
4.3.1.	Akses Keuangan kepada UMKM	63
4.3.2.	Perkembangan Program Akses Keuangan dan UMKM	65

BAB
VII

Prospek Perekonomian Daerah

7.1.	Prospek Ekonomi Jawa Timur Tahun 2023	96
7.1.1.	Sisi Permintaan	96
7.1.2.	Sisi Penawaran	97
7.2.	Prospek Inflasi Jawa Timur Tahun 2023	97

BAB
V

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1.	Kondisi Umum	70
5.2.	Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Timur	70
5.2.1.	Sistem Pembayaran Tunai	70
5.2.2.	Transaksi Sistem Pembayaran	72
5.3.	Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	74
5.3.1.	Penanganan Uang Palsu	74
5.3.2.	Penyediaan Uang Rupiah	75
5.3.3.	Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai	75

BOKS

Boks 1.	Penguatan Jawa Timur sebagai <i>Lead Export</i> Manufaktur	18
Boks 2.	Optimalisasi Potensi Kawasan Industri di Jawa Timur	22
Boks 3.	Potensi Inflasi HBKN, Komoditas Penyumbang Persistensi Inflasi HBKN Utama dan Mitigasi Pengendalian Inflasi Hari Raya	51
Boks 4.	Hasil Survei: Pandemi Covid-19 Mendorong Peningkatan Preferensi Konsumen untuk Menggunakan Transaksi Digital di Jawa Timur	77

Grafik



Grafik 1.1	Perekonomian Jawa Timur, Jawa, Nasional	2	Grafik 1.18	Neraca Perdagangan Luar Negeri Jawa Timur	9
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa	2	Grafik 1.19	Pertumbuhan Nilai Ekspor Jawa Timur berdasarkan LU	9
Grafik 1.3	Pertumbuhan Konsumsi Swasta, Rumah Tangga dan LNPRT	4	Grafik 1.20	Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama	9
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja di Jawa Timur	4	Grafik 1.21	Pangsa Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	10
Grafik 1.5	Sumber Pembiayaan Konsumsi Rumah Tangga	5	Grafik 1.22	Pertumbuhan Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	10
Grafik 1.6	Pangsa DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan III 2022 – Triwulan IV 2022	5	Grafik 1.23	Perkembangan Komoditas Utama Ekspor LN di Jawa Timur	11
Grafik 1.7	Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan III 2022 – Triwulan IV 2022	5	Grafik 1.24	Indeks Ketidakpastian Global dan <i>Prompt Manufacturing Index</i>	11
Grafik 1.8	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Jawa Timur	6	Grafik 1.25	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri	11
Grafik 1.9	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Total Kab/Kota Jawa Timur	6	Grafik 1.26	Kredit LU Industri Pengolahan	11
Grafik 1.10	Perkembangan Belanja Pegawai dan Barang Provinsi Jawa Timur	6	Grafik 1.27	Kredit Sub Sektor Industri	12
Grafik 1.11	Pertumbuhan Investasi Jawa Timur	7	Grafik 1.28	Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil	13
Grafik 1.12	Realisasi Investasi Proyek Perpres 80/2019	7	Grafik 1.29	Kredit LU Perdagangan	13
Grafik 1.13	Perkembangan Kondisi Investasi Dunia Usaha dan Realisasi Belanja Modal	7	Grafik 1.30	Perkembangan Bongkar Muat Bandara Juanda	13
Grafik 1.14	Pertumbuhan PMA dan PMDN Jawa Timur	7	Grafik 1.31	Kabupaten/Kota Produksi Padi Jawa Timur	14
Grafik 1.15	Nominal PMA dan PMDN Jawa Timur	7	Grafik 1.32	Persediaan Daging Sapi	14
Grafik 1.16	Pertumbuhan Net Ekspor DN Jatim dan Konsumsi RT Daerah Mitra	8	Grafik 1.33	Realisasi Kegiatan Usaha LU Pertanian	14
Grafik 1.17	Keyakinan Konsumen Wilayah Sumatra, Kalimantan, dan KTI	8	Grafik 1.34	Kredit LU Pertanian	14
			Grafik 1.35	Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi	16
			Grafik 1.36	Pembangunan Proyek Perpres 80/2019	16
			Grafik 1.37	Investasi Penanaman Modal Sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	16

Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2023

Grafik 1.38	Pertumbuhan IHPR Properti Residensial	16	Grafik 2.10	Proporsi Komponen Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2022	35
Grafik 1.39	Mobilitas ke Ritel & Rekreasi dan Penjualan Eceran Makanan Minuman	17	Grafik 2.11	Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022	35
Grafik 1.40	Rata – rata Lama Menginap dan Pertumbuhan TPK Hotel Berbintang	17	Grafik 2.12	Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021-2022 (berdasarkan anggaran)	35
Grafik 1.41	Pertumbuhan Jumlah Kedatangan Domestik Penumpang Bandara Juanda	17	Grafik 2.13	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV 2022	36
Grafik 1.42	Kredit LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17	Grafik 2.14	Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2022	37
Grafik 2.1	Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2022	30	Grafik 2.15	Proporsi Anggaran Belanja Daerah Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022	37
Grafik 2.2	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2022	31	Grafik 2.16	Rasio Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2021-2022	37
Grafik 2.3	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Triwulanan)	32	Grafik 2.17	Persentase Realisasi Belanja Daerah APBD Kab/Kota Jawa Timur s.d Triwulan IV 2022	38
Grafik 2.4	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Kumulatif)	32	Grafik 2.18	Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Kab/Kota di Jawa Timur Triwulan I 2023 (Kumulatif)	38
Grafik 2.5	Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (Triwulanan)	34	Grafik 2.19	Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota di Jawa Timur Triwulan I 2023 (Kumulatif)	39
Grafik 2.6	Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (Kumulatif)	34	Grafik 2.20	Pangsa Anggaran Belanja APBN Jawa Timur Menurut Jenis Belanja Tahun 2018-2022	40
Grafik 2.7	Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2023 (Kumulatif)	34	Grafik 2.21	Pangsa Anggaran Belanja APBN Jawa Timur Menurut Fungsi Tahun 2021 dan 2022	40
Grafik 2.8	Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2023 (Kumulatif)	34	Grafik 2.22	Persentase Realisasi Belanja APBN Jawa Timur Berdasarkan Jenis Belanja Per Triwulan Tahun 2017-2022	40
Grafik 2.9	Perkembangan APBD Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2022	34	Grafik 2.23	Pagu Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2021 dan 2022 di Jawa Timur	41
			Grafik 2.24	Proyeksi Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur Triwulan I 2023 (Kumulatif)	41

Grafik

Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur dan Nasional (yoy)	44	Grafik 4.4	Pertumbuhan Kredit Modal Kerja Korporasi	60
Grafik 3.2	Inflasi Gabungan Kota IHK Provinsi di Jawa Triwulan IV 2022 (yoy)	44	Grafik 4.5	Perkembangan Rasio NPL Kredit Modal Kerja Korporasi	60
Grafik 3.3	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	45	Grafik 4.6	Pertumbuhan Kredit Investasi Korporasi	60
Grafik 3.4	Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	46	Grafik 4.7	Perkembangan Rasio NPL Kredit Investasi Korporasi	60
Grafik 3.5	Perkembangan Harga Aneka Cabai dan Minyak Goreng di Jawa Timur	46	Grafik 4.8	Pertumbuhan DPK Korporasi	61
Grafik 3.6	Perkembangan Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	46	Grafik 4.9	Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK Korporasi	61
Grafik 3.7	Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi	47	Grafik 4.10	Indeks Keyakinan dan Penghasilan Konsumen	61
Grafik 3.8	Perkembangan Harga Avtur	47	Grafik 4.11	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga	62
Grafik 3.9	Perkembangan Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	47	Grafik 4.12	Proporsi Kredit Sektor RT Jawa Timur	62
Grafik 3.10	Perkembangan Harga <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) Dunia	47	Grafik 4.13	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KPA-KPR	62
Grafik 3.11	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya	48	Grafik 4.14	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KKB	62
Grafik 3.12	Model Prediksi ENSO82	50	Grafik 4.15	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Multiguna	63
Grafik 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama	59	Grafik 4.16	Pertumbuhan DPK RT	63
Grafik 4.2	Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Jawa Timur	59	Grafik 4.17	Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK RT	63
Grafik 4.3	Perkembangan Rasio NPL Kredit Korporasi Jawa Timur	59	Grafik 4.18	Share Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Jawa Timur	64
			Grafik 4.19	Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Perbankan di Jawa Timur	64
			Grafik 4.20	Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral	64
			Grafik 4.21	Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral	64



Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2023

Grafik 4.22	Perkembangan NPL dan Suku Bunga Tertimbang Kredit UMKM	64	Grafik 5.18	Pangsa Jumlah Merchant QRIS per Kabupaten/Kota	76
Grafik 4.23	Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur	64	Grafik 5.19	Perkembangan Volume dan Nominal Transaksi QRIS	76
Grafik 4.24	Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur	65	Grafik 6.1	Jumlah Tenaga Kerja LU Utama	83
Grafik 5.1	Rasio UTLE terhadap Inflow Jawa Timur	71	Grafik 6.2	Pangsa Tenaga Kerja Sektoral	83
Grafik 5.2	Statistik Uang Palsu yang Ditemukan	72	Grafik 6.3	Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal	84
Grafik 5.3	Pangsa Temuan Uang Palsu berdasarkan Wilayah Kerja Bank Indonesia	72	Grafik 6.4	Komposisi Tenaga Kerja Formal-Informal	84
Grafik 5.4	Temuan Uang Palsu Per Pecahan	72	Grafik 6.5	Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal secara sektor (berdasarkan Persentase)	84
Grafik 5.5	Perkembangan Kliring Jawa Timur	72	Grafik 6.6	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	85
Grafik 5.6	Transaksi Kliring Spasial Jawa	73	Grafik 6.7	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	85
Grafik 5.7	Perkembangan RTGS Provinsi Jawa Timur	73	Grafik 6.8	Komposisi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	85
Grafik 5.8	Perkembangan RTGS Spasial	73	Grafik 6.9	Penggunaan Tenaga Kerja berdasarkan Sektor	87
Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi Melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	74	Grafik 6.10	Keyakinan Konsumen, Penghasilan RT, dan Lapangan Usaha Saat Ini	87
Grafik 5.10	Perkembangan Jumlah Instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	74	Grafik 6.11	Perubahan Pendapatan Bulanan Masyarakat di Jawa Timur pada September 2022 dan Oktober 2022	87
Grafik 5.11	Penggunaan Kartu ATM/Debit	74	Grafik 6.12	Persentase Penurunan Pengeluaran Masyarakat di Jawa Timur Berdasarkan Kelompok Pengeluaran, Oktober 2022 dibandingkan September 2022	87
Grafik 5.12	Penggunaan Kartu Kredit	74	Grafik 6.13	Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa	88
Grafik 5.13	Transaksi dan Jumlah Uang Elektronik	74	Grafik 6.14	Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa	88
Grafik 5.14	Nominal Transaksi Kas Keliling	75	Grafik 6.15	Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota	88
Grafik 5.15	Nominal Transaksi Penukaran	75			
Grafik 5.16	Aktivitas Kas Titipan Jawa Timur	75			
Grafik 5.17	Perkembangan Merchant QRIS per Skala Usaha	76			

Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2023



Grafik 6.16	Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota	88
Grafik 6.17	Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan	89
Grafik 6.18	Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Desa dan Kota	89
Grafik 6.19	Perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi di Jawa	90
Grafik 6.20	NTP Jawa Timur, Indeks yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB)	90
Grafik 6.21	NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur	91
Grafik 6.22	Inflasi Pedesaan Jawa Timur	91
Grafik 6.23	Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi di Jawa	92
Grafik 6.24	NTN, IT dan IB Nelayan Jawa Timur	92
Grafik 7.1	Proyeksi Indeks Nino	98
Grafik 7.2	Proyeksi Indeks <i>Indian Ocean Dipole</i> (IOD)	98

Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Permintaan	2	Tabel 3.4	Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa pada Triwulan IV 2022 (%yoy)	48
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Penawaran	3	Tabel 3.5	Komoditas Penyumbang Utama Sub Kelompok Makanan Spasial (%yoy)	49
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2021 dan 2022	31	Tabel 4.1	Harga Komoditas Internasional	58
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2021 dan 2022	32	Tabel 5.1	Perkembangan <i>Inflow – Outflow</i> Jawa Timur (miliar rupiah)	71
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2021 dan 2022	36	Tabel 6.1	Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur (juta orang)	83
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2021 dan 2022	38	Tabel 6.2	Perbandingan Kinerja Lapangan Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja	86
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2021 dan 2022	39	Tabel 6.3	Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Penggunaan Tenaga Kerja Sejumlah Perusahaan di Jawa Timur	86
Tabel 3.1	Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur Sepanjang Tahun 2022	44	Tabel 6.4	Rasio Gini Jawa Timur	90
Tabel 3.2	Komoditas Penyumbang Utama Deflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur Sepanjang Tahun 2022	45	Tabel 6.5	NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur	91
Tabel 3.3	Inflasi Triwulan III 2022 dan Triwulan IV 2022 Jawa Timur (%yoy)	48	Tabel 7.1	Prospek Perekonomian Dunia – <i>World Economic Outlook</i>	96
			Tabel 7.2	Perkiraan Arah Pertumbuhan PDRB Sisi Penawaran (LU Utama) Tahun 2023 (%yoy)	97
			Tabel 7.3	Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Jawa Timur Tahun 2023	99

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tetap tumbuh positif sebesar 4,76% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 (5,59%, yoy).

Untuk keseluruhan tahun 2022, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,34% (yoy), terakselerasi dibandingkan tahun 2021 (3,56%, yoy).

Inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada triwulan IV 2022 atau keseluruhan tahun 2022 tercatat 6,52% (yoy). Pencapaian ini melandai dibandingkan triwulan III 2022 (6,80%, yoy) namun meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 (2,45%, yoy).

Pada triwulan I 2023, inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur diperkirakan lebih rendah dari realisasi triwulan IV 2022

Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tetap tumbuh positif kendati lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 4,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 5,59% (yoy). Perlambatan ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 terutama dipengaruhi oleh perlambatan permintaan domestik dan eksternal akibat eskalasi ketidakpastian global, dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 3 September 2022, dan telah selesainya beberapa insentif pemerintah. Hal tersebut tercermin dari lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga (RT), ekspor luar negeri (LN), dan perdagangan antardaerah. Perlambatan domestik dan eksternal tersebut berdampak pada penurunan kinerja lapangan usaha (LU) utama Jawa Timur, yakni LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Dengan pencapaian triwulan IV 2022, kinerja ekonomi Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2022 terakselerasi dibandingkan tahun 2021. Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 tumbuh 5,34% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,56% (yoy) terutama ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan masih positifnya permintaan eksternal. Akselerasi ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 ditopang oleh berlanjutnya upaya efektif penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi yang mendorong perluasan pembukaan sektor ekonomi produktif. Di samping itu, perbaikan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 turut didukung oleh percepatan penyelesaian proyek-proyek yang terdapat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.80 Tahun 2019. Hal tersebut mendorong akselerasi konsumsi RT dan investasi. Permintaan global yang masih tinggi pada komoditas ekspor LN utama Jawa Timur, yakni emas/perhiasan serta lemak dan minyak hewani/nabati juga turut mendukung lebih tingginya ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan permintaan domestik dan masih positifnya permintaan eksternal tersebut mendorong akselerasi LU utama di Jawa Timur, yakni LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Transportasi dan Pergudangan.

Asesmen Inflasi Daerah

Inflasi gabungan Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Timur pada triwulan IV 2022 dan keseluruhan tahun 2022 tercatat sebesar 6,52% (yoy). Pencapaian ini melandai dibandingkan triwulan III 2022 (6,80%, yoy) namun meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 (2,45%, yoy) dan berada di atas target inflasi $3 \pm 1\%$ (yoy). Melandainya tingkat inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan III 2022 terutama disebabkan oleh penyesuaian harga BBM yang telah berlangsung pada triwulan III 2022 serta peningkatan pasokan komoditas hortikultura sejalan dengan berlangsungnya panen raya di beberapa sentra produksi. Berdasarkan kelompok, lebih rendahnya inflasi tahunan gabungan kota IHK Jawa Timur terutama disebabkan oleh semakin terkendalinya tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; serta Transportasi. Sementara itu, peningkatan inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dipengaruhi oleh tingginya inflasi hortikultura pada triwulan II-III 2022 akibat gangguan hama antraknosa, tingginya intensitas curah hujan, serta penyesuaian harga BBM pada 3 September 2022.

Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan I 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022, namun berpotensi masih berada di atas sasaran inflasi $3,0 \pm 1\%$ (yoy). Semakin terkendalinya tingkat inflasi diperkirakan terutama terjadi pada kelompok (1) Transportasi;

(2) Perumahan, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; serta (3) Makanan, Minuman, dan Tembakau sejalan dengan normalisasi tarif angkutan pasca kenaikan harga pada momentum HBKN Natal dan Tahun Baru, serta peningkatan pasokan komoditas pangan berkenaan dengan masa panen di sejumlah sentra produksi. Lebih lanjut, penyelenggaraan operasi pasar yang terukur dan penerapan pola kemitraan – *offtaker*, serta pasar lelang diprakirakan turut menjadi faktor penahan tekanan inflasi pada triwulan I 2023.

Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi belanja daerah di Jawa Timur hingga triwulan IV 2022 lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021. Anggaran Belanja Pemerintah secara agregat di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai Rp193,04 triliun, dengan realisasi sampai dengan triwulan IV 2022 sebesar 91,51% terhadap pagu anggaran atau sebesar Rp210,942 triliun. Pagu Anggaran Belanja tersebut meningkat 1,28% (yoy), demikian pula dengan nilai realisasi belanja yang meningkat 3,18% (yoy) dibandingkan anggaran pasca perubahan tahun 2021. Dari nominal tersebut, 53,02% atau Rp111,85 triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota, 31,05% atau 65,50 triliun merupakan belanja APBN di Provinsi Jawa Timur, dan sebesar 15,93% atau Rp33,60 triliun merupakan APBD Provinsi Jawa Timur. Sampai dengan triwulan IV 2022, total realisasi belanja daerah mencapai 91,51% dari pagu anggaran atau lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 (89,83%). Realisasi anggaran terbesar terjadi pada belanja APBN di Provinsi Jawa Timur yang terealisasi hingga 96,89%, disusul oleh realisasi belanja APBD Provinsi yang sebesar 93,76% dari pagu anggaran, dan realisasi pada APBD Kabupaten/Kota yang tercatat sebesar 87,69%.

Anggaran Belanja Pemerintah secara agregat di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai Rp219,403 triliun, dengan realisasi sampai dengan triwulan IV 2022 sebesar 91,38% terhadap pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 (89,83%).

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan UMKM

Perlambatan kinerja intermediasi perbankan di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 terjadi baik di sektor korporasi maupun Rumah Tangga (RT). Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi dan Rumah Tangga (RT) tercatat menurun pada triwulan IV 2022 sejalan dengan perlambatan kinerja seluruh LU utama Jawa Timur dan penurunan keyakinan RT terhadap kondisi ekonomi pada triwulan laporan. Di sisi lain, kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) korporasi tercatat mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa korporasi masih menahan investasi maupun ekspansi usaha dan cenderung menyimpan modal di perbankan. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor RT yang mencatatkan peningkatan DPK yang diindikasikan sebagai respon dari eskalasi ketidakpastian global dan masih tingginya tingkat inflasi. Lebih lanjut, peningkatan DPK juga sejalan dengan kebijakan peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia yang telah ditransmisikan dengan baik.

Pembiayaan perbankan di Jawa Timur, baik untuk sektor korporasi maupun Rumah Tangga, mengalami perlambatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga, terindikasi dari risiko kredit dan risiko likuiditas perbankan di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 yang masih berada dalam batas aman. Secara agregat, risiko kredit di Jawa Timur tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,27%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,89%. Lebih lanjut, risiko likuiditas terpantau cenderung rendah yang tercermin dari rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 89,07% atau masih dalam kisaran Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM) .

Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga, tercermin dari risiko kredit dan risiko likuiditas yang masih dalam batas aman

Pada triwulan IV 2022 pergerakan *outflow* (uang keluar) dan *inflow* (uang masuk) di Jawa Timur dalam posisi *net-outflow*.

Transaksi tunai di Jawa Timur mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Transaksi nontunai melalui Bank Indonesia pada triwulan IV 2022 tercatat meningkat, sedangkan transaksi nontunai retail mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Upaya perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS terus berlanjut.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2022 menunjukkan perlambatan dibandingkan Februari 2022, namun lebih baik dibandingkan Agustus 2021, tercermin dari dinamika TPT dan TPAK di Jawa Timur.

Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Pada triwulan IV 2022, transaksi pembayaran secara umum mengalami kenaikan terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat dalam menyambut HBKN Natal dan Tahun Baru 2023, serta periode libur sekolah akhir tahun. Aktivitas belanja pemerintah menjelang akhir tahun juga mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh realisasi belanja pemerintah yang memiliki tenggat penyelesaian hingga akhir tahun 2022.

Transaksi tunai di Jawa Timur mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2022, KPw BI Provinsi Jawa Timur mencatatkan *net-outflow* sebesar Rp 8,78 triliun, setelah sebelumnya mengalami *net-inflow* pada triwulan III 2022 sebesar Rp0,93 triliun. Peningkatan *outflow* sejalan dengan pola historis yang didorong oleh kenaikan konsumsi masyarakat berkenaan dengan HBKN Natal dan Tahun Baru 2023, serta periode libur sekolah akhir tahun. Lebih lanjut, peningkatan nominal *outflow* juga sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah yang terakselerasi pada akhir tahun.

Transaksi nontunai melalui Bank Indonesia pada triwulan IV 2022 tercatat meningkat, sementara transaksi nontunai retail mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada triwulan IV 2022 tercatat meningkat masing-masing sebesar 4,24% (qtq) dan 14,35% (qtq), seiring meningkatnya kebutuhan untuk bertransaksi dalam jumlah besar, khususnya korporasi dan Pemerintah. Sementara itu, penurunan transaksi nontunai retail tercermin dari penurunan nominal transaksi melalui APMK dan Uang Elektronik yang masing-masing turun sebesar 7,34% (qtq) dan 0,51% (qtq).

Upaya perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS terus berlanjut. Jumlah *merchant* QRIS pada triwulan IV 2022 di Jawa Timur sudah mencapai 2,60 juta, diiringi oleh peningkatan jumlah pengguna QRIS yang sudah mencapai 3,90 juta. Peningkatan tersebut mendorong nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS yang tercatat meningkat 25,88% (qtq) pada triwulan IV 2022.

Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2022 menunjukkan perlambatan dibandingkan Februari 2022, namun lebih baik dibandingkan Agustus 2021. Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2022 mengalami perlambatan dibandingkan Februari 2022 dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2022 akibat eskalasi ketidakpastian global yang berdampak pada tertahannya kinerja mayoritas lapangan usaha utama. Lebih rendahnya kondisi ketenagakerjaan dibandingkan Februari 2022 tercermin dari peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sementara itu, jika dibandingkan Agustus 2021, kondisi ketenagakerjaan meningkat sejalan dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19 di tengah akselerasi vaksin Covid-19 yang mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja sejalan dengan semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif. Lebih lanjut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur pada Agustus 2022 terpantau mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021 ditopang oleh kenaikan jumlah angkatan kerja di Jawa Timur yang bekerja penuh. Peningkatan TPAK menunjukkan peningkatan tenaga kerja produktif yang siap bekerja di Jawa Timur yang dapat mendukung perbaikan ekonomi Jawa Timur pada masa depan. Pada triwulan IV 2022, berdasarkan SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur, penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur terindikasi menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya khususnya akibat penurunan kinerja ekspor LN.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau sedikit menurun dibandingkan Maret 2022, namun lebih baik dibandingkan September 2021. Perlambatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 yang berdampak pada peningkatan tarif transportasi dan berbagai komoditas konsumsi sehingga menekan pendapatan dan pengeluaran sekelompok masyarakat. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan September 2021 terpantau mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin dari lebih rendahnya jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Perluasan pembukaan sektor ekonomi produktif pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang ditopang oleh semakin terkendalinya kasus Covid-19 mendorong semakin tingginya penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan September 2021.

Kesejahteraan masyarakat pedesaan yang direpresentasikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat mengalami kenaikan pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan petani di sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan sejalan dengan peningkatan harga komoditas beras, hasil ternak/unggas, dan komoditas tebu. Sementara itu, kesejahteraan kelompok nelayan juga terpantau meningkat pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan kenaikan penerimaan nelayan, terutama untuk perikanan.

Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2023

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2022 disebabkan oleh faktor global dan domestik. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan berada di kisaran 4,7% - 5,5% (yoy), cenderung bias bawah, termoderasi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,3%(yoy). Moderasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh estimasi kinerja ekonomi global pada tahun 2023 yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi akibat konflik geopolitik Rusia – Ukraina, Tiongkok – Taiwan, dan Amerika Serikat – Arab Saudi yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Hal tersebut diprakirakan menahan kinerja ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2023. Moderasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan turut dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal pemerintah sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terjadi, pemerintah berupaya mengembalikan kebijakan anggaran untuk tidak lebih dari 3%. Konsolidasi fiskal tersebut diprakirakan berdampak pada pengurangan sejumlah insentif fiskal serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Hal tersebut diprakirakan menahan laju pertumbuhan konsumsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 dan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau mengalami sedikit menurun dibandingkan Maret 2022, namun lebih baik dibandingkan September 2021, tercermin dari dinamika jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur.

Kinerja ekonomi Jawa Timur 2023 diprakirakan tetap tumbuh positif, namun termoderasi dibandingkan tahun 2022.

**Inflasi gabungan Kota IHK
Jawa Timur pada tahun 2023
diprakirakan kembali di
kisaran sasaran inflasi
3,0%±1% (yoy).**

Inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan kembali di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Tingginya tekanan inflasi dari sisi penawaran pada tahun 2022 terutama akibat peningkatan harga hortikultura serta penyesuaian harga energi berdampak pada tingkat inflasi IHK di Jawa Timur pada tahun 2022 yang lebih tinggi dibandingkan batas atas sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Pada tahun 2023, tekanan inflasi dari sisi penawaran diprakirakan mereda sejalan dengan prakiraan cuaca yang lebih mendukung produksi tanaman pangan dan harga komoditas energi global yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Lebih lanjut, berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID diprakirakan turut menjaga tingkat inflasi IHK Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy).

Tabel Indikator Ekonomi

A. PDRB

INDIKATOR	2021		2022				
	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
PDRB Penawaran - Harga Konstan (Rp Milliar)							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.473	170.593	41.261	47.020	48.708	36.650	173.638
Pertambangan dan Penggalian	18.753	77.270	17.972	17.909	17.814	18.138	71.834
Industri Pengolahan	130.396	504.855	132.609	132.793	134.599	136.541	536.543
Pengadaan Listrik dan Gas	1.232	4.711	1.223	1.256	1.280	1.306	5.065
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	450	1.761	436	450	459	456	1.801
Konstruksi	40.546	152.418	38.289	38.622	41.706	43.401	162.019
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	81.019	312.155	81.268	82.009	84.578	85.740	333.595
Transportasi dan Pergudangan	12.626	44.548	12.505	13.237	13.512	13.968	53.223
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.590	86.108	22.492	23.156	23.728	24.777	94.152
Informasi dan Komunikasi	29.136	113.957	29.205	29.753	29.761	30.394	119.114
Jasa Keuangan dan Asuransi	10.598	42.118	10.697	11.034	10.601	10.764	43.096
Real Estate	7.594	30.241	7.752	7.914	7.970	7.982	31.619
Jasa Perusahaan	3.195	12.466	3.214	3.259	3.263	3.376	13.113
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.833	34.949	8.409	8.731	8.637	9.261	35.039
Jasa Pendidikan	11.951	46.185	11.488	11.465	11.492	12.134	46.579
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.247	12.847	3.248	3.283	3.354	3.258	13.143
Jasa lainnya	5.567	21.567	5.722	6.156	6.118	6.254	24.250
PDRB Permintaan - Harga Konstan (Rp Milliar)							
Konsumsi RT	256.727	990.158	254.460	263.988	261.849	269.574	1.049.872
Konsumsi LNPRT	4.293	16.796	4.282	4.526	4.578	4.628	18.014
Konsumsi Pemerintah	20.828	71.635	14.390	17.261	18.946	21.119	71.717
Pembentukan Modal Tetap Bruto	114.250	438.579	111.363	111.688	118.039	121.222	462.312
Ekspor Luar Negeri	60.173	238.447	73.617	63.406	63.817	59.605	260.446
Impor Luar Negeri	80.138	286.757	75.656	83.132	87.685	84.659	331.132
Net Ekspor Antar Daerah	44.970	186.626	41.697	56.279	64.001	50.165	212.142

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

INDIKATOR	2021		2022				
	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL
PDRB Penawaran - (% , yoy)							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,60	1,77	3,77	1,28	1,63	0,48	1,79
Pertambangan dan Penggalian	(11,80)	(4,48)	(8,04)	(9,99)	(6,61)	(3,28)	(7,04)
Industri Pengolahan	4,53	3,37	7,00	8,05	5,46	4,71	6,28
Pengadaan Listrik dan Gas	8,76	5,82	7,26	9,58	7,36	5,98	7,52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,65	5,67	1,39	3,13	3,25	1,26	2,26
Konstruksi	9,91	2,53	3,92	8,03	6,20	7,04	6,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,61	7,77	6,59	6,99	8,10	5,83	6,87
Transportasi dan Pergudangan	4,70	2,49	18,74	22,17	28,02	10,63	19,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,51	3,06	5,99	8,57	13,14	9,68	9,34
Informasi dan Komunikasi	6,42	6,89	6,63	5,01	2,28	4,32	4,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,51	1,61	2,28	4,85	0,60	1,57	2,32
Real Estate	1,60	2,29	2,89	4,90	5,30	5,12	4,55
Jasa Perusahaan	4,64	2,35	4,51	5,37	5,15	5,69	5,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,56	0,29	0,74	(5,84)	1,66	4,85	0,26
Jasa Pendidikan	(2,01)	0,93	0,06	(0,12)	1,93	1,53	0,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,04	4,97	4,27	5,53	(0,58)	0,33	2,30
Jasa lainnya	0,71	5,78	5,32	13,07	19,43	12,35	12,44
PDRB Permintaan - (% , yoy)							
Konsumsi RT	4,39	2,77	5,31	6,69	7,16	5,00	6,03
Konsumsi LNPRT	4,24	2,06	4,11	8,19	8,82	7,80	7,25
Konsumsi Pemerintah	1,02	0,87	3,83	(4,05)	(0,06)	1,40	0,11
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,99	1,08	3,88	7,14	4,57	6,10	5,41
Ekspor Luar Negeri	5,53	1,33	29,20	0,03	10,21	(0,94)	9,23
Impor Luar Negeri	35,89	24,57	15,28	15,51	27,04	5,64	15,47
Net Ekspor Antar Daerah	74,15	63,68	(6,91)	24,58	23,82	11,55	13,67
Pertumbuhan PDRB (% , yoy)	4,54	3,56	5,24	5,76	5,59	4,76	5,34

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

B. INFLASI

INDIKATOR	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)								
JAWA TIMUR	105,37	105,62	105,96	107,26	108,57	110,82	113,17	114,25
- Kota Surabaya	105,54	105,81	106,27	107,60	108,88	110,98	113,61	114,69
- Kota Malang	104,16	104,49	104,61	105,85	107,26	110,03	112,02	112,68
- Kota Kediri	105,77	106,13	105,86	107,10	108,23	110,41	112,52	113,27
- Kab. Jember	106,36	106,46	106,35	107,69	109,41	112,35	114,11	115,65
- Kab. Sumenep	105,65	105,09	106,19	108,15	109,42	112,17	113,13	114,98
- Kota Probolinggo	105,07	105,15	105,17	106,38	107,44	109,92	110,85	112,18
- Kota Madiun	105,26	106,03	105,32	106,44	107,77	110,16	111,79	112,61
- Kab. Banyuwangi	104,64	104,63	104,62	105,69	106,93	109,25	110,33	112,09
LAJU INFLASI TAHUNAN (% , yoy)								
JAWA TIMUR	1,28	1,19	1,92	2,45	3,04	4,92	6,80	6,52
- Kota Surabaya	1,23	1,16	2,13	2,71	3,16	4,89	6,91	6,59
- Kota Malang	1,26	0,99	1,15	1,75	2,98	5,30	7,08	6,45
- Kota Kediri	1,30	1,51	1,14	1,64	2,33	4,03	6,29	5,76
- Kab. Jember	1,67	1,62	1,63	2,09	2,87	5,53	7,30	7,39
- Kab. Sumenep	1,47	1,81	2,18	2,57	3,57	5,79	5,40	6,32
- Kota Probolinggo	1,55	1,32	1,65	1,76	2,26	4,60	6,14	5,45
- Kota Madiun	1,81	1,68	1,93	2,00	2,38	4,76	6,54	5,80
- Kab. Banyuwangi	1,44	1,10	1,27	1,59	2,19	4,42	5,46	6,06

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

C. SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<i>Inflow</i> (Rp. Triliun)	27,66	23,30	12,68	12,52	19,92	24,70	16,89	16,05
<i>Outflow</i> (Rp. Triliun)	11,31	25,89	13,08	19,47	12,62	23,91	15,96	24,83
Volume Kliring (Juta Lembar)	1,21	1,22	1,18	1,34	1,12	1,07	0,85	0,85
Nominal Kliring (Rp. Triliun)	69,56	69,84	69,19	80,58	69,00	65,10	62,97	65,64
Volume RTGS	140,99	142,66	140,97	164,23	137,83	131,66	132,57	138,70
Nominal RTGS (Rp. Triliun)	314,28	360,33	365,10	605,42	560,13	502,75	389,89	445,83

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

D. PERBANKAN
D.1. Bank Umum

INDIKATOR	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kinerja (Miliar Rp)								
Total Asset	769.303	797.047	816.652	817.466	828.785	843.976	846.797	854.144
- Bank Pemerintah	407.649	425.227	440.483	442.792	449.344	460.235	457.772	464.007
- Bank Swasta	344.418	355.590	360.273	359.847	363.591	367.653	370.551	371.267
- Bank Asing	17.236	16.231	15.896	14.827	15.851	16.088	18.473	18.870
Dana Pihak Ketiga	640.995	660.206	678.276	683.276	681.570	690.114	700.319	707.827
- Giro	120.134	121.410	131.764	130.312	135.796	140.352	143.790	145.428
- Tabungan	270.888	286.941	295.136	307.552	303.623	309.308	312.141	317.856
- Deposito	249.973	251.855	251.376	245.413	242.151	240.454	244.388	244.543
Kredit Lokasi Bank (LB)	445.042	451.985	482.272	491.054	494.792	508.297	514.238	520.475
- Kredit Modal Kerja	242.435	260.172	263.026	269.306	270.042	280.080	282.069	283.584
- Kredit Investasi	67.537	75.987	76.097	76.128	78.582	81.387	82.263	83.667
- Kredit Konsumsi	135.070	143.031	143.149	145.620	146.167	146.831	149.906	153.225
Kredit Lokasi Proyek (LP)	546.659	554.791	536.692	581.346	588.787	615.997	622.968	630.454
- Kredit Modal Kerja	286.746	292.674	282.863	307.538	308.440	328.484	331.725	332.755
- Kredit Investasi	101.288	99.852	98.391	109.024	112.231	117.863	117.789	119.507
- Kredit Konsumsi	158.624	162.264	155.438	164.784	168.116	169.650	173.454	178.192
Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama	237.403	255.884	258.544	265.902	270.156	280.300	281.733	285.342
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	91.477	99.151	99.686	105.878	105.005	109.741	109.064	112.144
- Kredit Sektor Perdagangan	122.799	130.205	130.960	130.706	133.793	136.797	137.087	137.601
- Kredit Sektor Pertanian	23.128	26.528	27.898	29.318	31.358	33.762	35.582	35.597
Pertumbuhan (% , yoy)								
Total Asset	8,87	10,66	9,53	7,97	7,73	5,89	3,69	4,49
- Bank Pemerintah	5,63	7,19	7,42	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
- Bank Swasta	7,49	11,27	10,24	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
- Bank Asing	(12,15)	(16,91)	(22,32)	(14,03)	(14,03)	(14,03)	(14,03)	(14,03)
Dana Pihak Ketiga	8,41	8,94	8,52	8,01	6,33	4,53	3,25	3,59
- Giro	16,64	11,99	21,33	19,41	13,04	15,60	9,13	11,60
- Tabungan	9,10	13,32	11,94	11,46	12,08	7,80	5,76	3,35
- Deposito	4,17	3,05	-0,55	-0,85	-3,13	-4,53	-2,78	-0,35
Kredit Lokasi Bank (LB)	-7,18	-4,21	2,14	2,88	11,18	12,46	6,63	5,99
- Kredit Modal Kerja	-5,94	2,36	3,39	5,12	11,39	7,65	7,24	5,30
- Kredit Investasi	-16,35	-3,59	-2,85	-5,25	16,35	7,11	8,10	9,90
- Kredit Konsumsi	-4,20	2,99	2,67	3,44	8,22	2,66	4,72	5,22
Kredit Lokasi Proyek (LP)	-4,59	-1,21	-4,59	5,29	7,71	11,03	16,08	8,45
- Kredit Modal Kerja	-5,98	-1,95	-5,56	6,94	7,57	12,24	17,27	8,20
- Kredit Investasi	-5,36	-4,60	-6,12	2,96	10,80	18,04	19,72	9,62
- Kredit Konsumsi	-1,46	2,44	-1,73	3,85	5,98	4,55	11,59	8,14
Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama	-8,33	0,87	-19,68	3,57	13,80	9,54	8,97	7,31
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	-18,79	-9,22	-33,06	0,73	14,79	10,68	9,41	5,92
- Kredit Sektor Perdagangan	-2,48	5,99	-9,18	3,17	8,95	5,06	4,68	5,28
- Kredit Sektor Pertanian	13,31	22,83	-3,07	17,56	35,59	27,27	27,54	21,42

INDIKATOR	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Rasio Keuangan (%)								
NPL Lokasi Bank	3,68	3,85	4,05	3,55	3,65	3,84	3,85	3,34
- NPL Kredit Modal Kerja	4,93	5,02	5,47	4,70	4,83	4,89	4,95	4,34
- NPL Kredit Investasi	2,68	2,70	2,83	2,74	2,84	3,54	3,45	2,73
- NPL Kredit Konsumsi	1,92	2,03	2,08	1,86	1,89	2,01	1,99	1,82
NPL Lokasi Proyek	4,01	4,20	4,41	3,89	3,82	3,92	3,89	3,27
LDR Lokasi Bank	69,43	68,46	71,10	71,87	72,60	73,65	73,43	73,53
LDR Lokasi Proyek	85,28	84,03	79,13	85,08	86,39	89,26	88,95	89,07

Sumber : Laporan Bank (diolah)

D.2. Bank Umum Syariah

INDIKATOR	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kinerja (Miliar Rp)								
Total Asset	44.995	46.858	44.029	44.947	46.364	46.410	47.501	49.186
Dana Pihak Ketiga	36.779	38.225	35.720	39.850	40.458	40.257	40.815	42.411
- Giro	4.167	3.294	3.820	4.427	4.515	4.026	4.369	4.093
- Tabungan	16.127	17.257	17.580	18.543	18.919	20.193	21.116	21.875
- Deposito	16.486	17.674	14.321	16.880	17.024	16.038	15.330	16.443
Pembiayaan Lokasi Bank (LB)	29.220	30.070	31.665	30.169	30.803	31.909	33.062	34.097
- Modal Kerja	10.463	11.390	11.093	9.435	9.556	9.751	9.762	9.884
- Investasi	3.960	4.707	4.780	4.466	4.871	5.227	5.523	5.752
- Konsumsi	14.797	15.915	15.792	16.268	16.376	16.931	17.777	18.460
Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)	36.611	37.817	37.413	36.272	36.792	40.025	41.437	43.713
- Modal Kerja	12.091	12.645	12.184	10.939	10.725	12.319	13.452	13.749
- Investasi	8.371	8.498	8.462	8.054	8.665	9.799	9.160	10.456
- Konsumsi	16.148	16.674	16.767	17.279	17.403	17.907	18.825	19.508
Pembiayaan LB ke Sektor Ekonomi Utama	8.661	9.371	9.390	8.154	8.468	8.849	9.119	9.567
- Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	3.628	3.462	3.372	2.608	2.625	2.801	3.007	3.359
- Pembiayaan Sektor Perdagangan	4.556	5.217	5.365	4.931	5.215	5.386	5.445	5.508
- Pembiayaan Sektor Pertanian	477	692	653	615	628	662	667	700
Pertumbuhan (% , yoy)								
Total Asset	12,44	19,17	5,74	6,14	3,04	-0,96	7,89	9,43
Dana Pihak Ketiga	16,44	24,99	6,73	11,48	10,00	5,32	14,26	6,43
- Giro	51,50	17,72	11,10	29,52	8,36	22,23	14,39	-7,54
- Tabungan	11,76	17,81	13,65	13,09	17,31	17,01	20,12	17,97
- Deposito	14,43	34,54	-1,66	5,96	3,26	-9,26	7,05	-2,59
Pembiayaan Lokasi Bank (LB)	0,48	4,72	7,46	1,37	5,42	6,12	4,41	13,02
- Modal Kerja	-4,15	7,17	3,99	-11,69	-8,67	-14,39	-12,00	4,76
- Investasi	-13,92	4,14	4,82	6,84	23,02	11,05	15,55	28,80
- Konsumsi	9,09	17,31	10,92	9,20	10,67	6,38	12,57	13,47
Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)	1,24	6,26	4,68	0,41	0,50	5,84	10,76	20,51
- Modal Kerja	-9,18	0,13	1,15	-9,97	-11,30	-2,58	10,40	25,69
- Investasi	1,47	0,36	-1,72	-2,07	3,51	15,31	8,25	29,82
- Konsumsi	10,61	15,05	11,15	9,71	7,77	7,39	12,28	12,90
Pembiayaan ke Sektor Ekonomi Utama	-3,21	9,55	8,78	-6,18	-2,23	-5,57	-2,89	17,33
- Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	-9,03	-3,31	-10,92	-32,54	-27,65	-19,08	-10,82	28,80
- Pembiayaan Sektor Perdagangan	2,60	17,85	23,25	12,66	14,47	3,24	1,49	11,70
- Pembiayaan Sektor Pertanian	-8,27	26,50	32,28	37,28	31,63	-4,33	2,07	13,82
Rasio Keuangan (%)								
NPL Lokasi Bank	3,81	3,80	4,75	3,41	3,37	3,55	3,88	3,41
- Modal Kerja	6,06	5,68	8,66	5,89	5,62	6,12	7,59	6,96
- Investasi	2,63	3,17	2,83	1,88	2,09	1,81	1,98	1,64
- Konsumsi	2,54	2,70	2,58	2,40	2,44	2,61	2,44	2,07
NPL Lokasi Proyek	4,30	4,24	4,94	3,95	3,98	3,90	4,05	3,59
LDR Lokasi Bank	79,45	78,66	88,65	75,71	76,14	79,26	81,00	80,40
LDR Lokasi Proyek	99,54	98,93	104,74	91,02	90,94	99,42	101,52	103,07

Sumber : Laporan Bank (diolah)

D.3. Bank Berkantor Pusat di Surabaya

INDIKATOR	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kinerja (Miliar Rp)								
Total Asset	119.157	128.219	134.897	134.983	142.461	146.936	134.413	133.590
Dana Pihak Ketiga	69.074	74.277	76.369	71.813	78.556	82.159	80.614	69.040
- Giro	22.897	23.269	23.723	26.220	27.861	28.376	25.182	23.908
- Tabungan	21.295	23.054	23.134	25.944	23.834	24.178	25.224	27.168
- Deposito	24.882	27.954	29.512	19.649	26.862	29.605	30.208	17.965
Kredit Lokasi Proyek (LP)	42.752	43.793	43.897	43.007	42.672	43.703	45.772	45.688
- Kredit Modal Kerja	11.774	12.551	12.786	12.623	12.263	12.924	13.621	13.315
- Kredit Investasi	3.941	4.084	4.068	3.227	3.203	3.232	3.685	3.769
- Kredit Konsumsi	27.037	27.159	27.043	27.158	27.206	27.547	28.466	28.604
Kredit LP ke Sektor Ekonomi Utama	10.126	10.780	10.733	10.694	10.506	10.882	11.268	11.637
- Kredit Sektor Pertanian	842	877	881	881	999	1.062	1.150	1.223
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	2.416	2.691	2.611	2.693	2.415	2.658	2.655	2.745
- Kredit Sektor Perdagangan	6.867	7.213	7.241	7.120	7.092	7.162	7.463	7.66
Pertumbuhan (% , yoy)								
Total Asset	31,03	27,70	23,74	25,18	19,56	14,60	-0,36	-1,03
Dana Pihak Ketiga	15,68	12,56	12,89	14,59	13,73	10,61	5,56	-3,86
- Giro	20,09	-1,98	0,88	21,13	21,68	21,95	6,15	-8,82
- Tabungan	10,09	7,75	7,58	20,94	11,92	4,88	9,04	4,72
- Deposito	16,81	34,05	30,43	0,41	7,96	5,90	2,36	-8,57
Kredit Lokasi Proyek (LP)					-0,19			
- Kredit Modal Kerja	6,10	10,47	7,73	5,45	4,15	2,98	6,53	5,48
- Kredit Investasi	6,61	9,29	6,60	-18,72	-18,72	-20,87	-9,42	16,80
- Kredit Konsumsi	4,65	5,09	2,80	1,34	0,63	1,43	5,26	5,32
Kredit LP ke Sektor Ekonomi Utama					3,75			
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	4,72	8,53	6,73	4,10	18,58	21,12	30,60	38,82
- Kredit Sektor Perdagangan	16,85	28,51	18,23	5,37	-0,06	-1,22	1,67	1,93
- Kredit Sektor Pertanian	7,38	12,51	9,90	5,77	3,27	-0,70	3,06	7,71
Rasio Keuangan (%)								
NPL Lokasi Proyek	4,13	4,35	4,31	4,37	4,66	4,17	3,74	2,99
LDR LP	61,89	58,96	57,48	59,89	54,32	53,19	56,78	66,18

Sumber : Laporan Bank (diolah)
Terdapat empat bank berkantor pusat di Surabaya, yaitu BPD Jawa Timur, Bank Maspion, Bank Prima Master dan Bank Amar



Bab I

Perkembangan Ekonomi Makroregional



1.1. KONDISI UMUM PEREKONOMIAN JAWA TIMUR

Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tumbuh positif, kendati mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja dari sisi permintaan disebabkan oleh lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi RT, ekspor LN, dan perdagangan antardaerah. Dari sisi penawaran, perlambatan ekonomi terutama dipengaruhi oleh perlambatan LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Pertanian, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Perlambatan lebih dalam tertahan oleh perbaikan kinerja investasi dan konsumsi Pemerintah dari sisi permintaan, serta perbaikan kinerja LU Konstruksi dari sisi penawaran.

Kinerja Perekonomian Triwulan IV 2022

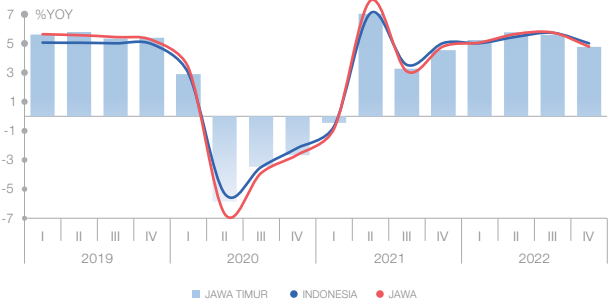
Perekonomian Jawa Timur pada triwulan IV 2022 melanjutkan pertumbuhan positif kendati mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 4,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,59% (yoy) (Grafik 1.1)¹. Dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, Jawa Timur menempati peringkat keempat setelah DIY (5,53%, yoy), Jawa Tengah (5,24%, yoy), dan DKI Jakarta (4,85%, yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga terpantau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan

nasional yang masing-masing tercatat sebesar 4,78% (yoy), dan 5,01% (yoy) (Grafik 1.2).

Perlambatan ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi RT, ekspor LN, dan perdagangan antardaerah pada periode laporan akibat faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, masih berlanjutnya konflik geopolitik Rusia – Ukraina, Tiongkok – Taiwan, dan Amerika Serikat – Arab Saudi serta kebijakan *Zero Covid Policy* di Tiongkok berdampak pada disrupsi rantai pasokan global yang berimplikasi pada kebijakan proteksionisme global. Hal tersebut menyebabkan penurunan perdagangan global sehingga turut menekan kinerja ekspor LN Jawa Timur pada periode laporan (Tabel 1.1). Sementara dari sisi domestik, telah selesainya beberapa stimulus pemerintah pada triwulan IV 2022, penurunan pendapatan sejumlah RT yang bekerja di korporasi berorientasi ekspor LN, dan dampak rambatan kenaikan harga BBM terhadap berbagai komoditas perdagangan berimplikasi pada tertahannya kinerja konsumsi RT dan perdagangan antardaerah pada triwulan laporan².

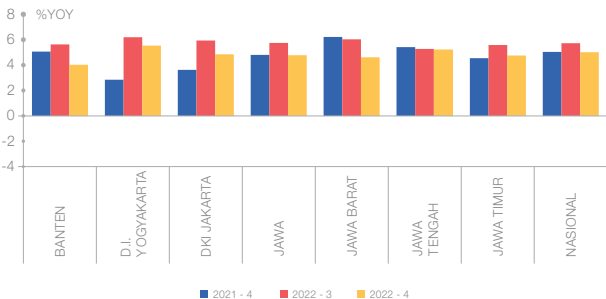
Perlambatan permintaan domestik dan eksternal berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU utama di Jawa Timur, yaitu LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan

Grafik 1.1 Perekonomian Jawa Timur, Jawa, Nasional



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa



Sumber : BPS (diolah)

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Permintaan

KOMPONEN	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Konsumsi Rumah Tangga	-1,47 ↓	6,00 ↑	2,30 ↓	4,39 ↑	5,31 ↑	6,69 ↑	7,16 ↑	5,00 ↓
Konsumsi Lnprt	-0,14 ↓	1,88 ↑	2,27 ↑	4,24 ↑	4,11 ↓	8,19 ↑	8,82 ↑	7,80 ↓
Konsumsi Pemerintah	0,35 ↑	0,86 ↑	1,09 ↑	1,02 ↓	3,83 ↑	-4,05 ↓	-0,06 ↑	1,40 ↑
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,61 ↑	1,98 ↑	1,03 ↓	3,99 ↑	3,88 ↓	7,14 ↑	4,57 ↓	6,10 ↑
Perubahan Inventori*)	0,21 ↑	198,25 ↑	129,80 ↓	127,74 ↓	2,93 ↓	8,25 ↑	39,01 ↑	-11,56 ↓
Ekspor Luar Negeri	-8,50 ↓	24,11 ↑	-10,85 ↓	5,53 ↑	29,20 ↑	0,03 ↓	10,21 ↑	-0,94 ↓
Impor Luar Negeri	5,21 ↑	31,99 ↑	27,05 ↓	35,89 ↑	15,28 ↓	15,51 ↑	27,04 ↑	5,64 ↓
Net Ekspor Antar Provinsi	41,72 ↑	43,38 ↑	106,09 ↑	74,15 ↓	-6,91 ↓	24,58 ↑	23,82 ↓	11,55 ↓
PDRB PROVINSI MENURUT PENGGUNAAN	-0,44 ↑	7,05 ↑	3,28 ↓	4,54 ↑	5,24 ↑	5,76 ↑	5,59 ↓	4,76 ↓

Sumber : BPS (diolah)

Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ↑
Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ↓
Sama dengan triwulan sebelumnya ↔

1. Pada Rilis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 6 Februari 2023, BPS Provinsi Jawa Timur mengoreksi angka pertumbuhan PDRB Jawa Timur pada triwulan III 2022 dari 5,58% (yoy) (pada rilis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 7 November 2022) menjadi 5,59% (yoy).

2. Stimulus Pemerintah yang telah usai pada triwulan IV 2022 meliputi: PPN DTP Properti (September 2022) dan PPNBM DTP LCGC (September 2022).

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Penawaran

LAPANGAN USAHA	2021			2022			
	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,50 ↓	0,45 ↑	4,60 ↑	3,77 ↓	1,28 ↓	1,63 ↑	0,48 ↓
Pertambangan dan Penggalian	4,79 ↑	-0,73 ↓	-11,80 ↓	-8,04 ↑	-9,99 ↓	-6,61 ↑	-3,28 ↑
Industri Pengolahan	6,90 ↑	3,00 ↓	4,53 ↑	7,00 ↑	8,05 ↑	5,46 ↓	4,71 ↓
Pengadaan Listrik dan Gas	6,28 ↑	6,10 ↓	8,76 ↑	7,26 ↓	9,58 ↑	7,36 ↓	5,98 ↓
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,67 ↓	5,36 ↓	5,65 ↑	1,39 ↓	3,13 ↑	3,25 ↑	1,26 ↓
Konstruksi	1,35 ↑	2,05 ↑	9,91 ↑	3,92 ↓	8,03 ↑	6,20 ↓	7,04 ↑
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,62 ↑	8,20 ↓	8,61 ↑	6,59 ↓	6,99 ↑	8,10 ↑	5,83 ↓
Transportasi dan Pergudangan	23,57 ↑	-1,10 ↓	4,70 ↑	18,74 ↑	22,17 ↑	28,02 ↑	10,63 ↓
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,81 ↑	2,90 ↓	3,51 ↑	5,99 ↑	8,57 ↑	13,14 ↑	9,68 ↓
Informasi dan Komunikasi	5,45 ↓	7,31 ↑	6,42 ↓	6,63 ↑	5,01 ↓	2,28 ↓	4,32 ↑
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,44 ↑	1,46 ↓	1,51 ↑	2,28 ↑	4,85 ↑	0,60 ↓	1,57 ↑
Real Estate	2,80 ↑	2,07 ↓	1,60 ↓	2,89 ↑	4,90 ↑	5,30 ↑	5,12 ↓
Jasa Perusahaan	9,78 ↑	4,68 ↓	4,64 ↓	4,51 ↓	5,37 ↑	5,15 ↓	5,69 ↑
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,80 ↑	-1,78 ↓	0,56 ↑	0,74 ↑	-5,84 ↓	1,66 ↑	4,85 ↑
Jasa Pendidikan	4,30 ↑	-2,11 ↓	-2,01 ↑	0,06 ↑	-0,12 ↓	1,93 ↑	1,53 ↓
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,94 ↓	8,33 ↑	4,04 ↓	4,27 ↑	5,53 ↑	-0,58 ↓	0,33 ↑
Jasa lainnya	41,21 ↑	1,68 ↓	0,71 ↓	5,32 ↑	13,07 ↑	19,43 ↑	12,35 ↓
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7,05 ↑	3,28 ↓	4,54 ↑	5,24 ↑	5,76 ↑	5,59 ↓	4,76 ↓

Sumber : BPS (dialah)

Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ↑
 Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ↓
 Sama dengan triwulan sebelumnya ↔

Makan Minum pada triwulan IV 2022. Perlambatan permintaan domestik tercermin dari lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi RT dan perdagangan antardaerah pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara perlambatan permintaan eksternal tercermin dari lebih rendahnya pertumbuhan ekspor LN pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut berimplikasi pada lebih rendahnya kinerja LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan laporan. Masih tingginya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik turut berdampak pada tertahannya optimisme pelaku usaha untuk melakukan ekspansi yang berimplikasi pada tertahannya kinerja LU Industri Pengolahan lebih dalam pada periode laporan. Lebih lanjut, masih berlangsungnya masa tanam padi dan hortikultura serta penurunan pasokan daging sapi dan daging ayam ras berdampak pada lebih rendahnya pertumbuhan LU Pertanian pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya (Tabel 1.2).

Perlambatan kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan pertumbuhan investasi dan konsumsi pemerintah. Peningkatan investasi pada triwulan laporan ditopang oleh berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Bandara Kediri, dan Bendungan Semantok³. Selain itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek prioritas Peraturan Presiden (Perpres) No.80 Tahun 2019 dan proyek swasta, terutama pembangunan smelter tembaga di Gresik turut mendorong kenaikan investasi pada triwulan laporan.

Hal tersebut turut mendorong peningkatan pertumbuhan LU Konstruksi pada periode laporan. Sementara itu, konsumsi pemerintah sesuai dengan pola musimannya meningkat pada triwulan IV dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut ditopang oleh peningkatan pertumbuhan realisasi belanja barang dan jasa, serta belanja modal sejalan dengan jatuh tempo pembayaran proyek pemerintah dan administrasi penunjang lainnya.

Kinerja Perekonomian Tahun 2022

Perekonomian Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2022 terakselerasi dibandingkan tahun 2021 ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan masih positifnya permintaan eksternal. Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 tumbuh 5,34% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,56% (yoy). Perbaikan ekonomi Jawa Timur didorong oleh berlanjutnya upaya efektif penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi yang mendorong perluasan pembukaan sektor ekonomi produktif serta percepatan penyelesaian proyek-proyek yang terdapat dalam PSN dan implementasi Peraturan Presiden No.80 Tahun 2019. Hal tersebut mendorong akselerasi konsumsi RT dan investasi. Permintaan global yang masih tinggi pada komoditas ekspor LN utama Jawa Timur, yakni emas/perhiasan serta lemak dan minyak hewani/nabati juga turut mendukung lebih tingginya ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan permintaan domestik dan masih positifnya permintaan eksternal tersebut mendorong akselerasi LU utama di

3. Kinerja Perekonomian Tahun 2022

Jawa Timur, yakni LU utama Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan LU Transportasi dan Pergudangan.

1.2. PDRB SISI PERMINTAAN

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tumbuh lebih rendah terutama disebabkan oleh perlambatan kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT), ekspor LN, dan perdagangan antardaerah. Perlambatan lebih dalam bertahan oleh perbaikan kinerja investasi dan konsumsi pemerintah.

1.2.1. Konsumsi

Kinerja konsumsi pada triwulan IV 2022 melambat dibandingkan triwulan III 2022 disebabkan oleh perlambatan konsumsi swasta. Lebih rendahnya kinerja konsumsi swasta pada triwulan laporan dipengaruhi oleh tertahannya daya beli masyarakat akibat dampak rambatan kenaikan harga BBM terhadap berbagai komoditas, telah selesainya beberapa insentif pemerintah pada triwulan IV 2022, serta penurunan pendapatan sejumlah RT yang bekerja di korporasi berorientasi ekspor LN.

1.2.1.1. Konsumsi Swasta (Rumah Tangga & LNPRT)⁴

Kinerja Konsumsi Swasta Triwulan IV 2022

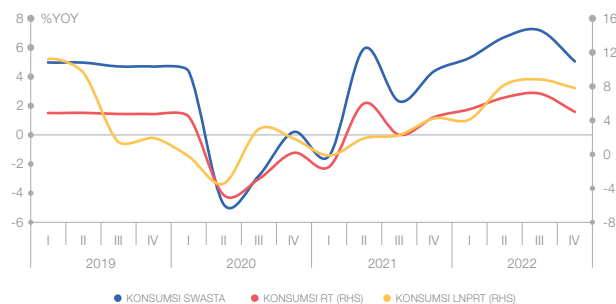
Konsumsi swasta melambat pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin pada lebih rendahnya pertumbuhan konsumsi swasta dari 7,18% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi sebesar 5,05% (yoy) pada periode laporan. Lebih rendahnya konsumsi swasta Jawa Timur disebabkan oleh kinerja kedua komponennya yaitu konsumsi RT dan LNPRT (Grafik 1.3)⁵. Dampak lanjutan kenaikan harga BBM terhadap berbagai komoditas, telah selesainya beberapa insentif pemerintah pada triwulan IV 2022, serta penurunan pendapatan sekelompok masyarakat yang bekerja di sektor berorientasi ekspor LN berdampak pada perlambatan laju konsumsi swasta pada triwulan IV 2022.

Dampak rambatan kenaikan harga BBM dan telah selesainya beberapa insentif pemerintah menahan kinerja konsumsi swasta Jawa Timur pada triwulan laporan. Sejalan dengan peningkatan harga minyak dunia, Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada 3 September 2022. Penyesuaian harga BBM tersebut berdampak pada penyesuaian sejumlah tarif transportasi sehingga biaya distribusi berbagai komoditas meningkat. Inflasi gabungan delapan kota di Jawa Timur untuk kelompok Transportasi pada tahun 2022 tercatat 16,43% (yoy), meningkat signifikan

dibandingkan tahun 2021 (2,25%, yoy). Hal tersebut mendorong kenaikan harga berbagai komoditas di Jawa Timur sehingga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan delapan kota di Jawa Timur meningkat signifikan dari 2,45% (yoy) pada tahun 2021 menjadi 6,52% (yoy) pada tahun 2022. Tingginya tekanan inflasi tersebut berdampak pada kecenderungan masyarakat untuk menahan konsumsi. Lebih lanjut, telah usainya insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) Properti dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) DTP Low Cost Green Car (LCGC) pada September 2022 turut menekan kinerja konsumsi swasta di Jawa Timur pada triwulan laporan.⁶

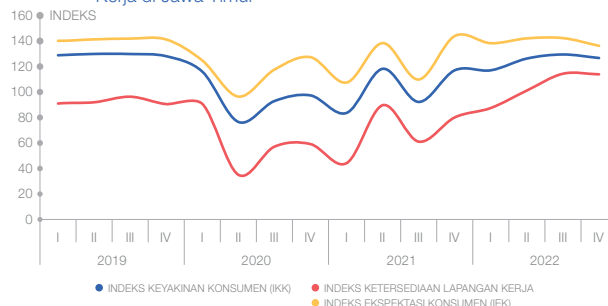
Deselerasi kinerja ekspor LN Jawa Timur berdampak pada lebih rendahnya utilisasi korporasi berorientasi ekspor sehingga berimplikasi pada penurunan penghasilan masyarakat dan ketersediaan lapangan pekerjaan pada triwulan laporan. Perlambatan permintaan eksternal berdampak pada penyesuaian produksi sejumlah korporasi padat karya berorientasi ekspor LN di Jawa Timur. Hal tersebut berdampak pada penyesuaian waktu dan jumlah tenaga kerja yang berimplikasi pada penurunan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut. Penurunan pendapatan masyarakat ini tercermin dari Indeks Penghasilan Saat Ini – Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Jawa Timur yang menurun dari 126,98 pada triwulan III 2022 menjadi 126,67 pada triwulan IV 2022. Sementara itu, lebih rendahnya kondisi ketersediaan lapangan kerja di Jawa Timur tercermin dari Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dari 114,37 pada triwulan III 2022 menjadi 113,88 pada triwulan laporan (Grafik 1.4).

Grafik 1.3 Pertumbuhan Konsumsi Swasta, Rumah Tangga dan LNPRT



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja di Jawa Timur

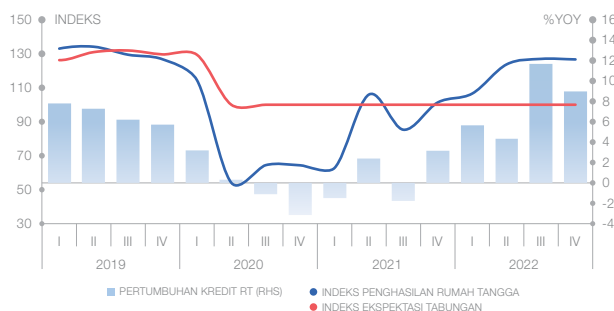


Sumber : SK Bank Indonesia (diolah)

4. Konsumsi swasta merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT.

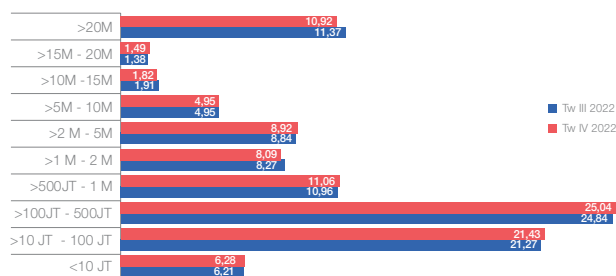
5. Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,00% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,16% (yoy). Sementara itu, kinerja konsumsi LNPRT juga meningkat dari tumbuh 8,82% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 7,80% (yoy) pada triwulan IV 2022.

6. Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 tahun 2022 (PMK 5/2022). Sementara, insentif PPN pembelian rumah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 tahun 2022 (PMK 6/2022).

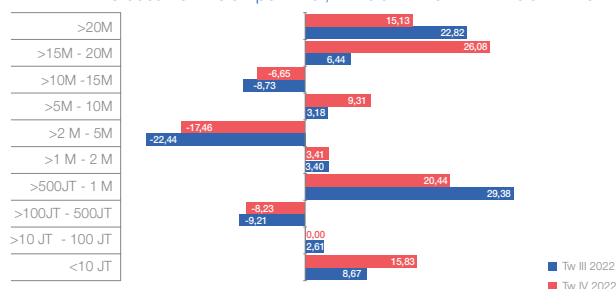
Grafik 1.5 Sumber Pembiayaan Konsumsi Rumah Tangga


Sumber : SK Bank Indonesia dan Laporan Bank Umum (diolah)

Perlambatan konsumsi juga tercermin dari lebih rendahnya pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (RT) pada periode laporan. Pertumbuhan kredit RT melambat dari 11,69% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 8,97% (yoy) pada triwulan IV 2022 (Grafik 1.5). Perlambatan kredit RT disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan kredit Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Multiguna yang masing – masing tercatat tumbuh 5,97%; 9,57%; dan 6,44% (yoy) pada triwulan IV 2022, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang masing-masing tumbuh 11,41%; 16,01%; dan 9,00% (yoy). Perlambatan kredit tersebut turut disebabkan oleh telah selesainya insentif kebijakan Pemerintah seperti insentif PPN DTP untuk pembelian properti dan PPNBM DTP untuk LCGC pada September 2022.

Grafik 1.6 Pangsa DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan III 2022 – Triwulan IV 2022


Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 1.7 Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan III 2022 – Triwulan IV 2022


Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

DPK sektor rumah tangga sedikit bertumbuh di tengah perlambatan konsumsi RT pada triwulan laporan mengindikasikan potensi perbaikan konsumsi swasta ke depan. DPK sektor rumah tangga di perbankan di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tumbuh 0,92% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 0,90% (yoy). Peningkatan DPK sektor rumah tangga di tengah perlambatan konsumsi swasta pada triwulan laporan mengindikasikan masyarakat cenderung mengalihkan konsumsi dengan menyimpan pendapatan pada periode tersebut. (Grafik 1.6 – 1.7).

Kinerja Konsumsi Swasta Tahun 2022

Kinerja konsumsi swasta sepanjang tahun 2022 terakselerasi dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi swasta Jawa Timur pada tahun 2022 tumbuh 6,03% (yoy) meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77% (yoy). Semakin terkendalnya kasus Covid-19, berlanjutnya vaksinasi Covid-19 dosis 2 dan *booster*, serta program pemulihan ekonomi pada tahun 2022 mendorong perluasan pembukaan sektor ekonomi produktif dan peningkatan mobilitas masyarakat. Hal tersebut berimplikasi pada perbaikan pendapatan masyarakat Jawa Timur sehingga mendorong perbaikan konsumsi pada tahun 2022.

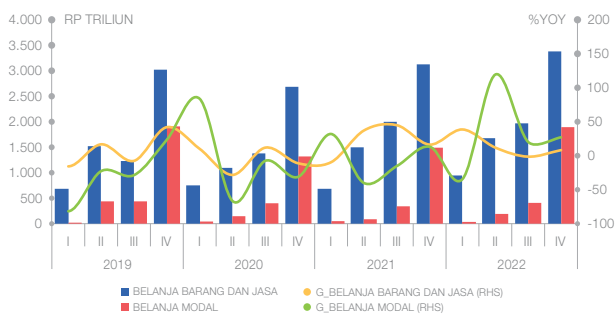
1.2.1.2. Konsumsi Pemerintah

Kinerja Konsumsi Pemerintah Triwulan IV 2022

Konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2022 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, ditopang peningkatan realisasi sejumlah kelompok belanja di APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur, dan APBN di Jawa Timur. Pada triwulan IV 2022, konsumsi pemerintah tumbuh 1,40% (yoy). Pencapaian ini membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,06% (yoy). Hal tersebut terutama ditopang oleh perbaikan pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal APBD Jawa Timur, Belanja Transfer APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur, serta Belanja Modal APBN di Jawa Timur.

Peningkatan pertumbuhan realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal APBD Provinsi Jawa Timur menopang perbaikan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Provinsi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tumbuh 8,20% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2022 (-1,41%, yoy). Peningkatan realisasi Belanja Barang dan Jasa didorong oleh realisasi Bantuan Sosial (Bansos), Dana Hibah, serta Dana Perlindungan Sosial (perlinsos) sebagai langkah penanganan dampak kenaikan BBM 3 September 2022 kepada kelompok pra-sejahtera. Lebih lanjut, kenaikan Belanja Barang dan Jasa APBD Provinsi Jawa Timur turut ditopang oleh peningkatan intensitas kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 sejalan dengan semakin terkendalnya kasus Covid-19 (Grafik 1.8).

Grafik 1.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Jawa Timur



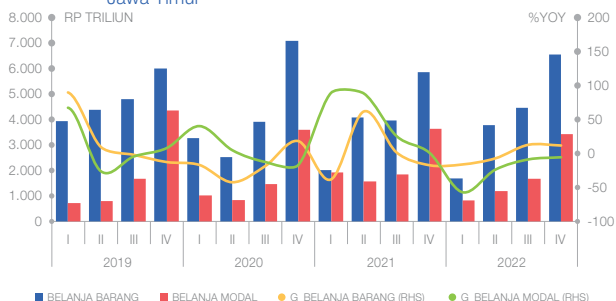
Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.9 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Total Kab/Kota Jawa Timur



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.10 Perkembangan Belanja Pegawai dan Barang Provinsi Jawa Timur



Sumber : Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur (diolah)

Realisasi belanja transfer APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur yang lebih tinggi turut mendorong peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah Jawa Timur pada triwulan laporan. Belanja transfer APBD total 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tumbuh 10,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 9,93% (yoy) (Grafik 1.9). Hal tersebut terutama didorong oleh pemerataan bagi hasil dan peningkatan kemampuan keuangan wilayah pedesaan di Jawa Timur.⁷

Lebih tingginya realisasi belanja modal dan tumbuh positifnya belanja barang APBN di Jawa Timur turut memengaruhi peningkatan konsumsi Pemerintah pada triwulan IV 2022. Realisasi belanja modal APBN di Jawa Timur berkontraksi 5,62% (yoy) pada triwulan IV 2022, membaik dari triwulan III 2022 yang berkontraksi 8,85% (yoy). Lebih lanjut, realisasi belanja barang APBN di Jawa

Timur tumbuh positif sebesar 11,69% (yoy) pada triwulan IV 2022. Peningkatan realisasi belanja modal dan pertumbuhan positif belanja barang APBN di Jawa Timur didorong oleh pembiayaan investasi untuk penyelesaian PSN, jatuh tempo pembayaran proyek pemerintah, dan administrasi penunjang lainnya (Grafik 1.10).

Kinerja Konsumsi Pemerintah Tahun 2022

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, konsumsi pemerintah tumbuh 0,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 0,87% (yoy). Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan realisasi Belanja Operasi APBD Jawa Timur terutama pada Belanja Hibah dan Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer seiring lebih terkendalinya pandemi Covid-19 pada tahun 2022.

1.2.2. Investasi

Kinerja investasi pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III 2022 ditopang oleh berlanjutnya pembangunan PSN, proyek Perpres No.80 Tahun 2019, dan proyek swasta di Jawa Timur.

Kinerja Investasi Triwulan IV 2022

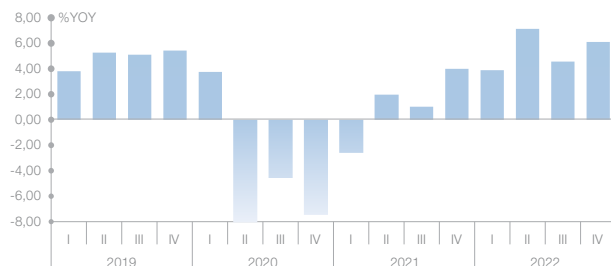
Akselerasi pembangunan proyek strategis menopang perbaikan kinerja investasi di Jawa Timur pada triwulan IV 2022. Kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tumbuh 6,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 4,57% (yoy) (Grafik 1.11). Perbaikan investasi juga tercermin dari kenaikan kondisi investasi (SBT) dunia usaha di Jawa Timur dari 4,24% pada triwulan III 2022 menjadi 15,74% pada triwulan IV 2022. Pembangunan proyek strategis yang menopang kinerja investasi meliputi percepatan penyelesaian PSN di Jawa Timur, proyek Perpres No.80 Tahun 2019, dan proyek swasta strategis. Percepatan penyelesaian PSN di Jawa Timur sepanjang triwulan IV 2022 meliputi sektor jalan dan jembatan (Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo-Banyuwangi), sektor Bandara (Bandara Kediri), dan sektor bendungan (Bendungan Semantok di Nganjuk). Total, terdapat 16 proyek prioritas Perpres No.80 Tahun 2019 yang telah selesai pada tahun 2022 dengan realisasi investasi sebesar Rp39,87 triliun di mana 15 proyek di antaranya selesai pada triwulan IV 2022 (Grafik 1.12)⁸. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek swasta strategis di Jawa Timur, khususnya pembangunan *smelter* tembaga Indonesia di Gresik turut menopang peningkatan kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan laporan⁹.

7. Pada triwulan IV 2022, realisasi belanja transfer tertinggi terjadi di kota Surabaya yang sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi Belanja Transfer tertinggi kedua terjadi di Kabupaten Pasuruan dengan realisasi sebesar 92,94% dari pagu anggaran, terutama untuk belanja bantuan keuangan yang terealisasi sebesar Rp576,18 miliar atau 99,64% dari pagu anggaran. Kabupaten Jember menduduki peringkat ketiga realisasi belanja transfer tertinggi sebesar 71,54% dari pagu anggaran, terutama untuk belanja bantuan keuangan yang terealisasi sebesar Rp347,99 miliar atau 70,89%.

8. Enam proyek prioritas Perpres No.80 Tahun 2019 dengan nilai tertinggi yang selesai pada triwulan IV 2022 meliputi : pembangunan Workshop PT INKA (Rp14,50 triliun), Progres Pengembangan JIPE Gresik (Rp5,00 triliun), Pendalaman Alur Pelayaran Barat Surabaya (Rp4,50 triliun), Penetapan KEK Pariwisata Singhasari (Rp4,00 triliun), Pengembangan KI Tuban (Rp4,00 triliun) dan Sidoarjo (Rp4,00 triliun).

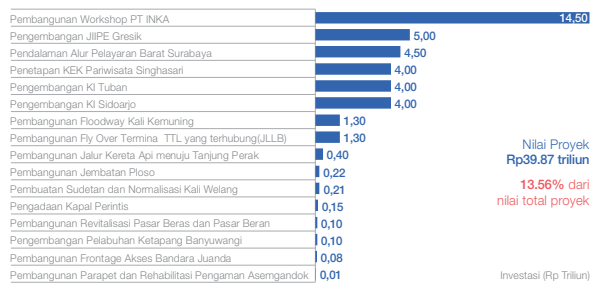
9. Nilai proyek pembangunan *smelter* tembaga di Gresik mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Hingga triwulan IV 2022, progres konstruksi proyek tersebut telah mencapai 50%, meningkat dibandingkan Mei 2022 yang sebesar 30%.

Grafik 1.11 Pertumbuhan Investasi Jawa Timur



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.12 Realisasi Investasi Proyek Perpres 80/2019



Sumber : Bappeda Prov. Jawa Timur (diolah)

Peningkatan pembiayaan proyek pemerintah Provinsi Jawa Timur serta lebih tingginya kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Timur di beberapa sektor dan spasial turut menopang peningkatan kinerja investasi di Jawa Timur pada periode laporan. Kenaikan pembiayaan atau pembayaran proyek pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tercermin dari realisasi Belanja Modal APBD Jawa Timur dan APBN di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 3,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang berkontraksi -4,29% (yoy) (Grafik 1.13). Peningkatan tersebut sejalan dengan pembiayaan proyek pemerintah daerah yang jatuh tempo pada triwulan IV 2022 serta pembiayaan sebagian proyek Perpres No.80 Tahun 2019¹⁰. Lebih lanjut, kinerja PMA dan PMDN di Jawa Timur

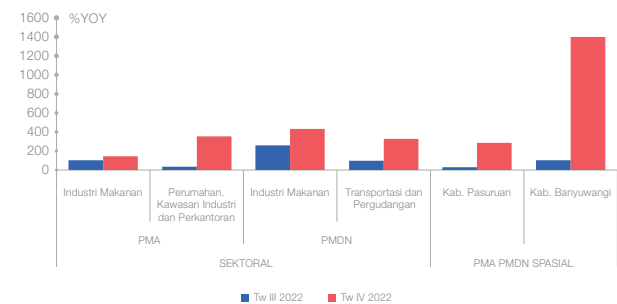
Grafik 1.13 Perkembangan Kondisi Investasi Dunia Usaha dan Realisasi Belanja Modal



Sumber : SKDU BI, BPKAD, DJPb Jawa Timur (diolah)

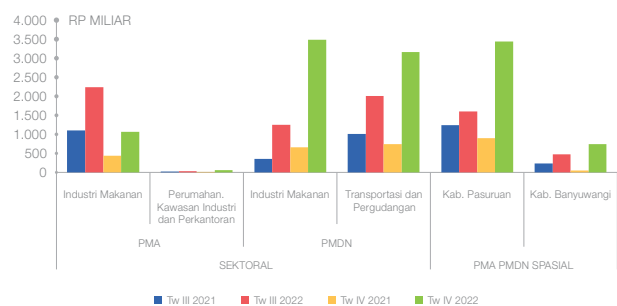
10. Berdasarkan FGD dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur, dari 16 proyek Perpres No.80 Tahun 2019 dengan realisasi investasi sebesar Rp39,87 triliun pada tahun 2022, lima persen dari total investasi tersebut bersumber dari APBN.

Grafik 1.14 Pertumbuhan PMA dan PMDN Jawa Timur



Sumber : BKPM (diolah)

Grafik 1.15 Nominal PMA dan PMDN Jawa Timur



Sumber : BKPM (diolah)

turut menunjukkan perbaikan. Peningkatan PMA terjadi di sub sektor Industri Makanan dan Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran yang masing – masing tumbuh dari 102,81% (yoy) dan 32,99% (yoy) pada triwulan III 2022, meningkat menjadi 145,91% (yoy) dan 353,90% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, pertumbuhan PMDN terutama terjadi di sub sektor Industri Makanan dan Transportasi Pergudangan yang tumbuh sebesar 430,81% (yoy) dan 327,41% (yoy) pada periode laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 258,34% (yoy) dan 98,66% (yoy). Secara spasial, pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal terjadi di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Banyuwangi. Pada triwulan IV 2022, realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kabupaten Banyuwangi masing-masing tercatat sebesar Rp3.442 miliar dan Rp745 miliar meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang masing-masing sebesar Rp898 miliar (meningkat 283,4%, yoy) dan Rp50 miliar (meningkat 1.400%, yoy) (Grafik 1.14 dan Grafik 1.15).

Kinerja Investasi Tahun 2022

Investasi di Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2022 mengalami peningkatan seiring perbaikan permintaan domestik, masih positifnya permintaan eksternal, dan pembangunan proyek strategis. Kinerja investasi Jawa Timur pada tahun 2022 tumbuh 5,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 1,08% (yoy). Secara umum, lebih terkendalinya kasus

Covid-19, akselerasi vaksinasi Covid-19 dosis 2 dan *booster*, serta berlanjutnya insentif pemerintah pada tahun 2022 mendorong perluasan pembukaan sektor ekonomi produktif yang berimplikasi pada peningkatan permintaan domestik di Jawa Timur. Hal tersebut direspons dengan perbaikan investasi sektor produktif. Lebih lanjut, tetap kuatnya permintaan eksternal, khususnya untuk komoditas emas/perhiasan dan lemak dan minyak hewani/nabati, mendukung tetap tumbuh positifnya ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2022 sehingga mendorong peningkatan kinerja investasi di Jawa Timur. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan PSN, proyek Perpres No.80 Tahun 2019, dan proyek swasta strategis turut menopang pertumbuhan investasi, khususnya investasi bangunan, di Jawa Timur sepanjang tahun 2022.

1.2.3. Ekspor – Impor

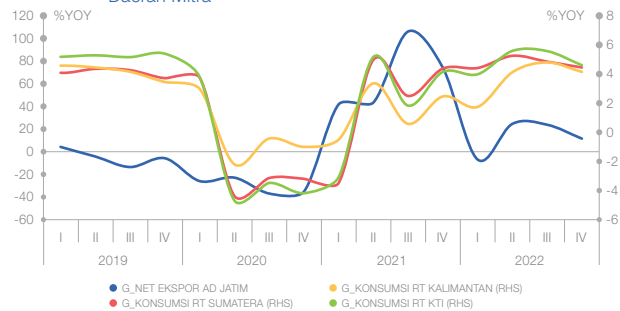
Kinerja net ekspor Jawa Timur pada triwulan IV 2022 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, dipengaruhi oleh perlambatan impor LN yang lebih dalam di tengah ekspor LN dan perdagangan antardaerah yang juga tumbuh lebih rendah. Perlambatan ekspor LN dipengaruhi oleh lebih rendahnya permintaan eksternal akibat konflik geopolitik dan kebijakan *Zero Covid Policy* di Tiongkok. Sementara itu, lebih rendahnya kinerja perdagangan antardaerah dipengaruhi oleh perlambatan konsumsi mitra dagang domestik Jawa Timur. Perlambatan permintaan eksternal dan mitra dagang domestik Jawa Timur tersebut berdampak pada penurunan kinerja impor LN Jawa Timur pada triwulan laporan. Lebih lanjut, lebih rendahnya kinerja konsumsi RT Jawa Timur pada triwulan laporan semakin menekan kinerja impor LN Jawa Timur pada triwulan IV 2022.

1.2.3.1. Ekspor-Impor Antardaerah

Kinerja Ekspor Impor Antardaerah Triwulan IV 2022

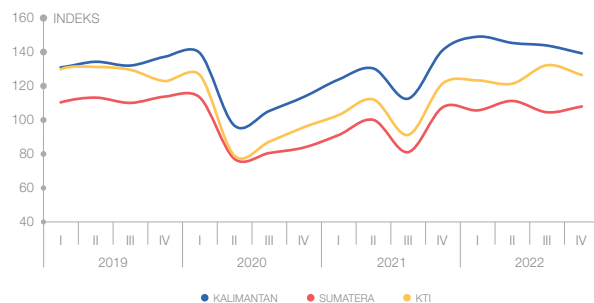
Kinerja perdagangan antardaerah pada triwulan laporan tercatat melanjutkan pertumbuhan positif, namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh perlambatan konsumsi daerah mitra dagang domestik Jawa Timur. Net ekspor antardaerah Jawa Timur mengalami perlambatan dari tumbuh 23,82% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi tumbuh 11,55% (yoy) pada triwulan IV 2022 (Tabel 1.1). Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan konsumsi RT mitra dagang domestik Jawa Timur, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)¹¹ tercatat masing-masing sebesar 4,45% (yoy), 4,15% (yoy), dan 4,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang masing-masing tumbuh sebesar 4,85% (yoy), 4,79% (yoy), dan 5,57% (yoy) (Grafik 1.16). Perlambatan kinerja konsumsi RT daerah Kalimantan dan KTI turut tercermin dari perlambatan Indeks Keyakinan Konsumen kedua wilayah (Grafik 1.17). Secara umum, lebih rendahnya kinerja konsumsi RT di daerah mitra dagang domestik Jawa Timur dipengaruhi oleh tertahannya daya beli masyarakat akibat dampak rambatan kenaikan harga BBM pada 3 September terhadap berbagai komoditas, telah selesainya beberapa insentif pemerintah pada triwulan IV 2022, serta

Grafik 1.16 Pertumbuhan Net Ekspor DN Jatim dan Konsumsi RT Daerah Mitra



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.17 Keyakinan Konsumen Wilayah Sumatra, Kalimantan, dan KTI



Sumber : SK Bank Indonesia (diolah)

penurunan pendapatan sejumlah RT yang bekerja di korporasi berorientasi ekspor LN. Perlambatan kinerja perdagangan antardaerah yang lebih dalam tertahan oleh tetap adanya permintaan musiman pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Relaksasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejalan dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19 di tingkat nasional serta program Misi Dagang yang secara rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut menopang tetap positifnya pertumbuhan net ekspor antardaerah Jawa Timur pada triwulan IV 2022.

Kinerja Ekspor Impor Antardaerah Tahun 2022

Kinerja perdagangan antardaerah Jawa Timur pada tahun 2022 tumbuh positif, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Net ekspor antardaerah Jawa Timur pada tahun 2022 tetap tumbuh positif 13,67% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 63,68% (yoy). Lebih rendahnya kinerja perdagangan antardaerah pada tahun 2022 dipengaruhi oleh normalisasi pertumbuhan net ekspor antardaerah Jawa Timur pasca tumbuh tinggi pada 2021. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mulai melakukan kegiatan Misi Dagang secara rutin setiap bulan pada tahun 2021 setelah pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Rutinitas kegiatan Misi Dagang bulanan yang berlanjut pada tahun 2022 berdampak pada normalisasi pertumbuhan

11. Kawasan Timur Indonesia (KTI) meliputi Sulawesi-Maluku-Papua dan Bali-Nusa Tenggara.

perdagangan antardaerah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Lebih lanjut, tetap positifnya pertumbuhan perdagangan antardaerah Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2022 turut ditopang oleh tetap positifnya permintaan mitra dagang domestik Jawa Timur.

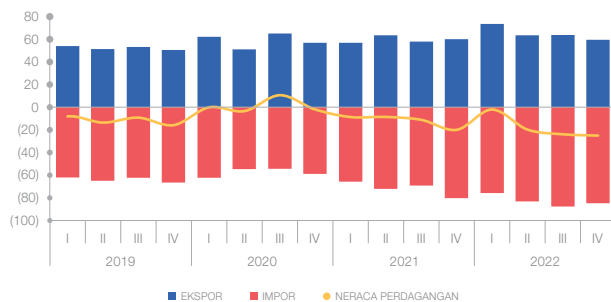
1.2.3.2. Ekspor-Impor Luar Negeri

Perdagangan luar negeri Jawa Timur pada triwulan IV 2022 mengalami posisi net impor sebesar Rp25,05 triliun (ADHK 2010). Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang mencatatkan net impor sebesar Rp23,87 triliun (ADHK 2010). Hal ini disebabkan oleh impor LN yang mengalami pertumbuhan positif, sementara ekspor LN Jawa Timur mengalami kontraksi.

Ekspor LN Jawa Timur melambat dari tumbuh 10,21% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi terkontraksi 0,94% (yoy) pada triwulan laporan (Tabel 1.1). Perlambatan kinerja ekspor LN tersebut terutama dipengaruhi oleh mulai melambatnya pertumbuhan ekonomi global, masih berlanjutnya konflik geopolitik, kebijakan *Zero Covid Policy* di Tiongkok, dan kebijakan proteksionisme global yang berdampak pada disrupsi rantai pasokan dan perdagangan global.

Sementara itu, kinerja impor LN tumbuh sebesar 5,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 27,04% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan impor bahan baku dan barang konsumsi, seiring lebih rendahnya permintaan domestik dan eksternal pada triwulan laporan.

Grafik 1.18 Neraca Perdagangan Luar Negeri Jawa Timur



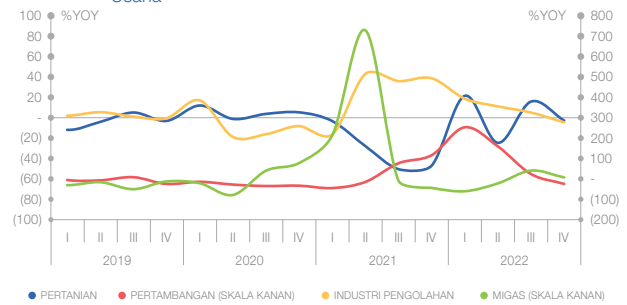
Sumber : BPS (diolah)

Ekspor Luar Negeri

Kinerja Ekspor LN Triwulan IV 2022

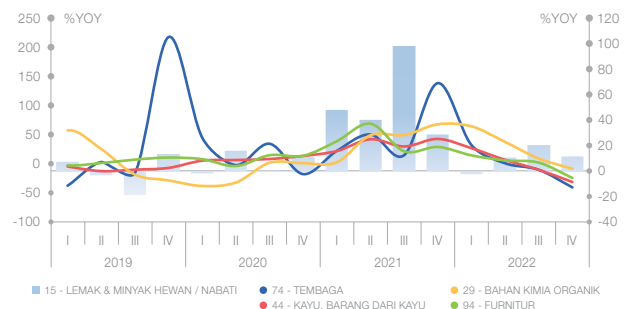
Kinerja ekspor LN Jawa Timur pada triwulan IV 2022 terdeselerasi dibandingkan triwulan III 2022. Ekspor LN Jawa Timur pada triwulan IV 2022 mencapai Rp59,61 triliun (ADHK 2010) atau terkontraksi 0,94% (yoy). Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh positif sebesar 10,21% (yoy) (Grafik 1.20)¹². Deselerasi kinerja ekspor LN terjadi pada ekspor migas dan ekspor non migas¹³. Secara nominal, nilai ekspor LN (FOB) Jawa Timur pada triwulan IV 2022 mencapai USD5,86 miliar atau terkontraksi 4,05% (yoy). Pencapaian tersebut lebih rendah

Grafik 1.19 Pertumbuhan Nilai Ekspor Jawa Timur berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.20 Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Sektor Utama



Sumber : BPS (diolah)

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 6,89% (yoy)¹⁴.

Deselerasi kinerja ekspor LN Jawa Timur terutama terjadi pada komoditas ekspor utama dan negara tujuan ekspor utama.

Perlambatan pertumbuhan ekspor terjadi pada komoditas ekspor utama Jawa Timur, yakni komoditas lemak dan minyak hewani/nabati dan berbagai produk kimia. Adapun penurunan ekspor terjadi pada komoditas tembaga; kayu dan barang dari kayu; serta furnitur (Grafik 1.20). Lebih rendahnya ekspor komoditas tembaga terutama terjadi pada negara tujuan Tiongkok dan Malaysia sejalan dengan perlambatan kinerja ekonomi di negara tersebut¹⁵. Ekspor lemak dan minyak hewani/nabati juga mengalami perlambatan, khususnya ke Tiongkok dan Malaysia. Di samping perlambatan kinerja ekonomi di negara tersebut, lebih rendahnya ekspor komoditas lemak dan minyak hewani/nabati turut dipengaruhi oleh pemberlakuan kembali tarif pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) untuk *crude palm oil* (CPO) oleh Pemerintah setelah digratiskan selama empat bulan serta tren penurunan harga CPO global. Perlambatan ekspor komoditas kayu dan furnitur pada

12. Pangsa ekspor luar negeri Jawa Timur pada triwulan IV 2022 sebesar 13,58% terhadap total PDRB Jawa Timur.

13. Berdasarkan rilis BPS, ekspor LN migas mengalami perlambatan, yakni dari tumbuh 40,66% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 7,19% (yoy) di triwulan IV 2022. Sementara ekspor LN non migas mengalami perlambatan dari tumbuh 5,56% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi terkontraksi 4,57% (yoy) di triwulan IV 2022.

14. Nilai ekspor (FOB) menggunakan sumber BPS Jawa Timur.

15. Berdasarkan *Tradingeconomics*, kinerja ekonomi, Tiongkok, dan Malaysia pada triwulan IV 2022 masing-masing tumbuh 2,9% (yoy) dan 7,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 (3,9%, dan 14,2%, yoy).

triwulan IV 2022 disebabkan oleh penurunan ekspor ke negara tujuan utama, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan kawasan Eropa akibat perlambatan ekonomi dan *overstock* di negara tujuan serta penerapan kebijakan “Produk Bebas Deforestasi” di Uni Eropa¹⁶. Lebih lanjut, ekspor komoditas produk kimia mengalami perlambatan pada triwulan IV 2022. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan akan obat-obatan dan produk kimia lainnya pendukung kesehatan sejalan dengan semakin terkendali kasus Covid-19 secara global. Perlambatan ekspor produk kimia terutama terjadi untuk negara tujuan Tiongkok, Amerika Serikat, dan Belanda.

Kinerja Ekspor LN Tahun 2022

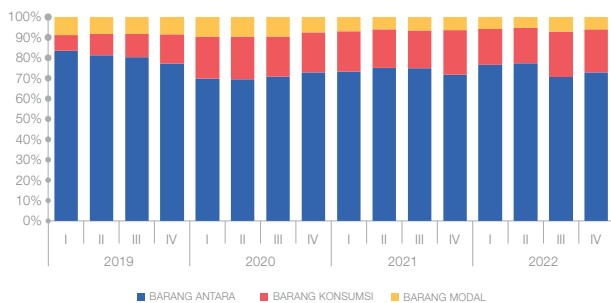
Kinerja ekspor LN Jawa Timur sepanjang tahun 2022 terakselerasi dibandingkan tahun 2021. Ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2022 tumbuh sebesar 9,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 1,33% (yoy). *Windfall* kenaikan harga komoditas global, masih positifnya permintaan global untuk komoditas ekspor LN utama Jawa Timur, yakni emas/perhiasan serta lemak dan minyak hewani/nabati, serta tren penurunan tarif *freight container* turut mendukung lebih tingginya ekspor LN Jawa Timur tahun 2022¹⁷.

Impor Luar Negeri

Kinerja Impor LN Triwulan IV 2022

Impor LN Jawa Timur pada triwulan IV 2022 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Impor LN pada PDRB Jawa Timur sebesar Rp84,66 triliun (ADHK 2010) atau tumbuh 5,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 27,04% (yoy) (Tabel 1.1). Perlambatan kinerja impor LN terjadi pada kelompok migas dan non migas yang masing – masing tumbuh sebesar -18,75% (yoy) dan 1,23% (yoy) pada triwulan IV 2022, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang masing-masing tumbuh sebesar 89,50% (yoy) dan 23,74% (yoy). Secara umum, perlambatan impor LN pada periode laporan disebabkan oleh perlambatan permintaan masyarakat Jawa Timur dan mitra dagang Jawa Timur, baik domestik dan eksternal.

Grifik 1.21 Pangsa Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan

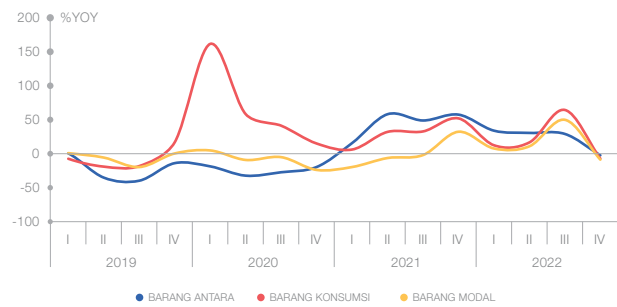


Sumber : BPS (diolah)

16. Berdasarkan Tradingeconomics, kinerja ekonomi Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa pada triwulan IV 2022 masing – masing tumbuh 1,0% (yoy), 0,6% (yoy), dan 1,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 (1,9%, 1,5%, dan 2,5%, yoy).
Uni Eropa mengesahkan UU Produk Bebas Deforestasi di wilayah Uni Eropa pada Desember 2022.

17. Harga emas dunia pada tahun 2022 tercatat sebesar 1.802 USD, meningkat 0,16%(yoy) dibandingkan tahun 2021.
Harga CPO dunia pada tahun 2022 tercatat sebesar 1.183 USD/Barrel, meningkat 10,76%(yoy) dibandingkan tahun 2021.

Grifik 1.22 Pertumbuhan Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber : BPS (diolah)

Perlambatan impor LN non migas pada triwulan dipengaruhi oleh lebih rendahnya impor kelompok bahan baku, barang konsumsi, dan barang modal. Berdasarkan penggunaannya, impor bahan baku, barang konsumsi, dan barang modal pada triwulan IV 2022 menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan III 2022. Di samping perlambatan permintaan domestik dan eksternal, lebih rendahnya impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi turut dipengaruhi oleh masih banyaknya inventori yang dipenuhi oleh impor pada triwulan III 2022 (Grifik 1.21 – 1.22).

Kinerja Impor LN Tahun 2022

Impor LN Jawa Timur pada tahun 2022 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021. Impor LN Jawa Timur pada tahun 2022 tumbuh sebesar 15,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 24,57% (yoy). Di tengah perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya permintaan eksternal, penurunan impor LN di Jawa Timur pada tahun 2022 dipengaruhi oleh penggunaan inventori bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi yang dipenuhi dari impor LN pada tahun 2021 serta upaya pelaku usaha untuk memenuhi bahan baku dari dalam negeri¹⁸. Lebih lanjut, masih tingginya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik pada 2022 menyebabkan pelaku usaha melakukan *wait and see* dalam melakukan impor bahan baku untuk menunjang produksi pada tahun 2022 dan persiapan 2023.

1.3. PDRB SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 terpantau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh perlambatan kinerja LU utama, yakni LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Pertanian, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan kinerja LU Konstruksi.

18. Impor LN Jawa Timur pada tahun 2021 tumbuh 24,57% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing tumbuh sebesar -9,17% (yoy) dan -10,03% (yoy). Peningkatan impor LN Jawa Timur pada tahun 2021 juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2017-2018 (sebelum pandemi Covid-19) yang sebesar 8,11% (yoy).

1.3.1. Industri Pengolahan

Kinerja Industri Pengolahan pada triwulan IV 2022 melambat dibandingkan triwulan III 2022 terutama dipengaruhi penurunan permintaan domestik dan eksternal pada triwulan laporan. Di samping itu, masih berlanjutnya konflik geopolitik berdampak pada masih tingginya ketidakpastian global yang berimplikasi pada tertahannya kepercayaan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi di LU Industri Pengolahan.

Kinerja LU Industri Pengolahan Triwulan IV 2022

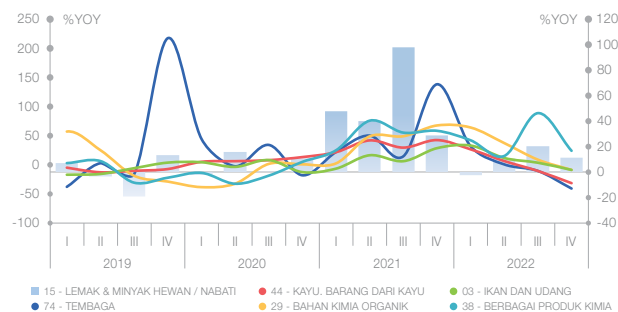
Pada triwulan IV 2022, kinerja LU Industri Pengolahan tercatat mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2022 tumbuh 4,71% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,46% (yoy) (Tabel 1.2). Lebih rendahnya permintaan domestik yang tercermin dari perlambatan konsumsi swasta dan perdagangan antardaerah, serta penurunan permintaan eksternal yang tercermin dari lebih rendahnya ekspor LN berdampak pada tertahannya kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan. Di samping itu, masih berlangsungnya konflik geopolitik yang berdampak pada ketidakpastian global turut menahan optimisme pelaku usaha untuk melakukan ekspansi pada triwulan laporan.

Dinamika perekonomian dalam negeri menahan permintaan domestik yang berimplikasi pada lebih rendahnya kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan. Peningkatan harga

berbagai komoditas konsumsi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM 3 September 2022 serta berakhirnya insentif PPnBM DTP LCGC menahan konsumsi masyarakat Jawa Timur dan mitra dagang domestik Jawa Timur pada triwulan IV 2022. Perlambatan konsumsi RT di Jawa Timur turut tercermin dari lebih rendahnya penjualan eceran di Jawa Timur pada triwulan laporan¹⁹. Perlambatan permintaan domestik berdampak pada lebih rendahnya utilisasi LU Industri Pengolahan.

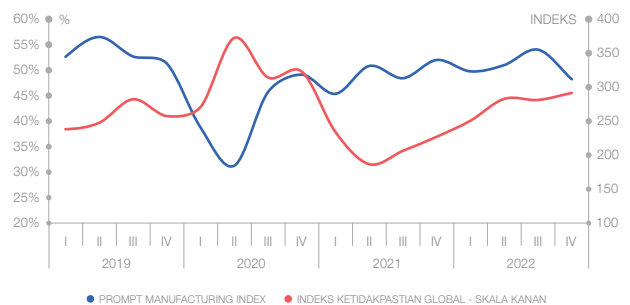
Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan turut dipengaruhi oleh lebih rendahnya permintaan eksternal pada produk industri. Pada triwulan IV 2022, ekspor LN produk LU Industri Pengolahan berkontraksi 4,57% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 5,05% (yoy) (Grafik 1.23). Perlambatan kinerja tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekspor LN komoditas tembaga, lemak dan minyak hewani/nabati, ikan dan udang, kayu dan barang dari kayu, bahan kimia organik, produk kimia, serta furnitur. Penurunan permintaan eksternal terutama terjadi di negara mitra dagang utama Jawa Timur, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia. Penurunan permintaan ekspor LN produk industri sejalan dengan tertahannya ekonomi global pada triwulan IV 2022 yang tercermin dari lebih rendahnya rata-rata indeks *J.P.Morgan Global Manufacturing Purchasing Managers' Index* (PMI) dari 50,4 pada triwulan III 2022 menjadi 48,9.

Grafik 1.23 Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)



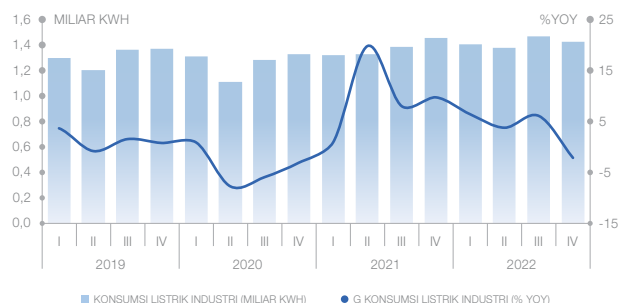
Sumber : EPU, SKDU KPw BI Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.24 Indeks Ketidakpastian Global dan *Prompt Manufacturing Index*



Sumber : EPU, SKDU KPw BI Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.25 Perkembangan Konsumsi Listrik Industri



Sumber: DSta (diolah)

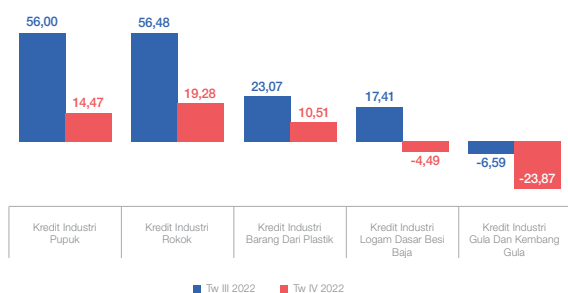
Grafik 1.26 Kredit LU Industri Pengolahan



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

19. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia di Jawa Timur, perlambatan kinerja LU Perdagangan pada periode laporan terutama terjadi pada kategori penjualan eceran suku cadang aksesoris, makanan minuman, bahan bakar, dan perlengkapan RT.

Grafik 1.27 Kredit Sub Sektor Industri



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Optimisme pelaku usaha yang tertahan untuk melakukan ekspansi akibat masih tingginya ketidakpastian global turut menahan kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan. Hal tersebut menekan kepercayaan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi di LU Industri Pengolahan. Tertahannya kepercayaan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi usaha dan produksi khususnya industri yang tercermin pada penurunan *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Jawa Timur. Pada triwulan IV 2022, PMI Jawa Timur tercatat sebesar 48,21% atau melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar 54,02% (Grafik 1.24). Hal ini berdampak pada perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan pada periode laporan.

Lebih rendahnya kinerja LU Industri Pengolahan turut tercermin dari perlambatan pertumbuhan konsumsi listrik industri dan pembiayaan kredit di sektor industri. Pada triwulan IV 2022, konsumsi listrik industri Jawa Timur berkontraksi sebesar 2,15% (yoy). Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 6,09% (yoy) (Grafik 1.25). Lebih lanjut, kredit perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 12,32% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar 23,31% (yoy) (Grafik 1.26). Perlambatan kredit terjadi di sub sektor Industri Pupuk, Industri Rokok, Industri Barang dari Plastik, Industri Logam Dasar Besi dan Baja, serta Industri Gula dan Pengolahan Gula (Grafik 1.27).

Kinerja LU Industri Pengolahan Tahun 2022

Kinerja LU Industri Pengolahan tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. LU Industri Pengolahan pada tahun 2022 tumbuh 6,28% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 3,37% (yoy). Hal tersebut ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan eksternal Jawa Timur pada tahun 2022. Lebih terkendalinya kasus Covid-19, akselerasi vaksinasi Covid-19 dosis 2, dan berbagai insentif Pemerintah mendorong semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif sehingga menopang perbaikan permintaan domestik Jawa Timur pada tahun 2022. Hal tersebut tercermin dari lebih tingginya pertumbuhan konsumsi swasta dan investasi Jawa Timur pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kenaikan harga komoditas ekspor utama Jawa Timur di tengah

permintaan eksternal yang masih tetap kuat mendukung perbaikan ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2022. Hal tersebut mendukung peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan Jawa Timur pada tahun 2022.

1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Perlambatan permintaan domestik dan eksternal pada triwulan IV 2022 turut berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Jawa Timur pada triwulan laporan.

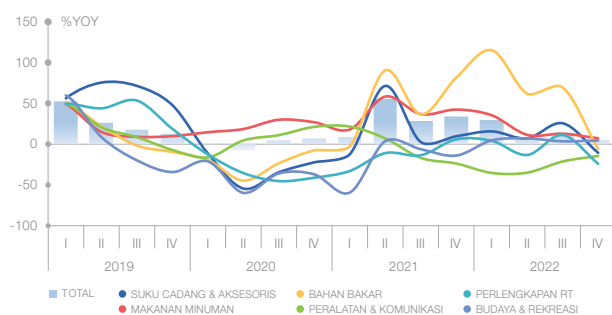
Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran Triwulan IV 2022

Pada triwulan IV 2022, kinerja LU Perdagangan terpantau mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Perdagangan pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 5,83% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 8,10% (yoy) (Tabel 1.2). Perlambatan kinerja LU Perdagangan di Jawa Timur pada periode laporan dipengaruhi oleh perlambatan permintaan domestik yang tercermin dari penurunan konsumsi swasta dan perdagangan antardaerah, serta lebih rendahnya permintaan eksternal yang tercermin dari penurunan ekspor LN pada triwulan laporan.

Perlambatan kinerja LU Perdagangan terjadi pada perdagangan ritel yang disebabkan oleh lebih rendahnya konsumsi masyarakat. Tertahannya laju konsumsi masyarakat Jawa Timur dan mitra dagang domestik Jawa Timur pada triwulan laporan dipengaruhi oleh dampak rambatan kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 terhadap berbagai barang konsumsi dan transportasi. Di samping itu, telah usainya insentif PPN DTP Properti dan PPnBM DTP LCGC pada September 2022 turut menekan kinerja konsumsi swasta di Jawa Timur pada triwulan laporan. Hal tersebut berdampak pada perlambatan kinerja perdagangan ritel di Jawa Timur yang tercermin dari lebih rendahnya penjualan eceran dan penjualan online pada triwulan laporan. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia di Jawa Timur, perlambatan kinerja LU Perdagangan pada periode laporan terutama terjadi pada kategori penjualan eceran suku cadang aksesoris, makanan minuman, bahan bakar, dan perlengkapan RT yang masing – masing tumbuh dari 25,54% (yoy), 12,72% (yoy), 69,50% (yoy), dan 11,08% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi -10,70% (yoy), 7,15% (yoy), -6,08% (yoy), dan -24,13% (yoy) pada periode laporan (Grafik 1.28).

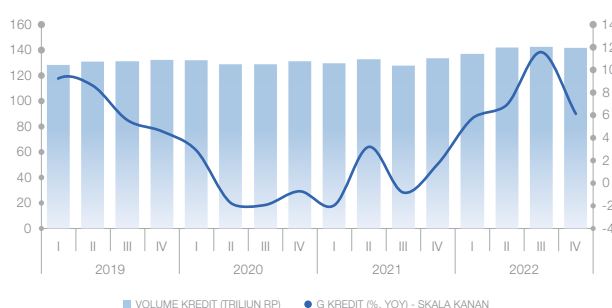
Penurunan kinerja perdagangan besar turut berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Perdagangan di Jawa Timur pada triwulan laporan. Masih berlanjutnya konflik geopolitik Rusia-Ukraina, Tiongkok-Taiwan, dan Amerika Serikat – Arab Saudi serta kebijakan *Zero Covid Policy* di Tiongkok berimplikasi pada semakin luasnya kebijakan proteksionisme yang berdampak pada penurunan perdagangan global. Hal tersebut turut berdampak pada penurunan kinerja ekspor LN Jawa Timur pada triwulan laporan,

Grafik 1.28 Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil



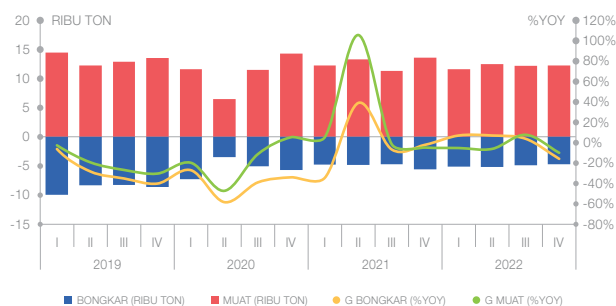
Sumber: SPE Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.29 Kredit LU Perdagangan



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 1.30 Perkembangan Bongkar Muat Bandara Juanda



Sumber: Angkasa Pura I (diolah)

sehingga menahan kinerja LU Perdagangan sub kelompok perdagangan besar di Jawa Timur. Kondisi tersebut terindikasi mengakibatkan penyesuaian waktu dan jumlah tenaga kerja di sektor ini, yang pada gilirannya turut menekan pendapatan dan konsumsi ritel masyarakat.

Kinerja LU Perdagangan yang lebih rendah pada triwulan laporan turut tercermin dari penyaluran kredit ke LU Perdagangan dan aktivitas muat barang di Bandara Juanda. Kinerja kredit LU Perdagangan pada triwulan IV 2022 tumbuh 6,12% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 11,57% (yoy) (Grafik 1.29). Perlambatan kinerja kredit terutama terjadi di sub sektor perdagangan kopra dalam negeri, perdagangan kelapa dan kelapa sawit, perdagangan beras dalam negeri, perdagangan besar tekstil, pakaian jadi, dan kulit, perdagangan semen dalam negeri, dan

perdagangan makanan dan minuman dalam negeri yang masing – masing dari tumbuh 22,02% (yoy); 62,84% (yoy); 76,74% (yoy); 17,17% (yoy); 4,29% (yoy); dan -13,15% (yoy) pada triwulan III 2022 melambat menjadi 12,54% (yoy); 54,54% (yoy); 72,31% (yoy); 14,69% (yoy); 1,03% (yoy); dan -18,95% (yoy) pada periode laporan. Di samping itu, lebih rendahnya kinerja LU Perdagangan Jawa Timur pada periode laporan turut tercermin dari perlambatan kinerja muat barang di Bandara Juanda dari tumbuh positif sebesar 7,76% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi terkontraksi sebesar 9,87% (yoy) pada triwulan IV 2022 (Grafik 1.30).

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2022

Pada tahun 2022, kinerja LU Perdagangan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2021. Kinerja LU Perdagangan pada tahun 2022 tercatat tumbuh 6,87% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 7,77% (yoy). Di tengah perbaikan permintaan domestik dan eksternal, perlambatan kinerja LU Perdagangan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh lebih rendahnya perdagangan antardaerah pasca tumbuh tinggi pada tahun 2021. Lebih rendahnya kinerja perdagangan antardaerah pada tahun 2022 dipengaruhi oleh dengan normalisasi pertumbuhan net ekspor antardaerah Jawa Timur pasca tumbuh tinggi pada 2021. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mulai melakukan kegiatan Misi Dagang secara rutin setiap bulan pada tahun 2021 setelah pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Rutinitas kegiatan Misi Dagang bulanan yang berlanjut pada tahun 2022 berdampak pada normalisasi pertumbuhan perdagangan antardaerah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Lebih lanjut, tetap tumbuh positifnya kinerja LU Perdagangan pada tahun 2022 ditopang oleh peningkatan kinerja konsumsi swasta dan ekspor LN Jawa Timur.

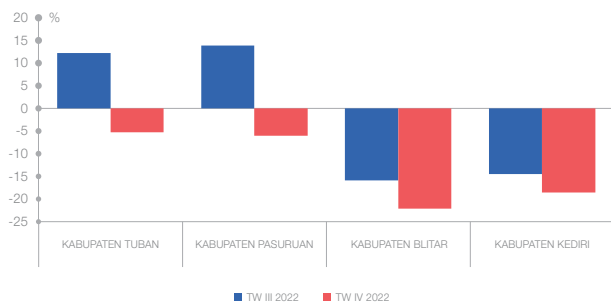
1.3.3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan IV 2022 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih berlangsungnya masa tanam padi serta penurunan pasokan daging sapi dan daging ayam ras pada triwulan laporan.

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Triwulan IV 2022

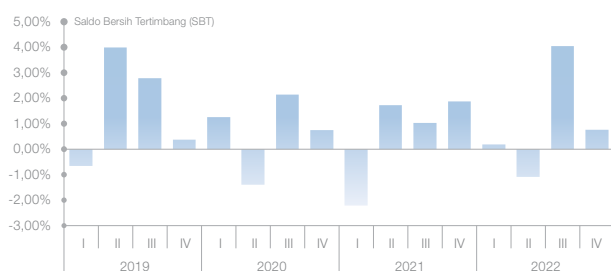
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan melambat pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 0,48% (yoy) pada triwulan IV 2022, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 1,63% (yoy) (Tabel 1.2). Perlambatan kinerja LU Pertanian terutama dipengaruhi oleh masih berlangsungnya masa tanam padi pada triwulan IV 2022. Lebih lanjut, pasokan daging sapi yang berkurang pada triwulan IV 2022 turut berimplikasi pada perlambatan kinerja LU ini pada triwulan laporan.

Grafik 1.31 Kabupaten/Kota Produksi Padi Jawa Timur



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.33 Realisasi Kegiatan Usaha LU Pertanian

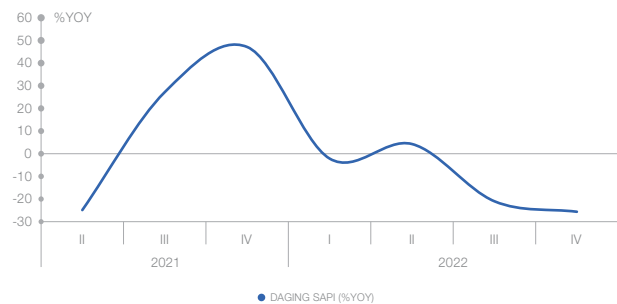


Sumber: SKDU Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (diolah)

Lebih rendahnya kinerja LU Pertanian pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya disebabkan oleh penurunan produksi padi gabah kering giling (GKG) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Produksi GKG di beberapa wilayah sentra produksi padi di Jawa Timur yakni di Kabupaten Tuban, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kediri mengalami penurunan, dari masing-masing tumbuh sebesar 12,24% (yoy), 13,87% (yoy), -15,92% (yoy), dan -14,48% (yoy) pada triwulan III 2022 berkontraksi menjadi -5,25% (yoy), -6,03% (yoy), -22,11% (yoy), dan -18,53% (yoy) pada periode laporan (Grafik 1.31). Hal tersebut sejalan dengan masih berlangsungnya masa tanam padi di Jawa Timur pada triwulan IV 2022.

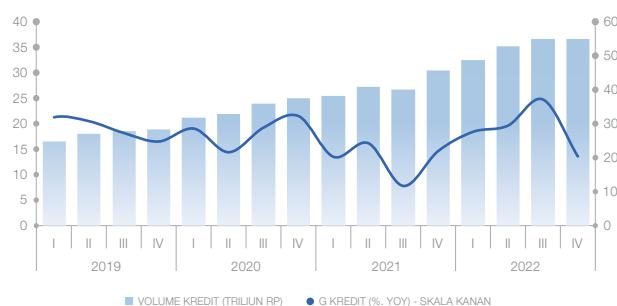
Adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) berdampak pada terganggunya produksi daging sapi di Jawa Timur sehingga menekan kinerja LU Pertanian pada sub LU Peternakan. Penambahan kasus PMK sebanyak 54.220 kasus pada sapi ternak di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya serta kemunculan penyakit LSD pada sapi ternak berdampak pada terganggunya persediaan daging sapi di Jawa Timur pada triwulan laporan. Berdasarkan data Posko Satgas Pangan Provinsi Jawa Timur, persediaan daging sapi di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tercatat sebanyak 11.591 ton atau berkontraksi 25,63% (yoy). Pencapaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang mengalami kontraksi 21,00% (yoy) (Grafik 1.32).

Grafik 1.32 Persediaan Daging Sapi



Sumber : Posko Satgas Pangan Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.34 Kredit LU Pertanian



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Perlambatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan turut tercermin dari penurunan realisasi kegiatan usaha LU Pertanian Jawa Timur dan perlambatan pembiayaan di LU Pertanian pada triwulan laporan. Berdasarkan SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur, SBT realisasi kegiatan usaha LU Pertanian Jawa Timur mengalami penurunan, dari SBT 4,04% pada triwulan III 2022 menjadi SBT 0,77% pada triwulan IV 2022 (Grafik 1.33). Lebih lanjut, pembiayaan kredit pada LU Pertanian pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 20,36% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 37,11% (yoy) (Grafik 1.34). Perlambatan kredit perbankan di LU Pertanian khususnya terjadi pada pembiayaan sub sektor perkebunan tebu dan tanaman pemanis; pembibitan dan budidaya unggas; pembibitan dan budidaya sapi potong; pertanian palawija jagung; dan sub sektor buah buahan musiman dari masing – masing tumbuh sebesar 27,70% (yoy); 100,71% (yoy); 40,71% (yoy); 35,87% (yoy); dan 88,92% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi -22,59% (yoy); 98,47% (yoy); 33,80% (yoy); 19,48% (yoy); dan 62,65% (yoy) pada triwulan IV 2022.

Program pemulihan perekonomian di bidang Pertanian menahan perlambatan kinerja LU Pertanian yang lebih dalam pada triwulan IV 2022. Beberapa program pemulihan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah sepanjang akhir tahun 2021 dan berlanjut pada tahun 2022 antara lain penguatan *Cooperative Farming* (CF) – kerja sama dengan

korporasi, pertanian berbasis korporasi, pengembangan kualitas dan mutu produk melalui sistem *Good Agricultural Practices* (GAP), pengembangan kawasan agropolitan, pengolahan hortikultura terpadu, program petik olah kemas jual, program pengembangan produk pangan berbasis agro, serta program asuransi petani, nelayan, dan ternak sapi.

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk keseluruhan 2022 meningkat terbatas dibandingkan tahun 2021. Kinerja LU Pertanian pada tahun 2022 tumbuh sebesar 1,79% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 1,77% (yoy). Perbaikan kinerja LU Pertanian pada tahun 2022 terutama ditopang oleh peningkatan pertumbuhan produksi komoditas hortikultura, seperti bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit dibandingkan tahun 2022. Kebijakan strategis pemulihan ekonomi Nasional dalam memfasilitasi sertifikasi ekspor dan memastikan pasar ekspor produk pertanian, program Pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), akselerasi ekspor melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Geratieks) dan Merdeka Ekspor, pencanangan *One Village One Product*, kebijakan intervensi Pemerintah untuk sisi hulu sampai dengan hilir, serta Program Makmur Pupuk Indonesia turut menopang perbaikan LU Pertanian pada tahun 2022.

1.3.4. Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya ditopang oleh percepatan penyelesaian pembangunan proyek strategis yang ditargetkan selesai pada 2022.

Kinerja LU Konstruksi Triwulan IV 2022

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2022 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Konstruksi tumbuh 7,04% (yoy) pada periode laporan, meningkat dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat tumbuh 6,20% (yoy) (Tabel 1.2). Perbaikan kinerja LU Konstruksi turut terkonfirmasi dari lebih tingginya realisasi kegiatan usaha LU Konstruksi –SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar 4,23% (SBT), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (3,11%, SBT) (Grafik 1.35).

Peningkatan kinerja LU Konstruksi Jawa Timur pada triwulan laporan didukung oleh penyelesaian beberapa proyek Perpres No.80 Tahun 2019. Terdapat 16 proyek prioritas Perpres No.80 Tahun 2019 yang telah selesai pada tahun 2022 dengan realisasi investasi sebesar Rp39,87 triliun di mana 15 proyek di antaranya selesai pada triwulan IV 2022²⁰. Kelima belas proyek yang telah selesai meliputi: (i) delapan proyek di kawasan Gerbangkertasusila (GKS+); (ii) dua proyek di kawasan Madura; (iii) dua proyek di kawasan Bromo-Tengger-Semeru; (iv) dua proyek di kawasan Selingkar Ijen; dan (v) satu proyek di kawasan Selingkar Wilis. Lebih

lanjut, terdapat 40 proyek strategis Perpres No. 80 Tahun 2019 yang telah memasuki tahap konstruksi pada tahun 2022. Keempat puluh proyek tersebut meliputi: (i) 14 proyek di kawasan Gerbangkertasusila (GKS+); (ii) lima proyek di kawasan Madura; (iii) sembilan proyek di kawasan Bromo-Tengger-Semeru; (iv) empat proyek di kawasan Selingkar Ijen; (v) dan delapan proyek di kawasan Selingkar Wilis (Grafik 1.36).

Peningkatan kinerja LU Konstruksi juga didukung oleh berlanjutnya pembangunan PSN. Percepatan penyelesaian PSN di Jawa Timur sepanjang triwulan IV 2022 terutama meliputi sektor jalan dan jembatan, sektor Bandara, dan sektor bendungan. Pada triwulan IV 2022, pembangunan PSN di sektor jalan dan jembatan terutama difokuskan pada konstruksi jalan tol Pasuruan – Probolinggo dan *rest area* tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar dengan progres konstruksi masing-masing mencapai 78,08% dan 92,57%²¹. Sementara itu, pembangunan Bandara Kediri terus berlanjut dengan progres pekerjaan tanah telah mencapai 83,16%, pada sisi udara mencapai 15,35%, dan pada sisi darat mencapai 3,06%. Lebih lanjut, konstruksi bendungan Semantok di Nganjuk selesai pada Desember 2022.

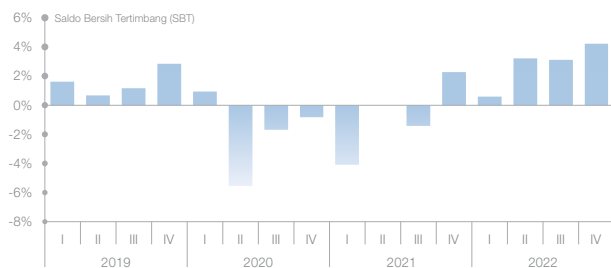
Berlanjutnya pembangunan proyek strategis swasta di Jawa Timur turut mendorong perbaikan kinerja LU Konstruksi di Jawa Timur pada triwulan laporan. Pembangunan pabrik peleburan (*smelter*) tembaga di Gresik dengan nilai investasi mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat terus berlanjut. Hingga triwulan IV 2022, progres konstruksi proyek tersebut mencapai 50%. Pencapaian tersebut meningkat dibandingkan progres konstruksi hingga Mei 2022 yang mencapai 30%.

Perbaikan realisasi investasi sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran dan peningkatan indeks harga properti turut mendorong peningkatan kinerja LU Konstruksi pada periode laporan. Pertumbuhan realisasi investasi sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada triwulan IV 2022, realisasi investasi sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar Rp2.153 miliar atau berkontraksi sebesar 76,42% (yoy). Pencapaian tersebut membaik dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp1.289 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 80,52% (yoy) (Grafik 1.37). Lebih lanjut, berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Primer Bank Indonesia di Jawa Timur, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di Kota Surabaya pada triwulan IV 2022 tumbuh 3,38% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,11% (yoy). Peningkatan indeks harga properti terjadi pada semua tipe properti (tipe kecil, menengah, dan besar) (Grafik 1.38). Peningkatan tersebut mengindikasikan pertumbuhan permintaan properti yang mendorong peningkatan harga dan aktivitas konstruksi residensial pada triwulan laporan.

20. Realisasi investasi proyek Perpres No.80 Tahun 2019 pada tahun 2022 sebesar Rp39,87 triliun atau 13,56% dari total nilai proyek (Rp294 triliun).

21. Berdasarkan FGD dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada Desember 2022.

Grifik 1.35 Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi



Sumber: SKDU Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (diolah)

Grifik 1.37 Investasi Penanaman Modal Sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran



Sumber: BKPM (diolah)

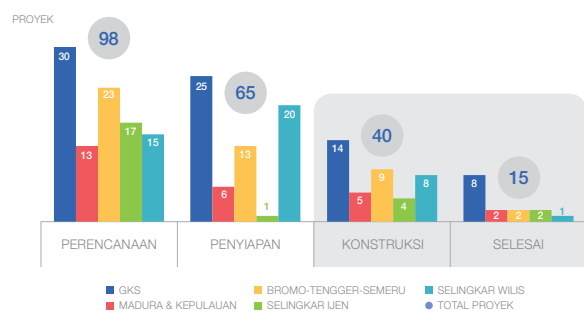
Kinerja LU Konstruksi Tahun 2022

Kinerja LU Konstruksi mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 ditopang oleh berlanjutnya proyek-proyek strategis, baik Pemerintah maupun swasta. LU Konstruksi pada tahun 2022 tumbuh 6,30% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tercatat tumbuh 2,53% (yoy). Relaksasi kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi sejalan dengan lebih terkendalinya kasus Covid-19 turut meningkatkan waktu operasional konstruksi proyek-proyek strategis pemerintah dan swasta. Hal tersebut mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek strategis Pemerintah dan swasta sepanjang tahun 2022. Akselerasi kinerja LU Konstruksi terutama didukung oleh berlanjutnya pembangunan dan penyelesaian beberapa proyek-proyek berskala besar, terutama PSN dan proyek Perpres No. 80 Tahun 2019. Berlanjutnya konstruksi proyek swasta berskala besar, khususnya pembangunan *smelter* tembaga di Gresik turut menopang akselerasi LU Konstruksi di tahun 2022.

1.3.5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

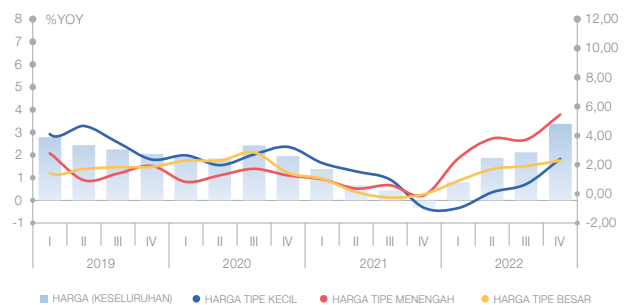
Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jawa Timur pada triwulan IV 2022 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh lebih rendahnya konsumsi makan minum dan jasa akomodasi.

Grifik 1.36 Pembangunan Proyek Perpres 80/2019



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur (diolah)

Grifik 1.38 Pertumbuhan IHPR Properti Residensial



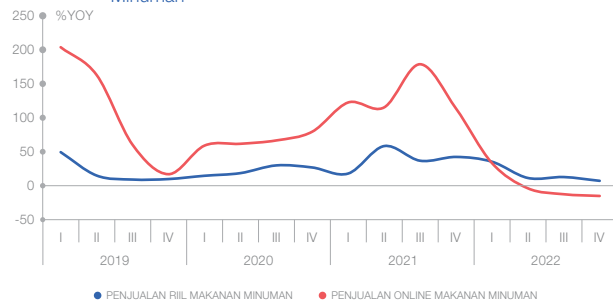
Sumber: SHPR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (diolah)

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Triwulan IV 2022

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan IV 2022 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2022, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 9,68% (yoy), melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 13,14% (yoy) (Tabel 1.2). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh tertahannya daya beli masyarakat akibat dampak kenaikan harga BBM terhadap berbagai komoditas konsumsi. Lebih lanjut, lebih rendahnya kinerja ekspor LN di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 turut berdampak pada penurunan pendapatan sekelompok masyarakat yang bekerja di sektor perdagangan luar negeri. Hal tersebut turut menahan permintaan masyarakat akan jasa akomodasi dan makan minum.

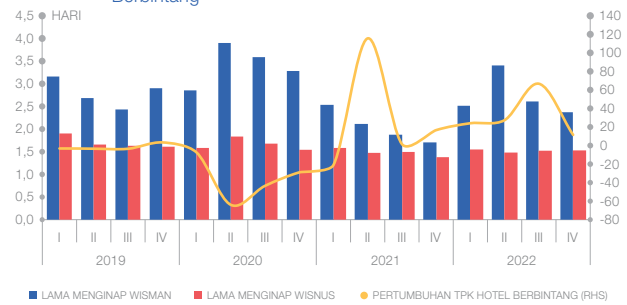
Perlambatan permintaan makan minum berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan laporan. Perlambatan kinerja penjualan makanan minuman di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 terjadi secara riil (*offline*). Berdasarkan SPE Bank Indonesia di Jawa Timur, Indeks Riil Penjualan Eceran (IRPE) kelompok makanan pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 7,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 (12,72%, yoy) (Grifik 1.39).

Grifik 1.39 Mobilitas ke Ritel & Rekreasi dan Penjualan Eceran Makanan Minuman



Sumber: Google Mobility dan SPE Bank Indonesia Jawa Timur (diolah)

Grifik 1.40 Rata – rata Lama Menginap dan Pertumbuhan TPK Hotel Berbintang



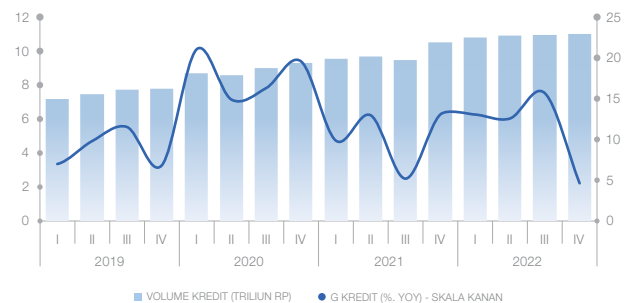
Sumber: BPS (diolah)

Grifik 1.41 Pertumbuhan Jumlah Kedatangan Domestik Penumpang Bandara Juanda



Sumber: BPS (diolah)

Grifik 1.42 Kredit LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum



Sumber: LBU (diolah)

Permintaan akomodasi yang lebih rendah turut berdampak pada perlambatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan laporan. Hal ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan rata-rata lama menginap wisatawan, baik mancanegara (wisman) maupun nusantara (wisnus). TPK hotel di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 11,48% (yoy), melambat signifikan dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 66,68% (yoy). Sementara itu, rata-rata lama menginap wisman di hotel di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tercatat 2,37 atau rata-rata sekitar 2 hari. Kondisi tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 2,61 hari atau 2,5–3 hari (Grifik 1.40).

Perlambatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum turut disebabkan oleh lebih rendahnya pertumbuhan jumlah kedatangan penumpang domestik ke Jawa Timur dan perlambatan pembiayaan kredit di LU Akomodasi dan Makan Minum. Pertumbuhan jumlah kedatangan penumpang domestik ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda melambat signifikan dari tumbuh dari 239,23% (%yoy) pada triwulan III 2022 menjadi sebesar 31,85% (yoy) pada triwulan IV 2022 (Grifik 1.41). Sementara dari sisi pembiayaan, kredit yang disalurkan ke LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh lebih rendah dari 15,68% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 4,63% (yoy) pada triwulan IV 2022 (Grifik 1.42).

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2022

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2022 mengalami perbaikan seiring semakin membaiknya mobilitas masyarakat pada tahun 2022. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 9,34% (yoy), terakselerasi dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 3,06% (yoy). Peningkatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ditopang oleh semakin terkendalinya kasus Covid-19, percepatan vaksinasi Covid-19 dosis 2 dan *booster*, serta program pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Hal tersebut mendorong semakin intensnya kegiatan *Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions* (MICE), pembukaan tempat wisata, restoran, perhotelan, dan pusat perbelanjaan. Peningkatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum turut terkonfirmasi dengan peningkatan indikator utama, yakni kenaikan TPK hotel serta jumlah wisatawan domestik dan internasional di Jawa Timur pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

BOKS 1

Penguatan Jawa Timur sebagai *Lead Export Manufaktur*

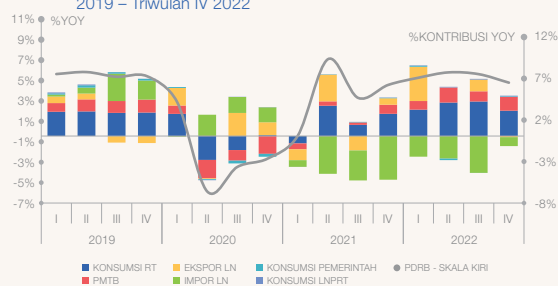
Tiga tahun sejak pandemi Covid-19 terjadi secara global, perekonomian dunia berangsur pulih namun dengan tingkat pemulihan yang divergen (*uneven recovery*). Di tengah semakin terkendalinya kasus Covid-19 secara global pada tahun 2022 yang berpotensi berlanjut pada tahun 2023, berbagai lembaga ekonomi global memprakirakan terjadinya eskalasi ketidakpastian global pada tahun 2023 terutama akibat masih berlanjutnya konflik geopolitik Rusia – Ukraina, Tiongkok - Taiwan, dan Amerika Serikat - Arab Saudi. Lebih lanjut, pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju diperkirakan berimplikasi pada aliran modal keluar dari negara berkembang ke negara maju. *Scarring effect* akibat pandemi Covid-19 dan potensi eskalasi ketidakpastian global pada tahun 2023 berimplikasi pada divergensi estimasi kinerja ekonomi di berbagai kelompok negara. Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2023, kinerja ekonomi negara maju diperkirakan lebih rendah dibandingkan negara berkembang pada tahun 2023²². Kinerja kelompok negara berkembang pun mengalami divergensi pada tahun 2023. Kelompok negara berkembang di kawasan Asia diperkirakan masih tumbuh di atas 5,0% (yoy), namun kelompok negara berkembang di kawasan Amerika Latin diperkirakan hanya tumbuh di kisaran 1,8% (yoy) pada tahun 2023.

Divergensi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi antarkawasan, namun juga antarsektor. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BIS (2020), IMF (2020), dan WTO (2020), berbagai sektor ekonomi mengalami kecepatan pemulihan yang berbeda akibat pandemi Covid-19. LU terkait pariwisata diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang dibandingkan LU Industri Pengolahan. Hal tersebut disebabkan oleh kecepatan penurunan kasus aktif Covid-19 yang berbeda antarnegara, sehingga kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat antarnegara relatif ketat. Di sisi lain, LU Industri Pengolahan diperkirakan pulih lebih cepat sejalan dengan adaptasi pelaku usaha di sektor ini untuk merespons penyesuaian permintaan pada masa pandemi. Lebih lanjut, kebijakan berbagai negara untuk mendorong pemulihan sektor industri dengan protokol kesehatan turut mendorong percepatan pemulihan sektor industri.

22. Kinerja ekonomi negara maju pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 1,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan estimasi pertumbuhan ekonomi 2022 yang sebesar 2,7% (yoy). Kinerja ekonomi negara berkembang pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 4,0% (yoy), stabil dibandingkan estimasi pertumbuhan ekonomi 2022 yang sebesar 3,9% (yoy).

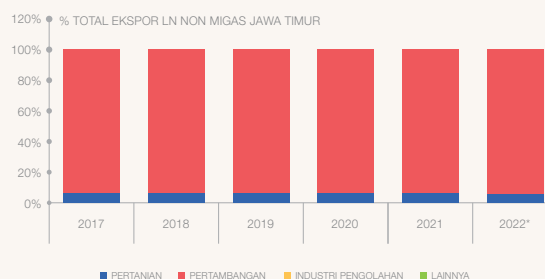
Kinerja ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan mengalami perbaikan sejak pandemi Covid-19 yang turut ditopang oleh tingginya pertumbuhan ekspor LN manufaktur. Pasca melambat signifikan pada tahun 2020, kinerja ekonomi Jawa Timur secara bertahap dan berkelanjutan menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 dan 2022 (Grafik 1). Ekspor LN Jawa Timur yang ditopang oleh produk manufaktur berperan esensial dalam mendukung kinerja ekonomi Jawa Timur tiga tahun terakhir (Grafik 2). Pada tahun 2020, kinerja ekspor LN Jawa Timur tumbuh tinggi sebesar 12,51% (yoy) di tengah kontraksi seluruh kelompok permintaan. Hal tersebut berimplikasi pada tertahannya perlambatan ekonomi Jawa Timur yang lebih dalam pada tahun 2020. Kinerja ekspor LN Jawa Timur yang berdaya tahan berlanjut pada tahun 2021 dan 2022. Untuk keseluruhan tahun 2022, kinerja ekspor LN Jawa Timur tercatat tumbuh 9,23% (yoy). Tingginya kinerja ekspor LN Jawa Timur pada era pandemi Covid-19 menunjukkan kuatnya daya saing ekspor LN Jawa Timur. Mempertimbangan karakteristik ekonomi Jawa Timur serta kuatnya daya saing ekspor LN Jawa Timur bahkan pada periode pandemi Covid-19, upaya mendorong Jawa Timur

Grafik 1. Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur, Sisi Permintaan, 2019 – Triwulan IV 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah (2022)

Grafik 2. Komposisi Ekspor LN Jawa Timur Berdasarkan Sektor



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah (2022)

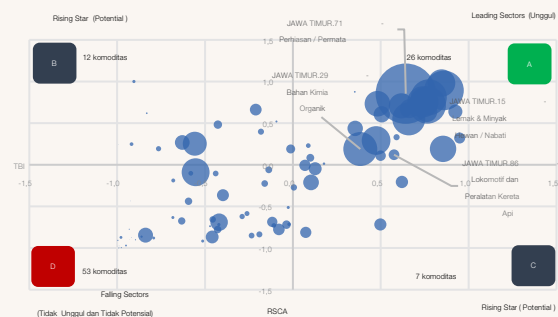
BOKS 1

sebagai *lead export* manufaktur dapat menjadi strategi akselerasi pemulihan ekonomi Jawa Timur dan nasional dalam jangka pendek – menengah.

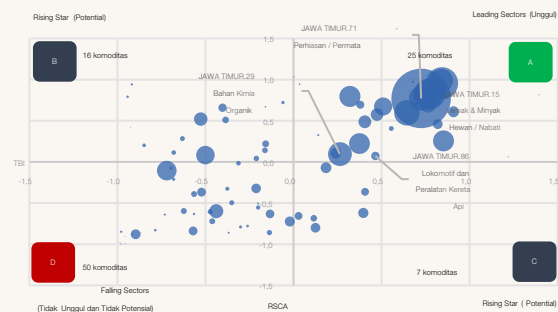
Pendekatan *Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA)* dan *Trade Balance Index (TBI)* mengkonfirmasi kuatnya daya saing ekspor LN Jawa Timur pada periode sebelum pandemi Covid-19 maupun pada periode Covid-19. Pada tahun 2020 dan 2021, dari 98 komoditas ekspor LN, terdapat 23 komoditas yang masuk dalam kelompok komoditas-komoditas ekspor yang potensial dikembangkan dalam jangka menengah-panjang karena memiliki surplus perdagangan atau memiliki pangsa ekspor yang tinggi dalam perdagangan dunia. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dengan 19 komoditas. Jumlah komoditas yang masuk kelompok *Falling Sectors*, yakni komoditas-komoditas yang mengalami defisit perdagangan dan memiliki pangsa ekspor yang rendah di tingkat global mengalami penurunan dari 53 komoditas pada tahun 2019 menjadi 50 komoditas pada tahun 2020 dan 2021. Lebih lanjut, jumlah komoditas yang masuk kelompok *Leading Sectors*, yakni komoditas-komoditas ekspor yang mengalami surplus perdagangan dan memiliki pangsa ekspor yang tinggi di tingkat global, sebesar 25 komoditas pada tahun 2020 dan 2021, tetap kuat dari sebelumnya 26 komoditas pada tahun 2019 (Grafik 3–5)²³.

Kuatnya daya saing ekspor LN Jawa Timur ditopang oleh terdiversifikasinya produk ekspor LN. Dalam periode 2017 – 2022, produk ekspor LN Jawa Timur terpantau terdiversifikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 10 komoditas ekspor LN tertinggi Jawa Timur rata-rata berkontribusi 63,79% terhadap total ekspor LN Jawa Timur. Perhiasan (HS 71), Minyak Nabati dan Hewani (HS 15), dan Kayu dan Bahan dari Kayu (HS 44), Tembaga (HS 74), Kertas

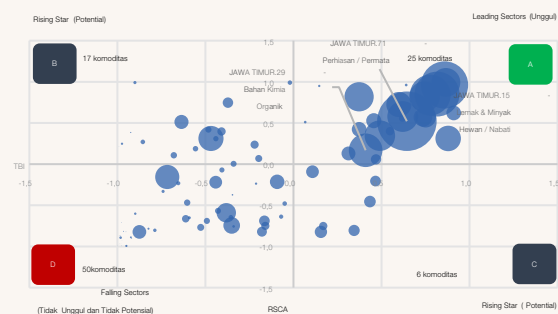
(HS 48), dan Ikan-Ikanan (HS 03) merupakan komoditas ekspor LN utama Jawa Timur (Grafik 6). Lebih lanjut, dengan pendekatan *Product Concentration Index (PCI)*, konsentrasi produk ekspor LN Jatim terpantau cukup terdiversifikasi terindikasi dari nilai PCI yang mendekati 0 (Grafik 7).

Grafik 3. *Product Mapping* Ekspor LN Jawa Timur, HS-2 Digit, 2019

Sumber: Laporan Bea Cukai, 2020 (diolah)

Grafik 4. *Product Mapping* Ekspor LN Jawa Timur, HS-2 Digit, 2020

Sumber: Laporan Bea Cukai, 2020 (diolah)

Grafik 5. *Product Mapping* Ekspor LN Jawa Timur, HS-2 Digit, 2021

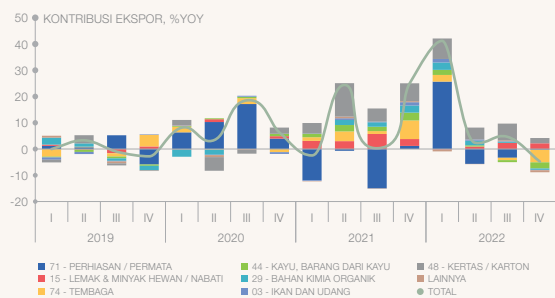
Sumber: Laporan Bea Cukai, 2020 (diolah)

23. Pendekatan product mapping dengan mengadaptasi penelitian yang dilakukan oleh Lafay (1992), Dalum et al (1998), Laursen (1998), dan Widodo (2008), di mana:

- RSCA, merepresentasikan keunggulan komparatif dari negara j untuk kelompok komoditas j dengan rentang nilai antara -1 hingga 1 ($-1 \leq RSCA_j \leq 1$). Nilai indeks RSCA, dengan nilai lebih dari 0 menunjukkan bahwa komoditas negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dibandingkan rata-rata global. Sementara itu nilai indeks RSCA, dengan nilai kurang dari 0 menunjukkan bahwa komoditas negara tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif dibandingkan rata-rata global.
- TBI, merepresentasikan indeks neraca perdagangan dari negara i untuk komoditas j ; x_i dan m_i masing-masing merepresentasikan ekspor dan impor dari negara i untuk komoditas j . Nilai TBI berada di rentang -1 sampai dengan +1 ($-1 \leq TBI_j \leq 1$). TBI, yang bernilai -1 menunjukkan bahwa negara i hanya melakukan impor untuk komoditas j . TBI, yang bernilai +1 menunjukkan bahwa negara i hanya melakukan ekspor untuk komoditas j . Nilai TBI, yang berada pada rentang -1 dan +1 mengimplikasikan bahwa negara j melakukan impor untuk komoditas i . Negara j dikatakan net-exporter untuk komoditas j jika TBI bernilai positif.

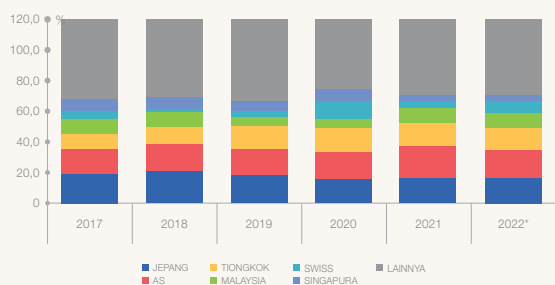
BOKS 1

Grafik 6. Produk Ekspor LN Utama Jawa Timur



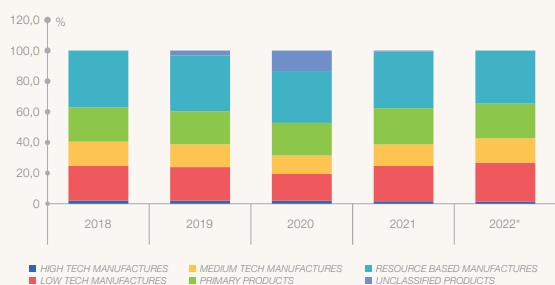
Sumber: Laporan Bea Cukai, 2022 (diolah)

Grafik 8. Negara Tujuan Ekspor LN Jawa Timur



Sumber: Laporan Bea Cukai, 2022 (diolah)

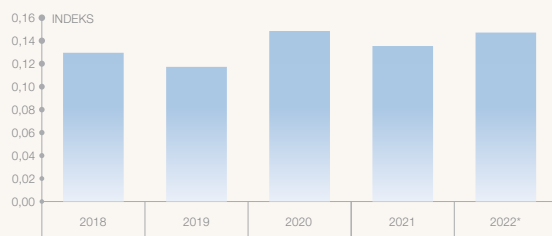
Grafik 10. Klasifikasi Lall Produk Ekspor LN Jawa Timur, 2018 -2022



Sumber: Laporan Bea Cukai, 2022 (diolah)

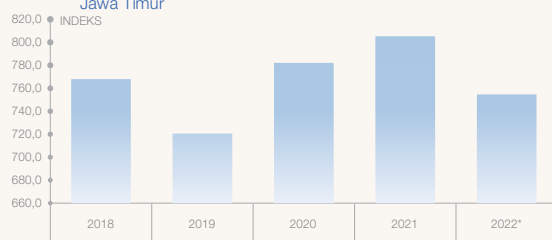
Kuatnya daya saing ekspor LN Jawa Timur turut ditopang oleh terdiversifikasinya negara tujuan ekspor LN. Dalam periode 2017 – 2022, negara tujuan ekspor LN Jawa Timur terpantau terdiversifikasi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Jepang (15,0%), Amerika Serikat (AS) (14,6%), dan Tiongkok (11,6%) menjadi tiga negara tujuan ekspor LN terbesar Jawa Timur (Grafik 8). Meskipun demikian, dengan pendekatan *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI), negara tujuan ekspor LN Jawa Timur masih terpantau cukup terdiversifikasi (HHI <1500) (Grafik 9).

Grafik 7. *Product Concentration Index* (PCI) Ekspor LN Jawa Timur



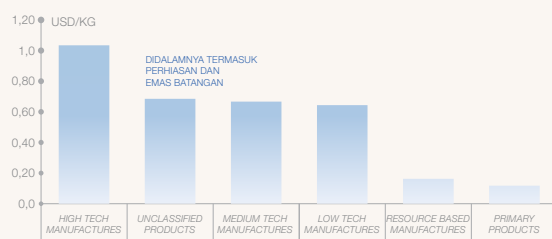
Sumber: Laporan Bea Cukai, 2022 (diolah)

Grafik 9. *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) Negara Tujuan Ekspor LN Jawa Timur



Sumber: Laporan Bea Cukai, 2022 (diolah)

Grafik 11. *Value Added* Ekspor LN Jawa Timur, 2022



Sumber: Laporan Bea Cukai, 2022 (diolah)

Meskipun demikian, ekspor LN Jawa Timur masih didominasi oleh komoditas ekspor dengan nilai tambah yang rendah. Ekspor LN Jawa Timur masih didominasi oleh produk *resource based manufactures* dengan nilai tambah yang terbatas. Berdasarkan klasifikasi Lall (2010), lebih dari 30% komoditas ekspor Jawa Timur hingga tahun 2022 masuk dalam kategori *resource based manufactures* dengan harga produk yang relatif rendah. Harga komoditas yang masuk dalam *resource based manufactures* hanya sedikit lebih tinggi dari harga *primary products* karena pengolahan

BOKS 1

yang masih terbatas. Lebih lanjut, pangsa ekspor LN Jawa Timur untuk kategori *low-tech* dan *medium-tech* berada di atas 10%, namun kontribusi ekspor *high-tech* dengan *value added* yang tinggi masih terbatas.

Faktor perizinan, bahan baku, serta biaya operasional menjadi tantangan pengembangan ekspor LN manufaktur di Jawa Timur saat ini. Berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan dengan pelaku usaha, terdapat tiga tantangan utama pengembangan ekspor LN manufaktur di Jawa Timur saat ini, yaitu: (1) prosedur perizinan yang lebih panjang dibandingkan negara peers di ASEAN (Vietnam dan Thailand); (2) masih tingginya kebutuhan bahan baku impor untuk mendukung produksi manufaktur di Jawa Timur (rata-rata 10%-20% dari kebutuhan produksi); serta (3) relatif lebih tingginya biaya sewa lahan dan tenaga kerja dibandingkan negara *peers* di ASEAN (Vietnam dan Thailand).

Mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, upaya penguatan Jawa Timur sebagai *lead export* manufaktur perlu didukung oleh sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan berbagai *stakeholders* terkait, terutama dalam upaya:

1. Penyederhanaan prosedur perizinan terutama regulasi terkait investasi,
2. Pertimbangan untuk pemberian insentif guna mengkompensasi tingginya harga sewa lahan dan Upah Minimum Provinsi.
3. Penguatan subsidi impor untuk bahan baku yang dapat dihasilkan di Jawa Timur maupun provinsi lain di Indonesia.
4. Peningkatan anggaran *research and development* secara bertahap untuk pengembangan industri dan edukasi pendukung industri. Hal tersebut dalam jangka panjang dapat menunjang peningkatan ekspor *high-tech*.

BOKS 2

Optimalisasi Potensi Kawasan Industri di Jawa Timur

Jawa Timur memerlukan pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi di tengah berbagai tantangan global yang mengemuka. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi memerlukan *prime mover*, baik dari sisi kontribusi bagi perekonomian, penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah LU Industri Pengolahan. Setidaknya dalam empat tahun terakhir, Industri Pengolahan secara konsisten menyumbang sekitar 30% pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dalam periode yang sama, serapan tenaga kerja di LU ini secara rata-rata mencapai kisaran 15% atau terbesar ketiga setelah Pertanian dan Perdagangan. Esensialnya peran industri ini turut tercermin dari besarnya peran Industri Pengolahan terhadap kinerja ekspor dan investasi. Industri Pengolahan Jawa Timur berkontribusi besar terhadap ekspor luar negeri (LN). Di tengah pandemi Covid-19, Industri Pengolahan Jawa Timur terpantau memiliki resiliensi yang tinggi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekspor LN yang meningkat 5,37% (yoy) atau sebesar 23,92 miliar dolar AS. Industri Pengolahan turut berkontribusi besar terhadap investasi Jawa Timur. Dalam lima tahun terakhir, Industri Pengolahan secara konsisten menjadi tiga besar penyumbang investasi terbesar di samping LU Pertambangan dan Transportasi. Pada tahun 2022, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di LU Industri Pengolahan di Jawa Timur mencapai 45% dari total investasi, menduduki peringkat pertama (BKPM, 2023). Sementara, nilai Penanaman Modal Asing (PMA) LU Industri Pengolahan pada periode yang sama tercatat mencapai 49% dari total PMA atau tertinggi dari seluruh LU.

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri, berbagai negara mulai membangun dan mengatur kawasan industri (KI). *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) mendefinisikan KI sebagai sebidang lahan yang dikembangkan sesuai perencanaan dan dilengkapi dengan infrastruktur jalan, transportasi, dan utilitas umum lainnya sehingga mendorong tumbuhnya industri manufaktur. Sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja industri, pemerintah melalui PP No 142 tahun 2015 menetapkan pelaku industri yang akan menjalankan aktivitas industri setelah regulasi tersebut wajib berlokasi di KI. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah KI di Indonesia terus meningkat menjadi sebanyak 135 KI pada 2022, di mana 10 di antaranya berada di Jawa Timur.

Kawasan Industri di Jawa Timur

Apabila dilihat dari jumlah KI di berbagai provinsi di Indonesia, Jawa Timur menempati peringkat ke-4 (empat) dengan 10 KI dan luas area lahan sebesar 5.795 Ha. Saat ini tengah dikembangkan 3 (tiga) KI baru²⁴, yang diharapkan mampu mendongkrak potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Potensi pengembangan KI tersebut juga didorong oleh keberadaan pelabuhan dan jaringan jalan raya dan tol, utamanya di daerah pesisir utara Jawa Timur antara lain Tuban, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan di mana lahan baru untuk KI masih tersedia. Terdapat pengembangan KI di Jawa Timur masuk dalam kategori prioritas dan ditargetkan selesai pada tahun 2023, antara lain Pengembangan KI Sidoarjo Timur (SiRIE dan *Safe n Lock*), KI Tuban, dan KI JIIPE Gresik (Tabel 1).

Tabel 12. Kawasan Industri di Jawa Timur

Nama Kawasan Industri	LOKASI	LUAS AREA	JUMLAH TENANT	OKUPANSI
Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	Surabaya	245	359	99%
Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER)	Pasuruan	563	137	53%
Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB)	Sidoarjo	87	359	100%
Kawasan Industri Gresik (KIG)	Gresik	140	41	100%
Kawasan Industri Tuban (KIT)	Tuban	233	6	40%
Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE)	Gresik	2961	18	30%
Ngoro Industrial Park (NIP)	Mojokerto	650	91	90%
Maspion Industrial Estate (MIE)	Gresik	341.5	39	67%
Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE)	Sidoarjo	300	125	5%
Pergudangan & Industri Safe N Lock (PISL)	Sidoarjo	307*	500	10%

Sumber: KPw BI Provinsi Jawa Timur, diolah (2023)

24. Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo

- Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Willis dan Lintas Selatan Nganjuk dengan luas 2.091 Ha, Madiun dengan luas lahan sebesar 64,83 Ha, dan Ngawi dengan total luas 1.460 Ha

BOKS 2

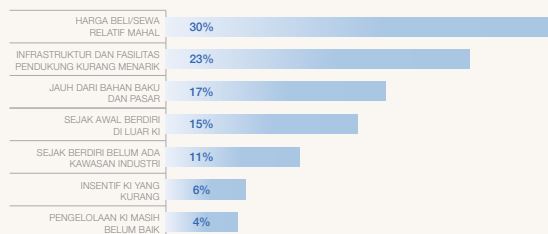
Dari 10 KI di Jawa Timur, 4 di antaranya masih memiliki okupansi kurang dari 60%. Apabila dilihat lebih detail, okupansi KIT saat ini baru mencapai 40%, sementara JIPE 30%, PIER 53% dan SiRIE 5%. Rendahnya okupansi beberapa KI ini menjadi peluang untuk mendorong industrialisasi di Jawa Timur. KIT menawarkan Layanan KILK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) yang diberikan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), sementara KI SiRIE memiliki lokasi yang strategis, berada di kawasan lingkaran timur dan dekat dengan kawasan penyangga Surabaya. Lebih lanjut, JIPE berfokus pada industri yang padat modal, *hi-tech*, dan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT), yang menyasar industri berskala besar, sementara PIER dan SiRIE memiliki berbagai fasilitas umum serta instalasi pengolahan air limbah sebagai solusi dalam mengatasi masalah pengolahan limbah.

Survei Kawasan Industri

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia Jawa Timur (2021), mayoritas pelaku usaha tidak beroperasi di KI karena **harga beli/sewa lahan yang relatif mahal serta infrastruktur dan fasilitas yang kurang menarik (Grafik 2)**. Sementara itu, 3 faktor utama yang paling memengaruhi pemilihan KI bagi pelaku usaha adalah **infrastruktur dan layanan, ketersediaan SDM, serta konektivitas terhadap bahan baku dan pasar (Grafik 3)**. Dalam pemilihan lokasi KI, faktor utama yang dibutuhkan oleh korporasi di KI adalah **kesediaan infrastruktur fisik yang memadai** antara lain suplai listrik, air, jaringan telekomunikasi. Peningkatan infrastruktur fisik yang lebih *advance* diharapkan dapat meningkatkan daya saing KI dan menarik pelaku usaha untuk beroperasi di dalam KI.

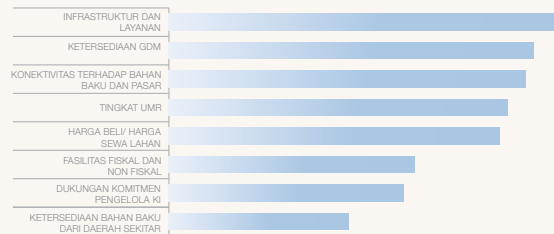
Faktor kedua yang dinilai penting dalam pemilihan KI adalah ketersediaan SDM. KI diharapkan dapat memberikan

Grafik 13. Hasil Survei Penyebab Pelaku Usaha Tidak Beroperasional di Kawasan Industri



Sumber: Survei KPw BI Provinsi Jawa Timur, dilah (2021)

Grafik 3. Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kawasan Industri



Sumber: Survei KPw BI Provinsi Jawa Timur, dilah (2021)

dukungan terhadap **ketersediaan SDM** yang sesuai dengan kebutuhan industri. Faktor ketiga yang dinilai penting dalam pemilihan kawasan industri adalah **konektivitas** yang mencakup akses transportasi seperti tol, pelabuhan, bandara, dan stasiun. Semakin baik jangkauan konektivitas pada KI, dapat menarik minat pelaku usaha untuk melakukan operasional di KI karena dapat memberikan dampak yang positif terhadap kemudahan akses ke bahan baku, pasar domestik, maupun ekspor.

Fasilitas dan Insentif Kawasan Industri di Indonesia

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan industri yang **berdaya saing, diperlukan dukungan penyediaan sarana dan prasarana industri yang memadai terutama di KI**. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat bersifat fisik seperti infrastruktur dasar maupun non fisik seperti standarisasi, sistem informasi industri nasional, dan kebijakan nonfiskal. Untuk fasilitas fisik KI seperti pola penggunaan lahan diatur dalam Permendagri No 40/M-IND/PER/7/2016²⁵, sementara fasilitas non fisik diharapkan dapat memberi kemudahan dan sebagai insentif untuk lebih menarik investor berusaha di KI. Insentif investasi seperti fasilitas fiskal dan non-fiskal banyak digunakan sebagai alat kebijakan publik untuk mengejar tujuan pembangunan ekonomi nasional dan regional melalui kawasan industri. Beberapa insentif fiskal yang diberikan Indonesia adalah fasilitas pajak penghasilan, pembebasan PPN atas nilai

25. 4 Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Industri: (1) Kaveling Industri maksimal 70%, (2) Jalan dan saluran maksimal 8-10%, Ruang terbuka hijau minimal 10%, Infrastruktur dasar lainnya, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang 8-10%. Sementara komponen Infrastruktur dan Fasilitas Kawasan Industri antara lain Internal Roads, Sumber daya listrik, Suplai air, Konektivitas TI, telekomunikasi, dan layanan residen yang mendukung informasi dan komunikasi, Waste Management, dan Fasilitas Pendukung Lainnya di dalam Kawasan Industri.

BOKS 2

impor, dan pembebasan bea masuk. Lebih lanjut, insentif non-fiskal yang ditawarkan antara lain kemudahan perizinan, pengecualian penyusunan AMDAL, serta kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik.

Fasilitas dan Insentif Kawasan Industri di Vietnam

Berdasarkan UNIDO Vietnam Industrial Investment Report (2011)²⁶, KI Vietnam didominasi oleh PMA di mana mayoritas adalah industri yang bersifat padat karya, *low-tech*, dan berorientasi pada ekspor. Daya tarik utama Vietnam bagi investor asing adalah biaya tenaga kerja yang rendah dengan

kualitas tinggi, sehingga menawarkan keunggulan efisiensi biaya bagi industri padat karya. Shira (2016)²⁷ mencatat bahwa upah minimum bulanan di Vietnam sebesar (US\$192) atau lebih rendah dari Indonesia yakni Keadaan ini mendorong tingginya tingkat okupansi rata-rata KI di Vietnam yang sebesar 73%. Dari segi perkembangan SDM, Vietnam fokus meningkatkan program pendidikan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja. Salah satunya adalah program vokasi dengan jangka waktu 10 tahun mampu melatih 108.000 ahli pekerja dan teknisi produksi di tahun 2008.

Tabel 2. Perbandingan Kawasan Industri di Indonesia dan Vietnam

	 INDONESIA	EODB RANK 73 ICOR 6,6	 VIETNAM	EODB RANK 70 ICOR 4,6
LAHAN	- Tidak semua lahan dikuasai pemerintah sehingga dibutuhkan biaya pembebasan lahan. - Investor asing dapat membeli lahan dengan status HGB dalam jangka waktu selama 30 tahun, dapat diperpanjang 2 kali selama 20 tahun dan 30 tahun (total 80 tahun).		- Semua lahan dikuasai negara. Lahan tersebut hanya bisa dialokasikan atau disewakan. - Investor asing hanya dapat menyewa lahan kepada negara melalui Hak Pakai dalam jangka waktu tertentu, biasanya sesuai durasi proyek (maks 50 tahun, atau 70 tahun untuk proyek besar tertentu yang durasi proyeknya lebih panjang).	
INSENTIF PAJAK	- Masa pembebasan pajak berlaku hingga 5-20 tahun, tergantung dengan nilai investasinya. - Untuk pemotongan pajak setelah masa pembebasan pajak habis sebesar 50% dari PPh Badan selama 2 tahun.		- Tax holiday selama 2-4 tahun, tergantung lokasi usaha, jenis industri dan nilai investasi. - Untuk pemotongan pajak setelah masa pembebasan pajak habis sebesar 10-50% dari PPh Badan selama 5-15 tahun atau selamanya.	
PROSEDUR PERIZINAN			- Terdapat 4.000 regulasi terkait investasi. - Investor hanya perlu memperoleh 2 izin untuk investasi, yaitu Investment Registration Certificate (IRC) dan Enterprise Registration Certificate (ERC). - Proses perizinan didesentralisasikan (level provinsi, namun seluruh format sama) - Lama perizinan investasi: 3 hari, sertifikat: 7 hari	
ENERGI			- Harga listrik industri: US\$0,04/ kwh - Harga air di Kawasan Industri: US\$ 0,53/m2 - Harga gas industri : US\$7-10/ MMBTU	
HARGA SEWA LAHAN/M2	US\$ 164,9/ m2, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (JIPE).		- Northern Vietnam: US\$54/ m2 – US\$122,5, rata – rata US\$78/ m2 - Central Vietnam: US\$22,5 – US\$55,5, rata – rata US\$33,4/ m2 - Southern Vietnam: US\$33- US\$150, rata – rata US\$74,2/ m2	
AKSESIBILITAS	JIPE - Manyar Tol Gate : 3,5 km - Stasiun KA Duduk Sampeyan: 11 km - Pelabuhan Tanjung Perak: 27 km - Bandara Juanda : 55 km		Northern Vietnam (Thang Long) - Hong River Port: 300 m - Noi Bai airport : 30 km - Phu Dien Station : 350 m	Northern Vietnam (Nomura-Haiphong) - Hani Phon Port: 13 km - Nearest station: 2 km
UPAH TENAGA KERJA	USD 279/ bulan (Rata Rata Kawasan Industri Jawa Timur)		USD 182/ bulan.	
PENDIDIKAN TENAGA KERJA	- SD : 44,88% dari total orang yang bekerja (Jawa Timur, 2019) - SMP : 18,33% dari total orang yang bekerja (Jawa Timur, 2019) - SMA : 14,81% dari total orang yang bekerja (Jawa Timur, 2019) - SMK : 11,44% dari total orang yang bekerja (Jawa Timur, 2019) - Diploma : 1,81% dari total orang yang bekerja (Jawa Timur, 2019) - Universitas : 8,71% dari total orang yang bekerja (Jawa Timur, 2019)		- No professional qualification : 78,29% dari total orang yang bekerja (2018) - Vocational Training : 5,38% dari total orang yang bekerja (2018) - Professional secondary : 4,08% dari total orang yang bekerja (2018) - College education : 2,78% dari total orang yang bekerja (2018) - University : 9,46% dari total orang yang bekerja (2018)	

Sumber: World Bank, BPS, BKPM, Vietnam Investment Review, FGD dengan instansi terkait, diolah (2021)

26. UNIDO dan MPI. (2011). Viet Nam Industrial Investment Report. Diambil kembali dari https://www.unido.org/sites/default/files/2012-08/VIIR%20print_0.pdf

27. Shira, D. (2016). The Guide to Understanding Vietnam's Industrial Zones. Diambil kembali dari TNI Holding Vietnam: <https://tniholdings.vn/guide-to-invest-industrial-park/>

BOKS 2

Pemerintah Vietnam memberikan insentif untuk mendorong investasi domestik dan asing, yang ditentukan berdasarkan bidang usaha dan lokasi. Sektor yang didorong di Vietnam adalah pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya, teknologi tinggi, perlindungan lingkungan, penelitian ilmiah, pengembangan infrastruktur, dan manufaktur perangkat lunak. Insentif investasi yang diberikan juga berdasarkan lokasi yang meliputi kawasan tertinggal atau sangat tertinggal, KI, kawasan pemrosesan ekspor, kawasan *hi-tech*, dan kawasan ekonomi (Tabel 2).

Urgensi Optimalisasi Okupansi Kawasan Industri

Tingkat okupansi yang maksimal akan meningkatkan aktivitas industri sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi. Tingkat okupansi KI yang tinggi dapat mempermudah pengawasan oleh pemerintah dan juga meningkatkan penerimaan. Kawasan industri dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap industri, sehingga pengawasan antara lain terhadap kepatuhan terhadap ketentuan, pengolahan limbah industri akan lebih efisien dan efektif. Selain itu, peningkatan aktivitas industri juga akan meningkatkan penerimaan pemerintah, antara lain melalui pajak dan retribusi. Sementara bagi pengelola KI juga akan meningkatkan pendapatan bagi pengelola kawasan industri melalui biaya pengelolaan fasilitas dan layanan yang dikenakan kepada *tenant*.

Bagi industri, tingkat okupansi yang optimal juga akan memberikan keuntungan. Dengan beroperasi di KI, *tenant* perlu membayar biaya pengelolaan kepada pengelola KI namun di sisi lain dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan saat menggunakan layanan dan fasilitas umum. Pengelola KI akan menyediakan kerangka kelembagaan, layanan dan infrastruktur fisik yang mungkin tidak tersedia di luar KI. Ketersediaan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung oleh pengelola KI dapat mengurangi nilai investasi awal yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan *tenant*. Sehingga *tenant* dapat fokus pada bisnis dan fokus pada pertumbuhannya.

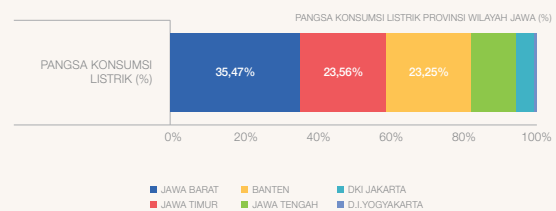
Tingkat okupansi yang maksimal juga dapat mendorong pembeli, produsen, dan pemasok beroperasi di lokasi yang sama, sehingga dapat mengurangi biaya transaksi ekonomi. Semakin banyak perusahaan yang berlokasi di KI, dapat mendorong penggunaan jasa perusahaan lokal yang tidak

hanya menciptakan ekosistem *forward* dan *backward linkage*, melainkan juga meningkatkan pembelajaran ekonomi kepada komunitas bisnis yang lebih luas. Oleh karena itu, KI yang berhasil dapat menjadi pusat pertumbuhan, menciptakan kawasan dengan pertumbuhan tinggi, dan mengarah pada pembangunan ekonomi nasional.

Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan

Semakin tinggi aktivitas industri, maka kebutuhan energi untuk proses produksi mengalami peningkatan dan emisi limbah meningkat, sehingga urgensi menciptakan KI berwawasan lingkungan menjadi esensial untuk dilakukan. Tingginya aktivitas industri di Jawa Timur berpotensi meningkatkan sumbangan emisi karbon dan peningkatan limbah, serta membutuhkan konsumsi energi yang tinggi. Di wilayah Jawa, Jawa Timur menyumbang intensitas emisi karbon paling tinggi, sementara kebutuhan konsumsi listrik berada di peringkat kedua setelah Jawa Barat (Grafik 4).

Grafik 4. Kontribusi Jawa Timur terhadap Konsumsi Listrik di Wilayah Jawa



Sumber: PLN, 2022 (diolah)

Telah dilakukan penilaian kinerja lingkungan untuk KI di Jawa Timur dengan melihat 5 aspek (UNIDO, 2019), yaitu (1) manajemen dan monitoring, (2) efisiensi energi, (3) pengelolaan air, (4) perubahan iklim dan kelestarian alam, serta (5) penggunaan kembali limbah dan produk sampingan. Hasilnya, pengembangan KI berwawasan lingkungan di Jawa Timur masih belum optimal dan memiliki potensi besar untuk ditingkatkan, khususnya dalam aspek lingkungan (efisiensi energi dan penggunaan kembali limbah dan produk sampingan).

Diperlukan sinergi kebijakan yang intens antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan berbagai *stakeholders* untuk mengisi ruang optimalisasi KI di Jawa Timur antara lain 1) regulasi dan biaya produksi yang lebih

BOKS 2

efisien serta insentif non-fiskal dan fiskal yang lebih kompetitif; 2) membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir yang memudahkan akses ke bahan baku, pasar domestik, maupun ekspor; 3) pertimbangan untuk pemberian insentif guna mengkompensasi tingginya harga sewa lahan dan upah minimum bulanan; 4) fasilitasi AMDAL oleh pengelola KI dapat mendorong terwujudnya KI ramah lingkungan.





Bab II

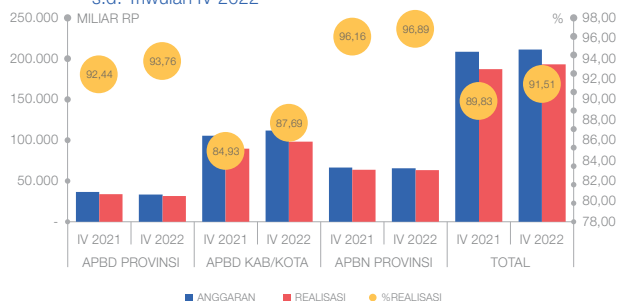
Keuangan Pemerintah



2.1. GAMBARAN UMUM

Anggaran Belanja Pemerintah secara agregat di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai Rp210,942 triliun, dengan realisasi sampai dengan triwulan IV 2022 sebesar 91,51% terhadap pagu anggaran atau sebesar Rp193,04 triliun. Pagu Anggaran Belanja tersebut meningkat 1,28% (yoy), demikian pula dengan nilai realisasi belanja yang meningkat 3,18% (yoy) dibandingkan anggaran pasca perubahan tahun 2021. Dari nominal tersebut, 53,02% atau Rp111,85 triliun merupakan APBD Kabupaten/Kota, 31,05% atau Rp65,50 triliun merupakan belanja APBN di Provinsi Jawa Timur, dan sebesar 15,93% atau Rp33,60 triliun merupakan APBD Provinsi Jawa Timur. Sampai dengan triwulan IV 2022, total realisasi belanja daerah mencapai 91,51% dari pagu anggaran atau lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2021 (89,83%). Realisasi anggaran terbesar terjadi pada belanja APBN di Provinsi Jawa Timur yang terealisasi hingga 96,89%, disusul oleh realisasi belanja APBD Provinsi yang sebesar 93,76% dari pagu anggaran, dan realisasi pada APBD Kabupaten/Kota yang tercatat sebesar 87,69% (Grafik 2.1). Dibanding tahun sebelumnya, realisasi belanja APBN tersebut menurun 0,49% (yoy), demikian pula dengan realisasi belanja APBD pemerintah kabupaten/kota yang juga mengalami peningkatan sebesar 9,63% (yoy) dibanding tahun 2021. Namun demikian, realisasi belanja pemerintah provinsi justru mengalami penurunan 6,94% (yoy), lebih disebabkan oleh pagu belanja yang juga mengalami penurunan 8,25% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pagu dan realisasi belanja pemerintah provinsi tersebut antara lain diakibatkan peralihan kewenangan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik jenis regular maupun kinerja untuk sekolah swasta dari Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

Grafik 2.1 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2022



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur, Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur (diolah)

2.2. APBD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

APBD Jawa Timur terdiri dari Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp29,56 triliun serta Anggaran Belanja Daerah yang mencapai Rp33,60 triliun. Dibandingkan pagu anggaran tahun 2021, pagu pendapatan APBD Jawa Timur pada tahun 2022 turun sebesar 10,33% (yoy) dan pagu belanja pemerintah Provinsi Jawa

Timur juga turun sebesar 8,25% (Tabel 2.1 dan Tabel 2.2). Adapun realisasi pendapatan meningkat cukup tinggi hingga 107,91% terhadap pagu pendapatan, namun dibandingkan nominal pendapatan tahun sebelumnya mengalami kontraksi 6,93% (yoy). Demikian pula dengan anggaran belanja pemerintah provinsi yang mengalami perbaikan realisasi (93,76% dari pagu), namun secara nominal turun 6,94% (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

2.2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur

2.2.1.1. Anggaran Pendapatan Daerah

Pada tahun 2022, pagu Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun 2021 terutama disebabkan oleh adanya penurunan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat. Anggaran Pendapatan Transfer terkontraksi 27,15% (yoy) atau setara Rp4,25 triliun sejalan dengan penurunan Pendapatan Transfer dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah swasta, dari yang sebelumnya dianggarkan di Pemerintah Provinsi menjadi dianggarkan di Kabupaten/Kota. Lain-Lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan Hibah juga dianggarkan lebih rendah atau terkontraksi sebesar 78,10% (yoy), sejalan dengan Program Hibah Jalan Daerah³⁷ (PHJD) yang tidak lagi dianggarkan oleh kementerian keuangan di tahun 2022. Untuk menahan penurunan belanja pemerintah, maka pemerintah Provinsi Jatim menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan lebih tinggi sebesar 5,83% (yoy) sejalan dengan ekspektasi berlanjutnya perbaikan kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 (Tabel 2.1).

Meningkatnya target PAD pada APBD Provinsi Jawa Timur menyebabkan peningkatan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)³⁸ APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. DOF tahun 2022 diperkirakan mencapai 61,30% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 51,94% (Grafik 2.2). Komponen PAD ditopang oleh Pajak Daerah sebesar 83,02% dari PAD, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 13,97%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,44%, dan Retribusi Daerah sebesar 0,57%.

Tingginya komponen Pajak Daerah didukung oleh komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 45,13% dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 21,57%. Selain itu, salah satu komponen pendorong terbesar PAD Jawa Timur tahun 2022 adalah kenaikan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 9,19% (yoy), yang ditopang oleh penerimaan atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD, khususnya lembaga keuangan.

36. Anggaran tahun 2021 adalah anggaran pasca perubahan posisi akhir tahun 2021, dan anggaran tahun 2022 adalah anggaran posisi awal tahun 2022.

37. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang diberikan oleh Kementerian Keuangan di tahun 2020-2021 adalah salah satu anggaran pendukung realisasi kawasan strategis nasional yang ada di Jatim, salah satunya adalah Kawasan Bromo Tengger Semeru.

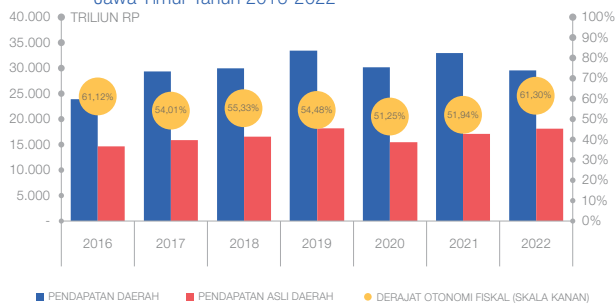
38. DOF : Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan.

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2021 dan 2022

URAIAN	Pagu APBD Prov. Jawa Timur		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi IV 2022 (%YOY)
	2021	2022		Realisasi IV 2021		Realisasi IV 2022		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Pendapatan Daerah	32.969,57	29.564,65	(10,33)	34.280,71	103,98	31.904,60	107,91	(6,93)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.124,37	18.122,85	5,83	18.935,88	110,58	21.256,55	117,29	12,26
Pajak Daerah	14.227,43	15.046,05	5,75	15.400,86	108,25	17.573,32	116,80	14,11
Retribusi Daerah	110,30	103,56	(6,11)	110,95	100,59	119,97	115,85	8,13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	404,50	441,68	9,19	408,64	101,02	441,93	100,06	8,15
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.382,13	2.531,55	6,27	3.015,43	126,59	3.121,32	123,30	3,51
Pendapatan Transfer	15.644,97	11.397,95	(27,15)	15.194,25	97,12	10.563,74	92,68	(30,48)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	15.644,97	11.397,95	(27,15)	15.186,75	97,07	10.563,74	92,68	(30,44)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	7,50	-	-	-	(100,00)
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	200,24	43,85	(78,10)	150,57	75,20	84,31	192,29	(44,01)
Pendapatan Hibah	200,24	43,85	(78,10)	148,23	74,03	68,14	155,41	(54,03)
Dana Darurat	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	0	-	2,34	-	16,17	-	590,31

Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.2 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2022



Sumber : BPKAD Jawa Timur, diolah

2.2.1.2. Realisasi Pendapatan Daerah

Dibanding pagu anggaran, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan IV tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 107,91% dari pagu anggaran atau sebesar Rp31,90 triliun. Realisasi pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan IV 2021 yang terealisasi sebesar 103,98% dari pagu anggaran (Grafik 2.4). Peningkatan realisasi pendapatan pada triwulan IV 2022 ditopang oleh pencapaian PAD yang terealisasi sebesar 117,29% dari pagu anggaran, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang terealisasi hingga 192,29%. Peningkatan PAD terutama ditopang oleh komponen Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp17,57 triliun (116,80%) pada triwulan IV 2022, meningkat signifikan dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2021 yang sebesar Rp15,40 triliun (108,25%). Tingginya realisasi komponen Pajak Daerah dari PAD terutama didukung oleh realisasi pada komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp7,62 triliun³⁹ dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp3,98 triliun⁴⁰. Peningkatan realisasi tersebut sejalan dengan

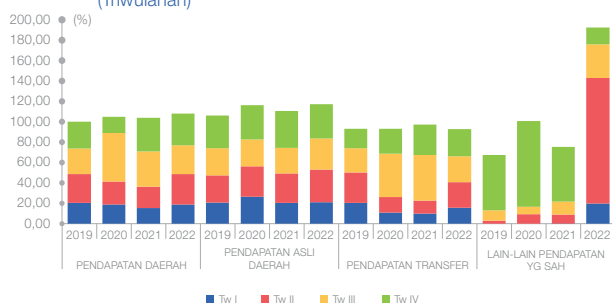
optimalisasi penerapan kebijakan insentif pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlaku mulai 1 April 2022 hingga 15 Desember 2022. Adanya program diskon PPN dan PPNBM untuk pembelian kendaraan juga mampu meningkatkan permintaan kendaraan bermotor di daerah. Lebih lanjut, program pemutihan pajak kendaraan Jawa Timur 2022 memberikan pembebasan PKB 100% untuk dua jenis kendaraan yaitu mikrolet dan ojek *online*. Peningkatan realisasi PAD juga didukung peningkatan realisasi Retribusi Daerah sebesar 115,85% pada triwulan IV 2022, meningkat dari 100,59% pada triwulan IV 2021, terutama pada Retribusi Jasa Usaha yang terealisasi sebesar 106,55% dengan nominal mencapai Rp46,65 miliar. Lebih lanjut, Lain-Lain Pendapatan yang Sah juga meningkat sebesar 192,29% pada triwulan IV 2022 dari 75,20% pada triwulan IV 2021. Kenaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan Pendapatan Hibah sebesar 155,41% pada triwulan IV 2022 dari 74,03% pada triwulan IV 2021.

Secara nominal, realisasi pendapatan mengalami penurunan sebesar 6,93% (yoy) dari Rp34,28 triliun menjadi Rp31,90 triliun pada triwulan IV 2022 (Tabel 2.1). Penurunan ini sejalan dengan penurunan nominal realisasi Pendapatan Transfer sebesar 30,48% (yoy) dari Rp15,19 triliun menjadi Rp10,56 triliun sampai dengan triwulan IV 2022. Penurunan yang lebih dalam dapat ditahan oleh peningkatan semua komponen penyusun PAD hingga Rp2,32 triliun dibanding realisasi PAD tahun 2021.

39. Pangsa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 43,37% terhadap Pajak Daerah

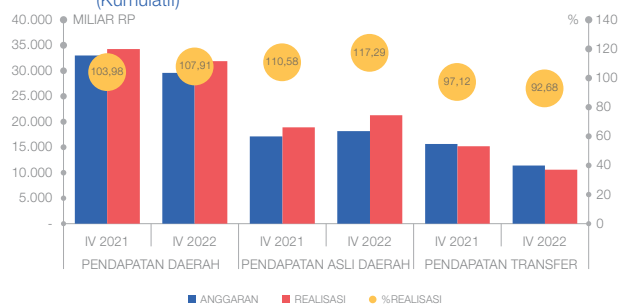
40. Pangsa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 22,62% terhadap Pajak Daerah

Grafik 2.3 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Triwulanan)



Sumber : BPKAD Jawa Timur, diolah

Grafik 2.4 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Kumulatif)



Sumber : BPKAD Jawa Timur, diolah

2.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur

2.2.2.1. Anggaran Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp33,60 triliun, lebih rendah 8,25% dibandingkan anggaran tahun 2021 (Tabel 2.2). Penurunan nilai anggaran belanja tersebut terutama terjadi pada komponen Belanja hibah, sejalan dengan pengalihan belanja BOS yang sebelumnya dianggarkan Pemerintah Provinsi menjadi dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan penurunan pagu belanja hibah hingga 40,48% (yoy) atau setara dengan Rp3,75 triliun, maka secara total, pagu belanja operasi juga mengalami penurunan

sebesar 11,98% (yoy). Fokus Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi, melalui upaya penanggulangan dampak inflasi berupa pemberian subsidi seperti subsidi sosial, penciptaan lapangan kerja, bantuan sosial kepada masyarakat khususnya di bidang Kesehatan, dan kapal perintis. Adapun Belanja Transfer juga mengalami penurunan terutama disebabkan penurunan Belanja Bagi Hasil sebesar 7,28% (yoy) mengikuti penurunan target Pendapatan Daerah di tahun 2022. Di sisi lain, anggaran belanja modal meningkat hingga 18,72% (yoy), seiring dengan semangat pemerintah provinsi untuk memperbaiki kualitas belanja daerah, terutama dialokasikan pada Belanja modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan mesin, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2021 dan 2022

URAIAN	Pagu APBD Prov. Jawa Timur		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi IV 2022 (%YOY)
	2021	2022		Realisasi IV 2021		Realisasi IV 2022		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Belanja Daerah	36.621	33.601	(8,25)	33.853	92,44	31.503	93,76	(6,94)
Belanja Operasi	24.948	21.958	(11,98)	23.370	93,67	20.863	95,01	(10,73)
Belanja Pegawai	7.459	7.907	6,00	6.989	93,69	7.374	93,27	5,52
Belanja Barang Dan Jasa	8.129	8.352	2,74	7.300	89,80	7.970	95,42	9,17
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	22	-	-	-	15	68,62	-
Belanja Hibah	9.259	5.511	(40,48)	8.989	97,08	5.359	97,24	(40,38)
Belanja Bantuan Sosial	101	167	65,16	92	91,55	145	86,69	56,39
Belanja Modal	2.418	2.871	18,72	1.970	81,47	2.529	88,08	28,37
Belanja Modal Tanah	12	40	228,79	11	93,80	26	65,81	130,66
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.274	1.462	14,75	1.128	88,53	1.349	92,28	19,61
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	684	1.072	56,65	472	68,97	906	84,49	91,90
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	324	187	(42,08)	242	74,71	140	74,91	(41,92)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	119	108	(8,94)	115	96,79	106	98,02	(7,78)
Belanja Modal Aset Lainnya	6	2	(64,02)	2	39,08	2	82,86	(23,73)
Belanja Tak Terduga	777	709	(8,78)	370	47,58	116	16,40	(68,56)
Belanja Transfer	8.478	8.063	(4,89)	8.143	96,06	7.995	99,16	(1,82)
Belanja Bagi Hasil	7.869	7.296	(7,28)	7.564	96,12	7.296	100,00	(3,54)
Belanja Bantuan Keuangan	609	767	25,98	580	95,25	699	91,18	20,60

Sumber : BPKAD Jawa Timur

Pada tahun 2022, anggaran komponen Belanja Tak Terduga mengalami penurunan sejalan dengan penyesuaian pos anggaran terkait penanggulangan bencana alam dan penanganan Covid-19 yang semakin mereda. Anggaran komponen Belanja Tak Terduga menurun dari Rp777 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp709 miliar pada tahun 2022 (8,78%, yoy) sejalan dengan adanya penyesuaian ke dalam komponen belanja yang lain seiring semakin meredanya Covid-19 tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, realisasi belanja lebih difokuskan untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 dalam rangka membentuk *herd immunity* masyarakat Jawa Timur.

2.2.2.2. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan IV tahun 2022 mencapai Rp31,50 triliun atau 93,76% dari pagu anggaran, dengan persentase realisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2021 sebesar 92,44% (Grafik 2.6). Peningkatan persentase realisasi ditopang oleh tingginya persentase realisasi Belanja Operasi sebesar 95,01%, Belanja Modal sebesar 88,08%, dan Belanja Transfer sebesar 99,16%. Secara nominal, realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 6,94% (yoy) terutama disebabkan oleh penurunan belanja hibah hingga sebesar 40,38% (yoy). Penurunan lebih dalam tertahan oleh peningkatan komponen Belanja Modal sebesar 28,37% terutama pada Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Tabel 2.2).

Realisasi Belanja Modal sampai dengan triwulan IV 2022 mencapai 88,08% atau meningkat 28,37% (yoy) dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2021. Peningkatan realisasi Belanja Modal ditopang oleh hampir seluruh komponen yaitu Belanja Modal Peralatan dan mesin, Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan meningkat dari 68,97% pada triwulan IV 2021 menjadi 84,49% pada triwulan IV 2022, diikuti peningkatan secara nominal sebesar 91,90%, sejalan dengan meningkatnya pengeluaran untuk renovasi gedung dan bangunan termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Lebih lanjut, realisasi Belanja Peralatan dan Mesin meningkat dari 88,53% pada triwulan IV 2021 menjadi 92,28% pada triwulan IV 2022, sejalan dengan meningkatnya pengeluaran untuk pengadaan mesin termasuk biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya.

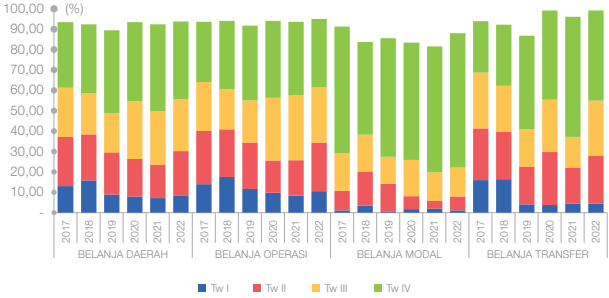
Realisasi Belanja Transfer sampai dengan triwulan IV 2022 mencapai 99,16% dari pagu, meningkat dibandingkan triwulan IV 2021. Secara nominal realisasi Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar 1,82% (yoy). Realisasi Belanja Transfer ditopang oleh komponen Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi komponen Belanja Bagi Hasil meningkat dari 96,12% pada triwulan IV 2021 menjadi 100% pada triwulan IV 2022, namun secara nominal mengalami penurunan sebesar 3,54% (yoy). Lebih lanjut, Belanja Bantuan Keuangan telah terealisasi sebesar 91,18%

pada triwulan IV 2022, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2021 sebesar 95,25% (Tabel 2.2). Secara nominal, Belanja Bantuan Keuangan mengalami peningkatan sebesar 20,60% (yoy), dari Rp580 miliar pada 2021 menjadi Rp699 miliar pada tahun 2022, dengan nominal realisasi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp539 miliar dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa sebesar Rp160 miliar.

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan triwulan IV 2022 mencapai 95,01% dari pagu, meningkat dibandingkan triwulan IV 2021. Secara nominal, realisasi Belanja Operasi menurun sebesar 10,73% (yoy). Realisasi Belanja Operasi ditopang oleh komponen Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, dan Belanja Hibah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa juga mengalami peningkatan pada triwulan IV 2022 sebesar 95,42% dari triwulan IV 2021 yang sebesar 89,80%. Secara nominal, realisasi Belanja Barang dan Jasa juga mengalami peningkatan sebesar 9,17% (yoy). Peningkatan ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam percepatan realisasi belanja sejalan dengan relaksasi kebijakan PPKM pada triwulan IV 2022. Lebih lanjut, komponen Belanja Hibah meningkat dari 97,08% pada triwulan IV 2021 menjadi 97,24% pada triwulan IV 2022, namun secara nominal mengalami penurunan sebesar 40,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, komponen Belanja Subsidi terealisasi sebesar 68,62% dari yang sebelumnya tidak dianggarkan pada triwulan IV 2021. Hal ini sejalan dengan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 dan dukungan program vaksinasi, serta pemberian subsidi angkutan laut perintis kepulauan sebagai upaya pemerintah dalam membantu pengoperasian angkutan laut kapal perintis dengan efisien, efektif dan akuntabel demi menjaga konektivitas daerah. Lebih lanjut, meskipun realisasi Belanja Bantuan Sosial menurun dari 91,55% pada tahun 2021 menjadi 86,69% pada tahun 2022, namun secara nominal mengalami peningkatan sebesar 56,39% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan target peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama melalui penguatan program jaring pengaman sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Belanja hibah tersebut disalurkan baik kepada badan, lembaga, organisasi swasta, maupun kepada kelompok atau masyarakat terutama yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan keagamaan.

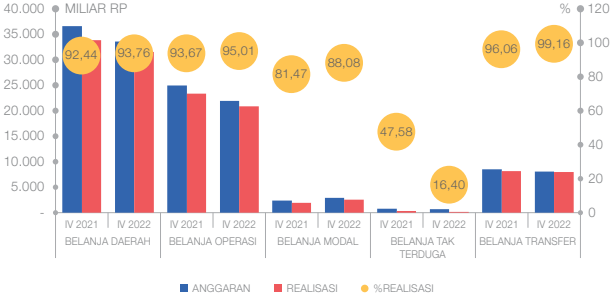
Realisasi Belanja Tak Terduga sampai dengan triwulan IV 2022 menurun dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2021. Penurunan ini juga terjadi secara nominal sebesar 68,56% dibandingkan nominal belanja tak terduga pada triwulan IV 2021. Belanja Tak Terduga mengalami penurunan realisasi pada triwulan IV 2022 yaitu sebesar 16,40%, lebih rendah dari triwulan IV 2021 yang mencapai 47,58% (Grafik 2.6). Penurunan pada komponen Belanja Tak Terduga ini sejalan dengan penurunan realisasi penanganan Covid-19, yang meliputi biaya posko Covid-19, pengadaan bahan medis dan alat kesehatan, serta kegiatan kuratif, promotif, preventif, dan *social safety net* sejalan dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19 di Jawa Timur (Tabel 2.2).

Grafik 2.5
 Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (Triwulanan)



Sumber : BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.6
 Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (Kumulatif)

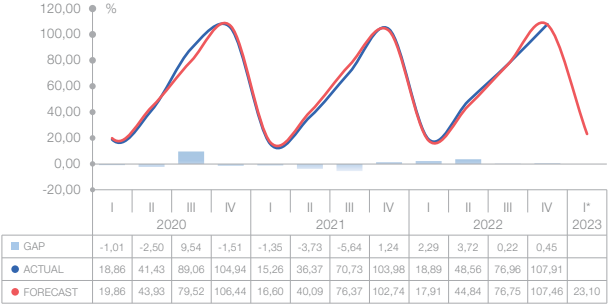


Sumber : BPKAD Jawa Timur

2.2.3. Tracking Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2023

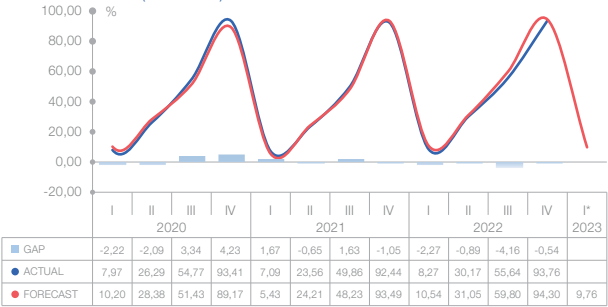
Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan I tahun 2023 masing-masing diperkirakan tercapai sebesar 23,10% dan 9,76% dari pagu anggaran. Realisasi Pendapatan Daerah pada triwulan I 2023 ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah pada triwulan I 2022 yang tercapai sebesar 18,89% (Grafik 2.7), didorong oleh perkiraan peningkatan realisasi pajak konsumtif (pajak hotel, hiburan, dan restoran) serta peningkatan realisasi redistribusi terutama di daerah pariwisata, sejalan dengan semakin pulihnya ekonomi daerah. Lebih lanjut, realisasi Belanja Daerah

Grafik 2.7
 Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2023 (Kumulatif)



Sumber : BPKAD Jawa Timur, diolah

Grafik 2.8
 Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Triwulan I 2023 (Kumulatif)



Sumber : BPKAD Jawa Timur, diolah

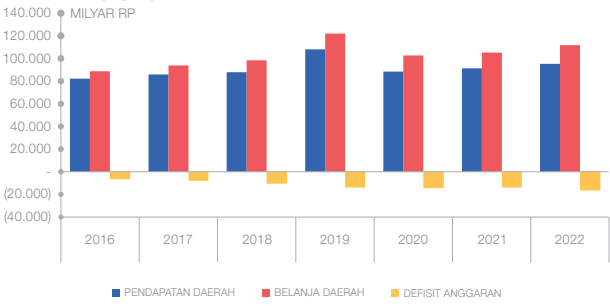
triwulan I 2023 diperkirakan sebesar 9,76%, lebih tinggi dibandingkan realisasi Belanja Daerah pada triwulan I 2022 yang tercapai sebesar 8,27% dalam rangka mendorong kinerja ekonomi di daerah dan sekaligus sejalan dengan program Pemerintah Daerah untuk percepatan realisasi di tahun 2023 melalui percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat (Grafik 2.8).

2.3. APBD 38 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2022

APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2022⁴¹ lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Peningkatan terjadi baik pada sisi Pendapatan Daerah maupun sisi Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercatat tumbuh masing-masing sebesar 4,48% (yoy) dan 6,22% (yoy) atau mencapai Rp95,40 triliun dan Rp111,85 triliun. Hal ini berdampak pada meningkatnya pagu defisit anggaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur, menjadi Rp16,45 triliun pada tahun 2022 dari Rp13,99 triliun tahun 2021 (Grafik 2.9). Adapun realisasi belanja menunjukkan nilai realisasi nominal belanja pemerintah kabupaten/kota yang lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh, namun masih dapat dipenuhi oleh SILPA pemerintah tahun sebelumnya.

Grafik 2.9
 Perkembangan APBD Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2022



Sumber : BPKAD Jawa Timur

41. APBD Kabupaten/Kota pada Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur ini menggunakan anggaran posisi awal tahun 2022 yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota

2.3.1.1. Anggaran Pendapatan Daerah

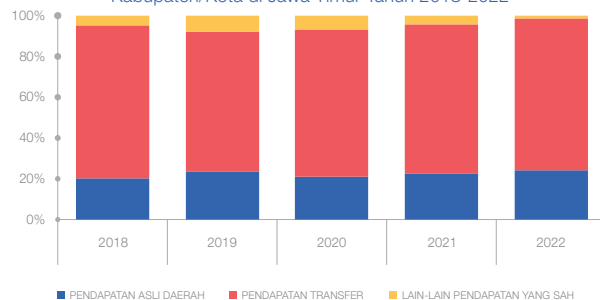
Anggaran Pendapatan Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2022 didominasi oleh Pendapatan Transfer (Grafik 2.11). Pangsa anggaran Pendapatan Transfer di Kabupaten/Kota meningkat dari 73,11% pada tahun 2021 menjadi 74,45% pada 2022 sejalan dengan kenaikan alokasi kebutuhan anggaran Kabupaten/Kota, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dana BOS yang saat ini dianggarkan di Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, pangsa anggaran Pendapatan Asli Daerah di APBD Kabupaten/Kota meningkat dari 22,59% pada tahun 2021 menjadi 24,14% pada tahun 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan prakiraan semakin membaiknya ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 yang diharapkan mampu mendorong kenaikan Pendapatan Daerah terutama pajak daerah berupa pajak hotel dan restoran, serta pajak kendaraan bermotor. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara rata-rata mencapai 19,92% pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yang sebesar 18,79%. Beberapa daerah yang memiliki target Pendapatan Daerah tinggi sehingga mendorong peningkatan DOF antara lain Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, dan Kota Mojokerto, yang merupakan daerah padat industri dan pariwisata. Namun demikian, terdapat 4 Kabupaten/Kota dengan angka persentase DOF rendah di Jawa Timur (kurang dari 10%), yang menunjukkan masih tingginya

ketergantungan Kabupaten/Kota tersebut terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Secara spasial, Kota Surabaya memiliki target anggaran Pendapatan Daerah tertinggi yaitu Rp9,82 triliun atau 10,30% dari total anggaran Pendapatan Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Grafik 2.10). Kota Surabaya merupakan kota di Jawa Timur dengan target DOF terbesar, yaitu mencapai 64,31% (Grafik 2.12). Target tersebut juga meningkat dibandingkan target DOF tahun 2021 yakni 61,36%. Struktur ekonomi Kota Surabaya yang didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, menopang penghasilan dari pajak daerah dan retribusi yang relatif besar. Sementara itu, anggaran Pendapatan Daerah terendah berada di Kota Pasuruan yaitu sebesar Rp860,53 miliar atau 0,90% dari total anggaran pendapatan daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

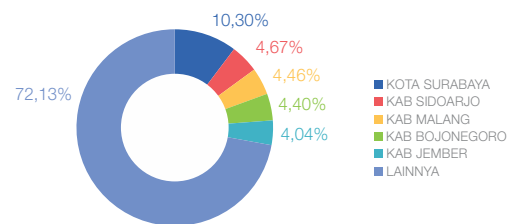
Dari sisi kemandirian fiskal, Kabupaten Sampang merupakan daerah yang memiliki ketergantungan tertinggi terhadap Pemerintah Pusat. DOF Kabupaten Sampang hanya sebesar 9,43%, namun target tersebut meningkat dibandingkan target DOF tahun 2021 yakni 7,72% (Grafik 2.12). Selanjutnya, berdasarkan DOF masing-masing Kabupaten/Kota, mayoritas daerah (26 Kabupaten/Kota) ditargetkan mengalami kenaikan DOF melalui pemberdayaan potensi ekonomi masing-masing, sementara 12 Kabupaten/Kota lainnya justru diperkirakan mengalami penurunan DOF dan membutuhkan lebih banyak dana transfer dari pemerintah Pusat.

Grafik 2.10 Proporsi Komponen Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2022



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.11 Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.12 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021-2022 (berdasarkan anggaran)



Sumber: BPKAD Jawa Timur

2.3.1.2. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur sampai dengan triwulan IV 2022 sebesar 98,59% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 101,26% (Tabel 2.3). Penurunan persentase realisasi pendapatan daerah terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah dari 100,96% pada tahun 2021 menjadi sebesar 93,60% pada tahun 2022, serta Pendapatan Transfer dari 103,32% pada 2021 menjadi 93,60% pada 2022. Lebih lanjut, penurunan realisasi lebih dalam tertahan oleh peningkatan realisasi dari komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari 67,85% pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 108,90% pada tahun 2022. Namun demikian, realisasi Pendapatan Daerah secara nominal mengalami peningkatan sebesar 0,02% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2021, ditopang oleh realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan sebesar 0,03% (yoy) dibandingkan 2021. Komponen Pendapatan Transfer juga mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,03% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara spasial, Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang mampu merealisasikan anggaran Pendapatan Daerah tertinggi pada triwulan IV yaitu 137,05% dari anggaran, sementara realisasi Pendapatan Daerah terendah terjadi di Kabupaten Bondowoso, sebesar 86,16% (Grafik 2.13). Realisasi Pendapatan Daerah yang tinggi di Kabupaten Bojonegoro didukung oleh tingginya realisasi Pendapatan Transfer, yang ditopang oleh realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 147,38% dan Transfer dari Pemerintah Daerah sebesar 172,79%. Walaupun Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah dengan realisasi Pendapatan Daerah tertinggi, namun realisasi PAD terbesar berada di Kabupaten Kediri

yaitu sebesar 122,71% dari anggaran. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Kediri mencapai 143,01%, diikuti dengan realisasi Retribusi Daerah sebesar 110,90% dari pagu anggaran. Tingginya realisasi PAD di Kabupaten Kediri tidak terlepas dari dukungan pendapatan salah satu pabrik rokok besar di Kediri.

Berdasarkan komponen Pendapatan Transfer, realisasi tertinggi triwulan IV terjadi di Kabupaten Bojonegoro (148,25% dari pagu anggaran) dan terendah di Kabupaten Bondowoso (86,16% dari pagu anggaran) (Grafik 2.13). Tingginya realisasi Pendapatan Transfer di Kabupaten Bojonegoro didorong oleh realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai 147,38% dari pagu anggaran, dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah yang mencapai 172,79%. Realisasi pendapatan daerah di Bojonegoro sejalan dengan tingginya dana bagi hasil dari sektor migas.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
APBD Kabupaten/Kota

2.3.2.1. Anggaran Belanja Daerah

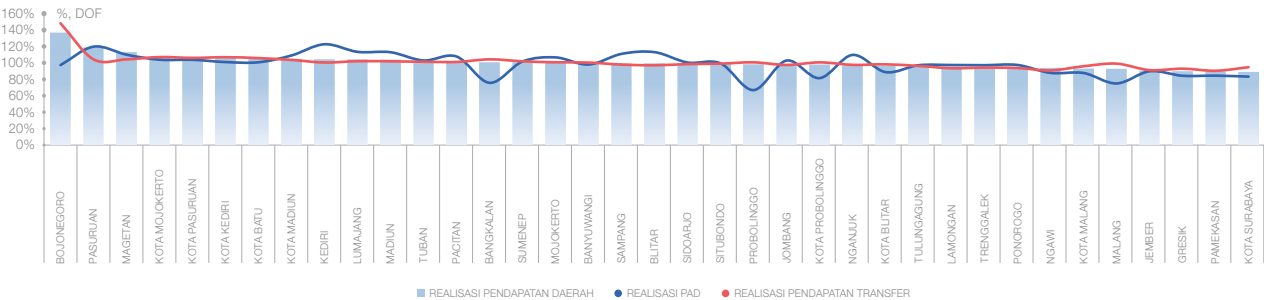
Anggaran Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp77,48 triliun atau 69,27% dari total anggaran Belanja Daerah (Grafik 2.14). Secara spasial, Kota Surabaya memiliki anggaran Belanja Daerah terbesar, yang mencapai Rp10,05 triliun atau 8,98% dari total anggaran Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Grafik 2.15). Sementara itu, Kota Pasuruan merupakan daerah dengan anggaran Belanja Daerah terendah yaitu sebesar Rp1,06 triliun atau 0,95% dari total anggaran Belanja Daerah.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2021 dan 2022

URAIAN	Pagu APBD Kab/kota		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi IV 2022 (%YOY)
	2021	2022		Realisasi IV 2021		Realisasi IV 2022		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
PENDAPATAN DAERAH	91.307	95.401	4,48	92.460	101,26	94.060	98,59	0,02
Pendapatan Asli Daerah	20.630	23.027	11,62	20.827	100,96	21.553	93,60	0,03
Pendapatan Transfer	66.751	71.030	6,41	68.969	103,32	71.044	100,02	0,03
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.926	1.344	-65,76	2.664	67,85	1.464	108,90	-0,45

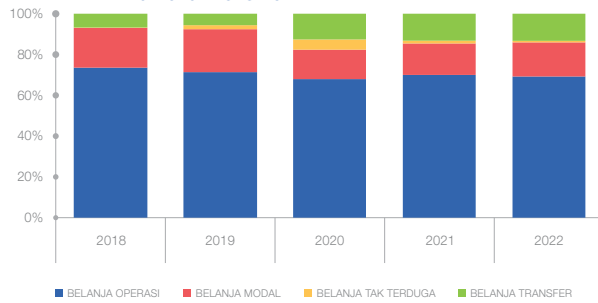
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.13 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV 2022



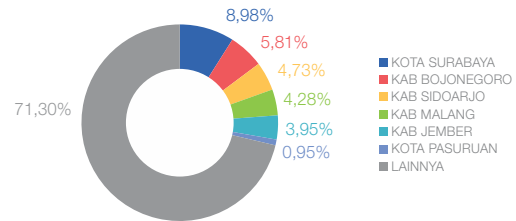
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.14 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2022



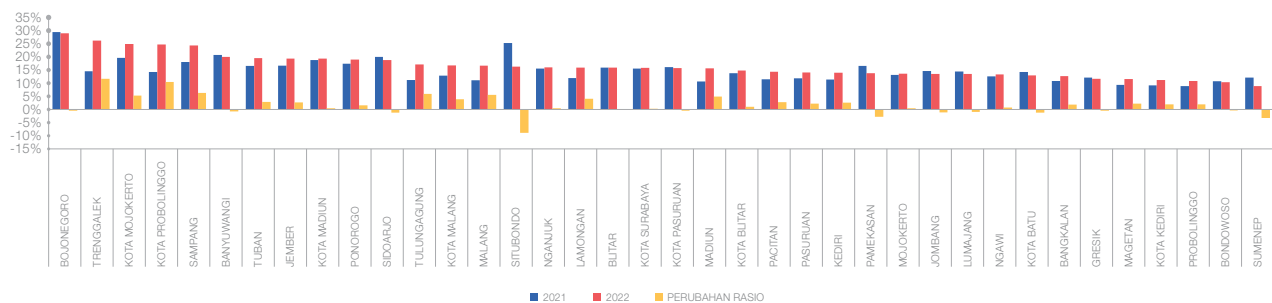
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.15 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.16 Rasio Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2021-2022



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Mayoritas Kabupaten/Kota mengalami peningkatan anggaran Belanja Daerah dibandingkan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan rasio anggaran Belanja Modal tahun 2022 di beberapa Kabupaten/Kota. Seiring dengan melandainya kasus Covid-19, terjadi penurunan kebutuhan belanja untuk penanganan Covid-19, khususnya untuk *testing*, *tracing*, *treatment*, pengadaan alat kesehatan, dan obat-obatan. Sebagian anggaran disesuaikan untuk menambah belanja prioritas yang telah ditetapkan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di Jawa Timur, utamanya dari sisi investasi proyek, mesin, dan barang modal lainnya. Beberapa Kabupaten/Kota dengan peningkatan rasio modal terbesar antara lain Kabupaten Trenggalek, Kota Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Tulungagung, serta Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota tersebut memiliki kualitas belanja yang lebih bagus dilihat dari rasio belanja modal yang lebih tinggi. Peningkatan terbesar rasio anggaran Belanja Modal terhadap total anggaran Belanja Daerah terjadi di Kabupaten Trenggalek, dari 14,49% menjadi 26,18%, yang ditopang oleh Belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan sejalan dengan percepatan pembangunan proyek-proyek daerah. Peningkatan rasio anggaran Belanja Modal juga terjadi di Kota Probolinggo sejalan dengan meningkatnya rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Lebih lanjut, penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Situbondo, dari 25,24% menjadi 16,32% sejalan dengan telah selesainya pembangunan jalan, irigasi, dan bangunan tahun sebelumnya dan fokus belanja 2022 yang lebih besar untuk belanja operasional. Sementara itu, rasio

Belanja Modal tertinggi dan terendah pada tahun 2022 masing-masing dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro dengan rasio 28,98% dan Kabupaten Sumenep dengan rasio 8,85% (Grafik 2.16).

2.3.2.2. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai dengan triwulan IV 2022 sebesar 87,69% dari pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan realisasi sampai dengan triwulan IV 2021 (84,93%). Secara nominal, realisasi anggaran Belanja Daerah juga meningkat sebesar 9,63% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 2.4). Meningkatnya realisasi Belanja Daerah sampai dengan triwulan IV 2022 didorong oleh peningkatan realisasi Belanja Transfer menjadi sebesar 102,48% dari 92,63% pada triwulan IV 2021. Secara nominal, realisasi Belanja Transfer tercatat tumbuh sebesar 17,79% (yoy), dan digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, antara lain belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ke desa. Peningkatan realisasi belanja daerah di 38 Kabupaten/Kota turut ditopang oleh peningkatan realisasi Belanja Modal dari 75,94% pada triwulan IV 2021 menjadi sebesar 81,94% pada triwulan IV 2022. Lebih lanjut, nominal Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 24,29% (yoy) terutama untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan. Komponen Belanja Operasi juga mengalami sedikit peningkatan realisasi dari 86,12% pada triwulan IV 2021 menjadi 86,95% pada triwulan IV 2022. Nominal Belanja Operasi juga tumbuh sebesar 6,05%(yoy) terutama digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Sementara itu, Belanja Tak

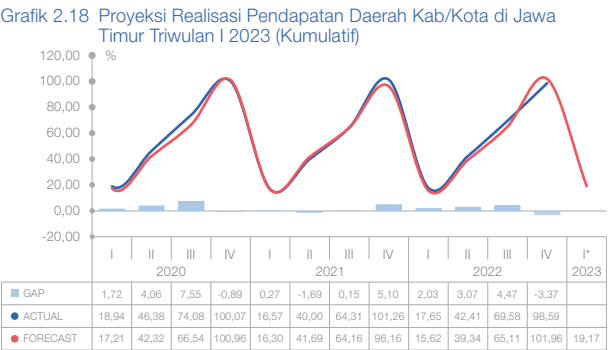
Terduga menjadi komponen Belanja Daerah yang mengalami penurunan realisasi dari 51,39% pada triwulan IV 2021 menjadi 26,63% pada triwulan IV 2022. Secara nominal Belanja Tak Terduga juga mengalami penurunan 68,27% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan lebih rendahnya pagu anggaran Belanja Tak Terduga pada tahun 2022 sebagai implikasi dari lebih rendahnya anggaran *refocusing* anggaran akibat Covid-19 dibandingkan tahun 2021. Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang membaik, maka kebutuhan anggaran untuk penanganan Kesehatan akibat Covid-19 juga berkurang tahun sebelumnya.

Secara spasial, realisasi Belanja Daerah tertinggi sampai dengan triwulan IV 2022 dicapai oleh Kabupaten Lamongan. Apabila dilihat secara komponen, realisasi Belanja Operasi dan realisasi Belanja Modal tertinggi terjadi di Kabupaten Pasuruan. Persentase realisasi Belanja Daerah tertinggi sampai dengan triwulan IV 2022 dicapai oleh Kabupaten Lamongan, yaitu 93,77% dari pagu anggaran, sementara realisasi terendah berada di Kabupaten Pasuruan yaitu sebesar 70,63% dari pagu anggaran (Grafik 2.17). Apabila dilihat per komponen belanja, realisasi Belanja Operasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasuruan sebesar 98,13% dari pagu anggaran terutama untuk Belanja Bantuan Sosial yang terealisasi sebesar Rp28,26 miliar atau 93,85% dari pagu anggaran, serta Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp1,13 triliun atau 89,77% dari pagu anggaran. Lebih lanjut, realisasi Belanja Modal tertinggi juga terjadi di Kabupaten Pasuruan yaitu sebesar 110,65% dari pagu anggaran, didorong belanja Bangunan dan Gedung sebesar 94,07% serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 86,72% dari pagu anggaran.

Seiring dengan tingginya capaian belanja APBD Kab/Kota yang lebih besar dari nilai nominal pendapatan yang dihasilkan, maka kekurangan anggaran belanja pada 28 Kabupaten/Kota yang mengalami defisit anggaran ditutup dari SILPA anggaran tahun sebelumnya yang masih mencukupi.

2.3.3. Tracking Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota Triwulan I 2023

Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada triwulan I tahun 2023 masing-masing diprakirakan tercapai sebesar 19,17% dan 10,01% dari pagu anggaran. Realisasi Pendapatan Daerah pada triwulan I 2023 ini diprakirakan lebih tinggi dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah pada triwulan I 2022 yang tercapai sebesar 18,16% seiring semakin pulihnya perekonomian daerah (Grafik 2.18). Lebih lanjut,



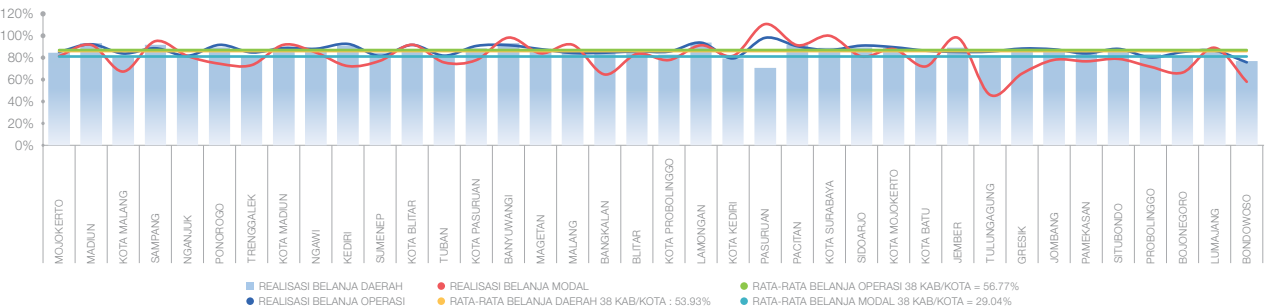
Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d Triwulan IV 2021 dan 2022

URAIAN	Pagu APBD Kab/kota		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi IV 2022 (%YOY)
	2021	2022		Realisasi IV 2021		Realisasi IV 2022		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
BELANJA DAERAH	105.329	111.846	6,19	89.460	84,93	98.076	87,69	9,63%
Belanja Operasi	73.764	77.480	5,04	63.525	86,12	67.369	86,95	6,05%
Belanja Modal	16.216	18.679	15,19	12.314	75,94	15.305	81,94	24,29%
Belanja Tak Terduga	1.450	888	-38,78	745	51,39	237	26,63	-68,27%
Belanja Transfer	13.899	14.799	6,47	12.875	92,63	15.166	102,48	17,79%

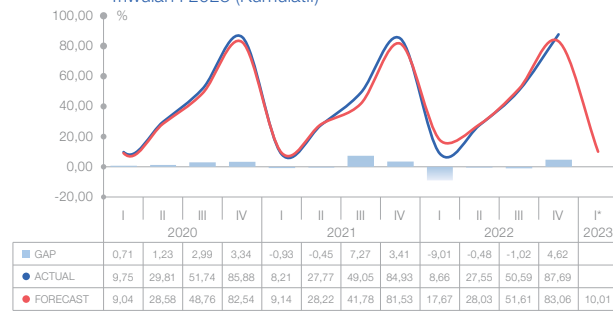
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.17 Persentase Realisasi Belanja Daerah APBD Kab/Kota Jawa Timur s.d Triwulan IV 2022



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grifik 2.19 Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota di Jawa Timur Triwulan I 2023 (Kumulatif)



Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

realisasi Belanja Daerah triwulan I 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan realisasi Belanja Daerah pada triwulan I 2022 yang tercapai sebesar 8,66% sejalan dengan adanya arahan Gubernur Jawa Timur untuk percepatan realisasi di awal tahun 2023.

2.4. APBN DI JAWA TIMUR TAHUN 2022

Alokasi belanja APBN di Jawa Timur tahun 2022⁴² mencapai Rp73,96 triliun atau meningkat 11,51% (yoy) dibandingkan tahun 2021, terutama pada komponen Belanja Bantuan Sosial dan DAK Non Fisik.

Pemerintah Pusat mengalokasikan sejumlah anggaran APBN untuk direalisasikan di Jawa Timur. Anggaran penerimaan APBN tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah. Sementara itu, anggaran belanja APBN disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur. Belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk pembayaran gaji pegawai kementerian atau instansi Pemerintah Pusat yang berada di Jawa Timur, proyek-proyek infrastruktur strategis yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, serta program kementerian yang dilaksanakan di Jawa Timur.

2.4.1. Anggaran Belanja APBN di Jawa Timur Tahun 2022

Berdasarkan jenisnya, anggaran belanja pegawai masih mendominasi untuk belanja APBN di Jawa Timur. Dari sisi pertumbuhan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik mengalami pertumbuhan sebesar 13,80% (yoy), diikuti oleh Belanja Bantuan Sosial dan Dana Desa masing-masing sebesar 14,06% (yoy) dan 1,31% (yoy) (Tabel 2.5). Peningkatan alokasi dana DAK Non Fisik sejalan dengan penambahan penyaluran per jenis DAK Non Fisik

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2021 dan 2022⁴³

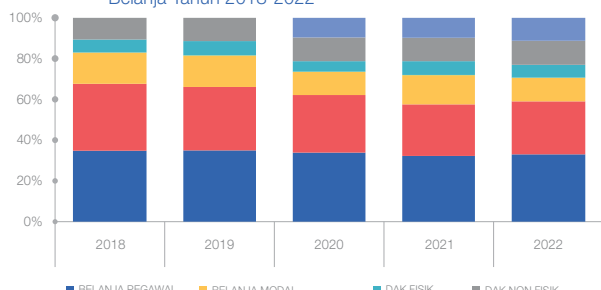
JENIS BELANJA	Pagu APBN		% Perubahan	Realisasi APBN				Pertumbuhan Realisasi IV 2022 (%YOY)
	2021	2022		Realisasi IV 2021		Realisasi IV 2022		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
BERDASARKAN JENIS BELANJA								
Belanja Pegawai	21.361	21.642	1,32	21.335	99,88	21.413	98,94	0,37
Belanja Barang	16.794	17.027	1,39	15.910	94,74	16.473	96,74	3,53
Belanja Modal	9.470	7.525	(20,54)	8.953	94,54	7.118	94,59	(20,50)
Belanja Bantuan Sosial	79	91	14,06	78	98,48	90	98,85	14,49
DAK Fisik	4.480	4.079	(8,95)	3.497	78,05	3.515	86,19	0,54
DAK Non Fisik	6.477	7.371	13,80	6.345	97,97	7.096	96,27	11,83
Dana Desa	7.660	7.760	1,31	7.654	99,92	7.753	99,90	1,29
BERDASARKAN FUNGSI								
Agama	741	748	0,98	735	99,15	733	97,93	(0,27)
Ekonomi	9.443	7.547	(20,08)	9.187	97,29	7.390	97,92	(19,56)
Kesehatan	998	984	(1,35)	953	95,57	919	93,34	(3,65)
Ketertiban Dan Keamanan	7.426	7.912	6,54	7.394	99,58	7.867	99,43	6,39
Lingkungan Hidup	1.004	913	(9,03)	967	96,30	892	97,69	(7,71)
Pariwisata Dan Budaya	-	4	-	-	-	3	79,20	-
Pelayanan Umum	20.145	21.412	6,29	18.978	94,21	20.453	95,52	7,77
Pendidikan	13.875	12.683	(8,59)	13.188	95,05	12.142	95,73	(7,94)
Pertahanan	10.755	11.356	5,59	10.550	98,09	11.138	98,09	5,58
Perumahan Dan Fasilitas Umum	1.917	1.935	0,95	1.803	94,07	1.921	99,28	6,53
TOTAL	66.321	65.495	(1,25)	63.773	96,16	63.458	96,89	(0,49)

Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur

42. Alokasi APBN di Jawa Timur pada tahun 2022 meliputi pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Alokasi APBN tahun 2022 lebih rendah -18,34% (yoy) dibandingkan tahun 2021 tanpa menyertakan DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa.

43. Total Alokasi Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2022 termasuk yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat untuk Jawa Timur adalah sebesar Rp15.832 miliar (sebesar Rp7.371 miliar dianggarkan di Jawa Timur dan Rp8.461 miliar dianggarkan Pemerintah Pusat)

Grafik 2.20 Pangsa Anggaran Belanja APBN Jawa Timur Menurut Jenis Belanja Tahun 2018-2022



Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur

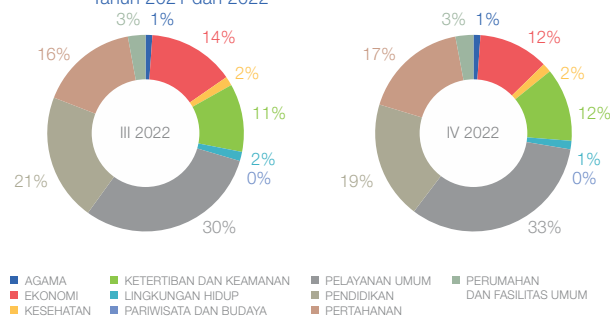
yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Selanjutnya, peningkatan Belanja Bansos dan Dana Desa dialokasikan untuk kebutuhan belanja dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi tahun 2022 di Jawa Timur karena dampak pandemi Covid-19, termasuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan fokus utama kebijakan APBN 2022, alokasi APBN tahun 2022 di Jawa Timur antara lain ditujukan untuk tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan penguatan desentralisasi fiskal. Berdasarkan fungsinya, belanja APBN di Jawa Timur berfokus pada fungsi pelayanan umum (32,69%), pendidikan (19,37%), diikuti fungsi pertahanan (17,34%) dan fungsi ketertiban dan keamanan (12,08%) (Grafik 2.21). Peningkatan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial, DAK Non Fisik, dan Dana Desa turut mengindikasikan komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan infrastruktur, perekonomian, dan kesejahteraan dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi.

2.4.2. Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur s.d. Triwulan IV 2022

Realisasi belanja APBN di Jawa Timur sampai dengan triwulan IV 2022 mencapai 95,89% dari pagu anggaran atau senilai Rp70,91 triliun (Tabel 2.5). Secara nominal, realisasi tersebut meningkat sebesar 11,20% (yoy) dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan jenis belanja, persentase realisasi tertinggi terjadi pada realisasi Belanja Dana Desa, Belanja Pegawai, dan Bantuan Sosial. Dana Desa terealisasi 99,90% dari pagu anggaran sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan secara merata hingga ke desa melalui penyelenggaraan program pemerintah, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang lebih optimal. Lebih lanjut, realisasi Belanja Pegawai sebesar 98,94% dari pagu sejalan dengan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negara yang dibayarkan tepat waktu. Sementara itu, realisasi Belanja Bantuan Sosial mencapai 98,85% dari pagu sejalan dengan upaya

Grafik 2.21 Pangsa Anggaran Belanja APBN Jawa Timur Menurut Fungsi Tahun 2021 dan 2022



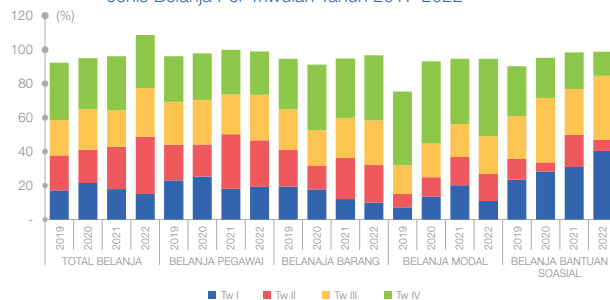
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur

pemerintah pusat untuk memulihkan ekonomi, serta berlanjutnya pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022, secara spasial, kenaikan alokasi Dana Desa tertinggi terjadi di Kabupaten Mojokerto dengan kenaikan sebesar 6,42% (yoy) (Grafik 2.23). Sementara kabupaten dengan nominal alokasi penerimaan Dana Desa terbesar di Jawa Timur tahun 2022 adalah Kabupaten Malang yaitu sebesar Rp409,74 miliar terutama untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin, sejalan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang. Alokasi Dana Desa pada tahun 2022 diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, serta pemulihan dari Covid-19 yang lebih optimal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

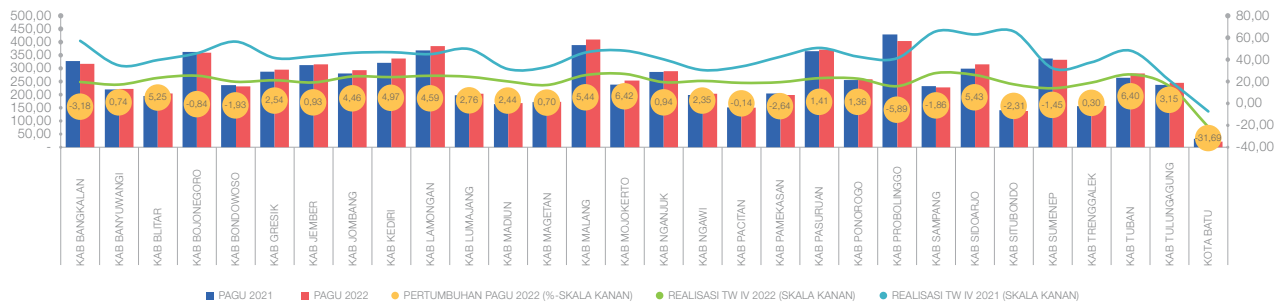
Dari sisi penyaluran, realisasi Dana Desa pada triwulan IV 2022 cukup tinggi, sebesar Rp1,55 triliun atau 20,03% dari pagu anggaran sehingga secara keseluruhan tahun 2022 Dana Desa telah terealisasi sebesar 99,90% (Grafik 2.24). Pagu Dana Desa pada tahun 2022 meningkat sebesar 1,31% (yoy) apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini mencerminkan tingginya komitmen daerah untuk meningkatkan pemberdayaan desa dalam mendorong kinerja ekonomi dan kesejahteraan di daerah, serta percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masa

Grafik 2.22 Persentase Realisasi Belanja APBN Jawa Timur Berdasarkan Jenis Belanja Per Triwulan Tahun 2017-2022



Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur (dolah)

Grafik 2.23 Pagu Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2021 dan 2022 di Jawa Timur



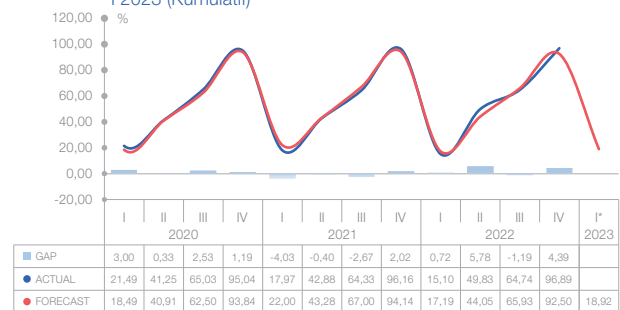
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur (diolah)

pemulihan Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan komitmen pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, di mana penggunaan dana desa diprioritaskan bagi penyediaan BLT - Dana Desa untuk optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BLT - Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan.

2.4.3. Tracking Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur Triwulan I 2023

Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur pada triwulan I tahun 2023 diperkirakan sebesar 18,92% dari pagu anggaran. Prakiraan realisasi ini lebih tinggi dibandingkan realisasi Belanja APBN triwulan I 2022 yang mencapai 15,10% (Grafik 2.25). Realisasi yang lebih tinggi sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka menjaga momentum penurunan inflasi sekaligus untuk mendorong realisasi belanja di tiap triwulannya sehingga tidak menumpuk di akhir tahun, dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur.

Grafik 2.24 Proyeksi Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur Triwulan I 2023 (Kumulatif)



Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur (diolah)



Bab III

Perkembangan Inflasi



3.1. KONDISI UMUM

Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,52% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat 6,80% (yoy). Melandainya tingkat inflasi pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh *high base effect* pada triwulan III 2022 pasca kenaikan harga BBM pada September 2022, serta peningkatan pasokan komoditas hortikultura berkenaan dengan pelaksanaan panen raya di beberapa sentra produksi. Berdasarkan kelompok, inflasi tahunan gabungan kota IHK Jawa Timur terutama disebabkan oleh semakin terkendalinya tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; serta Transportasi. Lebih lanjut, inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan I 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022, namun berpotensi masih berada di atas sasaran inflasi 3,0±1% (yoy). Semakin terkendalinya tingkat inflasi diperkirakan terutama terjadi pada kelompok (1) Transportasi; (2) Perumahan, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; serta (3) Mamin dan Tembakau sejalan dengan normalisasi tarif angkutan pasca kenaikan harga pada momentum HBKN Natal dan Tahun Baru, serta peningkatan pasokan komoditas pangan berkenaan dengan masa panen di sejumlah sentra produksi. Lebih lanjut, penyelenggaraan operasi pasar yang terukur dan penerapan pola kemitraan – *offtaker*, serta pasar lelang diperkirakan turut menjadi faktor penahan tekanan inflasi pada triwulan I 2023.

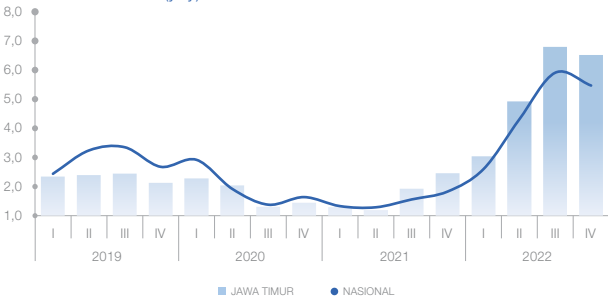
3.2. KINERJA INFLASI JAWA TIMUR

3.2.1. Perkembangan Inflasi Triwulan IV 2022

Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,52% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat 6,80% (yoy). Melandainya tingkat inflasi pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh *high base effect* pada triwulan III 2022 pasca kenaikan harga BBM pada September 2022⁴⁴. Perkembangan bulanan menunjukkan inflasi pasca kenaikan harga BBM kembali terkendali tercermin pada tekanan inflasi tahunan yang terus menurun. Meredanya tekanan inflasi pada triwulan laporan juga ditopang oleh peningkatan pasokan komoditas hortikultura, khususnya cabai, berkenaan dengan pelaksanaan panen raya di beberapa sentra produksi. Adapun melandainya tekanan inflasi tahunan pada triwulan IV 2022 terutama disumbang oleh deflasi pada komoditas cabai rawit (deflasi 27,37%, yoy), Sekolah Menengah Atas (deflasi 2,85%, yoy), cabai merah (deflasi 21,37%, yoy), minyak goreng (deflasi 1,83%, yoy), dan biaya administrasi transfer uang (deflasi 27,60%, yoy). Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh masih tingginya tingkat inflasi pada beberapa komoditas, terutama bensin (inflasi 33,77%, yoy), beras (inflasi 7,57%), dan angkutan udara (inflasi 15,67%) (Tabel 3.1 dan Tabel 3.2).

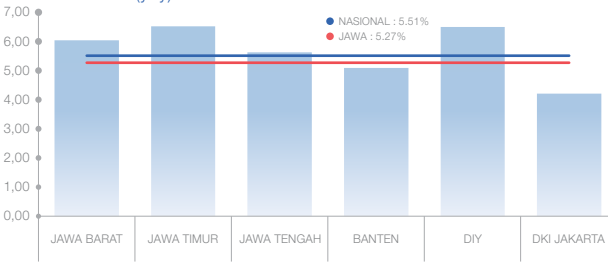
Secara spasial, inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di wilayah Jawa pada triwulan IV 2022. Capaian tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,51% (yoy) (Grafik 3.2).

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur dan Nasional (yoy)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2 Inflasi Gabungan Kota IHK Provinsi di Jawa Triwulan IV 2022 (yoy)



Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.1 Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur Sepanjang Tahun 2022

Gabungan 8 Kota		
Jenis Komoditi/Barang	Persentase Perubahan Harga	Sumbangan Inflasi
Bensin	33,77	1,51
Beras	7,57	0,30
Angkutan Udara	15,67	0,21
Akademi/Perguruan Tinggi	7,00	0,19
Sekolah Dasar	13,05	0,16
Mobil	7,47	0,16
Rokok Kretek Filter	12,01	0,15
Telur Ayam Ras	21,90	0,14
Kontrak Rumah	2,28	0,10
Bawang Merah	47,07	0,10

Sumber: BPS, diolah

44. Pada 3 September 2022, Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan subsidi sebagai berikut:

- Harga BBM subsidi jenis Pertalite mengalami peningkatan dari Rp7.650,-/ liter menjadi Rp10.000,-/ liter atau naik sebesar 30,72%
- Harga BBM subsidi jenis Solar mengalami peningkatan dari Rp5.150,-/ liter menjadi Rp6.800,-/ liter atau naik sebesar 32,04%
- Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina mengalami peningkatan dari Rp12.500,-/ liter menjadi Rp14.500,-/ liter atau naik sebesar 16,00%.

Tabel 3.2 Komoditas Penyumbang Utama Deflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur Sepanjang Tahun 2022

Jenis Komoditi/Barang	Gabungan 8 Kota	
	Persentase Perubahan Harga	Sumbangan Deflasi
Cabai Rawit	-27,37	-0,09
Sekolah Menengah Atas	-2,85	-0,03
Cabai Merah	-21,37	-0,03
Minyak Goreng	-1,83	-0,02
Biaya Administrasi Transfer Uang	-27,6	-0,01
Telepon Seluler	-1,13	-0,01
Daging Ayam Ras	-0,57	-0,01
Bayam	-3,17	0,00
Tissu	-2,08	0,00
Bawang Putih	-1,72	0,00

Sumber: BPS, diolah

3.2.2. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Pada triwulan IV 2022, melandainya tekanan inflasi tahunan terutama disebabkan oleh semakin terkendalinya tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; serta Transportasi. Meredanya tekanan inflasi juga terpantau pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar, serta kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga. Namun, penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi pada beberapa kelompok, yaitu kelompok Kesehatan; Pakaian dan Alas Kaki; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; Pendidikan; serta Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (Grafik 3.3).

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

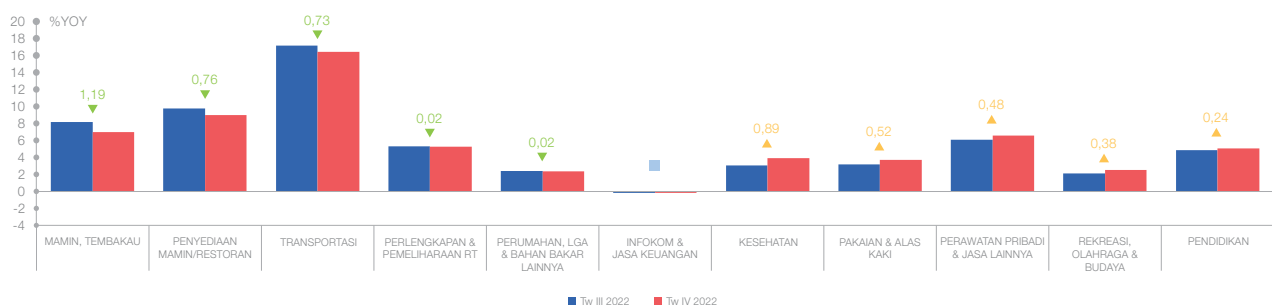
Tekanan inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mereda dari 8,17% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 6,99% (yoy) (Grafik 3.4). Meredanya tekanan inflasi didorong oleh semakin terkendalinya tingkat inflasi pada subkelompok Makanan dan Minuman yang masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar

6,87% (yoy) dan 4,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,29% (yoy) dan 5,15% (yoy). Namun, penurunan inflasi lebih dalam pada kelompok ini tertahan oleh subkelompok Tembakau yang mengalami peningkatan tekanan inflasi dari 10,43% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 10,67% (yoy) pada triwulan laporan.

Meredanya tekanan inflasi subkelompok Makanan sejalan dengan tren penurunan harga aneka cabai. Komoditas cabai rawit dan cabai merah tercatat mengalami deflasi pada triwulan IV 2022 setelah mengalami inflasi yang sangat tinggi pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan data BPS, pada triwulan III 2022 komoditas cabai rawit dan cabai merah masing-masing mengalami inflasi 128,35% (yoy) dan 174,20% (yoy) yang kemudian mengalami deflasi pada triwulan IV 2022 sebesar 27,37% (yoy) dan 21,37% (yoy). Selain faktor *high base effect* tersebut, deflasi pada komoditas aneka cabai juga ditopang oleh peningkatan pasokan berkenaan dengan panen raya secara serentak pada beberapa sentra produksi, yaitu yang berlokasi di Kabupaten Kediri, Blitar, Tuban, Malang, dan Probolinggo. Melimpahnya pasokan pasca panen raya terindikasi tidak terserap sepenuhnya di tengah peningkatan permintaan pasar pada momentum HBKN Natal dan Tahun Baru sehingga mendorong tren penurunan harga aneka cabai (Grafik 3.5). Lebih lanjut, meredanya tekanan inflasi subkelompok Makanan juga disumbang oleh komoditas minyak goreng yang terpantau mengalami deflasi 1,83% (yoy) pada triwulan laporan. Kondisi tersebut sejalan dengan penurunan harga CPO global pada triwulan IV 2022⁴⁵ yang disebabkan oleh (i) penurunan proyeksi permintaan minyak mentah dunia pada tahun 2022 sebesar 0,01 juta barel per hari, yaitu dari 99,57 juta barel menjadi 99,56 juta barel per hari⁴⁶; (ii) adanya peningkatan stok produk minyak Amerika Serikat (*gasoline dan distillate*)⁴⁷ di akhir tahun 2022; serta (iii) kebijakan peningkatan suku bunga oleh The Fed untuk mengatasi inflasi.

Penurunan tingkat inflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi pada subkelompok Tembakau, terutama komoditas rokok kretek filter. Inflasi komoditas rokok kretek filter masih dalam tren meningkat seiring dengan berlanjutnya transmisi cukai oleh produsen pasca penerapan kebijakan peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan rata-rata

Grafik 3.3 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



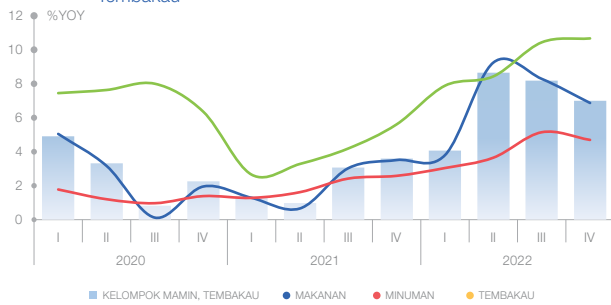
Sumber: BPS, diolah

45. Harga CPO dunia pada triwulan IV 2022 (856,50 USD/barel) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 sebesar 886,23 USD/barel.

46. OPEC Monthly Oil Market Desember 2022

47. Pasokan gasoline Desember 2022 naik dari 9,2 juta barel menjadi 223,0 juta barel dibandingkan bulan sebelumnya, sementara distillate naik dari 7,6 juta barel menjadi 120,2 juta barel, dibandingkan bulan sebelumnya.

Grifik 3.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau



Sumber: BPS, diolah

sebesar 12% mulai tahun 2022. Pada triwulan IV 2022, BPS mencatat komoditas rokok kretek filter mengalami inflasi sebesar 12,01% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 11,79% (yoy).

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran

Pada triwulan IV 2022, inflasi kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran terpantau melandai dari 9,75% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 8,99% (yoy) pada triwulan laporan (Grifik 3.6). Melandainya tingkat inflasi sejalan dengan deselerasi kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan laporan⁴⁸ di tengah penurunan permintaan masyarakat yang juga tercermin pada melambatnya kinerja konsumsi RT Jawa Timur⁴⁹. Selain itu, semakin terkendalinya tingkat inflasi subkelompok Makanan (aneka cabai dan minyak goreng) yang merupakan bahan baku komoditas makanan jadi turut mendorong meredanya tekanan inflasi pada kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran.

Grifik 3.6 Perkembangan Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

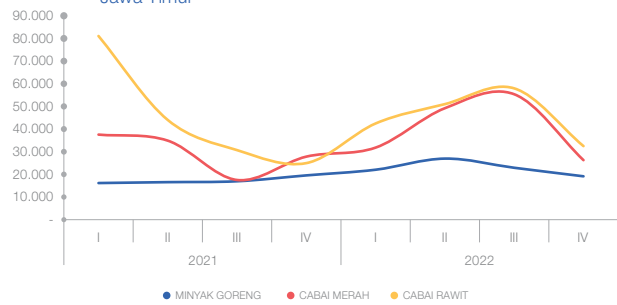


Sumber: BPS, diolah

Kelompok Transportasi

Kelompok Transportasi terpantau masih mengalami tingkat inflasi yang tinggi pada triwulan IV 2022, namun mereda dibandingkan triwulan sebelumnya. Kelompok Transportasi mencatatkan inflasi sebesar 16,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,16% (yoy). Melandainya inflasi kelompok Transportasi didorong oleh semakin terkendalinya tingkat inflasi

Grifik 3.5 Perkembangan Harga Aneka Cabai dan Minyak Goreng di Jawa Timur



Sumber: SISKAPERBAPO, diolah

subkelompok Jasa Angkutan Penumpang dan Pembelian Kendaraan yang masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 14,29% (yoy) dan 6,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 19,72% (yoy) dan 6,68% (yoy). Namun, penurunan inflasi lebih dalam pada kelompok ini tertahan oleh subkelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi yang mengalami peningkatan tekanan inflasi dari 20,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 21,25% (yoy) pada triwulan laporan (Grifik 3.7).

Tekanan inflasi subkelompok Jasa Angkutan Penumpang melandai ditopang oleh semakin terkendalinya tarif angkutan udara, meskipun masih terpantau tinggi. Pada triwulan IV 2022, BPS mencatatkan tarif angkutan udara mengalami inflasi sebesar 15,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi lebih tinggi sebesar 26,86% (yoy). Perkembangan tersebut seiring dengan melandainya harga Avtur yang mendorong maskapai untuk melakukan penyesuaian harga, khususnya maskapai *Low Cost Carrier* (LCC), guna menjaga daya saing di pasaran (Grifik 3.8). Namun meskipun menurun, tarif angkutan udara masih tercatat sebagai penyumbang inflasi tertinggi Jawa Timur sepanjang tahun 2022. Sementara itu, meredanya tekanan inflasi subkelompok Pembelian Kendaraan terutama didorong oleh tekanan inflasi mobil yang melandai dari 8,22% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 7,46% (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan tersebut diindikasikan didorong oleh menurunnya permintaan kendaraan pasca berakhirnya insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)-Ditanggung Pemerintah (DTP)⁵⁰ pada September 2022.

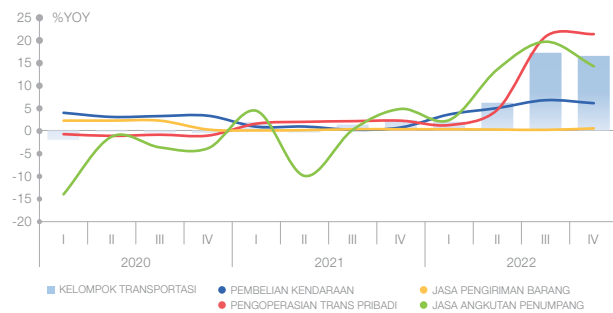
Penurunan inflasi lebih dalam pada kelompok Transportasi tertahan oleh meningkatnya tekanan inflasi subkelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi, terutama pada komoditas bensin. Pada triwulan IV 2022, BPS mencatat adanya peningkatan tekanan inflasi pada komoditas bensin, yaitu dari sebelumnya mengalami inflasi 33,08% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 33,76% (yoy) pada triwulan laporan.

48. Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jawa Timur tercatat melambat dengan capaian pertumbuhan pada triwulan IV 2022 sebesar 9,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,14% (yoy).

49. Kinerja konsumsi RT Jawa Timur tercatat melambat dengan capaian pertumbuhan pada triwulan IV 2022 sebesar 5,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,16% (yoy).

50. Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 tahun 2022 (PMK 5/2022).

Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi



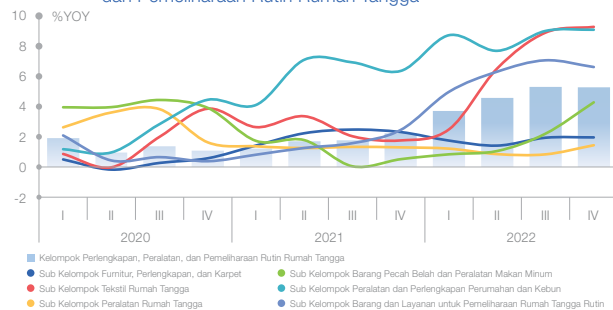
Sumber: BPS, diolah

Perkembangan ini menjadikan komoditas bensin sebagai penyumbang inflasi utama Jawa Timur sepanjang tahun 2022. Kembali meningkatnya tekanan inflasi pada komoditas bensin didorong oleh peningkatan harga BBM nonsubsidi di awal Desember 2022⁵¹. Lebih lanjut, peningkatan tekanan inflasi pada subkelompok Jasa Pengiriman Barang tidak terlepas dari peningkatan pemanfaatan jasa pengiriman berkenaan dengan gencarnya promo yang ditawarkan oleh berbagai *platform* penjualan *online* pada momentum HBKN Natal dan Tahun Baru.

Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

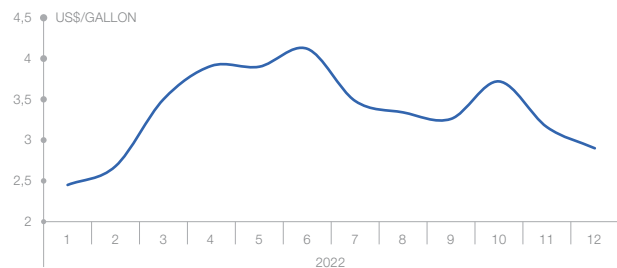
Inflasi kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (RT) pada triwulan IV 2022 terpantau sedikit melandai (Grafik 3.9). Capaian inflasi kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT tercatat sebesar 5,26% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,28% (yoy). Melandainya kelompok ini terutama didorong oleh semakin terkendalnya tekanan inflasi pada subkelompok Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan RT Rutin di tengah peningkatan subkelompok lainnya. Penurunan tekanan inflasi pada subkelompok Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan RT Rutin

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.8 Perkembangan Harga Avtur



Sumber: indexmundi.com, diolah

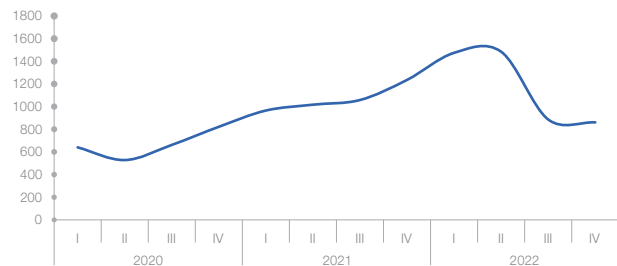
diindikasikan seiring dengan tren penurunan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia yang merupakan bahan baku beberapa komoditas pada subkelompok tersebut, seperti sabun (Grafik 3.10).

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya

Tingkat inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya terpantau stabil cenderung melandai. Pada triwulan IV 2022, inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya tercatat sebesar 2,37% (yoy), sedikit melandai dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,38% (yoy) (Grafik 3.11). Melandainya tekanan inflasi terutama didorong oleh semakin terkendalnya subkelompok Pemeliharaan, Perbaikan, dan Kemanan Tempat Tinggal, yang diindikasikan mengalami penurunan permintaan di akhir tahun seiring dengan tertahannya proses konstruksi berkenaan dengan curah hujan yang tinggi. Lebih lanjut, subkelompok Sewa Rumah juga tercatat mengalami inflasi yang melandai sejalan dengan pola historis di akhir tahun.

Penurunan inflasi lebih dalam pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya tertahan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada subkelompok Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

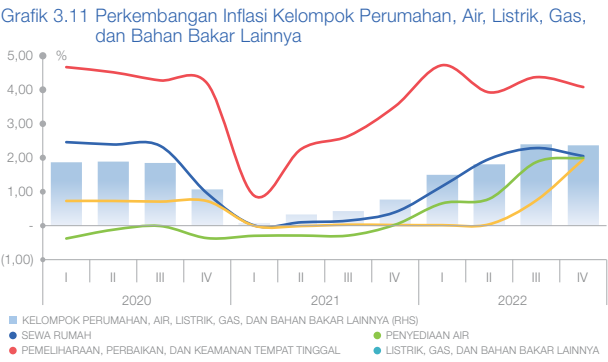
Grafik 3.10 Perkembangan Harga Crude Palm Oil (CPO) Dunia



Sumber: indexmundi.com, diolah

51. Pada 18 Desember 2022, Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 dengan detail sebagai berikut:

- Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina Turbo mengalami peningkatan dari Rp14.300,-/ liter menjadi Rp15.200,-/ liter atau naik sebesar 6,29%
- Harga BBM nonsubsidi jenis Dexlite mengalami peningkatan dari Rp18.000,-/ liter menjadi Rp18.300,-/ liter atau naik sebesar 1,67%
- Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina Dex mengalami peningkatan dari Rp18.550,-/ liter menjadi Rp18.800,-/ liter atau naik sebesar 1,33%.



Lainnya, serta subkelompok Penyediaan Air. Peningkatan inflasi pada kedua subkelompok diindikasikan seiring dengan peningkatan harga LPG non subsidi selama tahun 2022⁵², serta peningkatan tarif air minum PDAM di Kabupaten Jember sejak 1 November 2022.

3.3. ANALISIS INFLASI SPASIAL JAWA TIMUR

Pada triwulan IV 2022, dari 8 Kota/Kabupaten di Jawa Timur yang dihitung inflasinya, 5 wilayah mengalami tingkat inflasi tahunan yang melandai (Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sumenep), sementara 3 wilayah lainnya mengalami peningkatan tekanan inflasi tahunan (Kabupaten

Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Probolinggo). Secara tahunan, tingkat inflasi tertinggi terjadi di Kota Jember sebesar 7,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (6,41%, yoy) dan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,30% (yoy). Hal ini terutama diakibatkan oleh kenaikan tarif PDAM di Kabupaten Jember pada bulan November 2022 sebesar rata-rata 32% di tengah tarif PDAM kab/kota lain yang relatif tetap. Di sisi lain, inflasi tahunan terendah terjadi di Kabupaten Probolinggo dengan capaian inflasi pada triwulan IV 2022 sebesar 5,45% (yoy) terutama dipengaruhi oleh tingkat inflasi kelompok Transportasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya seiring pilihan jenis transportasi yang relatif lebih sedikit dan tingkat mobilitas yang lebih rendah.

Inflasi kelompok Transportasi terpantau persisten tinggi di seluruh Kabupaten/Kota, tertinggi di Kota Malang (Tabel 3.4). Masih tingginya tingkat inflasi kelompok Transportasi di Kota Malang tidak terlepas dari tingginya tingkat permintaan terhadap moda transportasi berkenaan dengan momentum HBKN Natal dan Tahun Baru mengingat Kota Malang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Jawa Timur. Selain itu, terbatasnya jumlah maskapai dan masih minimnya frekuensi penerbangan juga berkontribusi dalam menyumbang inflasi pada kelompok Transportasi di beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki layanan moda transportasi udara. Lebih lanjut, tekanan inflasi pada kelompok Transportasi juga didorong oleh penyesuaian harga tiket

Tabel 3.3 Inflasi Triwulan III 2022 dan Triwulan IV 2022 Jawa Timur (%yoy)

		WILAYAH								
		Jawa Timur	Surabaya	Malang	Kediri	Jember	Sumenep	Probolinggo	Madiun	Banyuwangi
Inflasi YOY	Tw III 2022	6,80	6,91	7,08	6,29	7,30	6,54	5,40	6,14	5,46
	Tw IV 2022	6,52	6,59	6,45	5,76	7,39	6,32	5,45	5,80	6,06

Sumber: BPS (diolah)

■ Lebih Tinggi dari Inflasi Jawa Timur

Tabel 3.4 Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa pada Triwulan IV 2022 (%yoy)

KELOMPOK BARANG	WILAYAH								
	Jawa Timur	Surabaya	Malang	Kediri	Jember	Sumenep	Probolinggo	Madiun	Banyuwangi
UMUM	6,52	6,59	6,45	5,76	7,39	6,32	5,45	5,80	6,06
Makanan, Minuman Dan Tembakau	6,98	6,91	6,76	5,28	8,27	7,65	6,84	6,41	8,87
Pakaian Dan Alas Kaki	3,71	4,12	2,90	1,07	5,26	4,74	1,45	3,46	1,55
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar RT	2,37	2,39	1,26	1,93	7,40	1,89	1,41	2,71	3,13
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin RT	5,26	4,97	1,03	5,87	7,14	7,38	3,26	3,06	4,87
Kesehatan	3,93	4,46	1,94	2,91	0,21	5,37	2,18	9,87	1,16
Transportasi	16,43	16,41	21,11	14,71	13,90	12,67	10,51	16,17	12,17
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-0,19	(0,13)	0,26	0,28	(0,66)	(0,38)	(0,07)	(1,73)	(2,05)
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	2,50	2,28	3,02	0,33	5,22	2,51	3,72	3,00	3,80
Pendidikan	5,07	5,47	3,62	4,69	2,71	2,45	7,90	0,70	4,07
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	8,99	10,03	5,78	9,20	7,45	10,15	4,80	4,32	3,76
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	6,57	5,95	8,55	10,26	6,89	6,11	9,22	7,72	7,32

Sumber: BPS (diolah)

■ Lebih Tinggi dari Inflasi Jawa Timur

52. Mengutip dari CNBC, berlaku sejak 27 Februari 2022, harga LPG non subsidi menjadi Rp15.500 per kg atau meningkat 14,81% dari sebelumnya yang sebesar Rp13.500 per kg. Peningkatan harga berlanjut kembali pada bulan Juli 2022 yang mana harga rata-rata LPG non subsidi 5,5 kg meningkat menjadi Rp100.000 – Rp127.000 per tabung, sedangkan LPG non subsidi 12 kg meningkat menjadi Rp213.000 – Rp270.000 per tabung (sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221228141715-4-400885/2022-serba-mahal-harga-lpg-sudah-naik-3x-jadi-segini/1>).

53. TAC adalah biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk penggunaan prasarana perkeretaapian yang dimiliki atau dioperasikan. Mengacu pada regulasi PMK No.138 tahun 2021, PT KAI diwajibkan membayar TAC sebesar Rp2,4 Triliun, lebih tinggi dari regulasi sebelumnya yang sebesar Rp388 Miliar.

Tabel 3.5 Komoditas Penyumbang Utama Sub Kelompok Makanan Spasial (%yoy)

KAB/ KOTA	CABAI RAWIT	CABAI MERAH	MINYAK GORENG	DAGING AYAM RAS	BAYAM	BAWANG PUTIH
JAWA TIMUR	(27,37)	(21,37)	(1,83)	(0,57)	(3,17)	(1,72)
SURABAYA	(23,13)	(18,98)	(0,48)	0,78	(0,97)	0,80
MALANG	(38,81)	(2,62)	(3,42)	0,16	0,63	(6,73)
KEDIRI	(29,73)	(39,51)	(14,51)	0,63	32,62	(5,47)
JEMBER	(27,22)	(22,33)	(4,63)	(12,40)	17,04	(13,95)
PROBOLINGGO	(50,30)	(38,10)	6,39	(4,43)	27,79	(7,33)
MADIUN	(19,91)	(7,98)	(14,10)	(8,79)	10,37	(4,48)
SUMENEP	(47,78)	(29,37)	18,78	2,67	(1,64)	(6,62)
BANYUWANGI	(26,35)	(32,79)	(7,08)	(6,47)	(3,59)	(8,60)

Sumber: BPS (diolah)

■ Lebih Rendah dari Deflasi Jawa Timur

kereta secara bertahap sebagai dampak dari pemberhentian subsidi BBM solar kepada PT KAI dan kenaikan *Track Access Charge* (TAC)⁵³. Namun demikian, tingkat inflasi diperkirakan akan melandai pada periode berikutnya seiring dengan ketersediaan moda transportasi yang diperkirakan terus bertambah dan melandainya dampak lanjutan kenaikan harga bahan bakar yang terjadi pada triwulan III 2022.

Deflasi pada komoditas aneka cabai mendorong semakin melandainya tingkat inflasi di mayoritas Kabupaten/Kota (Tabel 3.5). Pada triwulan IV 2022, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur mencatatkan terjadinya deflasi pada komoditas aneka cabai. Kondisi tersebut tidak terlepas dari harga aneka cabai yang sudah terlalu tinggi pada triwulan sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan produksi, penurunan kualitas panen akibat penyebaran penyakit antraknosa, serta distribusi yang terhambat. Selain faktor *high base effect* tersebut, deflasi pada komoditas aneka cabai juga ditopang oleh peningkatan pasokan berkenaan dengan panen raya secara serentak pada beberapa sentra produksi, yaitu yang berlokasi di Kabupaten Kediri, Blitar, Tuban, Malang, dan Probolinggo. Ke depan, perlu dilakukan upaya untuk meminimasi volatilitas harga aneka cabai, di antaranya melalui memastikan kontinuitas masa panen komoditas.

3.4. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Dalam menghadapi berbagai risiko inflasi ke depan, TPID Provinsi Jawa Timur telah menyusun roadmap pengendalian inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur tahun 2022-2024 yang mengacu pada pilar 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif).

Hingga bulan Desember 2022, beberapa program pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Jawa Timur meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan program intensifikasi dan optimalisasi bibit unggul;
2. Pelaksanaan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi menjadi IP 400;

3. Pengadaan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui penyerapan di beberapa sentra produksi Jawa Timur (mulai memasuki musim panen);
4. Pemantauan penyerapan beras dari sentra produksi Jawa Timur;
5. Pelaksanaan KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) beras medium;
6. Implementasi Program Komando Strategi Penggilingan Padi (Konstraling) sebagai bentuk antisipasi puncak panen dalam rangka optimalisasi penyerapan padi paska panen;
7. *Monitoring* dan pengawasan terhadap perusahaan perunggasan dan peternak yang menghasilkan produksi daging sapi potong;
8. Pemantauan harga komoditas di tingkat produsen dan konsumen daging sapi;
9. Pemerintah mendorong importir untuk bid lock harga kedelai impor meski lebih mahal, sehingga pengrajin tahu-tempe yang berjumlah 150ribu UMKM dapat tetap menjalankan usahanya;
10. Bantuan benih dan pupuk untuk tanam kedelai (1 kali tanam);
11. Pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM) secara *offline* dan OPM *Delivery* Paket Sembako (*online*) yang bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman *online*;
12. Pengawasan *monitoring* dan pengumpulan data potensi ketersediaan sapi siap potong di kab/kota guna memenuhi kebutuhan akan daging sapi lokal di pasaran;
13. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) di Jawa Timur memberikan peluang terciptanya rantai pasok yang lebih efisien dan mengurangi terjadinya potensi perpanjangan rantai perdagangan;
14. Subsidi kapal perintis kepulauan dengan rute pelayaran Probolinggo – Gili Ketapang – Gili Mangangin – Pamekasan;
15. Optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD) intra Jawa Timur untuk meminimalkan disparitas harga komoditas di Jawa Timur;
16. Implementasi kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui peningkatan intensitas operasi pasar yang lebih *targeted*; optimalisasi KAD; dan *urban farming*.

3.5. TRACKING INFLASI TRIWULAN I 2023

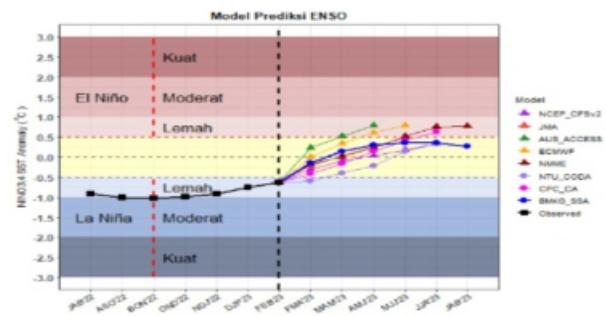
Inflasi tahunan IHK Jawa Timur pada awal triwulan I 2023 (Januari 2023) tercatat masih berada pada level yang tinggi, namun menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan IHK Jawa Timur pada Januari 2023 tercatat sebesar 6,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi triwulan IV 2022 yang sebesar 6,52% (yoy). Lebih rendahnya inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur pada Januari 2023 dibandingkan triwulan VI 2022 terutama disebabkan oleh penurunan inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Transportasi⁵⁴. Hal tersebut terutama didorong oleh deflasi pada komoditas daging dan telur ayam ras seiring dengan pasokan yang terjaga di tengah penurunan permintaan pasca libur Natal dan Tahun Baru. Di samping itu, upaya pengendalian inflasi pangan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur, baik melalui optimalisasi operasi pasar maupun penguatan KAD turut mendorong penurunan inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Januari 2023. Lebih lanjut, penurunan inflasi kelompok Transportasi (terutama angkutan udara) ditengarai didorong oleh normalisasi harga transportasi umum setelah libur Natal dan Tahun Baru dan penurunan tarif *fuel surcharge* yang dikenakan maskapai, serta seiring penurunan harga bensin nonsubsidi pada awal Januari 2023. Pencapaian inflasi Gabungan Kota IHK tahunan Jawa Timur pada Januari 2023 mendorong inflasi tahun kalender pada Januari 2023 sebesar 0,36% (ytd).

Dengan perkembangan tersebut dan beberapa indikator terkini, maka inflasi gabungan kota IHK tahunan Jawa Timur pada triwulan I 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022, namun masih berada di atas rentang sasaran inflasi 3,0 – 1,0% (yoy). Lebih rendahnya inflasi gabungan kota IHK tahunan Jawa Timur pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya diperkirakan terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Transportasi. Inflasi kedua kelompok tersebut pada triwulan I 2023 diperkirakan menurun dibandingkan triwulan IV 2022 sejalan dengan masuknya masa panen tanaman beras pada Februari 2023 – triwulan II 2023 sehingga mendukung ketersediaan pasokan beras sepanjang 2023. Lebih lanjut, normalisasi harga transportasi umum setelah libur Natal dan Tahun Baru seiring penurunan harga bensin nonsubsidi pada awal Januari 2023 diperkirakan mendukung potensi lebih rendahnya inflasi kelompok Transportasi pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan IV 2022.

Terjaganya stok bahan pangan strategis, penyelenggaraan operasi pasar yang efektif, serta faktor cuaca yang mendukung produksi pangan diperkirakan turut menjadi faktor penahan tekanan inflasi pada triwulan I 2023. Penguatan stok pangan komoditas strategis Jawa Timur diperkirakan menahan potensi peningkatan inflasi kelompok bahan makanan yang lebih tinggi. Ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan melalui penyelenggaraan operasi pasar yang efektif, turut menjaga kestabilan harga pangan di Jawa Timur. Lebih lanjut, masuknya masa panen raya pada pertengahan triwulan I 2023 diperkirakan turut mendukung

terjaganya pasokan pangan yang berimplikasi pada rendahnya inflasi kelompok pangan. Di samping itu, La Nina di Jawa Timur diperkirakan semakin melemah dan beralih menuju kondisi El Nino lemah pada bulan Februari-Maret 2023. Hal ini diperkirakan berpotensi turut mendukung percepatan masa tanam dan peningkatan luas tanam (Grafik 3.12).

Grafik 3.12 Model Prediksi ENSO



Sumber : BMKG, Februari 2023

54. Inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada Januari 2023 tercatat sebesar 6,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan VI 2022 yang sebesar 6,99% (yoy). Sementara Inflasi kelompok Transportasi pada Januari 2023 tercatat sebesar 14,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan VI 2022 yang sebesar 16,43% (yoy)

BOKS 3

Potensi Inflasi HBKN, Komoditas Penyumbang Persistensi Inflasi HBKN Utama dan Mitigasi Pengendalian Inflasi Hari Raya

Tekanan inflasi menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) cenderung meningkat menjelang dan saat perayaan HBKN. Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan komoditas yang tidak diimbangi oleh pasokan yang cukup. Selain mismatch pasokan dan permintaan, gangguan pasokan, ekspektasi inflasi yang meningkat, pengaruh pergerakan harga dunia/daerah lain juga seringkali meningkatkan inflasi HBKN.

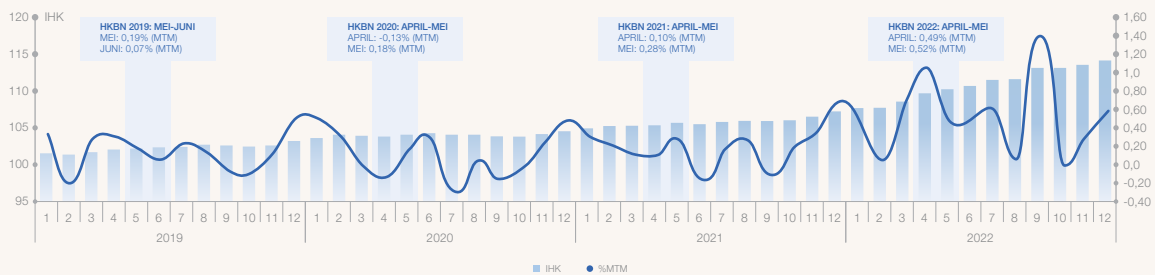
Berdasarkan data historis, inflasi cenderung meningkat menjelang hingga saat perayaan HBKN. Pola pergerakan inflasi ini konsisten terjadi terutama pada saat sebelum pandemi dan kembali terjadi pasca pelonggaran migrasi masyarakat diberlakukan di tahun 2022. Selama pandemi, inflasi HBKN juga masih terjadi namun dengan kenaikan yang relatif minim.

Berdasarkan data inflasi 5 tahun terakhir, didapatkan bahwa setidaknya terdapat 11 komoditas yang secara persisten

menjadi penyumbang inflasi utama di kota perhitungan inflasi di Jawa Timur. Ayam hidup dan daging ayam ras menjadi komoditas penyumbang inflasi yang paling sering menjadi penyumbang inflasi di seluruh kota perhitungan inflasi dikarenakan peningkatan permintaan yang tinggi selama hari raya. Demikian pula dengan komoditas bahan makanan lainnya seperti apel, telur ayam ras, cabai merah, minyak goreng, bawang merah dan daging sapi. Adapun tingginya kebutuhan transportasi selama mudik lebaran juga cenderung meningkatkan harga jual tiket angkutan udara dan angkutan antarkota. Kebutuhan akan emas perhiasan juga meningkatkan harga jual emas sepanjang hari raya.

Perencanaan pasokan menjadi faktor yang krusial dalam pengendalian inflasi tiap komoditas selain juga kondisi cuaca terlebih pada komoditas hortikultura. Data neraca produksi dan konsumsi komoditas menunjukkan kecenderungan meningkatnya inflasi pada komoditas cabai merah, bawang merah, daging ayam ras dan telur ayam ras

Grafik 1. IHK dan Inflasi Jawa Timur sepanjang Hari Besar Keagamaan Nasional



Sumber: BPS, diolah (2023)

Tabel 1. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama HBKN

KOMODITAS UTAMA	Jatim	Surabaya	Malang	Kediri	Jember	Madiun	Probolinggo	Sumenep	Banyuwangi
AYAM HIDUP	7	4	5	3	1	2	3	9	5
DAGING AYAM RAS	6	6	7	7	5	7	6	5	6
ANGKUTAN UDARA	6	5	6		3				3
APEL	5	4		4		4	1	2	
EMAS PERHIASAN	4	4	3	4		2	7	4	5
TELUR AYAM RAS	4	4	4	4	3	3	4	2	5
CABAI MERAH	4	4	3	3	2	2	1	4	2
MINYAK GORENG	4	4	1	2	3	4	3	1	3
ANGKUTAN ANTAR KOTA	4	3	1	2	1	5	4	3	
BAWANG MERAH	3	3	3	3	2	3	3	4	3
DAGING SAPI	3	2	3		4	1	4	6	4

Sumber: BPS, diolah (2023)

BOKS 3

ketika terjadi net konsumsi komoditas, demikian pula sebaliknya. Pada komoditas minyak goreng dan emas perhiasan, selain peningkatan permintaan, inflasi juga dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas dunia. Hal ini lebih disebabkan karena kedua komoditas tersebut merupakan komoditas ekspor unggulan Jawa Timur, sehingga kenaikan/penurunan harga dunia, secara langsung mempengaruhi pergerakan harga jual di domestik.

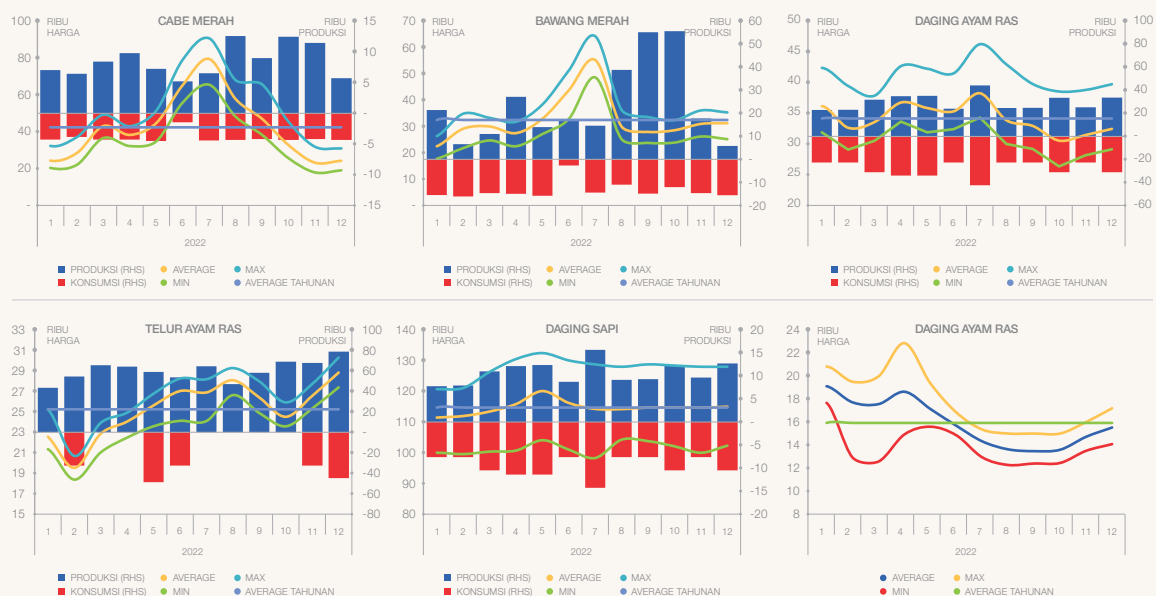
Tingginya inflasi angkutan udara dan angkutan antarkota terindikasi lebih disebabkan oleh tidak elastisnya penyediaan pasokan angkutan terhadap peningkatan permintaan pada menjelang dan saat perayaan HBKN. Kondisi tersebut antara lain akibat diperlukannya pengurusan izin penambahan trayek dan penambahan investasi yang dirasa kurang menguntungkan untuk penyediaan angkutan pada jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, penyediaan tambahan pasokan transportasi lebih memerlukan waktu dalam penyiapannya agar peningkatan pasokan dapat dilakukan pada saat dibutuhkan jelang hari raya. Sementara itu, tingginya inflasi apel selama HBKN menunjukkan preferensi konsumsi buah masyarakat selama hari raya. Demikian pula dengan kenaikan inflasi daging sapi yang lebih disebabkan oleh kenaikan permintaan menjelang hari raya.

Walaupun peningkatan permintaan daging sapi jelang hari raya tidak terlalu besar, namun ekspektasi peningkatan harga juga menjadi pemicu inflasi komoditas ini.

Penyediaan pasokan juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang digunakan sebagai dasar penentuan masa tanam dan prognosa panen, terutama pada komoditas tanaman pangan, ikan tangkap dan hortikultura. Masa tanam beras (tanaman pangan) sangat dipengaruhi oleh prakiraan cuaca ke depan karena berpengaruh besar pada produktivitas yang dihasilkan. Dengan karakter tanaman yang memerlukan air cukup pada masa tanam dan minim air menjelang panen, maka petani cenderung menanam pada saat mulai musim hujan dan diharapkan sudah panen hingga menjelang musim hujan berakhir. Pada daerah irigasi, kendala kebutuhan air dapat diatasi dari pasokan air irigasi yang ada, sehingga waktu tanam dan panen relatif lebih dapat diatur.

Pada tanaman hortikultura, walaupun memiliki aliran irigasi, namun faktor cuaca tetap memiliki pengaruh penting pada produksi tanaman. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya hama tanaman yang relatif lebih banyak pada musim penghujan, ataupun karena daya simpan produk yang lebih rendah ketika terkena air, sehingga biaya *treatment* setelah

Grafik 2. Rata-Rata Harga Jual 6 Komoditas Penyumbang Inflasi Utama HBKN



Sumber : Siskaparbapo, dan Satgas Pangan (diolah)

BOKS 3

panen juga cenderung lebih tinggi. Berdasarkan data prognosa panen, tanaman hortikultura secara umum mengalami peningkatan produksi selama masa transisi musim dan musim kemarau. Hal ini terutama disebabkan oleh relatif minimnya hama dan relatif lebih panjangnya masa simpan karena perawatan pasca panen yang relatif lebih mudah pada saat kemarau dibanding pada saat musim hujan.

Pada komoditas unggas, perencanaan produksi hasil unggas menjadi faktor pemicu utama stabilitas pasokan.

Dengan neraca konsumsi yang relatif lebih mudah diprediksi, besar pasokan dapat direncanakan mengikuti prognosa kenaikan konsumsi jelang hari raya. Dengan waktu produksi daging ayam ras selama 28-30 hari, produksi daging ayam ras dan ayam hidup dapat ditingkatkan pada setidaknya 1 bulan menjelang peningkatan konsumsi daging ayam ras/ayam hidup. Demikian pula dengan peningkatan produksi telur yang harus sudah direncanakan setidaknya sebelum 6 bulan menjelang kenaikan permintaan. Hal ini disebabkan oleh waktu bertelur ayam yang membutuhkan setidaknya 6 bulan sebelum ayam petelur mulai berproduksi. Sehingga dengan penyusunan prognosa konsumsi yang tepat, maka penyediaan produksi ayam dapat diatur mengikuti kenaikan permintaan yang ada.

Selain menjaga keseimbangan produksi dan konsumsi, stabilisasi harga juga dapat dilakukan melalui perdagangan antarwilayah. Berdasarkan data siskaperbapo, dari keenam komoditas penyumbang inflasi Utama HBKN, hanya komoditas telur ayam ras dan minyak goreng yang harganya relatif terkonsentrasi, sedangkan 4 komoditas lainnya (bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi) relatif memiliki harga yang terdiversifikasi. Hal ini berarti mekanisme perdagangan antardaerah dapat berjalan secara natural dikarenakan adanya potensi profit yang cukup tinggi dengan menjual pada daerah yang mengalami kenaikan harga signifikan. Pada komoditas dengan harga terkonsentrasi, mekanisme pasar tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan tingginya ongkos angkut lebih besar dari potensi profit karena perdagangan antardaerah yang dilakukan.

Berdasarkan data spasial, terlihat bahwa perdagangan antardaerah pada komoditas bawang merah dan cabai merah relatif dapat dilakukan secara lintas kabupaten/kota. Perdagangan antardaerah komoditas daging ayam ras juga dapat dilakukan, namun terbatas hanya pada 7 kabupaten/kota, sedang daerah lainnya memiliki harga jual yang relatif terkonsentrasi. Demikian pula pada komoditas daging sapi yang hanya dapat dilakukan ke dua

Tabel 2. Prakiraan Cuaca dan Jadwal Panen Komoditas Penyumbang Inflasi Utama

2023		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Jadwal HBKN/Kegiatan				HBKN Idul Fitri									Nataru
Prakiraan Cuaca	Curah Hujan	Cenderung Normal						Lebih tinggi dari normal			Cenderung Normal		
	Perbandingan dg 2022	Lebih Tinggi	Lebih Rendah	Sama	Sama	Lebih Rendah	Lebih Rendah	Lebih Rendah	Lebih Rendah	Lebih Rendah	Lebih Rendah	Lebih Rendah	Lebih Rendah
Prakiraan Musim Hujan				Musim Transisi						Musim Transisi			
Prakiraan Jadwal Panen	Beras												
	Cabai Merah												
	Cabai Rawit												
	Bawang Merah												

Sumber : FGD Dinas Pertanian, (diolah)

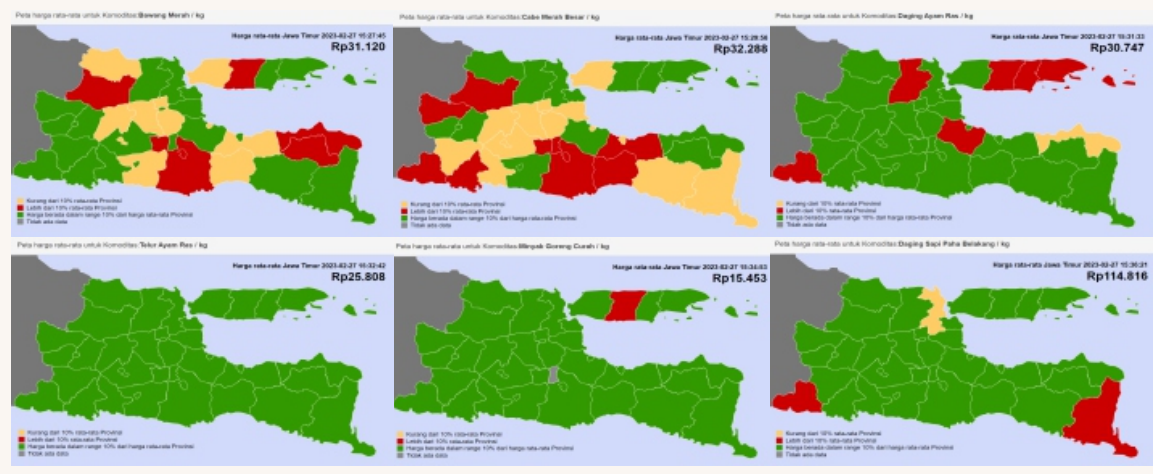
Tabel 3. Rata-rata Harga, Harga Minimal dan Maksimal, serta Deviasi Harga 6 Komoditas Penyumbang Inflasi Utama HBKN

KAB/ KOTA	BAWANG MERAH	CABAI MERAH	DAGING AYAM RAS	TELUR AYAM RAS	MINYAK GORENG	DAGING SAPI
Average	Rp39.970	Rp32.002	Rp31.065	Rp26.351	Rp15.803	Rp114.875
Min	Rp30.666	Rp24.333	Rp27.000	Rp25.000	Rp14.500	Rp101.666
Max	Rp48.666	Rp41.000	Rp38.500	Rp27.666	Rp17.500	Rp130.000
Dev Min	23,3%	24,0%	13,1%	5,1%	8,2%	11,5%
Dev Max	21,8%	28,1%	23,9%	5,0%	10,7%	13,2%

Sumber : Siskaperbapo, (diolah)

BOKS 3

Grafik 3. Peta Spasial Sebaran Rata-Rata Harga Jual 6 Komoditas Penyumbang Inflasi Utama HBKN di Provinsi Jawa Timur



kabupaten/kota, dan minyak goreng yang memiliki harga tinggi hanya pada satu kabupaten, sedangkan pada daerah lain, harga jual relatif terkonsentrasi. Apabila terjadi inflasi yang tinggi, maka diperlukan intervensi pemerintah di daerah dengan harga yang terkonsentrasi tersebut agar diskrepansi harga dapat diminimalisasi.

Perdagangan antarwilayah memungkinkan untuk dilakukan dengan provinsi lainnya. Berdasarkan data PIHPS rata-rata harga jual Jawa Timur (Jatim) relatif lebih rendah dari rata-rata nasional, sehingga KAD yang lebih mungkin dilakukan adalah ekspor antardaerah. Namun, ekspor antardaerah berpotensi mengganggu pasokan di provinsi Jatim pada kondisi tertentu. Berdasarkan data rata-rata harga jual antarprovinsi didapatkan bahwa dari 6 komoditas utama penyumbang inflasi HBKN tidak terdapat komoditas dengan harga yang terkonsentrasi. Hal ini berarti perdagangan antardaerah

dapat secara natural dilakukan dikarenakan oleh cukup tingginya profit yang bisa diperoleh dengan melakukan perdagangan antardaerah. Bila dibandingkan dengan rata-rata harga jual di Jawa Timur, didapatkan bahwa rata-rata harga jual Jatim jauh lebih rendah dari rata-rata harga jual nasional. Deviasi harga rata-rata Jatim dengan harga jual tertinggi provinsi lain juga sangat tinggi, yang menunjukkan adanya potensi profitabilitas yang tinggi apabila dilakukan perdagangan antarwilayah. Dengan demikian, meskipun neraca produksi komoditas di Jawa Timur masih mengalami surplus, tekanan inflasi dapat meningkat akibat tingginya ekspor antardaerah.

Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan KAD yang terukur sekiranya dapat dilakukan, agar keuntungan yang didapatkan dari perdagangan antardaerah tidak berdampak pada penurunan pasokan di Jawa timur yang pada gilirannya menekan daya beli masyarakat.

Tabel 3. Rata-rata Harga, Harga Minimal dan Maksimal, serta Deviasi Harga 6 Komoditas Penyumbang Inflasi Utama HBKN Jatim dibanding Provinsi Lain di Indonesia

KAB/ KOTA	BERAS	BAWANG MERAH	CABE MERAH	DAGING AYAM RAS	TELUR AYAM RAS	MINYAK GORENG	DAGING SAPI
Average	Rp13.191	Rp38.794	Rp46.732	Rp33.787	Rp28.657	Rp19.410	Rp134.103
Min	Rp10.750	Rp28.900	Rp29.750	Rp20.750	Rp23.600	Rp16.350	Rp101.000
Max	Rp17.150	Rp60.000	Rp71.600	Rp45.750	Rp38.200	Rp24.700	Rp158.350
Jatim	Rp12.100	Rp32.400	Rp32.200	Rp30.900	Rp25.750	Rp18.250	Rp116.550
Dev Min	18,5%	25,5%	36,3%	38,6%	17,6%	15,8%	24,7%
Dev Max	30,0%	54,7%	53,2%	35,4%	33,3%	27,3%	18,1%
Dev Jatim Min	11,2%	10,8%	7,6%	32,8%	8,3%	10,4%	13,3%
Dev Jatim Max	41,7%	85,2%	122,4%	48,1%	48,3%	35,3%	35,9%

Sumber : PIHPS, (diolah)

BOKS 3

Grafik 4. Peta Spasial Sebaran Rata-Rata Harga Jual 6 Komoditas Penyumbang Inflasi Utama HBKN di Indonesia



Sumber : PHPS, (diolah)

Inflasi HBKN perlu dijaga tetap rendah dan terkendali agar daya beli masyarakat selama hari raya dapat terjaga. Berdasarkan pemetaan persistensi inflasi hari raya, setidaknya dengan mengendalikan 11 komoditas penyumbang inflasi utama hari raya, inflasi dapat lebih terjaga. Dari sisi produksi, komoditas telur ayam ras, cabai merah, bawang merah dan apel sudah lewat masa produksi, namun penyiapan pasokan melalui perdagangan antarwilayah masih bisa dilakukan. Penyediaan daging ayam ras, ayam hidup, minyak goreng dan emas perhiasan masih bisa ditingkatkan dengan meningkatkan produksi sesuai dengan karakter produksi masing-masing. Komoditas daging sapi bisa dipenuhi baik melalui produksi daging sendiri, ataupun menambah dari impor komoditas. Mitigasi angkutan udara dan angkutan antarkota bisa dilakukan melalui koordinasi bersama kementerian perhubungan untuk memastikan ketersediaan intermoda transportasi selama hari raya.

Adapun untuk penanganan inflasi jangka pendek, TPID dapat membantu menjaga stabilitas harga melalui beberapa langkah nyata seperti melakukan operasi pasar yang tidak terbatas pada 11 komoditas penyumbang inflasi utama, melainkan juga komoditas lainnya berdasarkan hasil pemantauan inflasi dalam Siskaperbapo. Monitoring pasokan menjadi hal esensial untuk memastikan jumlah pasokan cukup untuk memenuhi kenaikan permintaan jelang hari raya. TPID dapat melakukan subsidi ongkos angkut terutama bagi komoditas dengan harga yang terkonsentrasi. Apabila terjadi penurunan pasokan, maka pemerintah dapat mulai mendorong impor barang dari daerah lain.



BAB IV

Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



4.1. KONDISI UMUM

Perlambatan kinerja intermediasi perbankan terjadi baik di sektor korporasi maupun Rumah Tangga (RT). Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi dan RT tercatat menurun pada triwulan IV 2022 sejalan dengan deselerasi kinerja seluruh LU utama Jawa Timur dan penurunan keyakinan RT terhadap kondisi ekonomi pada triwulan laporan. Di sisi lain, kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) korporasi tercatat mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa korporasi masih menahan investasi maupun ekspansi usaha dan cenderung menyimpan modal di perbankan. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor RT yang mencatatkan peningkatan DPK yang diindikasikan sebagai respon dari eskalasi ketidakpastian global dan masih tingginya tingkat inflasi. Lebih lanjut, peningkatan DPK juga sejalan dengan kebijakan peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia yang telah ditransmisikan dengan baik.

Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga, terindikasi dari risiko kredit dan risiko likuiditas perbankan di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 yang masih berada dalam batas aman. Secara agregat, risiko kredit di Jawa Timur tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,27%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,89%. Lebih lanjut, risiko likuiditas terpantau cenderung rendah yang tercermin dari rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 89,07% atau masih dalam kisaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)⁴⁷.

4.2. PEMBIAYAAN DAERAH DI JAWA TIMUR

4.2.1. Asesmen Pembiayaan Korporasi

4.2.1.1 Kinerja Korporasi di Jawa Timur

Kinerja korporasi pada triwulan IV 2022 terpantau melambat sejalan dengan perlambatan kinerja ekonomi Jawa Timur. Kinerja korporasi yang menurun pada triwulan IV 2022 sejalan dengan deselerasi kinerja seluruh LU utama Jawa Timur. Penurunan juga tercermin dari perlambatan kinerja penyaluran kredit kepada korporasi yang tercatat tumbuh 8,19% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,31% (yoy).

Perlambatan kinerja korporasi seiring dengan penurunan permintaan domestik pada triwulan IV 2022. Penurunan permintaan domestik tercermin pada kinerja konsumsi RT Jawa Timur yang tercatat menurun dari 7,15% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 4,20% (yoy) pada triwulan laporan. Kondisi ini sejalan dengan telah selesainya beberapa stimulus Pemerintah, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) yang berdampak pada penurunan permintaan, khususnya untuk komoditas properti dan otomotif. Selain itu, dampak rambatan kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) terhadap berbagai komoditas perdagangan juga berimplikasi pada tertahannya kinerja konsumsi RT pada triwulan laporan.

Pelambatan kinerja korporasi juga disebabkan oleh perlambatan permintaan global. Masih berlanjutnya konflik geopolitik Rusia-Ukraina, Tiongkok-Taiwan, dan Amerika Serikat-Arab Saudi berdampak pada disrupsi rantai pasokan global yang berimplikasi pada kebijakan proteksionisme global. Hal tersebut berdampak pada penurunan perdagangan global yang turut menekan kinerja ekspor LN Jawa Timur. Berdasarkan data BPS, kinerja ekspor LN Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tercatat tumbuh 1,45% (yoy) atau menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,53% (yoy). Penurunan ini seiring dengan perlambatan kinerja ekonomi mitra dagang utama Jawa Timur pada triwulan laporan, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat⁴⁸.

Kenaikan harga komoditas internasional berpotensi memberi tekanan lebih dalam kepada kinerja korporasi (Tabel 4.1). Berdasarkan data *World Bank* (posisi Desember 2022), harga komoditas impor bahan baku industri utama Jawa Timur, yaitu gandum dan produk gandum, serta harga energi terpantau meningkat signifikan pada triwulan laporan. Hal ini dapat memicu terjadinya penurunan impor bahan baku industri. Selain itu, peningkatan harga bahan baku dan energi dapat memicu terjadinya peningkatan biaya produksi yang berpotensi mengurangi daya saing produk ekspor dan mengurangi *margin* korporasi. Namun demikian, potensi perlambatan kinerja korporasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas ekspor unggulan Jawa Timur, yakni minyak sawit dan emas.

Tabel 4.1 Harga Komoditas Internasional

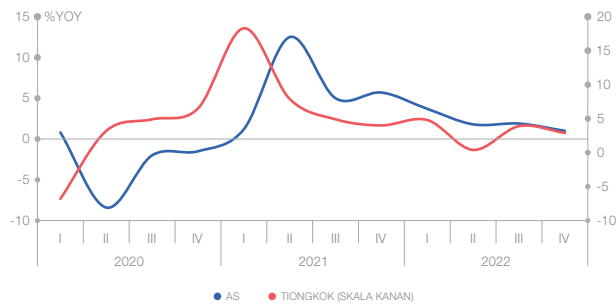
KOMODITAS	UNIT	2018	2019	2020	2021	2022
Energi						
Coal, Australia	\$/mt	107	77,9	60,8	138,1	344,9
Crude Oil	\$/bbl	68,3	61,4	41,3	69,1	97,1
Natural Gas, US	\$/mmbtu	3,2	2,6	2,0	3,9	6,4
Non Energi						
Komoditas Ekspor						
Minyak Sawit	\$/mt	639	601	752	1131	1276
Udang	\$/kg	12,2	12,6	12,7	13,7	13,5
Emas	\$/toz	1.269	1.392	1.770	1.800	1.801
Kayu	\$/cum	270	273	279	271	228
Komoditas Impor						
Gandum	\$/mt	210	202	232	315	430
Kedelai	\$/mt	394	369	407	583	675
Beras	\$/mt	421	418	497	458	437
Alumunium	\$/mt	2.108	1.794	1.704	2.473	2.705

Sumber : World Bank, Februari 2023

47. Berdasarkan PBI No.20/4/PBI/2018, tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio LDR ditetapkan pada rentang 80%-92%.

48. Pada triwulan IV 2022 kinerja mitra dagang utama yaitu Tiongkok melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tiongkok melambat dari 3,9% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 2,9% (yoy) pada triwulan IV 2022 dan Amerika Serikat tercatat 1,0% (yoy) pada triwulan IV 2022 dari sebelumnya tumbuh 1,9% (yoy) pada triwulan III 2022.

Grafik 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama



Sumber : tradingeconomics.com

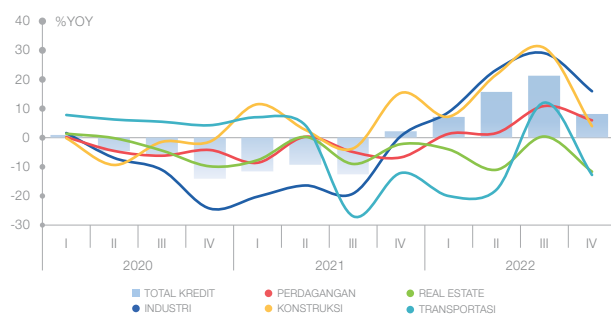
4.2.1.2 Pembiayaan Perbankan pada Sektor Korporasi

4.2.1.2.1 Penyaluran Kredit Korporasi

Kinerja penyaluran kredit korporasi di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tercatat melambat (Grafik 4.2). Perlambatan kinerja penyaluran kredit korporasi terjadi pada seluruh jenis kredit, yaitu Kredit Konsumsi (KK), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Modal Kerja (KMK). Pada triwulan IV 2022, penyaluran KK kepada korporasi di Jawa Timur tercatat berkontraksi 85,18% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 22,44% (yoy). Kondisi tersebut tidak terlepas dari peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia⁴⁹ yang menyebabkan korporasi cenderung menahan konsumsi. Pertumbuhan penyaluran KI dan KMK di Jawa Timur juga tercatat melambat dari yang sebelumnya tumbuh masing-masing sebesar 23,20% (yoy) dan 20,57% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi 9,27% (yoy) dan 8,33% (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan kinerja penyaluran KI dan KMK mengindikasikan belum adanya kebutuhan peningkatan kapasitas operasional produksi dan ekspansi korporasi di Jawa Timur.

Perlambatan penyaluran kredit korporasi terjadi pada seluruh LU utama. Perlambatan terutama terjadi pada LU Konstruksi yaitu dari yang sebelumnya tumbuh 30,83% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi hanya tumbuh 3,95% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, LU Transportasi dan *Real Estate* tercatat mengalami kontraksi pada triwulan IV 2022 yaitu masing-masing sebesar

Grafik 4.2 Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

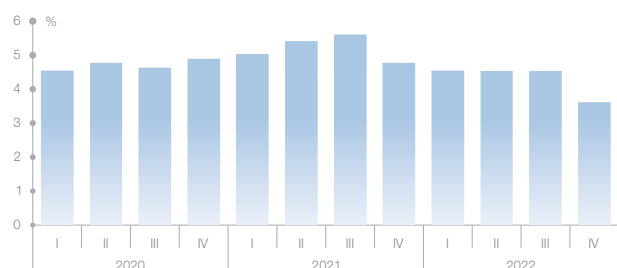
49. Pada tanggal 22 Desember 2022, BI7DRR tercatat sebesar 5,50%, meningkat dibandingkan posisi BI7DRR pada triwulan III 2022 (posisi 22 September 2022) yang sebesar 4,25%.

12,79% (yoy) dan 11,66% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh positif sebesar 12,05% (yoy) dan 0,41% (yoy). Penurunan kinerja penyaluran kredit korporasi pada LU Konstruksi dan Real Estate terindikasi terjadi seiring dengan telah selesainya stimulus insentif PPN DTP untuk sektor properti (KPR) per September 2022. Kondisi tersebut mengakibatkan tertahannya permintaan proyek pembangunan dari konsumen sehingga permintaan pembiayaan dari pelaku usaha turun. Sementara itu, kembali berkontraksinya kinerja penyaluran kredit korporasi pada LU Transportasi tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM pada September 2022 yang dinilai perbankan akan meningkatkan risiko. Secara umum, kenaikan harga BBM akan menambah beban biaya debitur sehingga berpotensi mempengaruhi kemampuan debitur dalam melunasi kredit kepada perbankan.

Risiko kredit korporasi membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya⁵⁰ (Grafik 4.3). Perbaikan risiko kredit korporasi terjadi pada beberapa LU utama Jawa Timur, yaitu LU Industri, Perdagangan, *Real Estate*, dan Transportasi. Perbaikan risiko kredit tersebut terutama didorong oleh kembali pulihnya mobilitas masyarakat yang diiringi peningkatan aktivitas usaha sehingga mampu mendorong perbaikan *cashflow* korporasi. Di sisi lain, rasio NPL pada LU konstruksi pada triwulan IV 2022 tercatat meningkat yang diindikasikan sejalan dengan peningkatan harga bahan bangunan dan peralatan konstruksi yang mayoritas masih dipenuhi secara impor. Peningkatan harga tersebut seringkali menyebabkan realisasi proyek konstruksi lebih besar dari rencana anggaran sehingga berpotensi dilakukan penundaan atau penyesuaian lingkup proyek.

Lebih lanjut, perbaikan risiko kredit korporasi di Jawa Timur, turut didukung pemberlakuan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Covid-19 (POJK Kebijakan BPR/BPRS) mengenai keringanan restrukturisasi utang bagi debitur pelaku

Grafik 4.3 Perkembangan Rasio NPL Kredit Korporasi Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

50. NPL gross korporasi Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tercatat 3,61%, menurun atau membaik dibandingkan triwulan III 2022 sebesar 4,54%. Sementara itu, NPL net korporasi juga mengalami peningkatan pada triwulan IV 2022 sebesar 3,38% dibandingkan triwulan III 2022 (3,30%).

UMKM yang terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada beberapa sektor tertentu. Kebijakan yang kembali diperpanjang hingga 31 Maret 2023 tersebut diperkirakan mampu mendorong perbaikan risiko kredit korporasi.

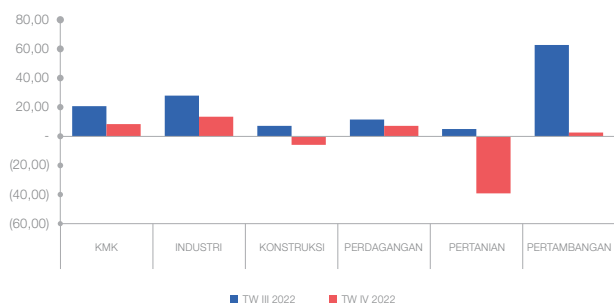
Kredit Modal Kerja (KMK) Korporasi

Perlambatan penyaluran KMK korporasi terjadi pada semua LU utama (Grafik 4.4). Penurunan pertumbuhan kinerja penyaluran KMK terdalam terjadi pada LU Pertambangan dan LU Pertanian. Pada triwulan IV 2022, kinerja penyaluran KMK pada LU Pertambangan tercatat tumbuh 2,58% (yoy), menurun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 62,61% (yoy). Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh faktor *base effect* seiring melesatnya harga komoditas pertambangan di tahun sebelumnya yang mendorong peningkatan penyaluran kredit pada triwulan IV 2021. Sementara itu, penyaluran KMK pada LU Pertanian tercatat berkontraksi 39,31% (yoy), menurun dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 4,99% (yoy). Penurunan tersebut ditengarai oleh penurunan kapasitas utilisasi akibat faktor cuaca⁵¹ pada periode laporan sehingga pelaku usaha cenderung menunggu perkembangan cuaca yang lebih stabil. Secara agregat, rasio NPL KMK korporasi di Jawa Timur terpantau membaik pada triwulan laporan (Grafik 4.5).

Kredit Investasi (KI) Korporasi

Perlambatan penyaluran KI korporasi terjadi pada semua LU utama, dengan perlambatan terdalam terjadi pada LU Konstruksi (Grafik 4.4). Pada triwulan IV 2022, kinerja penyaluran KI pada LU Konstruksi tercatat tumbuh 13,25% (yoy), menurun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 60,95% (yoy). Penurunan tersebut seiring dengan penurunan jumlah proyek konstruksi baru di triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya, serta mundurnya penyelesaian PSN jalan tol Probolinggo-Banyuwangi ke tahun 2023. Selain itu, harga bahan baku konstruksi yang masih tinggi serta eskalasi ketidakpastian global turut menahan *appetite* investor. Secara agregat, rasio NPL KI korporasi di Jawa Timur terpantau stabil cenderung lebih baik, yaitu dari 2,61% pada triwulan III 2022 menjadi 2,59% pada triwulan laporan (Grafik 4.7).

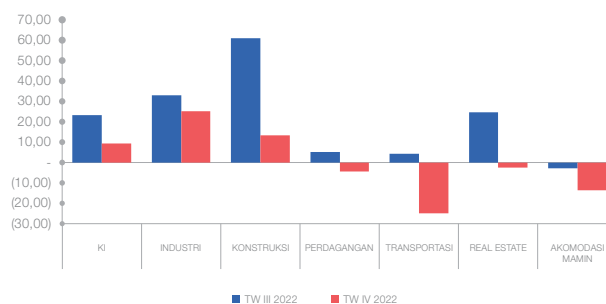
Grafik 4.4 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja Korporasi



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

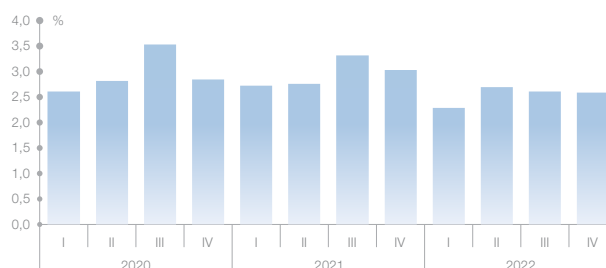
51. Hasil liason Bank Indonesia Jawa Timur pada triwulan IV 2022 menyampaikan bahwa salah satu kontak pelaku usaha di LU Pertanian dengan hasil produksi kopi, kakao, teh, dan karet, mengalami penurunan kapasitas utilisasi akibat faktor cuaca yang menyebabkan penurunan produksi.

Grafik 4.6 Pertumbuhan Kredit Investasi Korporasi



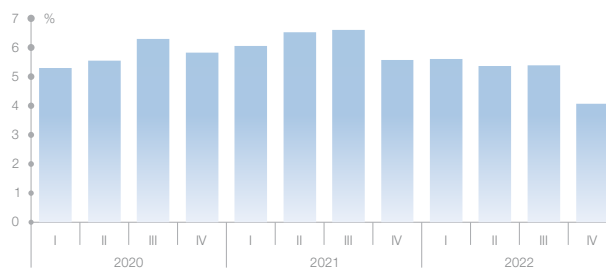
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.7 Perkembangan Rasio NPL Kredit Investasi Korporasi



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.5 Perkembangan Rasio NPL Kredit Modal Kerja Korporasi

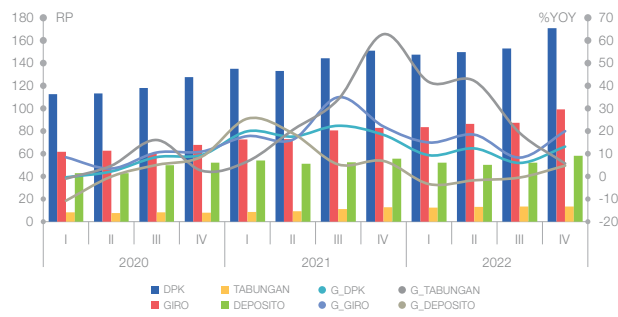


Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

4.2.1.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Korporasi

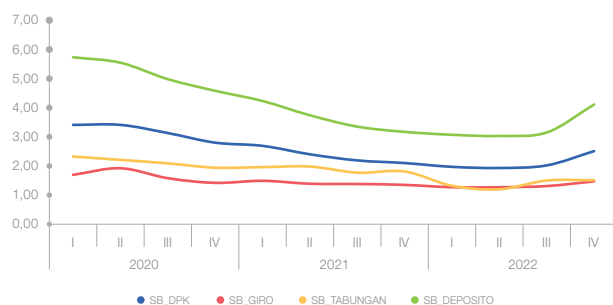
Pertumbuhan DPK korporasi di perbankan meningkat pada triwulan IV 2022 (Grafik 4.8). DPK korporasi di perbankan tercatat tumbuh 13,13% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,93% (yoy). Berdasarkan komponennya, DPK korporasi masih didominasi oleh giro dan desposito dengan pangsa masing-masing sebesar 58,01% dan 34,08% dari total DPK di perbankan, sementara tabungan hanya sebesar 7,91%. Pada triwulan IV 2022, peningkatan DPK korporasi didorong oleh peningkatan komponen giro dan deposito yang tercatat tumbuh masing-masing sebesar 19,95% (yoy) dan

Grafik 4.8 Pertumbuhan DPK Korporasi



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.9 Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK Korporasi



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

4,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 8,29% (yoy) untuk komponen giro dan terkontraksi 0,51% (yoy) untuk komponen deposito. Di sisi lain, komponen tabungan tercatat melambat dari yang sebelumnya tumbuh 19,14% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi tumbuh 5,66% (yoy) pada triwulan laporan. Secara umum, peningkatan DPK korporasi di tengah perlambatan kinerja penyaluran kredit korporasi mengindikasikan bahwa korporasi masih menahan investasi maupun ekspansi usaha dan cenderung menyimpan modal di perbankan.

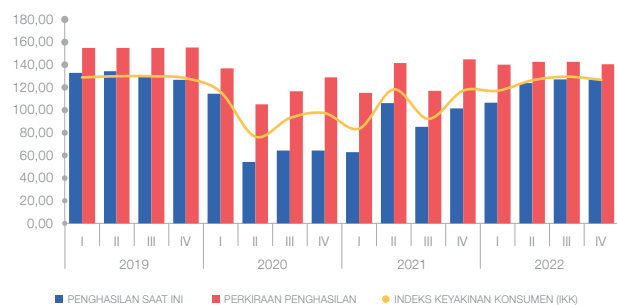
Suku bunga tertimbang DPK korporasi tercatat meningkat dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 4.9). Peningkatan suku bunga terjadi pada seluruh komponen DPK dengan peningkatan tertinggi pada komponen deposito. Suku bunga tertimbang deposito pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 4,11%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,15%. Peningkatan juga terjadi pada suku bunga tertimbang giro dan tabungan yang masing-masing meningkat dari 1,31% dan 1,50% pada triwulan III 2022 menjadi 1,47% dan 1,51% pada triwulan laporan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia telah ditransmisikan pada suku bunga perbankan.

4.2.2. Asesmen Pembiayaan Rumah Tangga (RT)

4.2.2.1 Kinerja RT di Jawa Timur

Kinerja RT di Jawa Timur menurun sejalan dengan penurunan keyakinan RT terhadap kondisi ekonomi pada triwulan IV 2022. Hasil Survei Konsumen (SK) menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 129,46 pada triwulan III 2022 menjadi 126,70 pada triwulan laporan (Grafik 4.10). Penurunan keyakinan konsumen tidak terlepas dari daya beli masyarakat yang melemah, tercermin dari indeks penghasilan saat ini dan indeks perkiraan penghasilan ke depan yang menurun. Selain itu, telah selesainya beberapa stimulus insentif dari Pemerintah, seperti PPN DTP dan PPnBM DTP, serta dampak rambatan kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada September 2022 juga berimplikasi pada tertahannya kinerja RT pada triwulan laporan.

Grafik 4.10 Indeks Keyakinan dan Penghasilan Konsumen



Sumber : Survei Konsumen (diolah)

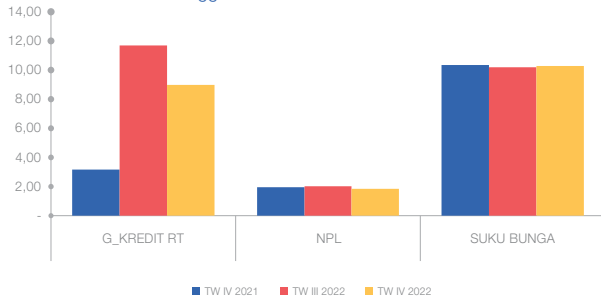
4.2.2.2 Pembiayaan Perbankan pada Sektor RT

4.2.2.2.1 Penyaluran Kredit RT

Kinerja penyaluran kredit RT melambat (Grafik 4.11). Pada triwulan IV 2022, kinerja penyaluran kredit RT tercatat tumbuh 8,97% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,69% (yoy). Secara umum, penurunan penyaluran kredit RT sejalan dengan perlambatan konsumsi RT pada periode laporan. Kondisi ini tidak terlepas dari berlanjutnya ketidakpastian global, kenaikan harga komoditas utama Jawa Timur, telah selesainya beberapa insentif dari Pemerintah (PPN DTP dan PPnBM DTP), serta dampak lanjutan kenaikan harga BBM yang turut menahan tingkat konsumsi RT. Adapun penurunan kinerja penyaluran kredit RT terutama bersumber dari penurunan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Lebih lanjut, berdasarkan komponennya, kredit RT di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 didominasi oleh Kredit Multiguna (44,18%) dan Kredit Pemilikan Rumah/KPR (34,54%) (Grafik 4.12).

Risiko kredit RT terjaga (Grafik 4.11). Pada triwulan IV 2022, risiko kredit RT terjaga dengan baik, tercermin dari rasio NPL yang rendah. Rasio NPL pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,84%, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,02%.

Grafik 4.11 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

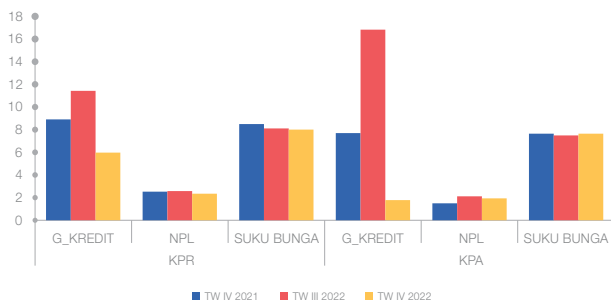
Perbaikan rasio NPL terjadi pada seluruh komponen kredit RT dengan rasio NPL terendah terjadi pada Kredit Multiguna. Ke depan, rendahnya risiko kredit di sektor RT serta berlanjutnya sinergi kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan daerah oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan *stakeholder* lainnya berpotensi mendorong pertumbuhan kredit di sektor RT dengan risiko kredit yang tetap berada dalam batas aman.

Kredit Pemilikan Apartemen dan Kredit Pemilikan Rumah (KPA dan KPR)

Penyaluran KPR dan KPA pada triwulan IV 2022 tercatat melambat (Grafik 4.13). Penyaluran KPR pada triwulan IV 2022 tumbuh 5,97% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,42% (yoy). Perlambatan juga terpantau pada kinerja penyaluran KPA dari yang sebelumnya tumbuh impresif 16,83% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi hanya tumbuh 1,78% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan seiring dengan telah selesainya insentif PPN DTP yang berdampak pada penurunan permintaan.

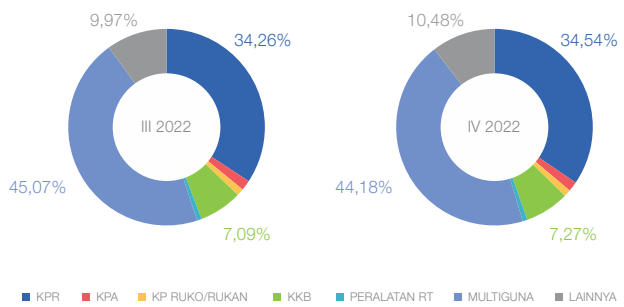
NPL KPR dan KPA membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 4.13). Pada triwulan IV 2022, rasio NPL KPR menurun dari 2,57% dari triwulan sebelumnya menjadi 2,34%. Penurunan tersebut didorong oleh perbaikan rasio NPL untuk rumah dengan luas di atas 21 m², sementara untuk rumah dengan luas di bawah 21 m² rasio NPL tercatat meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan kemampuan bayar untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada triwulan IV

Grafik 4.13 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KPA-KPR



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.12 Proporsi Kredit Sektor RT Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

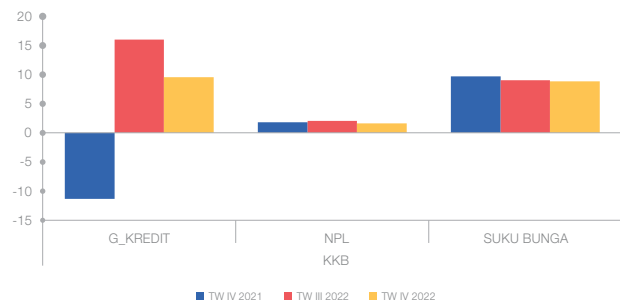
2022. Lebih lanjut, rasio NPL pada KPA juga menurun dari 2,12% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,94% pada triwulan laporan. Penurunan rasio NPL terjadi pada semua tipe apartemen, mengindikasikan bahwa rumah tangga yang berpenghasilan menengah tinggi di Jawa Timur semakin mampu untuk melakukan pembayaran pinjaman.

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Penyaluran KKB pada triwulan IV 2022 mengalami perlambatan (Grafik 4.14). Kinerja penyaluran KKB tumbuh 9,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 16,01% (yoy). Perlambatan diperkirakan merupakan dampak dari telah selesainya insentif PPnBM DTP untuk pembelian mobil di bawah Rp200 juta. Selain itu, kebijakan Pemerintah dengan menaikkan harga BBM pada September 2022 juga diperkirakan turut menahan keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Berdasarkan jenisnya, perlambatan penyaluran KKB terjadi pada seluruh tipe kendaraan, dengan penurunan terdalam terjadi pada tipe kendaraan truk dan kendaraan roda 6 atau lebih.

Risiko penyaluran KKB terjaga (Grafik 4.14). Pada triwulan IV 2022, rasio NPL KKB tercatat sebesar 1,63%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,07%. Namun, jika dilihat lebih detail berdasarkan jenis kendaraan, terjadi peningkatan rasio NPL untuk penyaluran kredit truk dan kendaraan roda 6 atau lebih. Peningkatan ini diperkirakan seiring belum membaiknya aktivitas logistik di tengah berlanjutnya disrupsi rantai pasokan global yang turut diperparah dengan peningkatan harga BBM.

Grafik 4.14 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KKB

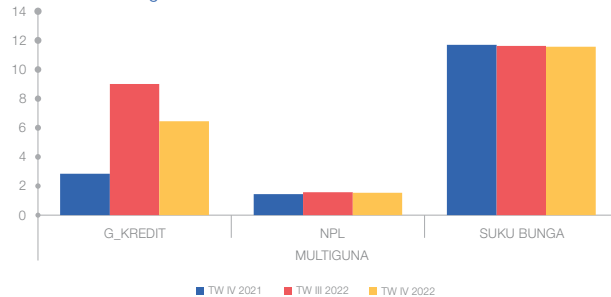


Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Kredit Multiguna

Pertumbuhan kredit multiguna tercatat melambat dengan risiko kredit yang terjaga (Grafik 4.15). Kredit multiguna tumbuh melambat pada triwulan IV 2022 dengan pertumbuhan sebesar 6,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,00% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, rasio NPL kredit multiguna juga tercatat mengalami sedikit penurunan dari 1,58% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,53% pada triwulan laporan.

Grafik 4.15 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Multiguna

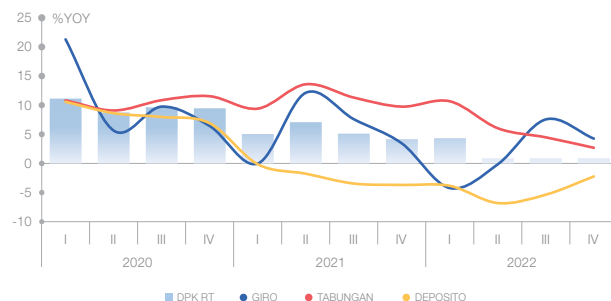


Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

4.2.2.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) RT

DPK RT di Jawa Timur terpantau sedikit meningkat pada triwulan IV 2022 (Grafik 4.16). Kinerja penghimpunan DPK RT terakselerasi pada triwulan laporan dengan pertumbuhan sebesar 0,92% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,90% (yoy). Peningkatan DPK RT di tengah perlambatan penyaluran kredit RT mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung menyimpan uang di perbankan dan menahan konsumsi. Adanya kenaikan suku bunga simpanan membuat masyarakat memilih untuk menunda konsumsi di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan jenisnya, akselerasi kinerja penghimpunan DPK bersumber dari membaiknya pertumbuhan deposito seiring peningkatan suku bunga acuan yang lebih atraktif.

Grafik 4.16 Pertumbuhan DPK RT



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia terpantau sudah tertransmisi pada suku bunga DPK RT. Suku bunga tertimbang DPK RT mengalami peningkatan dari 1,55% pada triwulan III 2022 menjadi 1,89% pada triwulan laporan. Peningkatan juga terjadi pada seluruh komponen DPK⁵² (Grafik 4.17). Hal ini mengindikasikan bahwa transmisi suku bunga acuan Bank Indonesia terhadap suku bunga pasar telah berjalan dengan baik.

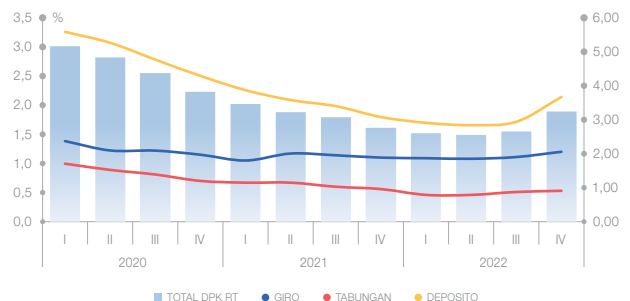
4.3. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

4.3.1. Akses Keuangan kepada UMKM

Eksposur perbankan terhadap UMKM terkonfirmasi cukup baik dan stabil. Pada triwulan IV 2022, pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Jawa Timur tercatat sebesar 31,64%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 31,34% (Grafik 4.18). Peningkatan pangsa kredit UMKM juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan perbankan untuk bersinergi mendorong peran UMKM dalam perekonomian Jawa Timur mengingat UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur.

Pertumbuhan penyaluran kredit kepada UMKM tercatat melambat pada triwulan IV 2022 (Grafik 4.19). Kredit UMKM tumbuh sebesar 10,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,42% (yoy). Perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM di Provinsi Jawa Timur tersebut disebabkan oleh perlambatan penyaluran KMK, sementara kinerja penyaluran KI terpantau stabil. Kinerja penyaluran KMK pada UMKM di Jawa Timur tercatat melambat dari 23,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 8,79% (yoy) pada triwulan IV 2022. Di sisi lain, kinerja penyaluran KI pada UMKM tercatat stabil dengan pertumbuhan sebesar 19,34% (yoy), sama seperti triwulan sebelumnya.

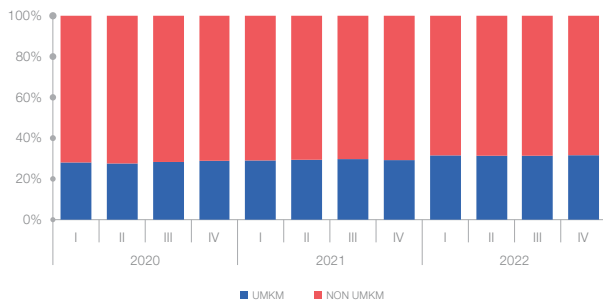
Grafik 4.17 Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK RT



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

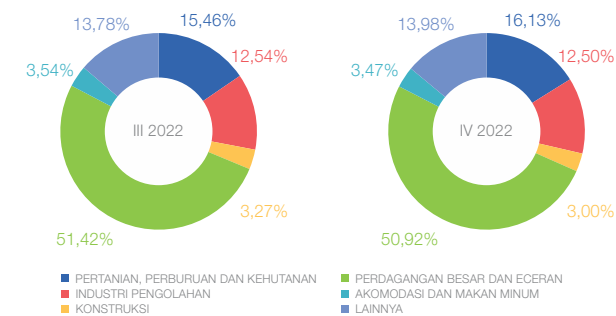
52. Suku bunga tertimbang DPK RT pada komponen deposito, giro, dan tabungan meningkat dari masing-masing sebesar 2,94%, 1,11%, dan 0,51% menjadi masing-masing sebesar 3,67%, 1,20%, dan 0,53% pada triwulan IV 2022.

Grafik 4.18 Share Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.20 Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral

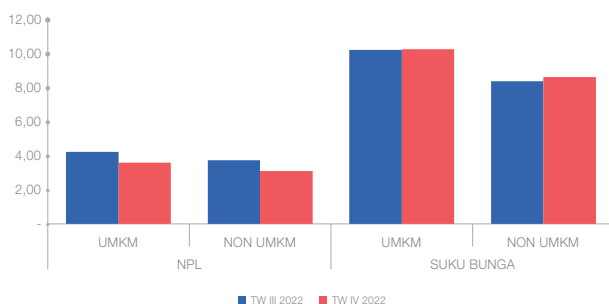


Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Mayoritas penyaluran kredit UMKM terjadi pada LU Perdagangan, LU Pertanian, dan LU Industri Pengolahan, tiga sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur (Grafik 4.20). Pangsa tersebut cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara pertumbuhan, kinerja penyaluran kredit UMKM untuk seluruh LU utama tercatat melambat (Grafik 4.21). Kondisi ini sejalan dengan deselerasi kinerja seluruh LU Utama Jawa Timur.

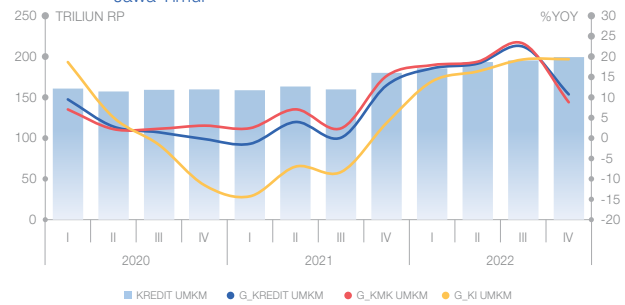
Rasio NPL kredit UMKM membaik di tengah deselerasi pertumbuhan kredit UMKM. Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 3,60%, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,23% (Grafik 4.22). Terjaganya risiko kredit UMKM menjadi indikator semakin pulihnya kinerja UMKM seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan pemulihan

Grafik 4.22 Perkembangan NPL dan Suku Bunga Tertimbang Kredit UMKM



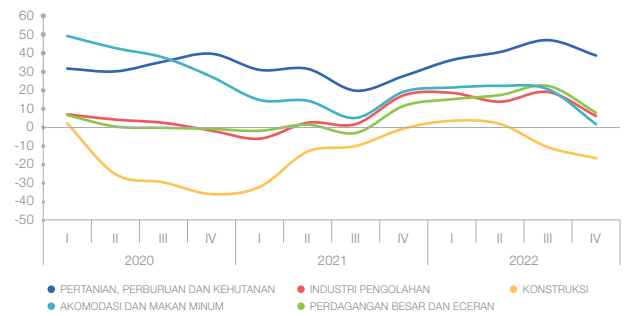
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.19 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Perbankan di Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.21 Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral



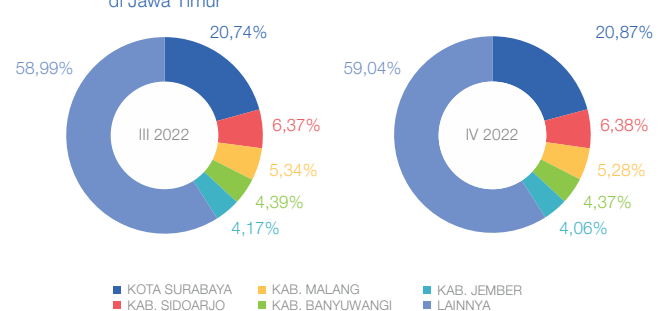
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan. Adapun kebijakan restrukturisasi UMKM yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19 juga terbukti mampu menahan laju peningkatan NPL kredit UMKM.

Suku bunga tertimbang untuk kredit UMKM terpantau lebih tinggi dibandingkan untuk non UMKM. Kondisi tersebut mengindikasikan potensi risiko kredit UMKM yang lebih tinggi. Apabila dibandingkan dengan triwulan III 2022, suku bunga tertimbang UMKM dan non UMKM pada triwulan laporan terpantau meningkat seiring dengan peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia.

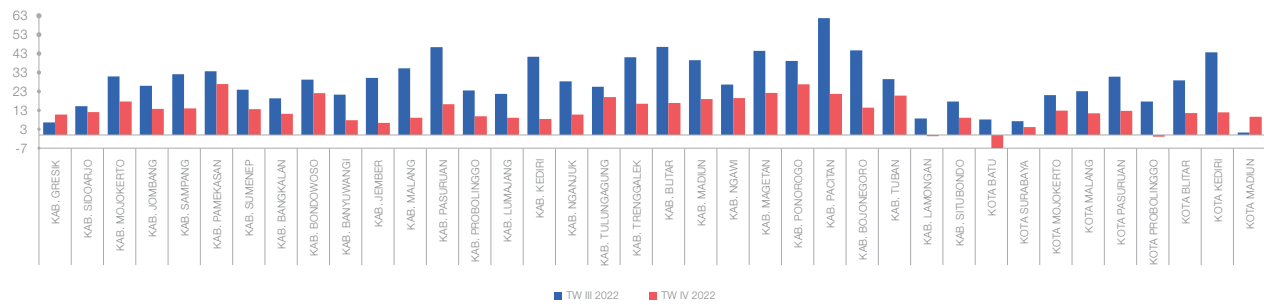
Secara spasial, kredit UMKM terbesar masih terkonsentrasi di Kota Surabaya. Penyaluran kredit terutama dilakukan di 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Surabaya dengan pangsa 20,87%,

Grafik 4.23 Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.24 Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Kabupaten Sidoarjo dengan pangsa 6,38%, dan Kabupaten Malang dengan pangsa 5,28% (Grafik 4.23). Tingginya penyaluran kredit pada daerah tersebut sejalan dengan banyaknya usaha di Ibukota dan pusat pariwisata Jawa Timur yang berlokasi di 3 daerah tersebut. Adapun kinerja penyaluran kredit UMKM di seluruh kabupaten/kota tercatat melambat (Grafik 4.24).

4.3.2. Perkembangan Program Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur secara konsisten terus mendorong peningkatan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas serta peningkatan akses keuangan UMKM untuk mendukung optimalisasi pembiayaan daerah dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Beberapa program yang telah dilakukan adalah:

1. Pengembangan Klaster *Volatile Food* Pembentukan Klaster Baru

Kpw BI Provinsi Jawa Timur melakukan kajian pembentukan klaster ketahanan pangan baru di Jawa Timur, khususnya untuk komoditas cabai, bawang merah dan ayam ras pedaging yang merupakan 10 besar komoditas penyumbang inflasi tertinggi di Jawa Timur. Pelaksanaan kajian ini bertujuan untuk menentukan target pengembangan klaster baru dalam rangka peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan di daerah sentra. Kajian telah dilakukan di daerah sentra yang memiliki modal sosial dan akseptansi terhadap teknologi yang baik. Dari hasil kajian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi antara lain:

1. Komoditas Cabai Rawit
Daerah sentra yang potensial untuk pengembangan klaster cabai rawit adalah di Kabupaten Tuban. Selain lahannya yang memang cocok untuk budidaya cabai, modal sosial dari petani di Kabupaten Tuban juga baik. Petani di Kabupaten Tuban aktif berinovasi dalam hal budidaya cabai dengan metode tumpang sari dan tumpang sisip yang terbukti efektif untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani.
2. Komoditas Bawang Merah
Rencana pembentukan klaster bawang merah akan difokuskan di Kabupaten Pamekasan yang merupakan

salah satu daerah sentra bawang merah di Jawa Timur. Mayoritas petani milenial di Kabupaten Pamekasan juga secara aktif berinovasi terhadap teknologi budidaya.

3. Komoditas Ayam Ras Pedaging
Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas peternak ayam ras pedaging di Jawa Timur adalah perorangan (bukan kelompok ternak) dan telah mandiri dari segi produksi hingga pemasarannya.

KPw BI Provinsi Jawa Timur berencana untuk menjajaki kerja sama antara klaster jagung (produsen) dengan para peternak ayam mandiri ini untuk menjadi alternatif calon offtaker klaster.

Rekomendasi dari kajian klaster ini akan ditindaklanjuti oleh KPw BI Provinsi Jawa Timur dengan pembukaan klaster baru komoditas ketahanan pangan (bawang merah dan cabai). Hal ini merupakan wujud nyata dukungan KPw BI Provinsi Jawa Timur dalam program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Klaster Padi Organik Kabupaten Mojokerto

Kpw BI Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan program *digital farming* hulu dan hilir bagi klaster padi organik Kabupaten Mojokerto. Di sisi hulu, untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi, diimplementasikan program *digital farming* menggunakan teknologi drone untuk menggantikan peran tenaga kerja pemupukan di lahan seluas 1 ha. Sedangkan di sisi hilir, saat ini klaster padi organik Brenjonk telah memiliki akun di *e-commerce* untuk memperluas akses pemasaran *online*-nya.

Klaster Kopi Wonosalam Kabupaten Jombang

Selain penguatan di sisi kelembagaan yang telah berbentuk koperasi, pada tahun 2022 klaster kopi Wonosalam berhasil meningkatkan kapasitas produksi kopinya di atas 26%, dari yang sebelumnya 42 ton/tahun menjadi 53 ton/tahun. Selain itu, klaster juga berhasil merealisasikan ekspor ke Malaysia sebanyak 12 ton varietas *excel*sa melalui aggregator. Sedangkan di sisi hulu, pengembangan klaster berfokus pada pembenihan kopi yang bertujuan agar klaster dapat memproduksi bibit kopi secara mandiri.

Klaster Jagung Madura

Klaster jagung Madura berhasil meningkatkan produktivitas jagung sebesar 8,3% dari yang sebelumnya 5,83 ton/ha menjadi 6,1 ton/ha. Saat ini, pengembangan klaster yang awalnya terbatas di wilayah Bangkalan, Sumenep dan Pamekasan, telah diperluas hingga ke Kabupaten Sampang. Pengembangan difokuskan pada teknik budidaya jagung modern yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas jagung secara merata di seluruh wilayah Madura. Dengan demikian, petani dapat memenuhi kebutuhan jagung di Jawa Timur melalui swasembada pangan.

2. Capacity Building dan Business Coaching

a) Onboarding UMKM

Pelaksanaan kegiatan onboarding UMKM KPw BI Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan akses pasar online UMKM. Hingga triwulan II 2022, 80% peserta kegiatan *onboarding* telah memanfaatkan media sosial dan *e-commerce* sebagai saluran pemasaran produknya yang berdampak pada peningkatan omzet UMKM.

b) Rumah Kurasi

Sebagai implementasi program Sinergi Optimis Jatim Bangkit, KPw BI Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kadin Kota Kediri menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Calon Kurator Rumah Kurasi se-Jawa Timur. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung ekosistem ekspor salah satunya melalui kurasi produk UMKM secara digital dan memberikan *feedback* bagi UMKM terkait pangsa pasarnya.

c) Kegiatan *Bootcamp* Wastra

Kegiatan *Bootcamp* Wastra bekerja sama dengan desainer nasional dan melibatkan UMKM Fesyen Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pelaku industri fesyen yang kreatif, inovatif, bernilai jual tinggi, serta menguatkan eksistensi industri *fesyen* di Jawa Timur. Hasil karya peserta *bootcamp* wastra telah lolos kurasi nasional dan ditampilkan dalam kegiatan *Muslim Fashion Festival* (MUFFEST) 2022. Melalui kegiatan ini, UMKM diajarkan untuk mengimplementasikan inovasi dan diversifikasi produk.

d) Capacity Building dan Studi Banding UMKM

Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi UMKM binaan/mitra KPw BI Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan produk kreatif dan inovatif, meningkatkan *value added* produk UMKM dan menambah pengetahuan terkait strategi bisnis agar UMKM semakin luas pasarnya.

3. Business Matching

Dalam rangka mendukung kegiatan ekspor UMKM, KPw BI Jawa Timur melaksanakan kegiatan *business matching* untuk menghubungkan UMKM dengan aggregator dan potensial *buyer* dari dalam dan luar negeri. *Output* kegiatan *business matching* ini adalah klaster kopi wonosalam berhasil melakukan realisasi ekspor 12 ton *excelsa* wonosalam ke Malaysia. Saat ini, klaster kopi Wonosalam juga dalam proses *business matching* dengan *buyer* dari Qatar dan Jerman.

4. Komitmen Sinergi Optimis Jatim Bangkit

Dalam rangka mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia (BWI), KPwBI Provinsi Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan antara lain Fasilitasi Sertifikasi Halal kepada UMKM melalui Skema Ikrar Halal, Perluasan Rumah Kurasi, dan Edukasi Keuangan Syariah dan Ekonomi Inklusif yang diikuti oleh ±450 peserta. Dampak program edukasi ini adalah peningkatan pemahaman peserta terhadap ekonomi dan keuangan inklusif, dengan tingkat pemahaman mencapai 94,26%.

5. Pelatihan SIAPIK

KPw BI Provinsi Jawa Timur kembali melakukan pelatihan dan sosialisasi SIAPIK kepada 20 UMKM binaan BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Kegiatan Pelatihan SIAPIK ini bertujuan agar UMKM debitur BPRS dapat melakukan pencatatan keuangan sesuai standar lembaga keuangan formal. Dengan pencatatan keuangan yang sesuai standar, UMKM diharapkan mampu mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

6. Side Event Presidensi G20 Indonesia

Dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia, KPw BI Provinsi Jawa Timur melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan UMKM dan ekonomi syariah, yakni:

- **Showcase produk** UMKM Binaan/Mitra Bank Indonesia se-Jawa Timur. Kegiatan ini berdampak peningkatan omzet penjualan UMKM di atas 50% dibandingkan bulan sebelumnya.
- **Capacity building G20 pesantren digipreneur** dengan tema "*Optimizing the Use of Digital Technology for the Development of Pesantren*" dilakukan secara *hybrid* dan diikuti ± 600 peserta yang berasal dari alumni/santri/pengurus pondok pesantren di Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas SDM santri terkait teknologi digital sehingga dapat mendorong percepatan kemandirian ekonomi pesantren melalui digitalisasi. Melalui kegiatan ini, 50% peserta tercatat telah memiliki *website* untuk memperluas publikasi di masing-masing pondok pesantren.

7. Java Coffee Culture (JCC) 2022

Dalam rangka memperkenalkan keunggulan dan keanekaragaman kopi di wilayah Jawa, KPw BI Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan JCC yang dipusatkan di Area Jalan Tunjungan Surabaya dengan konsep edukasi, *business matching*, *showcase*, dan kompetisi bernuansa kopi. Kegiatan ini dihadiri oleh ±5.329 pengunjung dan mampu mengumpulkan transaksi penjualan sebesar Rp5,14 miliar dan transaksi *business matching* sebesar Rp9,9 miliar.

8. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

- Sarasehan Hebitren se-Jawa dan Rakerwil Hebitren Jawa Timur 2022 yang dihadiri oleh 9 (sembilan) koordinator wilayah dan koordinator cabang se-Jawa serta Ketua dan Pengurus DPP Hebitren untuk mendukung peningkatan kemandirian dan menguatkan sinergi antara pesantren anggota Hebitren se-Jawa.
- Kegiatan FESyar Jawa merupakan *Flagship Event* dengan konsep *business matching*, edukasi, *showcase*, kompetisi, Tabligh Akbar, dan *Hall of Inspiration* sebagai upaya akselerasi perekonomian syariah Jawa. FESyar Jawa 2022 telah menghasilkan beberapa capaian antara lain: transaksi penjualan sebesar Rp 2,6 Miliar, transaksi *business matching* sebesar Rp 9,2 Triliun, serta jumlah pengunjung yang mencapai 208.982 orang.
- KPwBI Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan OPOP Jawa Timur melaksanakan **bimbingan teknis terkait sertifikasi halal** kepada ±300 UMKM dan/atau pelaku usaha pesantren. Selain itu, dilaksanakan juga beberapa kegiatan pemberdayaan pesantren antara lain:
 1. *Bootcamp Coding* merupakan pelatihan yang membantu para santri dalam membuat aplikasi berbasis web. Kegiatan ini dilakukan secara *offline* dan diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari 20 pondok pesantren binaan OPOP Jawa Timur. Ke depan, diharapkan peserta dapat menciptakan produk aplikasi berbasis web dan mobile yang dapat dikembangkan di masing-masing pondok pesantren.
 2. Pelatihan Budidaya Magot sebagai pakan alternatif, yang merupakan program sinergi antara KPw BI Provinsi Jawa Timur dengan Kopontren Nurul Amanah dan Tim OPOP Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan secara *offline* dan diikuti oleh santri dari 20 pondok pesantren di wilayah Madura. Kegiatan ini bertujuan agar pesantren mampu menjadikan magot sebagai salah satu pakan alternatif ternak dengan biaya yang rendah.
 3. Pelatihan dan Uji Kompetensi SKKNI Ritel bagi Manager/Pengelola Toko Ritel Kopontren dan diikuti oleh 50 Ponpes se-Jatim. Dampak dari pelatihan dan uji kompetensi ini adalah peserta mampu melakukan pengelolaan dan penjualan produk pesantren dengan lebih profesional dan berdaya saing.

4. Replikasi Model Bisnis Pemberdayaan Pesantren melalui program *integrated farming* yang diimplementasikan kepada Ponpes Fathul Ulum Jombang untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan usaha terpadu dan transfer teknologi tepat guna.
5. Pelatihan dan Sertifikasi Juru Sembelih Halal yang melibatkan RPH dan pondok Pesantren se-Jawa Timur untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi juru sembelih halal agar sesuai prinsip syariah Islam.

- KPw BI Provinsi Jawa Timur melibatkan UMKM dan pondok pesantren mitra/binaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ISEF 2022 di Jakarta. Dalam kegiatan ini, Ponpes Sunan Drajat Lamongan berhasil mendapatkan penghargaan sebagai ***Champion of the Champion Ponpes Unggulan tingkat Nasional tahun 2022***.

KPw BI Provinsi Jawa Timur melalui program pengembangan UMKM akan terus melakukan transformasi melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM agar dapat “naik kelas” melalui akses pembiayaan, digitalisasi, dan inklusi keuangan.



BAB V

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



5.1. KONDISI UMUM

Pada triwulan IV 2022, transaksi pembayaran secara umum mengalami kenaikan terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat dalam menyambut HBKN Natal dan Tahun Baru 2023, serta periode libur sekolah akhir tahun. Aktivitas belanja pemerintah menjelang akhir tahun juga mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh realisasi belanja pemerintah yang memiliki tenggat penyelesaian hingga akhir tahun 2022. Peningkatan aktivitas transaksi tersebut dapat terlihat dari meningkatnya *net-outflow* uang tunai. Demikian pula dengan transaksi non-tunai khususnya SKNBI dan RTGS yang juga mengalami peningkatan transaksi. Adapun instrumen pembayaran ritel melalui APMK dan Uang Elektronik justru mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya instrumen pembayaran lainnya, baik melalui QRIS maupun BI-FAST, yang menawarkan kemudahan transaksi lintas operator. Demikian pula dengan transaksi *e-commerce* yang mengalami penurunan seiring dengan mulai kondusifnya Covid-19 yang meningkatkan mobilitas masyarakat.

Transaksi tunai di Jawa Timur mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2022, KPw Jawa Timur mencatatkan *net-outflow* sebesar Rp8,78 triliun, setelah sebelumnya mengalami *net-inflow* pada triwulan III 2022 sebesar Rp0,93 triliun. Peningkatan *outflow* sejalan dengan pola historis yang didorong oleh kenaikan konsumsi masyarakat berkenaan dengan HBKN Natal dan Tahun Baru 2023, serta periode libur sekolah akhir tahun. Lebih lanjut, peningkatan nominal *outflow* juga sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah yang terakselerasi pada akhir tahun.

Transaksi nontunai melalui Bank Indonesia pada triwulan IV 2022 tercatat meningkat, sementara transaksi nontunai retail mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada triwulan IV 2022 tercatat meningkat masing-masing sebesar 4,24% (qto) dan 14,35% (qto), seiring meningkatnya kebutuhan untuk bertransaksi dalam jumlah besar, khususnya korporasi dan Pemerintah. Sementara itu, penurunan transaksi nontunai retail tercermin dari penurunan nominal transaksi melalui APMK dan Uang Elektronik yang masing-masing turun sebesar 7,34% (qto) dan 0,51% (qto). Kondisi ini seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat berkenaan dengan tidak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan di Hari Natal dan Tahun Baru sehingga mendorong kegiatan jual-beli secara langsung.

Upaya perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS terus berlanjut. Jumlah *merchant* QRIS pada triwulan IV 2022 di Jawa Timur sudah mencapai 2,60 juta, diiringi oleh peningkatan jumlah pengguna QRIS yang telah mencapai 3,90 juta. Peningkatan tersebut mendorong nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS yang tercatat meningkat 25,88% (qto) pada triwulan IV 2022.

5.2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI JAWA TIMUR

5.2.1. Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran tunai di Bank Indonesia dipengaruhi oleh aliran uang masuk atau keluar sistem perbankan, serta pengelolaan uang rupiah termasuk kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan uang palsu. Di Jawa Timur, pengelolaan uang Rupiah dilaksanakan di 4 (empat) Kantor Perwakilan Bank Indonesia⁵³.

5.2.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (*Inflow/Outflow*)

Pada triwulan IV 2022, aliran uang di Jawa Timur tercatat dalam posisi *net-outflow*. Jawa Timur mengalami *net-outflow* sebesar Rp 8,78 triliun, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami *net-inflow* sebesar Rp0,93 triliun (Grafik 5.1). Hal ini merupakan dampak dari peningkatan kebutuhan uang di masyarakat di tengah penurunan aliran uang masuk ke perbankan. Bank Indonesia mencatat nominal *outflow* meningkat sebesar 55,55% (qto) dari Rp15,97 triliun menjadi Rp24,83 triliun, sementara nominal *inflow* tercatat menurun sebesar 4,98% (qto) dari Rp16,89 triliun menjadi Rp16,05 triliun. Peningkatan *outflow* sejalan dengan pola historis yang didorong oleh kenaikan konsumsi masyarakat berkenaan dengan HBKN Natal dan Tahun Baru 2023, serta periode libur sekolah akhir tahun. Kondisi ini terkonfirmasi dari capaian konsumsi swasta Jawa Timur pada triwulan IV 2022 yang secara triwulanan meningkat 2,92% (qto). Lebih lanjut, peningkatan nominal *outflow* juga sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah yang terakselerasi pada akhir tahun. Pada triwulan IV 2022, nominal realisasi APBD Provinsi Jawa Timur mencapai Rp12,81 triliun atau meningkat sebesar 48,83% (qto) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp8,60 triliun. Secara spasial, *net outflow* tertinggi pada triwulan IV 2022 terjadi di wilayah kerja KPw BI Provinsi Jawa Timur sebesar Rp5,06 triliun, disusul oleh KPw BI Kediri sebesar Rp1,82 triliun, KPw BI Malang sebesar Rp1,28 triliun, dan KPw BI Jember sebesar Rp0,62 triliun (Tabel 5.1).

5.2.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang diedarkan, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin. Pada triwulan IV 2022, Bank Indonesia melakukan pemusnahan UTLE sebesar Rp6,65 triliun atau turun 22,87% (qto) dibandingkan triwulan III 2022 sebesar Rp8,62 triliun. Secara spasial, penurunan jumlah UTLE yang dimusnahkan terjadi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah Jawa Timur dengan penurunan tertinggi di KPw BI Malang, disusul KPw BI Jember, KPw BI Kediri, dan KPw BI Provinsi Jawa Timur yang masing-masing turun sebesar 28,86% (qto), 28,01% (qto), 24,57% (qto) dan 17,61% (qto).

53. Empat (4) KPw BI di Jawa Timur adalah KPw BI Prov. Jawa Timur, KPw BI Malang, KPw BI Kediri dan KPw BI Jember dengan cakupan wilayah kerja dapat dilihat di Lampiran 1.

Tabel 5.1 Perkembangan Inflow – Outflow Jawa Timur (Rp Miliar)

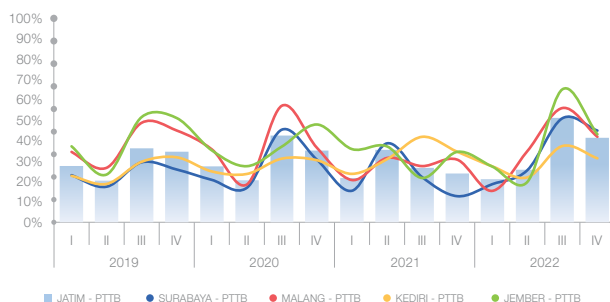
KETERANGAN	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
SURABAYA												
OUTFLOW	9.800	10.198	8.347	14.943	5.143	11.586	4.848	10.640	6.149	11.700	7.430	12.342
INFLOW	12.264	9.140	6.448	6.482	11.637	10.003	4.914	5.541	8.636	11.724	7.827	7.288
NETFLOW	2.464	(1.058)	(1.899)	(8.461)	6.494	(1.583)	65	(5.099)	2.488	24	397	(5.055)
MALANG												
OUTFLOW	2.437	4.145	3.218	3.081	1.528	4.558	2.791	3.849	2.166	3.842	2.356	4.354
INFLOW	5.985	5.033	3.566	2.626	5.305	4.672	2.862	3.206	4.162	4.554	3.230	3.071
NETFLOW	3.547	887	348	(455)	3.776	114	71	(643)	1.997	712	874	(1.283)
KEDIRI												
OUTFLOW	3.505	5.303	5.580	6.957	2.842	6.007	2.811	2.838	2.747	5.367	3.943	4.948
INFLOW	5.424	4.369	4.215	3.423	5.903	4.345	2.160	1.559	3.605	4.682	3.477	3.126
NETFLOW	1.919	(934)	(1.364)	(3.534)	3.061	(1.662)	(650)	(1.279)	858	(684)	(466)	(1.821)
JEMBER												
OUTFLOW	2.867	3.907	4.062	5.025	1.674	3.263	2.628	2.139	1.561	3.005	2.236	3.190
INFLOW	5.740	4.641	4.160	3.331	4.688	3.807	2.749	2.210	3.512	3.743	2.360	2.567
NETFLOW	2.873	734	98	(1.694)	3.014	544	120	71	1.951	738	124	(623)
JAWA TIMUR												
OUTFLOW	18.610	23.553	21.206	30.005	11.188	25.414	13.078	19.466	12.622	23.914	15.965	24.833
INFLOW	29.413	23.183	18.389	15.863	27.532	22.827	12.685	12.515	19.915	24.704	16.894	16.052
NETFLOW	10.803	(370)	(2.817)	(14.143)	16.344	(2.587)	(393)	(6.951)	7.293	790	929	(8.781)
Konsumsi Swasta (QTQ)	(0,07)	(4,74)	2,29	2,91	(1,72)	2,39	(1,21)	5,01	(0,87)	3,78	(0,78)	2,92
Konsumsi Pemerintah (QTQ)	(37,43)	29,14	5,14	9,94	(32,78)	29,80	5,38	9,87	(30,91)	19,95	9,76	11,47

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Rasio UTLE terhadap inflow menurun. Pada triwulan IV 2022, rasio UTLE terhadap inflow tercatat sebesar 41,43%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 51,13% (Grafik 5.1). Penurunan rasio UTLE terhadap inflow terutama dipengaruhi oleh penurunan nominal inflow ke Bank Indonesia yang lebih dalam dibandingkan dengan penurunan setoran jumlah UTLE.

Selain melalui kegiatan pemusnahan UTLE, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat melalui layanan penukaran uang. Pada triwulan IV 2022, total layanan penukaran di Jawa Timur mencapai

Grafik 5.1 Rasio UTLE terhadap Inflow Jawa Timur



PTTB: Pemberian Tanda Tidak Berharga
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Rp110,39 miliar atau meningkat sebesar 28,35% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp86,00 miliar. Lebih lanjut, untuk meningkatkan awareness masyarakat dalam menjaga kelayakan uang Rupiah, Bank Indonesia secara kontinu memberikan Edukasi Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah, salah satunya melalui kegiatan CBP Goes to Komunitas PKK dan Millenial Surabaya.

5.2.1.3. Temuan Uang Palsu

Jumlah bilyet uang palsu mengalami peningkatan pada triwulan IV 2022. Berdasarkan laporan perbankan dan laporan dari masyarakat, penemuan uang palsu di wilayah Jawa Timur pada triwulan IV 2022 adalah sebanyak 6.118 lembar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 5,61% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebanyak 5.793 lembar (Grafik 5.2).

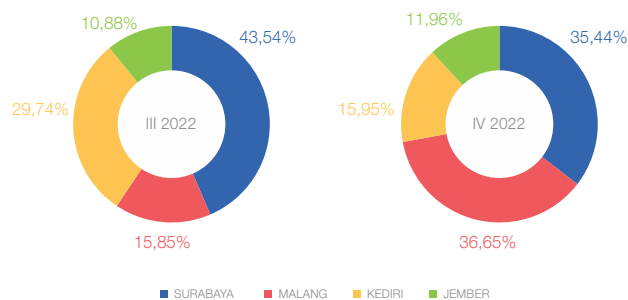
Secara spasial, temuan uang palsu terbanyak terjadi di KPw BI Malang sebanyak 2.242 lembar (36,65% dari total temuan), diikuti oleh KPw BI Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.168 lembar (35,44% dari total temuan), KPw BI Kediri sebanyak 976 lembar (15,95% dari total temuan), dan KPw BI Jember sebanyak 732 lembar (11,96% dari total temuan) (Grafik 5.3). Adapun dalam rangka meningkatkan layanan deteksi uang palsu, KPw BI di wilayah Jawa Timur telah dilengkapi dengan BI-Counterfit Analysis Center (BI-CAC).

Grifik 5.2 Statistik Uang Palsu yang Ditemukan



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grifik 5.3 Pangsa Temuan Uang Palsu berdasarkan Wilayah Kerja Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Grifik 5.4 Temuan Uang Palsu Per Pecahan



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Berdasarkan proporsinya, temuan uang palsu pada triwulan IV 2022 didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB), yaitu pecahan Rp100.000 (68,06%) dan pecahan Rp50.000 (24,50%) (Grifik 5.4). Kenaikan penemuan uang palsu tersebut sejalan dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri keaslian rupiah yang semakin membaik. Sampai dengan saat ini, KPw BI di wilayah Jawa Timur secara rutin melaksanakan edukasi dan sosialisasi mengenai pengenalan Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) kepada masyarakat agar mampu mengenali ciri-ciri uang yang diduga palsu dan melaporkannya kepada Kantor Bank Indonesia terdekat atau kepolisian untuk pengecekan lebih lanjut.

5.2.2. Transaksi Sistem Pembayaran

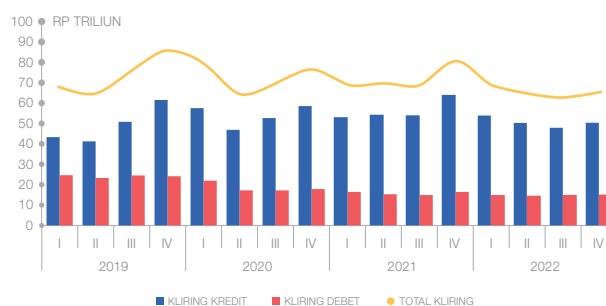
5.2.2.1 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada triwulan IV 2022, nominal kliring di wilayah Jawa Timur mengalami peningkatan. Nominal kliring di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 mencapai Rp65,64 triliun, meningkat 4,24% (qtr) dibandingkan triwulan III 2022 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di akhir tahun (Grifik 5.5). Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nominal kliring pada triwulan IV 2022 tercatat menurun sebesar 18,55% (yoy). Penurunan ini merupakan dampak dari implementasi Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) sejak 21 Desember 2021 yang lebih menjadi pilihan masyarakat dengan biaya per transaksi yang lebih murah serta bersifat *real time*. Lebih lanjut, secara spasial mayoritas transaksi kliring dilaksanakan di Kota Surabaya dan

sekitarnya dengan nominal sebesar Rp50,38 triliun atau sebesar 76,75% dari total nominal kliring di Jawa Timur (Grifik 5.6).

Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi, Bank Indonesia melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah dari yang semula 31 Desember 2022 menjadi 30 Juni 2023⁵⁴. Penyesuaian ini juga merupakan upaya Bank Indonesia untuk memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas. Lebih lanjut, Bank Indonesia akan terus memperluas secara bertahap layanan BI-FAST. Hingga November 2022, total peserta BI-FAST telah mencapai 106 peserta dan telah mewakili 87% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional.

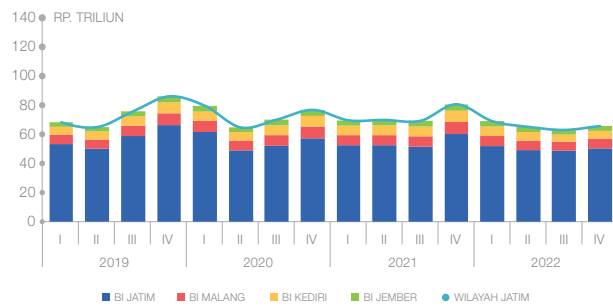
Grifik 5.5 Perkembangan Kliring Jawa Timur



Sumber: Bank Indonesia

54. Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Desember 2022

Grafik 5.6 Transaksi Kliring Spasial Jawa Timur



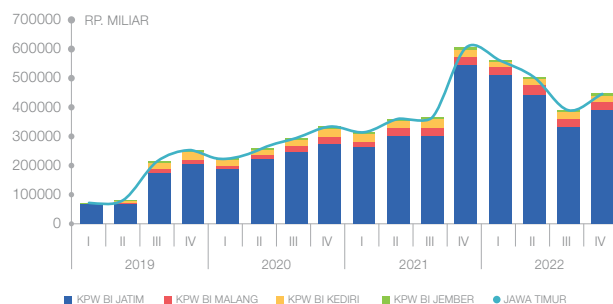
Sumber : Bank Indonesia

5.2.2.2 Transaksi Melalui Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)

Pada triwulan IV 2022, nominal transaksi BI-RTGS di wilayah Jawa Timur mengalami peningkatan. Nominal transaksi BI-RTGS di wilayah Jawa Timur sebesar Rp445,83 triliun, meningkat 14,35% (qta) dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar Rp389,89 triliun (Grafik 5.7). Kondisi ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan transaksi dalam jumlah besar⁵⁵, salah satunya transaksi Pemerintah seiring dengan meningkatnya jatuh tempo lelang belanja modal di akhir tahun. Di sisi lain, nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan IV 2022 sebesar Rp445,83 triliun, tercatat menurun 26,36% (yoy) jika dibandingkan nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan IV 2021 yang sebesar Rp605,42 triliun. Penurunan ini merupakan dampak dari implementasi BI-FAST yang dapat menjadi pilihan alternatif untuk transaksi dengan nominal maksimal mencapai Rp250 juta, mengingat biaya per transaksi pada layanan BI-FAST lebih murah dan bersifat *real time*. Lebih lanjut, secara spasial nominal transaksi RTGS Nasabah di Kota Surabaya dan sekitarnya yang merupakan pusat bisnis dan Pemerintahan Jawa Timur masih sangat mendominasi dengan pangsa 88,24% (Grafik 5.8).

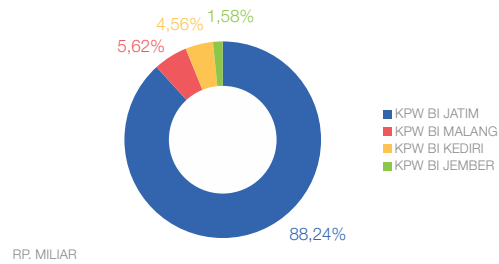
Volume transaksi RTGS pada triwulan IV 2022 di wilayah Jawa Timur tercatat sebanyak 138.703 transaksi, meningkat 4,63% (qta) dibandingkan triwulan III 2022 dengan 132.565 transaksi. Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, volume RTGS tercatat menurun 15,54% (yoy) sejalan dengan penurunan nominal secara tahunan.

Grafik 5.7 Perkembangan RTGS Provinsi Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.8 Perkembangan RTGS Spasial



Sumber : Bank Indonesia

5.2.2.3 Transaksi Melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Secara agregat, transaksi melalui APMK (ATM/Debit dan kartu kredit) pada triwulan IV 2022 tercatat menurun (Grafik 5.9). Pada triwulan IV 2022, total nominal transaksi melalui APMK tercatat sebesar Rp247,65 triliun atau menurun 7,34% (qta) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp267,28 triliun. Secara nominal, transaksi melalui APMK didominasi oleh kartu ATM/Debit dengan transaksi sebesar Rp240,27 triliun atau mencapai 97,02% dari total transaksi melalui APMK. Sementara itu, transaksi melalui Kartu Kredit tercatat sebesar Rp7,39 triliun atau hanya 2,98% dari total transaksi. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, transaksi melalui APMK secara agregat tercatat meningkat signifikan sebesar 68,95% (yoy) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang secara tahunan tumbuh positif dan peningkatan daya beli masyarakat⁵⁷.

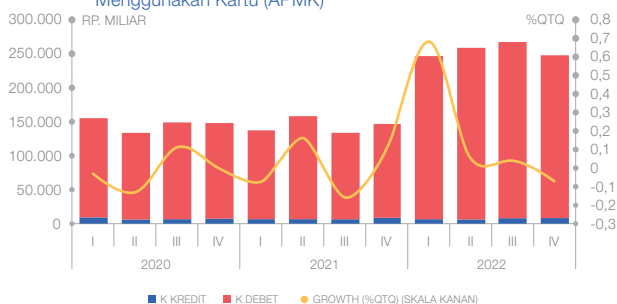
Jumlah instrumen pembayaran non tunai di Jawa Timur tercatat meningkat (Grafik 5.10). Jumlah Kartu ATM/Debit yang aktif di masyarakat tercatat sejumlah 35,71 juta kartu atau meningkat 2,97% (qta) secara triwulanan dan meningkat 34,10% (yoy) secara tahunan. Peningkatan ini mengindikasikan penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran non tunai semakin luas. Sementara itu, jumlah kartu kredit juga meningkat secara triwulanan sebesar 3,91% (qta) dari semula sejumlah 1,78 juta kartu menjadi 1,82 juta kartu. Namun, secara tahunan jumlah kartu kredit tercatat menurun 11,29% (yoy). Tren penurunan jumlah kartu kredit di Jawa Timur sudah terjadi sejak awal tahun 2020 sejalan dengan pandemi Covid-19. Penurunan jumlah kartu kredit juga diindikasikan tidak terlepas dari adanya berbagai jenis kanal pinjaman *online* yang menjadi alternatif pilihan lain masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya. Lebih lanjut, peningkatan jumlah kartu APMK didukung dengan ketersediaan mesin ATM yang memadai. Sampai dengan triwulan IV 2022, jumlah ATM di Jawa Timur mencapai 11.975 mesin atau jika dibandingkan dengan luas wilayah memiliki rasio 1:3,92 km².

55. Transaksi melalui RTGS diperuntukkan kepada transaksi di atas Rp100 juta

56. PDRB Jawa Timur pada triwulan IV 2022 tumbuh 4,76% (yoy).

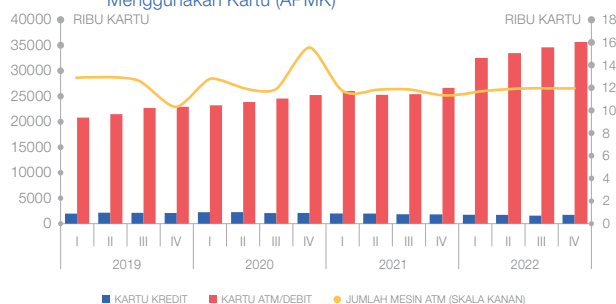
57. Survei Konsumen KPwBI Provinsi Jawa Timur mencatatkan peningkatan indeks penghasilan masyarakat Jawa Timur dari 93,22 pada triwulan IV 2021 menjadi 126,67 pada Januari triwulan IV 2022

Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi Melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)



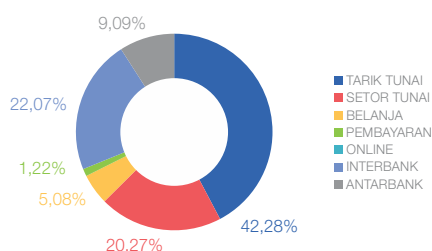
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.10 Perkembangan Jumlah Instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)



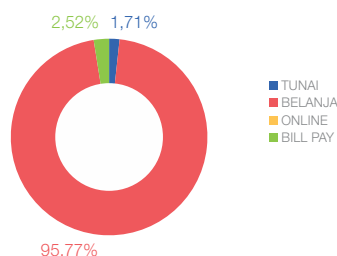
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.11 Penggunaan Kartu ATM/Debit



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.12 Penggunaan Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Berdasarkan penggunaannya, mayoritas kartu ATM/Debit di Jawa Timur digunakan untuk penarikan tunai melalui ATM. Pada triwulan IV 2022, penarikan tunai yang dilakukan mencapai Rp101,58 triliun atau sebesar 42,28% dari total transaksi ATM/Debit (Grafik 5.11). Fenomena ini mengindikasikan bahwa utilisasi kartu ATM/Debit belum dilakukan secara optimal atau hanya dilakukan sebagai perantara untuk mendapatkan uang tunai. Sementara itu, penggunaan kartu kredit di Jawa Timur mayoritas sudah dimanfaatkan untuk belanja, yaitu mencapai 95,77% dari total transaksi Kartu Kredit atau sebesar Rp6,14 triliun (Grafik 5.12).

5.2.2.4 Transaksi Uang Elektronik (UE)

Pada triwulan IV 2022, transaksi UE tercatat menurun. Nominal transaksi UE pada triwulan IV 2022 sebesar Rp15,43 triliun atau menurun 0,51% (qtq) dari capaian triwulan sebelumnya yang

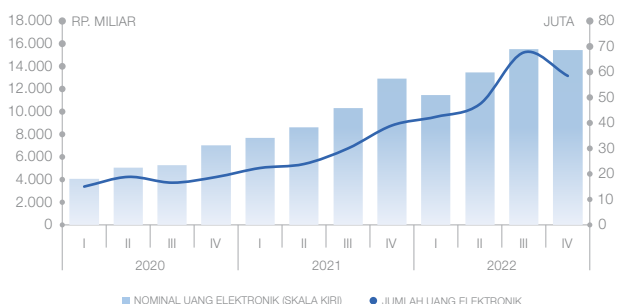
sebesar Rp15,51 triliun. Penurunan ini seiring dengan penurunan jumlah UE yang dimiliki masyarakat. Jumlah UE pada triwulan IV 2022 tercatat sejumlah 58,46 juta, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sejumlah 67,68 juta. Meskipun demikian, nominal dan jumlah UE pada triwulan IV 2022 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

5.3. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

5.3.1. Penanganan Uang Palsu

KPwBI Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan instansi terkait terus melakukan berbagai upaya penanganan, langkah preventif, dan represif dalam rangka mengurangi peredaran uang palsu. Selama triwulan IV 2022, tindakan preventif terus dilakukan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, baik secara langsung maupun melalui iklan dan publikasi di media massa. Upaya preventif dilakukan melalui peningkatan kerja sama dengan instansi terkait di Jawa Timur. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menangkap dan menindak pembuat maupun pengedar uang palsu. Kerja sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur telah dituangkan dalam Pokok-Pokok Kesepahaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, serta Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah.

Grafik 5.13 Transaksi dan Jumlah Uang Elektronik



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

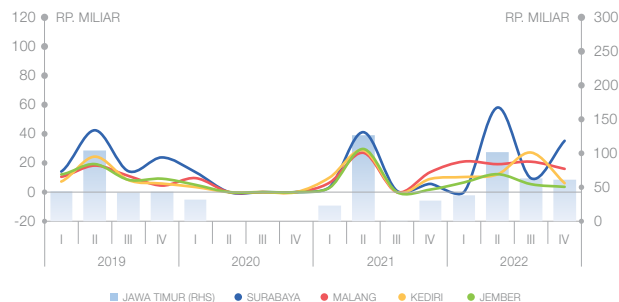
5.3.2. Penyediaan Uang Rupiah

Dalam rangka menjamin ketersediaan ULE di masyarakat, KPwBI Provinsi Jawa Timur terus mengintensifkan mekanisme penyediaan Uang Rupiah melalui layanan kas keliling, penukaran, dan kas titipan. Pada triwulan IV 2022, kegiatan kas keliling di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dari Rp62,95 miliar pada triwulan III 2022 menjadi Rp60,87 miliar (Grafik 5.14). Sementara itu, untuk kegiatan penukaran di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan pada triwulan IV 2022, yaitu dari semula Rp86,00 miliar pada triwulan III 2022 menjadi Rp110,39 miliar. Peningkatan layanan penukaran berkenaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah dalam pecahan tertentu pada Hari Natal dan Tahun Baru, serta uang Rupiah tahun emisi terbaru (Grafik 5.15). Secara spasial, peningkatan kegiatan penukaran yang signifikan terjadi di KPw BI Malang, diikuti oleh KPw BI Provinsi Jawa Timur, dan KPw BI Jember, sedangkan kegiatan penukaran di KPw BI Kediri mengalami penurunan.

Pada triwulan IV 2022, jumlah lokasi kas titipan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 6 (enam) kas titipan berada di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan kas titipan dilakukan melalui kerja sama antara Bank Indonesia dengan perbankan setempat.

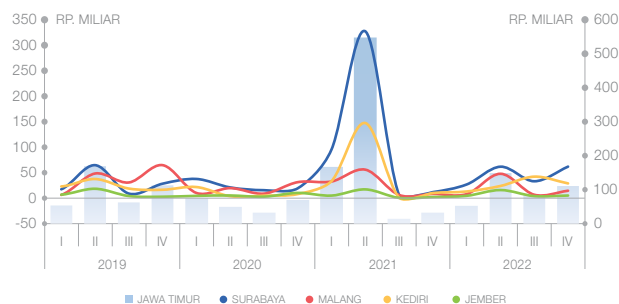
Jumlah nominal *dropping* ULE ke kas titipan pada triwulan IV 2022 mencapai Rp0,23 triliun, menurun sebesar 27,43% (qtq) dibandingkan dengan triwulan III 2022 (Grafik 5.16). Penurunan

Grafik 5.14 Nominal Transaksi Kas Keliling



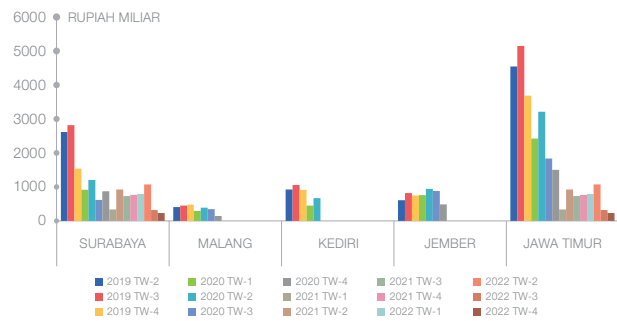
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.15 Nominal Transaksi Penukaran



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.16 Aktivitas Kas Titipan Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

tersebut mengindikasikan bank terus menerapkan efisiensi pengelolaan uang kartal. Ke depan, KPw BI Provinsi Jawa Timur akan senantiasa meningkatkan kerja sama dengan perbankan maupun dengan Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia) untuk memberikan layanan perkasan pada masyarakat.

5.3.3. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai

Dalam rangka merespon perubahan preferensi masyarakat ke arah digital, Bank Indonesia terus melakukan upaya perluasan SP nontunai berbasis QRIS yang bersifat *nirsentuh/contactless*. Pada bulan Agustus 2019, Bank Indonesia telah meluncurkan *standar Quick Response (QR) Code* sebagai metode pembayaran nirsentuh melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*. QRIS diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran, serta untuk memperluas akseptasi pembayaran nasional secara lebih efisien, mengingat dengan satu QR Code, penyedia barang dan jasa (*merchant*) sudah dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber. Penggunaan QRIS di Jawa Timur terus meningkat, terutama setelah perubahan pola transaksi masyarakat selama masa pandemi COVID-19 yang lebih memilih bertransaksi secara non tunai atau *less-contact*.

Jumlah *merchant* QRIS di Jawa Timur terus meningkat. Pada triwulan IV 2022 (posisi Desember 2022), jumlah *merchant* QRIS di Jawa Timur meningkat 12,88% (qtq) dari semula sebanyak 2,30 juta *merchant* pada triwulan III 2022 (posisi September 2022) menjadi 2,60 juta *merchant* (Grafik 5.17). Capaian tersebut berhasil membawa Jawa Timur sebagai Provinsi dengan jumlah *merchant* QRIS terbesar ke-3 di tingkat nasional. Namun demikian, dari segi skala usaha, pelaku usaha yang menyediakan QRIS di Jawa Timur masih didominasi oleh Usaha Mikro (pangsa 66,34%) dan Usaha Kecil (pangsa 26,66%). Kondisi ini diindikasikan tidak terlepas dari limit per transaksi melalui kanal pembayaran QRIS yang hanya Rp10 juta. Lebih lanjut, mayoritas *merchant* QRIS di Jawa Timur masih terkonsentrasi di Kota Surabaya (pangsa 29,93%), Kota Malang (pangsa 12,34%) dan Kabupaten Sidoarjo (8,59%).

Jumlah transaksi melalui kanal pembayaran QRIS meningkat seiring peningkatan jumlah pengguna/ user QRIS⁵⁸. Sampai dengan November 2022, jumlah pengguna QRIS di Jawa Timur tercatat sejumlah 3,90 juta pengguna atau setara 14,19% dari total pengguna QRIS secara nasional. Peningkatan jumlah pengguna juga diikuti oleh peningkatan volume dan nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS di Jawa Timur. Volume transaksi melalui kanal pembayaran QRIS pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 26,59 juta transaksi atau meningkat 25,88% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 21,12 juta transaksi. Seiring hal tersebut, nominal transaksi juga meningkat 10,34% (qtq) dari semula sebesar Rp1,97 triliun pada triwulan III 2022 menjadi Rp2,17 triliun pada triwulan laporan (Grafik 5.19). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa rata-rata transaksi per pengguna pada triwulan IV 2022 tercatat menurun, yaitu sebesar Rp81.785, lebih rendah dari rata-rata transaksi per pengguna pada triwulan sebelumnya yang sebesar Rp93.299.

Upaya perluasan implementasi QRIS di Jawa Timur juga telah dilakukan di berbagai sektor, baik dari segi penerimaan Pemerintah maupun sektor ritel. Sebagai upaya akselerasi penerimaan pemerintah, QRIS telah diimplementasikan untuk pembayaran Uji Kelayakan Kendaraan Niaga (KIR) dan Pajak Daerah, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, implementasi QRIS juga dilakukan melalui kerja sama dengan komunitas lokal, salah satunya pada komunitas golf yang meliputi

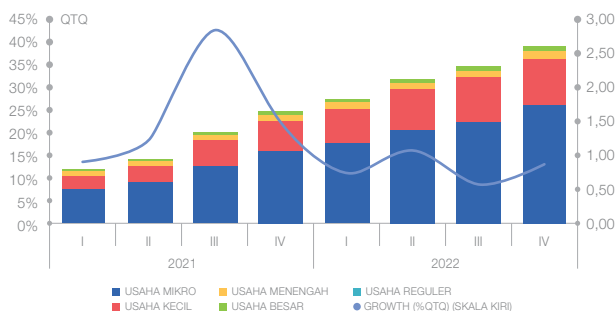
pembayaran *green fee* hingga pembayaran kepada *caddy*. Lebih lanjut, beberapa implementasi QRIS lainnya yang menjadi terobosan adalah penerapan QRIS pada Becak Wisata Tuban dan Kampung Inggris Kediri, serta penerapan QRIS pada daerah 3T (terdepan, terluar, terpencil) di Pulau Bawean. QRIS juga bisa digunakan pada lingkungan Aparat Penegak Hukum seperti penggunaan QRIS pada tilang manual sebagai komplemen *e-tilang* yang sudah mulai diterapkan. Dengan penggunaan QRIS tersebut, maka potensi kebocoran anggaran karena pungli dapat diminimalisasi. Kepolisian juga tidak membutuhkan peralatan khusus, hanya kode QRIS pembayaran saja, sehingga selain mudah diterapkan dalam penerapan tilang manual, proses penghimpunan dana juga menjadi lebih terbuka dan transparan. Ke depan, pembayaran transaksi *e-commerce* dengan cara COD yang biasanya dilakukan secara tunai, dapat pula dilakukan secara non-tunai melalui scan QRIS.

Grafik 5.19 Perkembangan Volume dan Nominal Transaksi QRIS



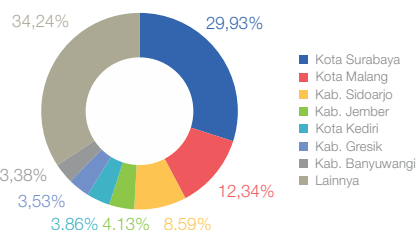
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.17 Perkembangan Merchant QRIS per Skala Usaha



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.18 Pangsa Jumlah Merchant QRIS per Kabupaten/Kota



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

58. Pengguna/user QRIS merupakan pihak yang memiliki aplikasi untuk mendukung pembayaran dengan cara memindai QRIS

BOKS 4

Hasil Survei: Pandemi Covid-19 Mendorong Peningkatan Preferensi Konsumen untuk Menggunakan Transaksi Digital di Jawa Timur

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global mendorong akselerasi transformasi digital di berbagai aspek aktivitas ekonomi, termasuk sistem pembayaran. Tiga tahun sejak pandemi Covid-19 terjadi secara global, ekonomi digital berkembang signifikan, tercermin dari peningkatan jumlah pengguna akun serta transaksi pembayaran digital. Dengan pendekatan survei skala besar, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BIS (2021) dan IMF (2022), terjadi peningkatan 30% pengguna akun pembayaran digital baru, penurunan pengambilan uang tunai di bank sebesar 25%, serta 87% responden menyatakan bertransaksi dengan uang tunai yang lebih rendah dibandingkan sebelum periode Covid-19. Hal tersebut mengindikasikan perubahan preferensi konsumen dalam aktivitas pembayaran dari tunai menjadi nontunai melalui sistem pembayaran digital.

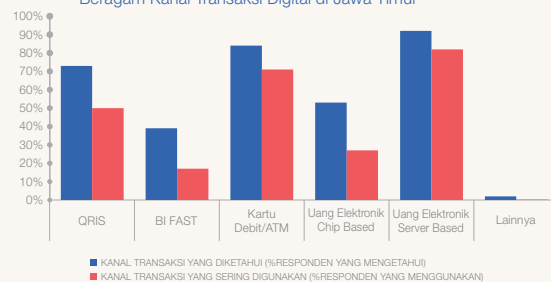
Sejalan dengan global dan nasional, pandemi Covid-19 turut mendorong percepatan transformasi sistem pembayaran digital di Jawa Timur yang berimplikasi pada perubahan preferensi konsumen dalam melakukan transaksi ekonomi. Mengadaptasi penelitian yang dilakukan oleh BIS (2021) dan IMF (2022), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur pada November 2022 melakukan survei untuk mengetahui preferensi kanal pembayaran konsumen pada periode sebelum pandemi Covid-19 (sebelum tahun 2020) dan saat pandemi Covid-19 (tahun 2020 – 2022). Secara umum, melalui survei dengan pendekatan *non-probability* sampling terhadap 300 responden di Jawa Timur, preferensi responden menggunakan transaksi digital (nontunai) mengalami peningkatan pada periode pandemi Covid-19 dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19. Lebih lanjut, dengan pendekatan *Structural Equation Modelling* (SEM), faktor kegunaan, manfaat, dan kemudahan merupakan faktor yang paling mempengaruhi minat responden untuk melakukan transaksi digital.

Hasil Survei secara Mendalam

Mayoritas responden telah mengetahui beragam kanal transaksi digital di Indonesia, namun masih terdapat ruang pengembangan untuk mendorong optimalisasi penggunaan beberapa jenis kanal transaksi digital, khususnya BI FAST dan uang elektronik *chip based*. Dari lima (5) kanal digital utama, yakni QRIS, BI FAST, Kartu Debit/ATM, uang elektronik *chip based*, dan uang elektronik *server based*, mayoritas responden (68%) mengetahui kelima kanal transaksi digital tersebut. Meskipun demikian,

masih terdapat divergensi pengetahuan responden untuk setiap kanal transaksi digital terkait. Uang elektronik *server based*, kartu debit/ATM, dan QRIS merupakan tiga kanal transaksi digital dengan popularitas tertinggi di tingkat responden. Persentase responden yang mengetahui kanal transaksi digital jenis uang elektronik *server based*, kartu debit/ATM, dan QRIS masing-masing sebesar 92%, 84%, dan 73% dengan tingkat penggunaan masing-masing sebesar 82%, 71%, dan 50%. Sementara itu, masih terdapat ruang optimalisasi yang besar terkait kanal transaksi digital jenis BI FAST dan uang elektronik *chip based*. Persentase responden yang mengetahui kanal transaksi digital jenis BI FAST dan uang elektronik *server based* masing-masing sebesar 39% dan 53% dengan tingkat penggunaan masing-masing sebesar 17% dan 27% (Grafik 1).

Grafik 1. Presentase Responden yang Mengetahui dan Menggunakan Beragam Kanal Transaksi Digital di Jawa Timur

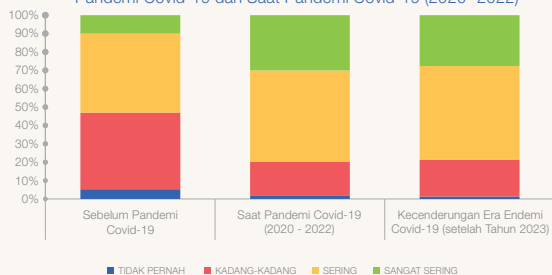


Sumber: Survei KPw BI Provinsi Jawa Timur, dilatih (2022)

Pandemi Covid-19 mendorong peningkatan transaksi digital di Jawa Timur dengan kecenderungan bertahan pada masa mendatang. Berdasarkan hasil survei, intensitas responden dalam menggunakan transaksi digital di Jawa Timur meningkat pada periode pandemi Covid-19 (2020-2022). Sebelum pandemi Covid-19, responden yang melakukan transaksi digital dengan intensitas sering dan sangat sering masing-masing sebesar 43% dan 10% dari total responden. Pada periode pandemi Covid-19 (2020-2022), terjadi peningkatan transaksi digital dengan intensitas sering dan sangat sering, yakni masing-masing sebesar 50% dan 30%. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat oleh Pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 mendorong peningkatan pemanfaatan transaksi digital (nontunai) oleh masyarakat di Jawa Timur. Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei, preferensi responden untuk menggunakan transaksi digital masih tetap kuat pada periode endemi Covid-19 (pasca tahun 2022) (Grafik 2). Dengan pendekatan SEM,

BOKS 4

Grafik 2. Intensitas Penggunaan Transaksi Digital di Jawa Timur, Sebelum Pandemi Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19 (2020 -2022)



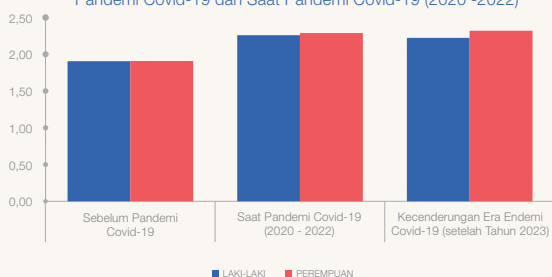
Sumber: Survei KPw BI Provinsi Jawa Timur, diolah (2022)

faktor kegunaan, manfaat, dan kemudahan merupakan faktor yang paling mempengaruhi minat responden untuk melakukan transaksi digital.

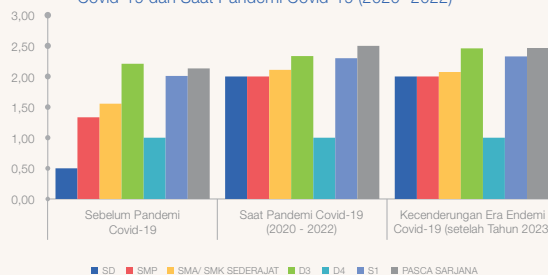
Peningkatan transaksi digital saat pandemi Covid-19 dengan kecenderungan bertahan pada masa mendatang terjadi untuk seluruh kelompok pendidikan dan jenis kelamin. Berdasarkan hasil survei, peningkatan transaksi digital terjadi untuk seluruh responden untuk seluruh kelompok pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK sederajat, D3, D4, S1, dan pasca sarjana) dan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) pada saat pandemi Covid-19 dan kecenderungan era endemi Covid-19 dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Peningkatan transaksi digital juga terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan (Grafik 3 dan Grafik 4).

Mayoritas transaksi digital digunakan untuk transaksi perdagangan dan transfer antarbank, sementara pemanfaatan transaksi digital untuk pembayaran pajak dan retribusi masih terbatas. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden melakukan pembayaran digital untuk

Grafik 4. Intensitas Penggunaan Transaksi Digital di Jawa Timur, Sebelum Pandemi Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19 (2020 -2022)

Keterangan:
0=tidak pernah, 1=kadang-kadang, 2=sering, 3=sangat sering
Sumber: Survei KPw BI Provinsi Jawa Timur, diolah (2022)

Grafik 3. Intensitas Penggunaan Transaksi Digital di Jawa Timur, Sebelum Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19 (2020 -2022)

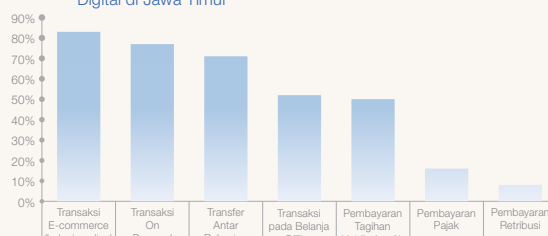
Keterangan:
0=tidak pernah, 1=kadang-kadang, 2=sering, 3=sangat sering
Sumber: Survei KPw BI Provinsi Jawa Timur, diolah (2022)

keperluan transaksi pada *e-commerce* (83%), transaksi pada aplikasi order *on-line*/transaksi *on demand* (77%), dan transaksi antarrekening (71%). Sementara itu, pemanfaatan kanal digital untuk pembayaran pajak dan retribusi masih terbatas, yakni masing-masing sebesar 16% dan 8% (Grafik 5).

Keterbatasan infrastruktur internet menjadi hambatan utama transaksi digital di Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei, 76% responden menyatakan bahwa hambatan terbesar yang menahan transaksi digital adalah akses internet saat melakukan transaksi. Sementara itu, pengetahuan responden terkait tata cara penggunaan transaksi digital cukup baik tercermin dari hanya 14% responden yang menyatakan tidak memahami penggunaan transaksi digital (Grafik 6).

Terdapat ruang pengembangan untuk mendorong optimalisasi transaksi digital di Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei, ruang optimalisasi terutama terletak pada peningkatan informasi jenis-jenis kanal pembayaran digital, terutama jenis BI Fast dan uang elektronik *chip based* di

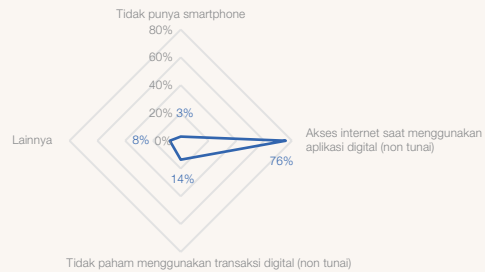
Grafik 5. Presentase Responden dalam Jenis Penggunaan Pembayaran Digital di Jawa Timur



Sumber: Survei KPw BI Provinsi Jawa Timur, diolah (2022)

BOKS 4

Grafik 6. Presentase Responden dalam Jenis Penggunaan Pembayaran Digital di Jawa Timur



Sumber: Survei KPw BI Provinsi Jawa Timur, dilatih (2022)

mana masing-masing terdapat 61% dan 47% responden yang belum mengetahui kanal pembayaran digital tersebut. Ruang optimalisasi juga terdapat pada peningkatan nilai dan transaksi digital untuk kedua kanal transaksi digital tersebut. Lebih lanjut, ruang pengembangan juga terdapat pada penguatan infrastruktur akses internet untuk menunjang optimalisasi transaksi digital. Di samping itu, masih terbatasnya transaksi digital pada pembayaran pajak dan retribusi turut menjadi salah satu ruang optimalisasi. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, edukasi yang diiringi penguatan infrastruktur sistem pembayaran menjadi faktor kunci untuk mendukung percepatan transaksi digital di Jawa Timur.



BAB VI

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



6.1. GAMBARAN UMUM

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Agustus 2022 menunjukkan perlambatan dibandingkan Februari 2022, namun lebih baik dibandingkan Agustus 2021. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2022 akibat eskalasi ketidakpastian global yang berdampak pada tertahannya kinerja mayoritas lapangan usaha utama. Lebih rendahnya kondisi ketenagakerjaan dibandingkan Februari 2022 tercermin dari peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,82% pada Februari 2022 menjadi 5,49% pada Agustus 2022. Sementara itu, jika dibandingkan Agustus 2021, kondisi ketenagakerjaan meningkat sejalan dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19 di tengah akselerasi vaksin Covid-19 yang mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja sejalan dengan semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif. Meskipun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur pada Agustus 2022 terpantau mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021 ditopang oleh kenaikan jumlah angkatan kerja di Jawa Timur yang bekerja penuh. Peningkatan TPAK menunjukkan peningkatan tenaga kerja produktif yang siap bekerja di Jawa Timur yang dapat mendukung perbaikan ekonomi Jawa Timur pada masa depan. Pada triwulan IV 2022, berdasarkan SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur, penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur terindikasi menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya khususnya akibat penurunan kinerja ekspor LN.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau sedikit menurun dibandingkan Maret 2022, namun lebih baik dibandingkan September 2021. Perlambatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 yang berdampak pada peningkatan tarif transportasi dan berbagai komoditas konsumsi sehingga menekan pendapatan dan pengeluaran sekelompok masyarakat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan September 2021 terpantau mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin dari lebih rendahnya jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Perluasan pembukaan sektor ekonomi produktif pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang ditopang oleh semakin terkendalinya kasus Covid-19 mendorong semakin tingginya penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan September 2021.

Kesejahteraan masyarakat pedesaan yang direpresentasikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

tercatat mengalami kenaikan pada triwulan IV 2022. NTP meningkat menjadi 105,13 pada triwulan IV 2022 dari 103,98 pada triwulan III 2022. Hal tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan petani di sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan sejalan dengan peningkatan harga komoditas beras, hasil ternak/unggas, dan komoditas tebu. Sementara itu, kesejahteraan kelompok nelayan juga terpantau meningkat pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan kenaikan penerimaan nelayan, terutama untuk perikanan. Hal ini tercermin dari perbaikan NTN menjadi 102,51 pada triwulan IV 2022, dari 102,45 pada triwulan III 2022.

6.2. KETENAGAKERJAAN

6.2.1. Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Agustus 2022 meningkat dibandingkan Februari 2022. TPT Jawa Timur pada Agustus 2022 tercatat sebesar 5,49%, lebih tinggi dibandingkan Februari 2022 yang tercatat sebesar 4,82% (Tabel 6.1). Hal tersebut dipengaruhi oleh lebih rendahnya kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2022, khususnya LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi. Peningkatan ketidakpastian global terutama akibat masih berlangsungnya konflik geopolitik Rusia – Ukraina dan Tiongkok – Taiwan berdampak pada semakin luasnya kebijakan proteksionisme global yang menyebabkan disrupsi rantai pasokan yang berimplikasi pada kenaikan inflasi global. Hal tersebut berdampak pada penurunan kepercayaan dunia usaha yang mendorong investor melakukan *wait and see* dan menahan investasi usahanya, termasuk investasi di LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi.

Meskipun demikian, TPT Jawa Timur pada Agustus 2022 lebih rendah dibandingkan Agustus 2021. TPT Jawa Timur pada Agustus 2022 tercatat sebesar 5,49%, lebih rendah dibandingkan Februari 2022 yang tercatat sebesar 5,74% (Tabel 6.1). Hal tersebut mengindikasikan perbaikan pasar ketenagakerjaan Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021 sejalan dengan perbaikan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Pada triwulan III 2022, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 yang sebesar 3,28% (yoy). Relaksasi kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi pada tahun 2022 sejalan dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19 mendorong semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif. Kondisi tersebut berimplikasi pada peningkatan permintaan tenaga kerja di Jawa Timur pada tahun 2022 yang tercermin dari lebih rendahnya TPT Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur pada Agustus 2022 meningkat dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021. TPAK Jawa Timur pada Agustus 2022 tercatat sebesar 71,23%, lebih tinggi dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021 yang masing-masing sebesar 70,98% dan 70,00% (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur (juta orang)

KEGIATAN	2018		2019		2020		2021		2022	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
Angkatan Kerja	21,01	21,30	21,59	21,50	22,52	22,27	22,19	22,32	23,04	22,87
Bekerja Penuh	13,43	14,28	14,00	14,42	14,46	13,23	13,07	13,27	13,68	14,31
Bekerja Paruh Waktu	5,31	4,98	5,33	5,14	6,16	5,85	6,17	6,20	6,52	6,06
Bekerja Setengah Pengangguran	1,46	1,19	1,44	1,09	1,09	1,89	1,80	1,57	1,73	1,25
Penganggur	0,81	0,85	0,83	0,84	0,81	1,30	1,15	1,28	1,11	1,26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,71%	69,37%	70,02%	69,43%	71,37%	70,33%	69,76%	70,00%	70,98%	71,23%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,86%	3,99%	3,84%	3,91%	3,64%	5,84%	5,18%	5,74%	4,82%	5,49%
Rasio Ketergantungan	43,70%		43,68%		42,33%		42,59%		42,21%	

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

Secara umum, peningkatan TPAK mengindikasikan kenaikan angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas atau penduduk berusia produktif. Kenaikan TPAK menunjukkan peningkatan tenaga kerja produktif yang siap bekerja di Jawa Timur. Peningkatan TPAK di Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021 terutama didukung oleh lebih tingginya jumlah angkatan kerja di Jawa Timur yang bekerja penuh. Kondisi tersebut mengindikasikan perbaikan kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 diiringi dengan perbaikan di sektor ketenagakerjaan.

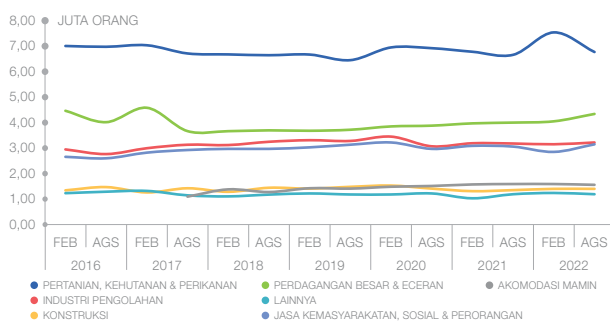
Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) Jawa Timur menunjukan tren perbaikan kecuali untuk tahun 2020 yang sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. *Dependency ratio* terpantau berada pada kisaran 43% - 44%, artinya setiap 100 orang penduduk usia kerja (16 – 64 tahun, dianggap produktif) di Jawa Timur mempunyai tanggungan sebanyak 43 – 44 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan tersebut mengindikasikan ukuran beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum dan/atau tidak produktif (Tabel 6.1).

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, pada Agustus 2022, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur. Pangsa penyerapan tenaga kerja LU Pertanian di Jawa Timur pada Agustus 2022 tercatat sebesar 31,30%, lebih rendah dibandingkan Februari 2022 (34,56%) dan Agustus 2022 (31,67%). Penurunan pangsa tenaga

kerja LU Pertanian di Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Februari 2022 dipengaruhi oleh lebih rendahnya kuantitas dan kualitas panen hortikultura akibat hama dan tingginya curah hujan serta belum berlangsungnya panen gadu komoditas beras pada Agustus 2022. Kondisi ini berbeda dengan periode Februari 2022 di mana panen padi tengah berlangsung sehingga penyerapan tenaga kerja di LU Pertanian lebih tinggi. Sementara itu, penurunan pangsa tenaga kerja LU Pertanian di Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021 dipengaruhi oleh lebih rendahnya kualitas dan kuantitas produksi hortikultura akibat hama antraknosa dan curah hujan yang tinggi. Hal tersebut berbeda dengan periode Agustus 2021 di mana kuantitas dan kualitas panen hortikultura terpantau baik sejalan dengan cuaca yang mendukung dan tidak adanya hama antraknosa (Grafik 6.2).

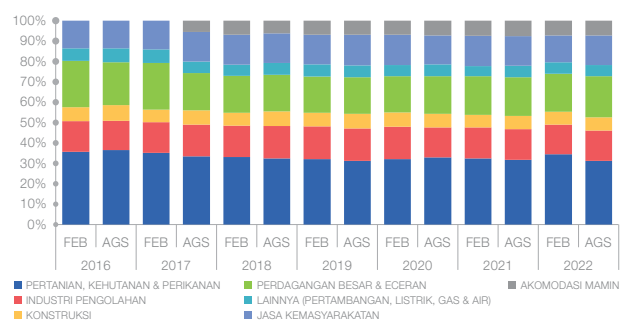
LU Perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar kedua di Jawa Timur pada Agustus 2022. Pangsa penyerapan tenaga kerja LU Perdagangan di Jawa Timur pada Agustus 2022 tercatat sebesar 20,06%, lebih tinggi dibandingkan Februari 2022 (18,56%) dan Agustus 2021 (19,52%). Peningkatan penyerapan tenaga kerja di LU Perdagangan di Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Februari 2022 ditopang oleh perbaikan kinerja LU Perdagangan di Jawa Timur pada triwulan III 2022 dibandingkan triwulan II 2022 sejalan dengan peningkatan konsumsi swasta, ekspor LN, dan perdagangan antardaerah di Jawa Timur pada periode tersebut⁵⁹. Kondisi tersebut berimplikasi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur pada triwulan III 2022.

Grafik 6.1 Jumlah Tenaga Kerja LU Utama



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.2 Pangsa Tenaga Kerja Sektoral



Sumber : BPS Jatim (diolah)

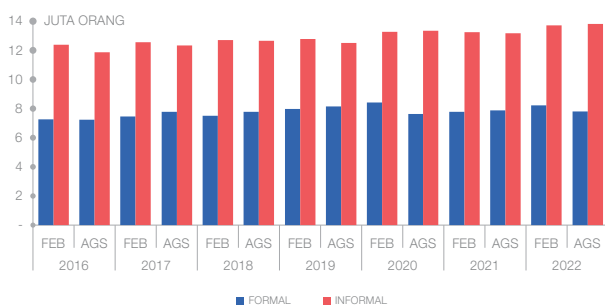
59. Pertumbuhan kinerja LU Perdagangan di Jawa Timur triwulan III 2022 mengalami peningkatan dari 6,99% (yoy) menjadi 8,10% (yoy).

Sementara itu, lebih tingginya penyerapan tenaga kerja di LU Perdagangan di Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021 didorong oleh relaksasi kebijakan pembatasan ekonomi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang berimplikasi pada semakin luasnya pembukaan sektor perdagangan.

LU Industri Perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar ketiga di Jawa Timur pada Agustus 2022. LU Industri Pengolahan merupakan LU terbesar dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi ketiga di Jawa Timur. Pangsa penyerapan tenaga kerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada Agustus 2022 tercatat sebesar 14,89%. Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Februari 2022 (14,44%), namun lebih rendah dibandingkan Agustus 2021 (15,21%). Peningkatan penyerapan tenaga kerja di LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Februari 2022 ditopang oleh peningkatan permintaan domestik dan eksternal pada triwulan III 2022 yang direspons dengan penyerapan tenaga kerja di LU Industri Pengolahan. Sementara itu, di tengah perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, lebih rendahnya penyerapan tenaga kerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021 dipengaruhi penggunaan teknologi yang mendorong efisiensi penggunaan tenaga kerja LU Industri Pengolahan pada tahun 2022.

Kondisi tenaga kerja di Jawa Timur pada Agustus 2022 berdasarkan Status Pekerjaan Utama masih didominasi oleh sektor informal. Pada Agustus 2022, jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal sebesar 13,81 juta atau 63,88% dari total tenaga kerja sekitar 21,62 juta, meningkat dibandingkan Februari 2022 (62,26%). Pangsa tersebut juga meningkat dibandingkan Agustus 2021 (62,61%) dengan jumlah tenaga kerja yang meningkat dibandingkan Februari 2022 (13,71 juta) dan Agustus 2021 (13,18 juta) (Grafik 6.3). Sebaliknya, jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal tercatat mengalami penurunan dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021 (Grafik 6.3 – 6.4). Berdasarkan status pekerjaannya, kenaikan jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal terutama didorong oleh peningkatan angkatan kerja yang berusaha sendiri dan pekerja dibantu buruh

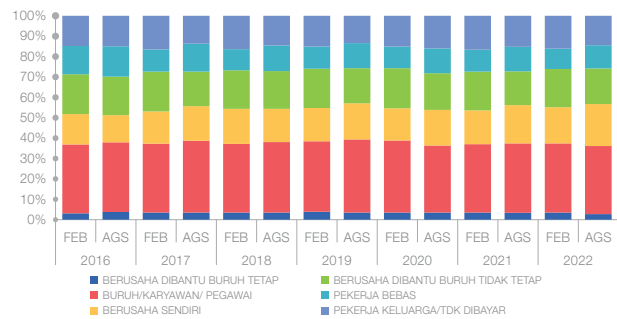
Grafik 6.3 Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal



Sumber : BPS Jatim (diolah)

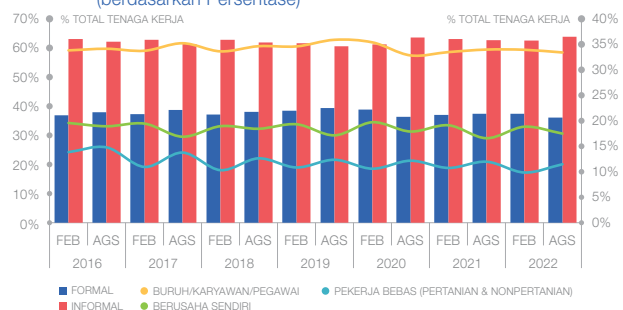
60. Jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Universitas pada Agustus 2022 tercatat 1,82 juta (pangsa 8,42% terhadap total tenaga kerja), lebih rendah dibandingkan Februari 2022 (2,01 juta atau 9,17% terhadap total tenaga kerja) dan Agustus 2021 (1,90 juta atau 9,03% terhadap total tenaga kerja).

Grafik 6.4 Komposisi Tenaga Kerja Formal-Informal



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.5 Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal secara sektor (berdasarkan Persentase)

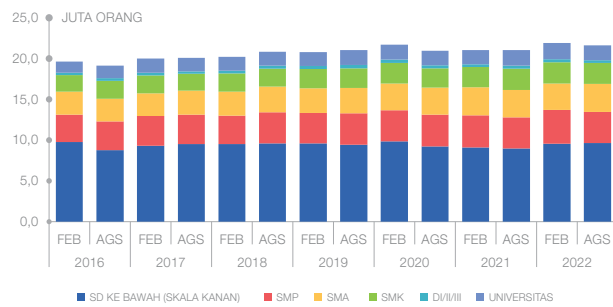


Sumber : BPS Jatim (diolah)

tidak tetap, masing – masing dari 3,96 juta dan 3,49 juta pada Agustus 2021 menjadi 4,44 juta dan 3,78 juta pada Agustus 2022 (Grafik 6.5). Sementara itu, penurunan penduduk yang bekerja di sektor formal terutama disebabkan oleh penurunan penduduk yang bekerja sebagai Berusaha Dibantu Buruh Tetap dari 0,72 juta pada Agustus 2021 menjadi 0,59 juta pada Agustus 2022 (Grafik 6.5). Peningkatan tenaga kerja informal yang diiringi dengan lebih rendahnya tenaga kerja formal di Jawa Timur pada Agustus 2022 mencerminkan penurunan kualitas di sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan oleh relatif lebih rendahnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja informal dibandingkan lapangan kerja formal.

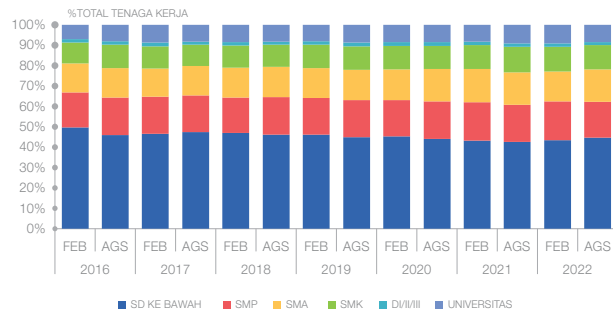
Pada Agustus 2022, profil angkatan kerja berdasarkan jenis pendidikan belum mengalami perbaikan dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021. Hal tersebut tercermin pada lulusan SD ke bawah yang masih mendominasi tenaga kerja, dengan proporsi yang lebih tinggi dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021. Jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah pada Agustus 2022 sebanyak 9,64 juta atau 44,59% dari total tenaga kerja Jawa Timur. Kondisi tersebut meningkat dibandingkan Februari 2022 (9,54 juta atau 43,5% dari total tenaga kerja Jawa Timur) dan Agustus 2021 (8,96 juta atau 42,61% dari total tenaga kerja Jawa Timur). Jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Universitas mengalami penurunan pada Agustus 2022 dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021⁶⁰. Jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMP, SMK, dan Diploma juga

Grafik 6.6 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.7 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

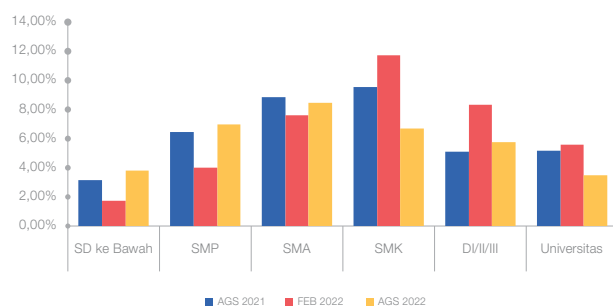


Sumber : BPS Jatim (diolah)

menunjukkan penurunan pada periode Agustus 2022 dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021. Sementara itu, jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA meningkat pada periode Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021, namun sedikit lebih rendah dibandingkan periode Februari 2022 (Grafik 6.6 – 6.7). Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat ruang pengembangan yang besar untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja di Jawa Timur.

Terdapat dinamika komposisi TPT berdasarkan tingkat pendidikan di Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Februari 2022. TPT pada lulusan tingkat SD ke bawah, SMP, dan SMA di Jawa Timur pada Agustus 2022 mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2022. Sementara itu, TPT pada lulusan tingkat SMK, Diploma, dan Universitas di Jawa Timur pada Agustus 2022

Grafik 6.8 Komposisi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : BPS Jatim (diolah)

mengalami penurunan dibandingkan Februari 2022. Peningkatan TPT pada lulusan kelompok SD ke bawah dan SMP ditengarai turut didorong oleh penurunan tenaga kerja pada LU Pertanian sejalan dengan belum berlangsungnya masa panen raya komoditas padi. Kondisi ini berbeda dengan periode Februari 2022 di mana panen raya padi tengah berlangsung. Sementara peningkatan TPT pada lulusan kelompok SMA pada Agustus 2022 ditengarai dipengaruhi oleh periode kelulusan SMA pada Juli 2022 yang berimplikasi pada masih berlangsungnya periode mencari pekerjaan pada Agustus 2022. Kondisi tersebut berbeda dengan periode Februari 2022 di mana periode pengajaran masih berlangsung. Lebih lanjut, penurunan TPT pada lulusan tingkat SMK, Diploma, dan Universitas di Jawa Timur pada Agustus 2022 dibandingkan Februari 2022 mengindikasikan peningkatan permintaan tenaga kerja terdidik di Jawa Timur pada periode laporan.

Dinamika komposisi TPT berdasarkan tingkat pendidikan di Jawa Timur juga terjadi pada periode Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021. TPT pada lulusan tingkat pendidikan SD ke bawah, SMP, dan Diploma mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2021. Sementara itu, TPT pada lulusan Universitas, SMA, dan SMK masih cukup tinggi meskipun menurun dibandingkan Agustus 2021. Peningkatan TPT pada lulusan kelompok SD ke bawah dan SMP ditengarai turut dipengaruhi oleh penurunan kuantitas dan kualitas panen hortikultura akibat gangguan hama antraknosa dan intensitas curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut berbeda dengan Agustus 2021 di mana faktor cuaca relatif mendukung dan tidak adanya gangguan hama antraknosa. Lebih lanjut, penurunan TPT pada lulusan Universitas, SMA, dan SMK pada Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021 mengindikasikan peningkatan penyerapan tenaga kerja terampil dan terdidik didorong oleh semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif pada tahun 2022 sejalan dengan semakin terkendalinya kasus Covid-19.

Baik pada periode Agustus 2022, Februari 2022, maupun Agustus 2021, TPT pada lulusan SMA, SMK, dan DI/DII/DIII masih terpantau tinggi sehingga dibutuhkan kebijakan spesifik untuk menekan tingginya TPT tersebut. Tingginya TPT pada lulusan SMA, SMK, dan DI/DII/DIII disebabkan oleh ketimpangan antara kualifikasi kebutuhan tenaga kerja (*skilled employees*) dengan angkatan kerja SMA dan SMK (khususnya bersifat *unskilled employees*), serta DI/DII/DIII (Grafik 6.8). Untuk itu, perlu dilakukan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dunia usaha. Beberapa program Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meminimalkan gap tersebut, antara lain :

1. Memberdayakan para ahli di bidang tertentu dengan sertifikasi nasional dan internasional sebagai pendamping tenaga pengajar SMA maupun SMK.
2. Sertifikasi kompetensi khususnya bagi lulusan SMK agar mempunyai kredibilitas dan daya saing dengan tenaga kerja asing, serta mampu memenuhi standar kebutuhan industri.
3. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja dengan melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi melalui

Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat pusat hingga daerah, serta program Kartu Prakerja.

4. Kerja sama antara Institusi Pendidikan bersama Perusahaan/ BUMN berupa program magang dan beasiswa, seperti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang diinisiasi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan Program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek.

Produktivitas tenaga kerja tertinggi terjadi pada LU Industri Pengolahan, sementara yang terendah pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Rendahnya produktivitas LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi berdampak pada rendahnya pendapatan per pekerja di LU tersebut. Sebaliknya, LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, dan LU Transportasi dan Informasi yang menyerap 14,89%, 0,51%, dan 3,88% tenaga kerja berkontribusi 44,78% terhadap PDRB Jawa Timur. Penggunaan teknologi dan kualitas tenaga kerja yang lebih tinggi pada LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, dan LU Transportasi dan Informasi ditengarai menjadi salah satu faktor pendorong produktivitas pada LU tersebut (Tabel 6.2).

Pada triwulan IV 2022, berdasarkan SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur, penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur terindikasi menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh lebih rendahnya ekonomi Jawa Timur pada periode laporan. Faktor domestik dan eksternal menjadi penyebab lebih rendahnya kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV 2022. Masih berlanjutnya konflik geopolitik Rusia – Ukraina, Tiongkok – Taiwan, dan Amerika Serikat – Arab Saudi serta kebijakan *Zero Covid Policy* di Tiongkok berdampak pada disrupsi rantai pasokan global yang berimplikasi pada kebijakan proteksionisme global. Hal tersebut bersama dengan perlambatan ekonomi global menyebabkan penurunan perdagangan global sehingga turut menekan kinerja ekspor LN Jawa Timur. Dari sisi domestik, telah selesainya beberapa stimulus pemerintah pada triwulan IV 2022 (PPN DTP Properti (September 2022) dan PPnBM DTP LCGC (Oktober 2022)), penurunan pendapatan sejumlah RT yang bekerja di korporasi yang bergerak di ekspor LN, dan dampak rambatan kenaikan harga BBM terhadap berbagai komoditas perdagangan berimplikasi pada tertahannya kinerja konsumsi RT pada triwulan laporan. Perlambatan dari permintaan domestik dan eksternal tersebut berimplikasi pada lebih rendahnya pertumbuhan mayoritas LU, termasuk LU utama Industri

Tabel 6.2 Perbandingan Kinerja Lapangan Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja

LAPANGAN USAHA	Tenaga Kerja		PDRB (ADHK)	
	Jumlah (Juta)	Pangsa	Nominal (T)	Pangsa
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,77	31,30%	48,48	10,83%
Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,51%	17,77	3,97%
Industri Pengolahan	3,22	14,89%	134,79	30,12%
Penyediaan Listrik, Gas, dan Air	0,11	0,51%	1,74	0,39%
Konstruksi	1,40	6,47%	41,71	9,32%
Perdagangan, Akomodasi, Makan Minum	5,90	27,28%	108,37	24,21%
Transportasi, Pergudangan, dan Informasi Komunikasi	0,84	3,88%	43,27	9,67%
Jasa Keuangan, Asuransi dan Perusahaan	0,53	2,45%	21,84	4,88%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Lainnya	2,75	12,71%	29,58	6,61%
TOTAL	21,63	100,00%	447,54	100,00%

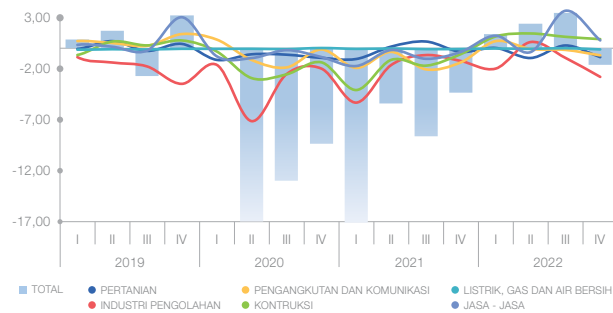
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

Tabel 6.3 Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Penggunaan Tenaga Kerja Sejumlah Perusahaan di Jawa Timur

SEKTOR	2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	-1,04	0,17	0,67	-0,34	0,04	-0,95	0,28	-0,86
Pertambangan	-0,01	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	-5,32	-1,64	-0,66	-1,24	-1,98	0,62	-0,93	-2,80
Listrik, Gas Dan Air Bersih	-0,05	-0,01	-0,07	-0,06	-0,01	-0,05	0,02	-0,10
Bangunan	-4,09	-1,13	-1,70	-0,57	1,17	1,46	1,13	0,91
PHR	-3,48	-0,98	-4,31	-0,54	-0,02	1,33	-0,83	0,30
Pengangkutan Dan Komunikasi	-1,92	-0,34	-2,06	-1,38	0,71	-0,06	-0,15	-0,69
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-0,38	-0,05	0,11	0,15	0,27	0,41	0,29	0,86
Jasa - Jasa	-1,73	-0,16	-1,03	-0,35	1,24	-0,37	3,69	0,78
TOTAL	-18,03	-5,39	-8,62	-4,33	1,41	2,41	3,49	-1,62

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha BI

Grafik 6.9 Penggunaan Tenaga Kerja berdasarkan Sektor



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha BI

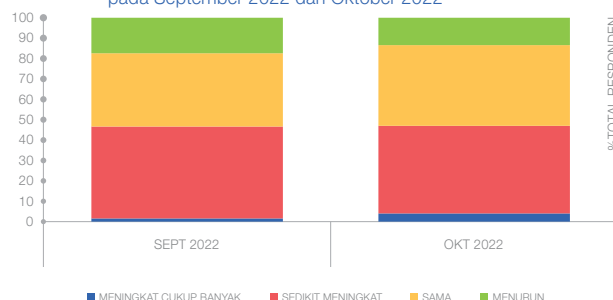
Pengolahan. Lebih lanjut, masih berlangsungnya masa tanam padi dan hortikultura berdampak pada lebih rendahnya pertumbuhan LU Pertanian pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal – hal tersebut berimplikasi pada penurunan serapan tenaga kerja pada periode laporan. Sektor ekonomi yang mengalami penurunan serapan tenaga kerja adalah LU Pertanian, Industri Pengolahan, Listrik dan Gas, Konstruksi, Pengangkutan dan Komunikasi, serta Jasa - jasa (Tabel 6.3 dan Grafik 6.9).

Penurunan serapan tenaga kerja pada triwulan laporan menyebabkan penurunan penghasilan RT dan keyakinan konsumen pada triwulan laporan. Lebih rendahnya ketersediaan lapangan kerja pada triwulan IV 2022 tercermin dari lebih rendahnya Indeks Ketersediaan Lapangan Usaha SK Bank Indonesia Jawa Timur dari 114,37 pada triwulan III 2022 menjadi 113,88 pada triwulan IV 2022. Sementara penurunan penghasilan RT tercermin dari penurunan Indeks Penghasilan Rumah Tangga SK Bank Indonesia Jawa Timur dari 126,98 pada triwulan III 2022 menjadi 126,67 pada triwulan IV 2022 (Grafik 6.10).

6.3 PROFIL KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA TIMUR

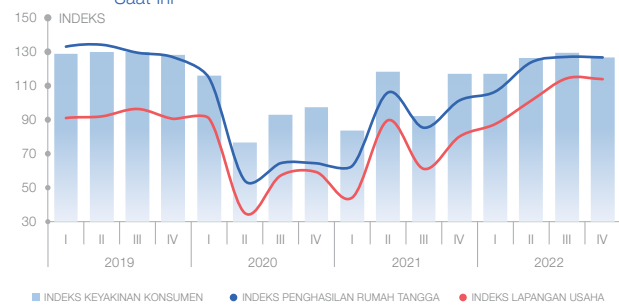
Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau sedikit lebih rendah dibandingkan Maret 2022. Sedikit tertekannya tingkat kesejahteraan masyarakat pada September 2022 tercermin dari kenaikan jumlah penduduk pra-sejahtera dari 4,18 juta jiwa (10,38% dari total penduduk) pada

Grafik 6.11 Perubahan Pendapatan Bulanan Masyarakat di Jawa Timur pada September 2022 dan Oktober 2022



Sumber : SK Bank Indonesia di Jawa Timur (diolah)

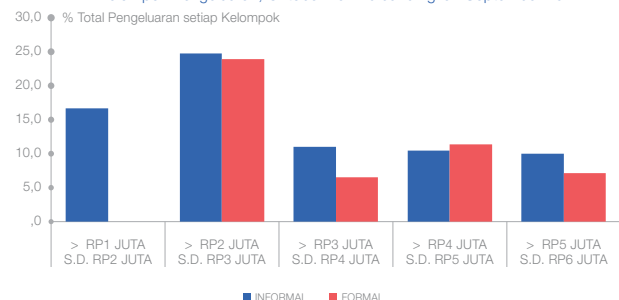
Grafik 6.10 Keyakinan Konsumen, Penghasilan RT, dan Lapangan Usaha Saat Ini



Sumber : Survei Konsumen BI

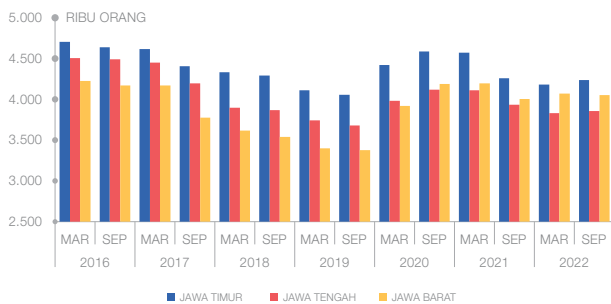
Maret 2022 menjadi 4,24 juta jiwa (10,49% dari total penduduk) pada September 2022. Peningkatan harga BBM oleh pemerintah pada 3 September 2022 sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia ditengarai berpengaruh terhadap sedikit tertekannya tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Pada 3 September 2022, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar masing-masing sebesar 30,72% dan 32,04% serta BBM nonsubsidi jenis Pertalite sebesar 16,00%. Penyesuaian harga BBM tersebut turut berdampak pada kenaikan berbagai tarif transportasi. Hal ini tercermin dari peningkatan inflasi IHK gabungan 8 kota di Jawa Timur kelompok Transportasi dari 6,09% (%yoy) pada Juni (triwulan II) 2022 menjadi 17,16% (yoy) pada September (triwulan III) 2022. Lebih lanjut, penyesuaian harga BBM turut berdampak pada penyesuaian harga sejumlah barang konsumsi tercermin dari Inflasi IHK gabungan 8 kota di Jawa Timur yang meningkat dari 4,92% (yoy) pada Juni (triwulan II) 2022 menjadi 6,80% (yoy) pada September (triwulan III) 2022. Peningkatan harga BBM dan dampak rambatannya terhadap tarif transportasi dan berbagai komoditas konsumsi lainnya tersebut berimplikasi pada penurunan pendapatan sekelompok masyarakat. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia di Jawa Timur, responden mengalami penurunan pendapatan dan pengeluaran konsumsi pada periode September 2022 dan Oktober 2022, khususnya untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (Grafik 6.11 – 6.12). Hal tersebut ditengarai berdampak tertekannya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang tercermin dari kenaikan penduduk pra sejahtera Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022.

Grafik 6.12 Persentase Penurunan Pengeluaran Masyarakat di Jawa Timur Berdasarkan Kelompok Pengeluaran, Oktober 2022 dibandingkan September 2022



Sumber : SK Bank Indonesia di Jawa Timur (diolah)

Grafik 6.13 Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa

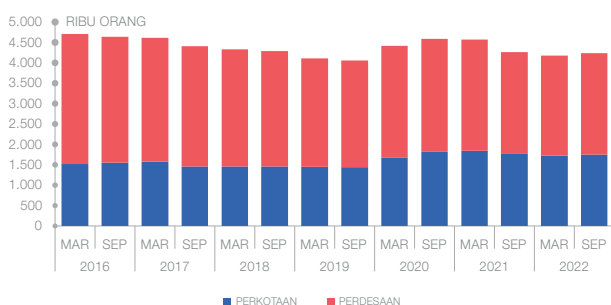


Sumber : BPS Jatim (diolah)

Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya tercermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera, yakni dari 4,26 juta jiwa (10,59% dari total penduduk) pada September 2023 menjadi 4,24 juta jiwa (10,49% dari total penduduk) pada September 2022. (Grafik 6.13-6.14). Semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan September 2021.

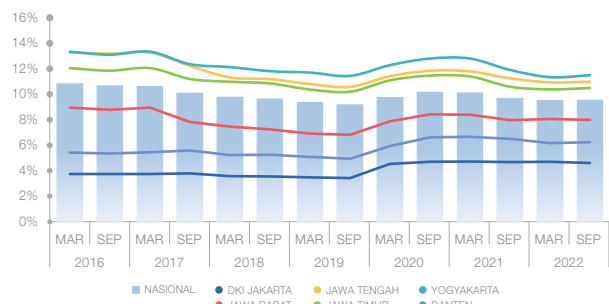
Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur di wilayah pedesaan dan perkotaan pada September 2022 mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode Maret 2022. Pada September 2022, sebanyak 2,48 juta jiwa penduduk pra-sejahtera tinggal di pedesaan (13,90% dari total penduduk di pedesaan), meningkat dibandingkan Maret 2022 yang sebanyak 2,46 juta jiwa (13,69% dari total penduduk di pedesaan). Demikian pula jumlah penduduk pra-sejahtera yang tinggal di perkotaan pada September 2022 sebanyak 1,75 juta jiwa (7,78% dari total penduduk di perkotaan), lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 yang sebanyak 1,72 juta jiwa (7,71% dari total penduduk di perkotaan). Kenaikan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan tersebut turut dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 yang turut berdampak pada

Grafik 6.15 Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.14 Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa



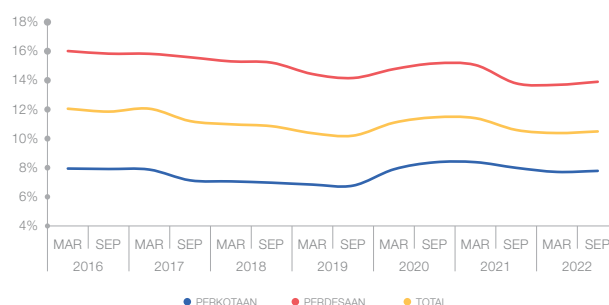
Sumber : BPS Jatim (diolah)

peningkatan tarif transportasi dan berbagai komoditas konsumsi sehingga menekan pendapatan masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor informal.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur di wilayah pedesaan dan perkotaan pada September 2022 mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada September 2022, sebanyak 2,48 juta jiwa (58,63%) penduduk pra-sejahtera tinggal di pedesaan dan 1,75 juta jiwa penduduk pra-sejahtera (41,37%) berdomisili di perkotaan. Pertumbuhan penduduk pra-sejahtera di pedesaan dan perkotaan dibandingkan September 2021 terpantau sedikit menurun masing – masing sebesar -0,27% (yoy) dan -0,93% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh semakin terkendalinya kasus Covid-19 dan percepatan vaksinasi dosis 2 serta *booster* pada tahun 2022 yang mendukung semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif.

Pada semester I 2023 (Maret 2023), tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan semester II 2022 (September 2022) sejalan dengan potensi perbaikan domestik serta investasi proyek strategis pemerintah dan swasta di Jawa Timur dan adanya panen raya padi. Hal tersebut terindikasi dari peningkatan Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan yang akan datang dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja 6 bulan yang akan datang berdasarkan survei konsumen (SK) Bank Indonesia di Jawa Timur⁶¹. Sejalan dengan

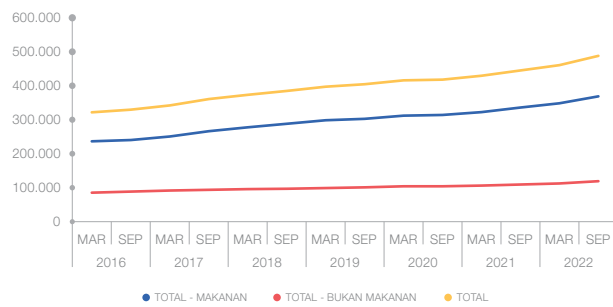
Grafik 6.16 Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota



Sumber : BPS Jatim (diolah)

61. Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan yang akan datang dan indeks Ketersediaan Lapangan Usaha 6 bulan yang akan datang di Jawa Timur (prakiraan angka Maret 2023) masing-masing tercatat sebesar 142,53 dan 139,27, meningkat dibandingkan prakiraan September 2022 (triwulan III 2022) yang masing-masing sebesar 139,98 dan 87,49.

Grafik 6.17 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan

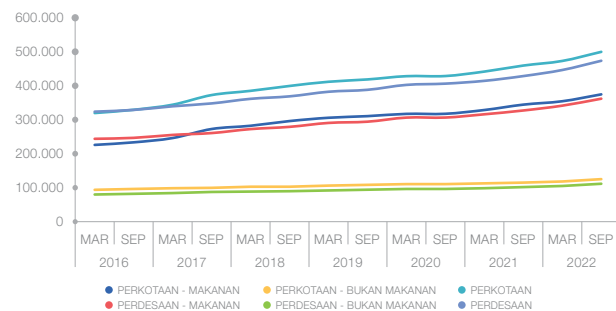


Sumber : BPS Jatim (diolah)

perbaikan indikator tersebut, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Timur pada semester I 2023 diprakirakan menurun sehingga mendorong kenaikan kesejahteraan masyarakat. Membaiknya cuaca dan mulai dilakukannya panen padi dan tanaman pertanian lainnya diperkirakan akan meningkatkan nilai tukar petani yang berdampak pada meningkatkan kesejahteraan petani di semester I 2023.

Tingginya komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok pra sejahtera, ditengarai turut menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional dan Jawa Timur, upaya untuk menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi krusial. Hingga saat ini pemerintah melakukan tiga intervensi untuk mengatasi tekanan pada kesejahteraan masyarakat, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan. Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas. Meskipun Pemerintah telah menyatakan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah usai pada akhir tahun 2022, Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program social safety net antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Kartu Prakerja. Program pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan pada tahun 2022 ditargetkan datanya selesai pada pertengahan tahun 2023. Regsosek diharapkan dapat menyediakan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta dapat menciptakan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Di samping program peningkatan kesejahteraan dari Pemerintah Pusat, terdapat berbagai program dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk turut mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Program-program tersebut antara lain meliputi; (i) Biaya Penunjang Operasional

Grafik 6.18 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Desa dan Kota



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA/SMK negeri dan swasta di Jawa Timur serta pembangunan Millenial Job Center untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja terampil dan terdidik sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja di Jawa Timur sehingga menekan TPT ; (ii) program Pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (Tantistas) bagi masyarakat kurang mampu untuk mendukung kesehatan masyarakat kelompok pra-sejahtera yang berkualitas sehingga mendukung peningkatan kesempatan berkarya dengan baik sehingga menekan angka kemiskinan dan TPT; (iii) program Desa Berdaya untuk menekan TPT dan meningkatkan kesejahteraan secara komunal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai masyarakat setempat; (v) program pemberdayaan perempuan (Jatim Puspa) untuk menekan TPT dan peningkatan kesejahteraan untuk wanita; dan (vi) Program Keluarga Harapan (PKH) Plus yang menysasar kelompok lanjut usia yang kurang mampu untuk menjaga daya beli kelompok lanjut usia sehingga kesejahteraan terjaga.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terindikasi sedikit tertekan tercermin dari peningkatan Garis Kemiskinan (GK) yang diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk pra-sejahtera pada periode September 2022 dibandingkan Maret 2022⁶². GK meningkat dari Rp460.909 pada Maret 2022 menjadi Rp487.908 perkapita/bulan pada September 2022 (Grafik 6.17 – 6.18). Di tengah peningkatan GK, jumlah penduduk pra-sejahtera Jawa Timur mengalami peningkatan, dari 4,18 juta (10,38% dari total penduduk) pada Maret 2022 menjadi 4,24 juta (10,49% dari total penduduk) pada September 2022. Peningkatan GK yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera mengindikasikan adanya kenaikan inflasi komoditas tidak dapat sepenuhnya direspon dengan peningkatan daya beli, sehingga tingkat kesejahteraan mengalami penurunan.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan September 2021, kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terpantau meningkat tercermin dari peningkatan GK yang tidak diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk pra-sejahtera. GK meningkat dari Rp445.139 pada September 2021 menjadi Rp487.908 perkapita/bulan pada

62. Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan non-pangan esensial, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Proporsi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) mencapai 75,59% dari total Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai komoditas pembentuk GK berimplikasi pada tekanan inflasi yang semakin tinggi yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Tabel 6.4 Rasio Gini Jawa Timur

TAHUN	Gini Ratio		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
Maret 2016	0,423	0,333	0,402
Sept 2016	0,433	0,313	0,402
Maret 2017	0,418	0,326	0,396
Sept 2017	0,442	0,317	0,415
Maret 2018	0,387	0,327	0,379
Sept 2018	0,375	0,322	0,371
Maret 2019	0,379	0,318	0,370
Sept 2019	0,374	0,314	0,364
Maret 2020	0,377	0,316	0,366
Sept 2020	0,373	0,318	0,364
Maret 2021	0,387	0,324	0,374
Sept 2021	0,379	0,319	0,364
Maret 2022	0,388	0,323	0,371
Sept 2022	0,381	0,322	0,365

Sumber : BPS Jatim (diolah)

September 2022 (Grafik 6.17 – 6.18). Di tengah peningkatan GK, jumlah penduduk pra-sejahtera Jawa Timur mengalami penurunan, dari 4,26 juta (10,59% dari total penduduk) pada September 2021 menjadi 4,23 juta (10,49% dari total penduduk). Peningkatan GK yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera mengindikasikan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan. Dengan kata lain, semakin banyak penduduk di Jawa Timur yang mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan meski dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Di tengah masa pemulihan pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global, berbagai program untuk mendukung kesejahteraan masyarakat terindikasi mampu menahan tekanan yang lebih tinggi. Rasio Gini terpantau terkendali dari 0,364 pada September 2021 menjadi 0,365 pada September 2022, terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan (Tabel 6.4). Terjaganya Rasio Gini serta tekanan lain pada kesejahteraan masyarakat didukung oleh (1) program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); (2) pemberian bantuan sosial; (3) pengamanan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian; (4) restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak; (5) program padat karya tunai (*cash for work*) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak; dan (6) jaring pengaman sosial (*social safety net*).

6.4. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

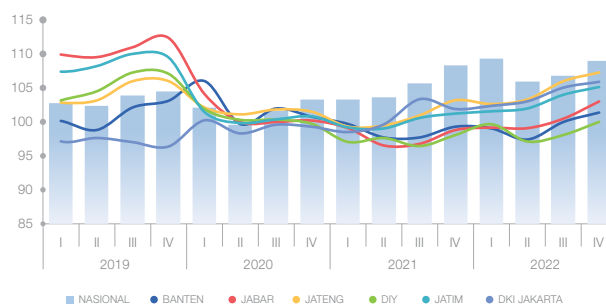
6.4.1. Kesejahteraan Petani

Tingkat kesejahteraan petani di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya ditopang oleh kenaikan harga dan permintaan komoditas beras, dan produk peternakan. Tingkat kesejahteraan petani di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 yang direpresentasikan oleh Nilai Tukar Petani

(NTP) sebesar 105,13 lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar 103,98. NTP Jawa Timur pada triwulan ini berada pada posisi ketiga tertinggi di Jawa setelah Jawa Tengah (107,27) dan DKI Jakarta (105,89) (Grafik 6.19).

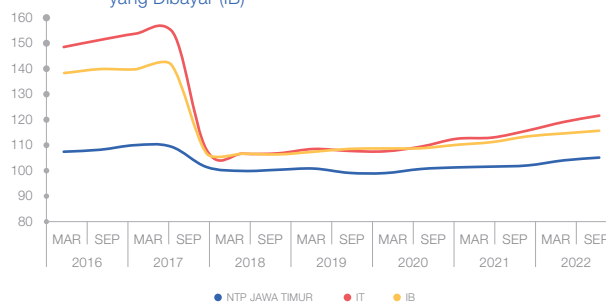
Peningkatan NTP di Jawa Timur didukung oleh peningkatan indeks harga yang diterima (It) oleh petani yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar (Ib) petani. Indeks harga yang diterima (It) petani sebesar 121,56 meningkat sebesar 2,03% (qto) sedangkan (Ib) petani sebesar 115,63 meningkat 0,92% (qto) (Grafik 6.20). Peningkatan It petani utamanya ditopang oleh peningkatan harga padi gabah, jagung, ketela pohon, telur ayam ras, bawang merah, sapi potong, tomat, dan tebu. Peningkatan (It) petani didorong oleh beberapa faktor: (i) kenaikan harga komoditas padi gabah dan beras sebagai dampak dari terbatasnya stok beras dan penurunan produksi musiman di tengah permintaan yang tetap kuat; (ii) peningkatan harga jagung didorong oleh kenaikan harga jagung dunia; serta (iii) dampak rambatan kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan biaya produksi dan distribusi yang berimplikasi pada kenaikan harga komoditas. Sementara itu, peningkatan Ib petani terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas beras, bensin, solar, telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, rokok kretek filter, dan buah/sayuran (tomat, terung, kacang panjang, semangka). Petani yang juga merupakan konsumen komoditas-komoditas tersebut (beras, BBM, bawang merah, telur, daging ayam, rokok, dan sayuran) turut terdampak kenaikan harga komoditas – komoditas tersebut. Secara umum, indeks harga yang diterima (It) petani mampu mengompensasi kenaikan harga-harga komoditas yang dikonsumsi.

Grafik 6.19 Perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi di Jawa



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 6.20 NTP Jawa Timur, Indeks yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB)



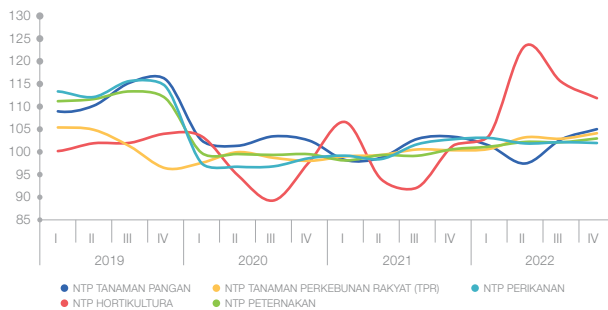
Sumber : BPS Jatim (diolah)

Tabel 6.5 NTP Subsektor Pertanian Jawa Timur

KETERANGAN	III 2022	IV 2022	PERUBAHAN (%)
TANAMAN PANGAN			
IT	118,30	122,09	3,20%
IB	115,16	116,26	0,96%
NTP - P	102,73	105,02	2,23%
HORTIKULTURA			
IT	131,43	127,05	-3,33%
IB	113,78	114,38	0,53%
NTP - H	115,51	111,86	-3,16%
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT			
IT	116,69	119,12	2,08%
IB	113,40	114,41	0,89%
NTP - Pr	102,91	104,12	1,18%

Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.21 NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur

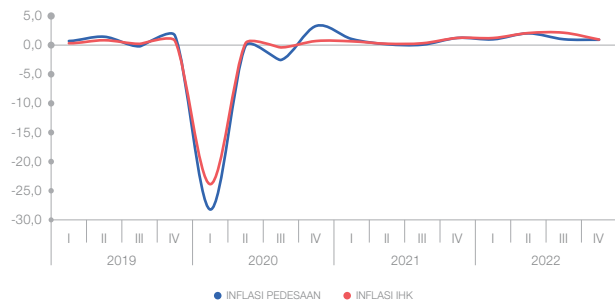


Sumber : BPS Jatim (diolah)

Berdasarkan sub sektornya, peningkatan NTP di Jawa Timur ditopang oleh sub sektor Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan (Tabel 6.5). NTP sub sektor Tanaman Pangan meningkat sebesar 2,23% (qtq). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga komoditas padi gabah dan beras seiring dengan terbatasnya stok dan penurunan produksi musiman di akhir tahun di tengah tetap kuatnya permintaan serta kenaikan biaya operasional dan distribusi akibat dampak rambatan peningkatan harga BBM. Peningkatan NTP sub sektor Tanaman Pangan juga ditopang kenaikan harga jagung seiring tren peningkatan harga global. Peningkatan NTP sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,18% (qtq) ditopang oleh peningkatan harga tebu seiring peningkatan harga gula global. Sementara itu, NTP sub sektor Peternakan meningkat sebesar 0,81% (qtq) terutama ditopang oleh peningkatan harga telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi pada periode laporan dibandingkan triwulan III 2022. Peningkatan NTP yang lebih tinggi terutama tertahan oleh perlambatan NTP sub sektor Tanaman Hortikultura dipengaruhi oleh penurunan harga cabai merah dan cabai rawit seiring adanya panen di beberapa wilayah sentra (Probolinggo, Nganjuk, Malang, dan Mojokerto). Sementara itu, lebih rendahnya NTP sub sektor Perikanan dipengaruhi oleh lebih

KETERANGAN	III 2022	IV 2022	PERUBAHAN (%)
PETERNAKAN			
IT	116,64	118,81	1,86%
IB	114,20	115,39	1,04%
NTP - Pt	102,13	102,96	0,81%
PERIKANAN			
IT	115,36	115,87	0,44%
IB	112,93	113,65	0,64%
NTP - Pi	102,15	101,96	-0,19%
GABUNGAN/ JAWA TIMUR			
IT	119,14	121,56	2,03%
IB	114,58	115,63	0,92%
NTP - JT	103,98	105,13	1,11%

Grafik 6.22 Inflasi Pedesaan Jawa Timur



Sumber : BPS Jatim (diolah)

tingginya indeks yang dibayarkan petani dibandingkan indeks yang diterima petani seiring kenaikan harga konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga komoditas ikan (Grafik 6.20).

Nilai konsumsi petani pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan (inflasi), meskipun dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022. Hal tersebut tercermin dari inflasi pedesaan pada triwulan IV 2022 yang mencapai 0,92% (qtq), mengalami inflasi namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,00% (qtq). Peningkatan indeks harga yang diterima petani terutama terjadi pada komoditas tanaman pangan, peternakan, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan. Hal tersebut ditengarai mampu membantu menjaga daya beli petani dalam melakukan konsumsi di tengah tekanan inflasi komoditas pangan yang masih tinggi dan dampak rambatan kenaikan harga BBM terhadap biaya distribusi dan berbagai komoditas konsumsi.

6.4.2 Kesejahteraan Nelayan

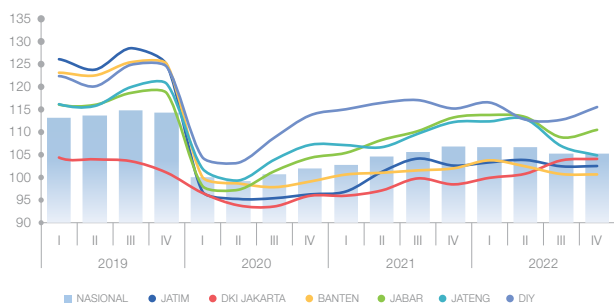
Tingkat kesejahteraan nelayan di Jawa Timur pada triwulan IV 2022 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya ditopang oleh kenaikan harga dan permintaan komoditas ikan. Pada triwulan IV 2022, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur sebesar 102,51

meningkat sebesar 0,06% (qtq) dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar 102,45. Di kawasan Jawa, NTN Jawa Timur berada pada posisi terendah kedua setelah Banten (100,66) (Grafik 6.23).

Berdasarkan komponennya, peningkatan NTN di Jawa Timur didorong oleh peningkatan indeks harga yang diterima nelayan (It) yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar (Ib) nelayan. Indeks harga yang diterima nelayan (It) mengalami peningkatan sebesar 0,75% (qtq) dari triwulan sebelumnya (Grafik 6.22). Peningkatan tersebut (It) ditopang oleh peningkatan harga pada komoditas ikan kembung, ikan cakalang, ikan tongkol, ikan ekor kuning, ikan asin belah, ikan belanak, ikan teri, ikan selar, ikan putih, ikan nila, dan kepiting air tawar. Sementara itu, indeks harga

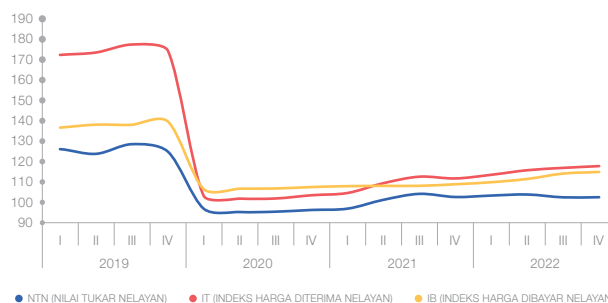
yang dibayar nelayan (Ib) mengalami peningkatan dari 114,10 pada triwulan III 2022 menjadi 114,89 pada triwulan IV 2022 atau naik sebesar 0,69% (qtq) (Grafik 6.24). Peningkatan Ib tersebut didorong oleh peningkatan biaya produksi dan operasional sebagai dampak rambatan kenaikan harga bahan bakar (BBM). Di samping itu, kenaikan Ib juga disebabkan oleh peningkatan harga komoditas bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam ras, rokok kretek filter, daging ayam ras, bawang merah, dan buah/sayuran (tomat, semangka, terung, dan kangkung). Peningkatan harga berbagai komoditas tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya produksi dan pasokan ditengah tetap kuatnya permintaan, peningkatan harga distribusi seiring dampak kenaikan tarif BBM, serta kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2022.

Grafik 6.23 Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi di Jawa



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.24 NTN, IT dan IB Nelayan Jawa Timur



Sumber : BPS Jatim (diolah)





BAB VII

Prospek Perekonomian Daerah



7.1. Prospek Ekonomi Jawa Timur Tahun 2023

7.1.1. Sisi Permintaan

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2022, terutama disebabkan oleh faktor global. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan berada di kisaran 4,7% - 5,5% (yoy), cenderung bias bawah, termoderasi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,3%(yoy). Moderasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh estimasi kinerja ekonomi global pada tahun 2023 yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi akibat konflik geopolitik Rusia – Ukraina, Tiongkok – Taiwan, dan Amerika Serikat – Arab Saudi yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Hal tersebut diperkirakan menahan kinerja ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2023.

Moderasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan turut dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal pemerintah sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terjadi, pemerintah berupaya mengembalikan kebijakan anggaran untuk tidak lebih dari 3%, sebagaimana capaian defisit anggaran tahun 2022 yang hanya sebesar 2,38%, jauh lebih rendah dibanding saat penerapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tahun 2021 yang mengalami defisit 4,65% dari PDB, ataupun defisit tahun 2020 yang sebesar 6,14% dari PDB. Pada tahun 2023, Pemerintah berkomitmen untuk kembali menerapkan defisit fiskal di bawah 3% dari APBN sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Konsolidasi fiskal tersebut diperkirakan berdampak pada pengurangan sejumlah insentif fiskal serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Hal tersebut diperkirakan menahan laju pertumbuhan konsumsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 dan berdampak pada tertahannya percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Di tengah potensi tertahannya kinerja eksternal dan belanja pemerintah, berlanjutnya tren perbaikan konsumsi RT dan investasi diperkirakan mendorong masih positifnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023. Tren penurunan kasus Covid-19 di tingkat global dan nasional, termasuk Jawa Timur, mendorong pemerintah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 30 Desember 2022 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Hal tersebut diperkirakan berimplikasi pada peningkatan keyakinan masyarakat dan dunia usaha sehingga mendorong semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi dan investasi. Pembukaan sektor ekonomi diperkirakan mendorong peningkatan mobilitas dan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kenaikan konsumsi RT. Implementasi dari pencabutan PPKM diperkirakan berimplikasi positif terhadap kepercayaan dunia usaha sehingga mendorong optimalisasi investasi pemerintah dan swasta walaupun sedikit tertahan oleh perilaku wait and see menjelang pemilu, maupun kenaikan suku bunga kredit. Berlanjutnya pembangunan infrastruktur yang sempat terhambat sejalan dengan realokasi anggaran Proyek Strategis Nasional dan proyek-proyek dalam Peraturan Presiden No.80 Tahun 2019 diperkirakan akan mendukung akselerasi investasi pada tahun 2023 walaupun diperkirakan tidak akan sebesar tahun 2022 dikarenakan adanya penyesuaian pengerjaan proyek yang memungkinkan untuk diselesaikan hingga tahun 2024⁶³. Di samping

Tabel 7.1 Prospek Perekonomian Dunia – World Economic Outlook

	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Proyeksi IMF			
				Oktober 2022		Januari 2023	
				2022p	2023p	2022(estimasi)*	2023p
Dunia	%yoy	-3,3	6,1	3,2	2,7	3,4	2,9
Negara Maju	%yoy	-4,7	5,2	2,4	1,1	2,7	1,2
Amerika Serikat	%yoy	-3,5	5,7	1,6	1,0	2,0	1,4
Kawasan Eropa	%yoy	-6,6	5,4	3,1	0,5	3,5	0,7
Jepang	%yoy	-4,8	1,7	1,7	1,6	1,4	1,8
Negara Berkembang	%yoy	-2,2	6,8	3,7	3,7	3,9	4,0
Russia	%yoy	-3,1	4,7	-3,4	-2,3	-2,2	0,3
Tiongkok	%yoy	2,3	8,1	3,2	4,4	3,0	5,2
India	%yoy	-8,0	8,7	6,8	6,1	6,8	6,1
Brazil	%yoy	-4,1	4,6	2,8	1,0	3,1	1,2
ASEAN-5	%yoy	-3,4	3,4	5,3	4,9	5,2	4,3
Volume Perdagangan Dunia	%yoy	-8,5	10,1	4,3	2,5	5,4	2,4

Sumber : WEO IMF Januari 2023, diolah (2023)

■ Lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya ■ Lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya ■ Sama dibandingkan tahun sebelumnya

63. Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 serta proyek-proyek yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Willis dan Lintas Selatan.

itu, proyek – proyek swasta dan kerja sama swasta – nasional, terutama pembangunan *smelter* tembaga di Kabupaten Gresik dan pembangunan kilang minyak Tuban diperkirakan semakin mendorong perbaikan investasi di Jawa Timur pada tahun 2023.

Momen persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak diperkirakan mendukung pertumbuhan positif konsumsi LNPR di Jawa Timur pada tahun 2023. Persiapan kegiatan pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada serentak pada tahun 2024 diperkirakan akan berlangsung sepanjang tahun 2023. Terkendalnya kasus Covid-19 yang berimplikasi pada pelanggaran kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi membuat persiapan pemilu diperkirakan mengikuti pola normal sebelum pandemi Covid-19. Hal tersebut diperkirakan mendukung pertumbuhan positif kinerja konsumsi LNPR pada tahun 2023.

7.1.2. Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, sejalan dengan potensi perlambatan ekonomi global, kinerja LU utama yakni LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan serta LU Transportasi dan Pergudangan di Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan WEO Januari 2023, IMF memprakirakan ekonomi global pada tahun 2023 akan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dengan potensi resesi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan kawasan Eropa yang merupakan mitra dagang eksternal utama Jawa Timur. Hal tersebut diperkirakan menahan kinerja ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2023 yang berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan, khususnya sub Perdagangan Besar. Sejalan dengan perlambatan kinerja perdagangan luar negeri Jawa Timur pada tahun 2023, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada periode yang sama diperkirakan lebih rendah. Kebutuhan transportasi dan pergudangan untuk logistik perdagangan luar negeri di Jawa Timur diperkirakan lebih rendah sejalan dengan potensi tertahannya kinerja ekspor-impor LN Jawa Timur pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan semakin terkendalnya kasus Covid-19 di Jawa Timur dan konsolidasi fiskal pemerintah, kinerja LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada tahun 2023 diperkirakan mengalami perlambatan. Kasus positif Covid-19 di Jawa Timur pada tahun 2022 tercatat sebesar 236.611 kasus, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebanyak 315.956 kasus. Pada tahun 2023, kasus Covid-19 diperkirakan semakin terkendali dan menurun dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan akselerasi vaksinasi Covid-19 yang mendukung terbentuknya *herd immunity* di Jawa Timur. Hingga minggu pertama Februari 2023, vaksinasi Covid-19 dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 di Jawa Timur masing-masing mencapai 85,54%; 74,59%; dan 26,75% dari kelompok sasaran. Potensi lebih rendahnya jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 berimplikasi pada moderasi kinerja pusat kesehatan di Jawa Timur yang berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Lebih lanjut, potensi semakin

terkendalnya kasus Covid-19 dan konsolidasi fiskal pada tahun 2023 diperkirakan turut berdampak pada efisiensi dana sejumlah bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid-19. Hal tersebut diperkirakan semakin menahan kinerja LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada tahun 2023.

Moderasi ekonomi Jawa Timur yang lebih dalam diperkirakan tertahan oleh perbaikan kinerja LU utama, yakni LU Konstruksi. LU Konstruksi untuk keseluruhan tahun 2023 diperkirakan melanjutkan perbaikan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek-proyek infrastruktur dalam Peraturan Presiden No.80/ 2019, serta proyek-proyek swasta korporasi dan rumah tangga sejalan dengan potensi perbaikan permintaan domestik. Pembangunan Proyek Strategis Nasional dan proyek – proyek berdasarkan Peraturan Presiden No.80/2019 terutama akan difokuskan pada : (1) peningkatan kapasitas tampungan *floodway* di Lamongan; (2) pengembangan pelabuhan Trunojoyo Sampang; (3) peningkatan kapasitas pelabuhan Kalianget; (4) pembangunan pasar induk Kota Batu; (5) pembangunan sistem distribusi SPAM Umbulan; (6) pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Jeroan; (7) pembangunan limbah B3 di Kabupaten Mojokerto; dan (9) pembangunan dan revitalisasi Pasar Besar dan Pasar Beran Ngawi. Berlanjutnya pembangunan *smelter* tembaga di KEK JIPE dengan nilai investasi 3 miliar dolar AS di Gresik, pembangunan kilang minyak di Tuban dengan total rencana investasi sebesar Rp210,91 triliun (pengilangan minyak dan kimia organik), serta berlanjutnya pembangunan Bandara Kediri, diperkirakan turut mendorong peningkatan kinerja LU Konstruksi di Jawa Timur pada tahun 2023. Lebih lanjut, tren perbaikan permintaan domestik sejak awal tahun 2023 diperkirakan turut mendorong permintaan konstruksi ritel oleh masyarakat serta investasi di bidang konstruksi oleh korporasi besar.

Tabel 7.2 Perkiraan Arah Pertumbuhan PDRB Sisi Penawaran (LU Utama) Tahun 2023 (%yoy)

SEKTOR	2019	2020	2021	2022	2023*
Industri Pengolahan	6,82	-2,08	3,37	6,28	↓
Perdagangan	5,96	-5,78	7,77	6,87	↓
Konstruksi	5,89	-3,28	2,53	6,30	↑
PDRB	5,53	-2,33	3,56	5,34	↓

*J dibandingkan tahun sebelumnya
Sumber: BPS, proyeksi Bank Indonesia, diolah (2023)

7.2 Prospek Inflasi Jawa Timur Tahun 2023

Inflasi IHK Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan kembali di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Tingginya tekanan inflasi dari sisi penawaran pada tahun 2022 terutama akibat peningkatan harga hortikultura serta penyesuaian harga energi berdampak pada tingkat inflasi IHK di Jawa Timur pada tahun 2022 yang lebih tinggi dibandingkan batas atas sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Pada tahun 2023, tekanan inflasi dari sisi penawaran diperkirakan mereda sejalan dengan prakiraan cuaca yang mendukung produksi tanaman pangan dan harga komoditas energi global yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Lebih lanjut, berbagai kebijakan

pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID diperkirakan turut menjaga tingkat inflasi IHK Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi $3,0\% \pm 1\%$ (yoy).

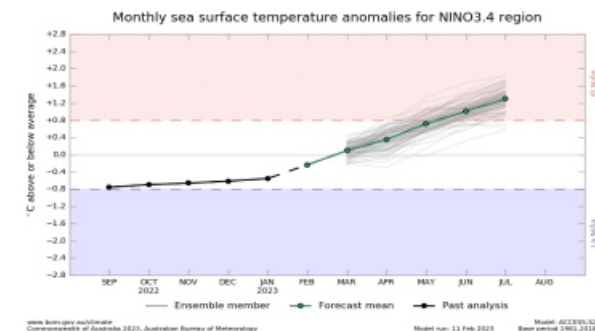
Prakiraan cuaca yang mendukung produksi tanaman pangan dan mitigasi serangan hama tanaman dan ternak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama TPID Provinsi Jawa Timur diperkirakan mendukung terkendalinya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada tahun 2023. Badan Klimatologi Australia (*Bureau of Meteorology*) memprakirakan cuaca di kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, termasuk Jawa Timur, sepanjang Januari – Mei 2023 dalam kondisi normal, tidak mengalami anomali cuaca baik El Nino maupun La Nina⁶⁴. Hal tersebut berpotensi mendukung produksi tanaman pangan utama di Jawa Timur, yakni padi dan hortikultura di Jawa Timur sehingga mendorong terkendalinya inflasi pangan di Jawa Timur pada tahun 2023. Lebih lanjut, hama antraknosa pada tanaman hortikultura dan Penyakit Mulut Kuku (PMK) pada ternak sapi yang menjadi tantangan utama sektor pertanian pada tahun 2022 diperkirakan akan terkendali pada tahun 2023 sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memitigasi hal tersebut. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait mitigasi hama antraknosa tercermin dari upaya mitigasi hama melalui optimalisasi pestisida. Sementara itu, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pengendalian PMK tercermin dari realisasi penyelesaian vaksinasi PMK yang telah mencapai 66% dari alokasi vaksinasi dan tingkat kesembuhan wabah PMK mencapai 95,39% pada minggu pertama Februari 2023⁶⁵. Hal – hal tersebut diperkirakan menopang terkendalinya inflasi pangan di Jawa Timur pada tahun 2023, khususnya untuk kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Potensi terkendalinya harga bahan pangan di Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan turut mendorong terkendalinya inflasi di kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada periode yang sama. Meskipun demikian, prakiraan rendahnya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau diperkirakan sedikit tertahan oleh peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar rata-rata 12% pada Januari 2023 yang mendorong peningkatan harga rokok.

Sebagaimana historisnya, pelaku usaha rokok diperkirakan melakukan penyesuaian harga rokok secara bertahap sebagai respon atas peningkatan tarif CHT.

Tren penurunan harga energi global diperkirakan mendukung terkendalinya inflasi Kelompok Transportasi serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar. Berdasarkan *World Bank Commodity Price* Oktober 2022, harga minyak dunia jenis Brent pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 92 Dollar Amerika Serikat per barel, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 100 Dollar Amerika Serikat per barel. Hal tersebut diperkirakan mendukung terkendalinya harga BBM domestik yang berimplikasi pada terkendalinya inflasi Kelompok Transportasi. Lebih lanjut, berdasarkan publikasi yang sama, harga gas dunia pada tahun 2023 diperkirakan turun sebesar 6,1% (yoy) dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut diperkirakan mendukung terkendalinya harga LPG domestik sehingga mendukung prakiraan tingkat inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar yang stabil. Meskipun demikian, prakiraan rendahnya tekanan inflasi pada kelompok ini diperkirakan sedikit tertahan oleh peningkatan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Surabaya dengan rata-rata peningkatan sebesar 22% pada Januari 2023⁶⁶. Penyesuaian tarif PDAM tersebut sebagai bentuk subsidi silang kepada masyarakat di Kota Surabaya. Penyesuaian tarif berlaku proporsional mempertimbangkan lebar jalan di depan persil pelanggan, luas bangunan, penggunaan persil, pemakaian listrik (daya listrik terpasang) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif PDAM gratis akan diberikan kepada pelanggan dengan kriteria: (i) lebar jalan 3 m; (ii) daya listrik terpasang 900 VA; (iii) luas bangunan 45 m²; (iv) NJOP < 100 juta; dan (v) pemakaian 0-30 meter kubik.

Berbagai upaya pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan stakeholder terkait diperkirakan turut mendukung pencapaian inflasi IHK Jawa Timur kembali ke sasaran inflasi $3,0\% \pm 1\%$ (yoy) pada tahun 2023. Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui TPIP dan TPID. Koordinasi kebijakan tersebut terutama

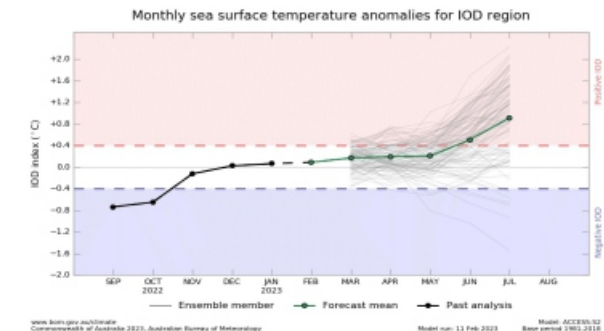
Grafik 7.1 Proyeksi Indeks Nino



Sumber: Badan Klimatologi Australia (BOM), Februari 2023

64. Hal tersebut berbeda dibandingkan tahun 2022 di mana pada periode Januari – Mei 2022 terjadi La Nina dengan intensitas lemah hingga moderat.
65. Berdasarkan informasi Posko Terpadu Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 5 Februari 2023.

Grafik 7.2 Proyeksi Indeks Indian Ocean Dipole (IOD)



Sumber: Badan Klimatologi Australia (BOM), Februari 2023

66. Peningkatan tarif PDAM di Kota Surabaya sebesar rata-rata 22% pada Januari 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021 Tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

ditujukan sebagai upaya mitigasi risiko inflasi yang bersifat *volatile* dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau akibat pengaruh harga komoditas pangan global dan ketergantungan produksi terhadap faktor cuaca, serta mitigasi dampak penetapan tarif dan berbagai kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar dan Transportasi. Upaya ekstra pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Bank Indonesia dan berbagai *stakeholder* terkait diperkirakan semakin mendukung terkendalinya inflasi pangan yang mendukung pencapaian inflasi LHK Jawa Timur sesuai sasaran inflasi 3,0%+1% (yoy) pada tahun 2023. Upaya-upaya ekstra tersebut meliputi penguatan KAD, peningkatan intensitas operasi pasar, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian dari hulu hingga hilir, serta peningkatan *urban farming*.

Tabel 7.3 Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Jawa Timur Tahun 2023

Faktor Pendorong Inflasi Tahun 2023
Akselerasi vaksin Covid-19 diperkirakan akan meningkatkan pembukaan sektor produktif yang berimplikasi pada peningkatan permintaan masyarakat.
Peningkatan harga impor bahan baku dan bahan penolong yang disebabkan oleh masih adanya disrupsi logistik perdagangan global sejalan dengan eskalasi ketidakpastian
Faktor Penahan Inflasi Tahun 2023
Estimasi lebih rendahnya harga komoditas energi global pasca tumbuh tinggi pada tahun 2022.
Peran aktif TPID dalam upaya pengendalian harga dan menjaga ekspektasi masyarakat.
Proyeksi cuaca yang berada di tingkat normal (tidak terdapat El Nino dan La Nina) sepanjang Januari – Mei 2023 yang mendukung produksi tanaman pangan.
Nilai tukar rupiah yang masih terjaga.

Daftar Istilah

Administered price

Harga barang yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BI-RTGS

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara on-line atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.

Bobot Inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito).

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Imported inflation

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dengan skala 1 – 100.

Indeks Keyakinan Konsumen (*Consumer Confidence*)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi Inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

Inflow

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan note purchase agreement (NPA)
- Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Loan to Funding Ratio (LFR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan bank.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

mtm

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Net Inflow

Uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.

Non Performing Financing (NPF) atau Non Performing Loan (NPL)

Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional. Kriteria NPF atau NPL adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan dan (3) macet.

Omset

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

qtq

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Volatile Food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu khususnya komoditas bahan makanan.

yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BBM	Bahan Bakar Minyak
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
BUKU	Bank Umum Kelompok Usaha
CIF	Cost, Insurance and Freight
DAU	Dana Alokasi Umum
DAK	Dana Alokasi Khusus
DER	Debt Equity Ratio
DOF	Derajat Otonomi Fiskal
DPK	Dana Pihak Ketiga
DSR	Debt Service Ratio
FGD	Focus Group Discussion
FOB	Free on Board
FTV	Financing to Value
IHK	Indeks Harga Konsumen
IKK	Indeks Keyakinan Konsumen
IPR	Indeks Penjualan Riil
JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
KI	Kredit Investasi
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KMK	Kredit Modal Kerja
KPA	Kredit Pemilikan Apartemen
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
LDR	Loan to Deposit Ratio
LFR	Loan to Funding Ratio
LNPRT	Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
LTV	Loan to Value

MTM	Month to month
NPF	Non Performing Financing
NPL	Non Performing Loan
NTN	Nilai Tukar Nelayan
NTP	Nilai Tukar Petani
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMTB	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
PPBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
QTQ	Quarter to quarter
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTGS	Real Time Gross Settlement
SBT	Saldo Bersih Tertimbang
SISKAPE	Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan
RBAPO	Harga Bahan Pokok
SITC	Standard International Trade Classification
SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SPE	Survei Penjualan Eceran
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPK	Tingkat Penghunian Kamar
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TTL	Tarif Tenaga Listrik
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UTLE	Uang Tidak Layak Edar
YOY	Year on year

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Pahlawan No. 105 Surabaya Jawa Timur
Telp. +6231 3520011, Fax. +6231 3520025
www.bi.go.id

